

BAB I

MUKADIMAH

A. PENDAHULUAN.

Max Weber (1964)¹ yang antara lain mengatakan bahwa status sosial seseorang atau komunitas tertentu dapat diekspresikan dengan fakta dalam kehidupan sehari-hari. Beragam identitas masyarakat pada status sosial dapat dibedakan dari cara berpakaian, cara berpikir, pilihan kata objek pembicaraan dan lain-lain. Sangat berbeda cara berpakaian seseorang rohaniawan, yaitu kyai, romo, pendeta, biksu dan sebagainya jika dibandingkan dengan cara berpakaian seorang pengusaha atau akademisi sebagai bentuk personifikasi diri merupakan implementasi nyata dari latar belakang kehidupan seseorang, tingkat pendidikan, semangat bela negara, pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan sebagainya. Untuk itu, dalam konsep komunikasi aktif antara warga negara, ideologi negara, semangat juang, maka sangat penting dalam teritori Negara Kesatuan Indonesia pemikiran tentang suatu kampus menjadi “benteng Pancasila”.

Korelasi nyata antara semangat kampus menjadi benteng Pancasila dan jati diri Universitas Krisnadwipayana dengan tetap berpedoman pada sistem pendidikan nasional, maka bertemu pada 5 titik keseimbangan, yaitu:

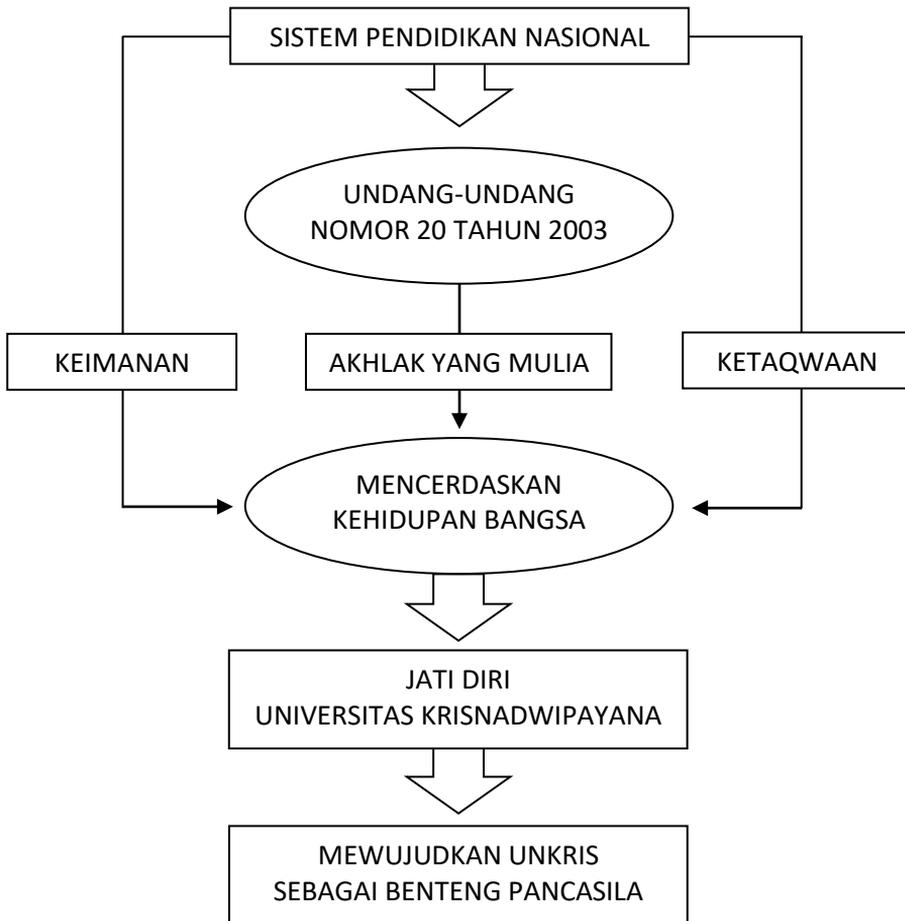
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berbudi luhur.

¹ Max Weber, Sosiologi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 226.

2 Mewujudkan Kampus Sebagai Benteng Pancasila

3. Bermoral yang baik.
4. Cerdas dan terampil.
5. Semangat pengabdian pada bangsa dan negara.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Francis Fukuyama (2004)² dalam bukunya yang berjudul *“State-Building : Governance and World Order in the 21st Century”*, antara lain mengatakan bahwa pemerintahan dengan tata kelola kurang baik adalah kondisi yang lemah dan dapat meruntuhkan prinsip-prinsip kedaulatan serta kurangnya legitimasi yang mendasari sistem politik secara keseluruhan. Untuk itu, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sangat diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat negara sebagai berikut:

1. Membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara.
2. Mendorong mahasiswa dan semua aktivitas akademika untuk meningkatkan kualitas hasil didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Memperkuat pemahaman dan memperluas implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
4. Menjadikan kampus-universitas dengan berbagai latar belakang pendiriannya dan dengan aneka fakultas dan jurusannya sebagai benteng Pancasila.

Samuel P. Huntington (1996)³ dalam bukunya yang berjudul *“The Clash of Civilization and Remaking of World Order”*, yang antara lain mengatakan bahwa peradaban merupakan akumulasi dari berbagai unsur puncak perkembangan manusia yang diantaranya adalah terwujudnya ketertiban

² Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara-Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 124.

³ Samuel P.Huntington, *Benturan Antar Peradaban*, (Yogyakarta: C.V. Qalam, 2002), 383.

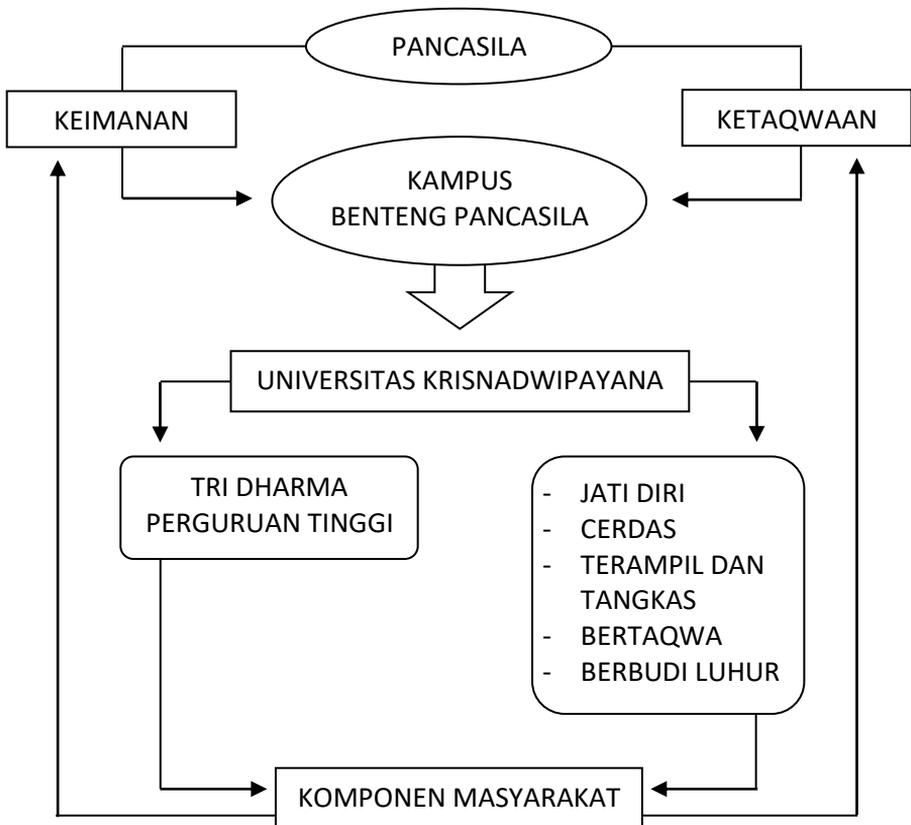
4 *Mewujudkan Kampus Sebagai Benteng Pancasila*

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena adanya regulasi, aturan perundang-undangan, ideologi negara dan lain sebagainya. Untuk itu proses “dinamika historikal” pada konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia diperoleh kesepakatan secara nasional sebagai salah satu pilar konsensus nasional, yaitu keutuhan Pancasila yang tidak boleh dirubah dengan alasan apapun dan upaya bagaimanapun. Untuk itu diperlukan jiwa juang dan semangat kebangsaan dari semua elemen masyarakat yang diantaranya adalah segenap mahasiswa dan civitas akademika Universitas Krisnadwipayana tampil di garda terdepan sebagai kampus benteng Pancasila. Artinya orientasi dasar pendidikan secara kelembagaan memposisikan Pancasila dengan segala butir-butir nilai yang terkandung di dalamnya dapat dimanifestasikan dalam kehidupan kampus.

Tri Darma perguruan tinggi merupakan tiga pilar yang mendasari operasional pendidikan di kampus, dengan argumentasi berfikir :

- a. Kampus merupakan agen perubahan berfikir menuju yang lebih baik.
- b. Kader pemimpin bangsa bersumber dari kampus.
- c. Pengabdian masyarakat merupakan rantai pendidikan mahasiswa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa harus diawali dengan peran dan fungsi pendidikan.

Gambar 2
Kampus Benteng Pancasila



Keikutsertaan mahasiswa dan seluruh unsur civitas akademika universitas dalam usaha bela negara mutlak diperlukan. Karena dapat dikatakan dewasa ini bahwa mayoritas pejabat eksekutif, yudikatif dan legislatif merupakan hasil proses dari kampus universitas di manapun.

Tri Dharma perguruan tinggi meliputi:

1. Pendidikan dan pengajaran.
2. Penelitian dan pengembangan.

6 Mewujudkan Kampus Sebagai Benteng Pancasila

3. Pengabdian kepada masyarakat.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, memposisikan pendidikan dan pengajaran pada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan serta pendidikan Agama termasuk dalam kelompok mata kuliah “MPK” atau Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. Artinya semangat pengabdian dan rela berkorban serta berjuang di garda depan sebagai benteng Pancasila menjadi barometer untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Universitas Krisnadwipayana memposisikan diri sebagai kampus benteng Pancasila, maka mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

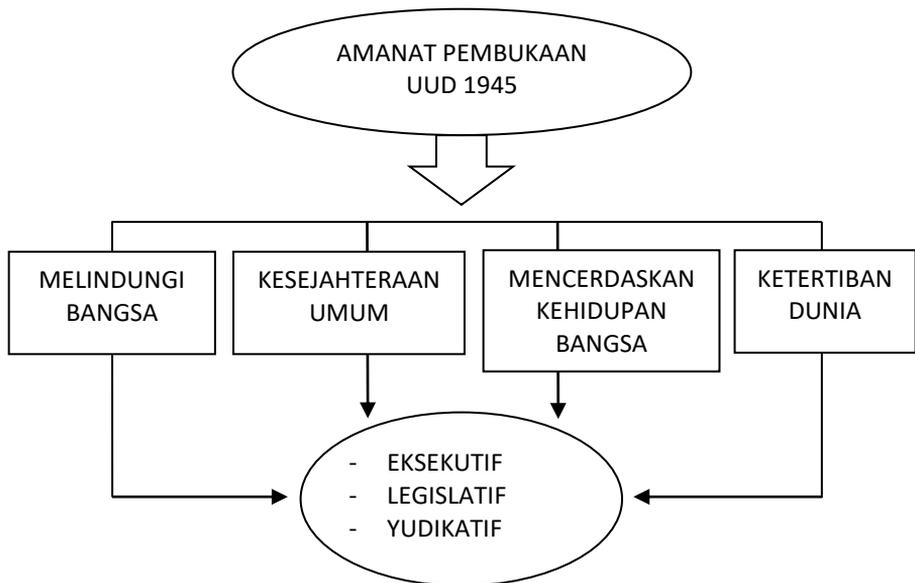
1. Mengembangkan tata kelola pendidikan dan pengajaran untuk mempertebal dan memperkuat keimanan dan keyakinan serta dengan berbagai implementasinya dalam kehidupan sehari-hari bahwa semua yang dilakukan, diucapkan bahkan niat di dalam hati akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berbudi luhur dan menjunjung tinggi etika serta menjadi pelopor dalam usaha pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuen.
3. Menjaga koridor toleransi beragama, toleransi kesukuan dan toleransi pada kearifan lokal, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan dinamis untuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

B. GAMBARAN UMUM.

Amanat Pembukaan UUD 1945 yang dirumuskan oleh “*Founding Fathers*” yang mengatakan yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Gambar 3
Founding Fathers



Dengan demikian, gambaran umum tentang konsep berbangsa dan bernegara yang telah dirumuskan oleh para pejuang pendiri NKRI ini meliputi 4 hal, yaitu perlindungan, kesejahteraan, pendidikan dan diplomasi internasional.

Peran dan fungsi pemerintah dalam hal perlindungan atau menjaga kedaulatan wilayah NKRI di darat, laut dan udara serta melindungi semua kepentingan masyarakat secara menyeluruh pada aspek ekonomi, sosial dan budaya serta perlindungan yang menciptakan rasa aman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Secara spesifik, objek perlindungan meliputi jasmani dan rohani terhadap ancaman dan gangguan yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Untuk itu diperlukan regulasi dan semua aturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengatur fungsi dan peran setiap individu pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebutuhan jasmani warga negara yang terlindungi adalah ketersediaan kebutuhan sehari-hari, meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan jasa, yaitu jasa transportasi, dokter, pengacara dan lain lain. Adapun kebutuhan rohani meliputi antara lain yaitu semua umat beragama dengan rasa aman melaksanakan ritual keagamaan masing-masing dengan tidak ada gangguan apapun dan dari manapun. Demikian juga pengamalan dari butir-butir Pancasila tidak terganggu oleh adanya Raka atau radikal kanan dan Raki atau radikal kiri.

Universitas Krisnadwipayana sebagai benteng Pancasila, artinya segenap kehidupan kampus dengan segenap aktivitasnya yang meliputi dosen, mahasiswa, karyawan dan seluruh unsur yayasan universitas dan semua civitas akademika menjadi garda terdepan untuk menjaga dan sekaligus mempelopori segala usaha-usaha untuk pengamalan butir-butir nilai yang terkandung dalam setiap Sila dari Pancasila, peran serta dosen untuk mempengaruhi dan mengarahkan cara berpikir mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa adalah sebagai implementasi kepedulian unsur

universitas untuk masa depan bangsa Indonesia. Ada pepatah yang mengatakan bahwa “rantai kemiskinan suatu bangsa hanya bisa diputus dengan pendidikan”. Untuk itu, semangat mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertumpu pada keadilan sosial dan pemerataan hasil pembangunan dalam bentuk kemakmuran bersama, sehingga mampu mengangkat derajat rakyat dari standar garis kemiskinan, akses pendidikan yang luas, jaminan kesehatan dan terbukanya lapangan pekerjaan yang luas serta terciptanya semangat gotong-royong yang dilandasi keimanan dan ketakwaan.

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dilandasi oleh kadar keimanan yang kuat, artinya secara sadar, percaya dan yakin akan adanya Tuhan, serta segala sesuatu di dunia ini termasuk semua kejadian peristiwa pada manusia dan alam raya ini adalah dalam lingkup ilmu dan pengetahuan Tuhan. Sehingga segala sesuatu itu tidak akan terjadi jika Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan Yang Maha Esa adalah penguasa alam raya ini dan Tuhan Maha Berkehendak serta menguasai segala sesuatu. Untuk itu manusia dan segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia sebagaimana diamanatkan oleh sistem pendidikan nasional yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sangat penting. Hal ini sejalan dengan semangat untuk mengejawantahkan Sila Pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, jika lebih dalam lagi diuraikan, maka Sila Pertama inilah yang menjwai semua Sila Pancasila. Dengan demikian, semua rakyat Indonesia harus berketuhanan dan menjadi tidak dibenarkan jika ada rakyat Indonesia mempunyai dasar pemikiran atheis atau komunis atau tidak berketuhanan.

Segenap civitas akademika Universitas Krisnadwipayana harus mengedepankan sifat dan sikap “berbudi luhur”. Artinya segala ucap dan perbuatan mencerminkan figur sebagai seorang akademisi yang santun, seiring antara ucapan dan perbuatan, suka menolong dan berkepribadian “keperwiraan”, yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Berbudi luhur artinya menjaga norma sopan santun, adat istiadat dan dapat memposisikan dirinya secara baik dalam komunitas tertentu yang dalam filosofi Jawa dikatakan dengan istilah “bener lan pener”. Artinya “bener” atau benar adalah tujuan akhir dari setiap perbuatan dan ucapan dilandasi oleh sifat keikhlasan, kesabaran untuk berbuat baik. Adapun “pener” artinya dalam mencapai tujuan yang baik tersebut harus dengan cara yang baik, sehingga kombinasi antara tujuan dan cara termasuk pada koridor kebaikan. Dengan demikian implementasi “budi luhur” adalah diawali dari niat, tujuan, cara, ucapan dan tindakan tidak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bermoral yang baik adalah cermin dari “akhlakul karimah” atau akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk menghormati orang yang lebih tua dan berilmu tinggi, sayang dan perhatian pada anak-anak atau generasi penerus, tidak sombong dan tidak arogan serta suka berbagi atau menolong orang lain dalam bentuk apapun, jika berucap dengan orang lain terkesan santun dan ramah serta gemar silaturahmi, menghormati tamu dan sebagainya. Jika dilihat dari fungsi dan peran manusia sebagai “khalifah fil ard” atau pemimpin di dunia ini untuk menjaga keseimbangan alam, menjaga ekosistem dan melestarikan lingkungan yang asri, maka

pada posisi ini dosen dan mahasiswa serta segenap civitas akademika harus bisa tampil di depan sebagai pelopor dan sekaligus sebagai benteng Pancasila. Untuk itu, secara paralel pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, gambaran umum dan manifestasi dari pemikiran universitas Krisnadwipayana sebagai benteng Pancasila akan semakin nampak jelas tergambar dari sikap dan perbuatan dari pemahaman “bermoral yang baik”.

Cerdas dan terampil adalah *output* secara nyata dari kedalaman intelektual mahasiswa, “*transfer knowledge*” atau proses belajar-mengajar meliputi beberapa unsur yang mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung, yaitu :

1. Dosen.
2. Mahasiswa.
3. Fasilitas kampus.
4. Kurikulum pendidikan, dan lain lain.

Ilmu sebagai objek komunikasi antara mahasiswa dan dosen, sehingga menghasilkan potensi cerdas dan terampil. Ilmu dapat didefinisikan sebagai cahaya, karena tanpa ilmu hidup manusia menjadi gelap dan masa depan negara pun menjadi suram. Sehingga hipotesa yang dibangun adalah “jika pada komunitas suatu negara terdiri dari masyarakat dan individu yang cerdas dan terampil, maka negara tersebut menjadi makmur dan menjadi negara maju yang mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia”. Dengan demikian, cerdas dan terampil yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa merupakan implementasi nyata dari sikap jiwa juang keperwiraan sebagai benteng Pancasila.

Susilo Bambang Yudhoyono (2006)⁴ mengatakan bahwa pentingnya untuk berbicara kembali tentang Pancasila. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesan negatif dari dampak dan semangat reformasi. Ada semacam kegamangan masyarakat pada umumnya dan masyarakat kampus, terutama para dosen dan mahasiswa yang termasuk di dalamnya civitas akademika Universitas Krisnadwipayana jika berbicara secara terbuka pada acara seminar dan lain-lain atau di media massa dengan tema Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan kebangsaan, stabilitas nasional, ketahanan nasional, dan lain-lain. Karena ada semacam opini negatif atau dianggap tidak reformis. Kondisi semacam ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh semangat reformasi gerakan mahasiswa yang berhadapan langsung dengan rezim Orde Baru. Pada kondisi saat itu, Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai alat untuk “heirarki kekuasaan” yang bercitra negatif. Untuk itu masyarakat kampus harus mampu dan mau menjadi pelopor kampus sebagai benteng Pancasila.

Semangat pengabdian pada bangsa dan negara adalah sifat yang diwariskan oleh “*Founding Fathers*”, rela berkorban dan melepaskan identitas kedaerahan untuk bersatu pada satu identitas, yaitu Pancasila. Pada saat kelahiran Pancasila tahun 1945, kemudian disepakati sebagai dasar negara yang pada saat itu dan sampai sekarang warna bernegara masyarakat bersifat plural, sehingga diperlukan perjuangan menyatukan atau mengintegrasikan seluruh komponen bangsa dalam satu kebijakan,

⁴ Susilo Bambang Yudhoyono, *Menata Kembali Kerangka Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, yang ditulis dalam buku “*Restorasi Pancasila*” pada acara pidato peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2006.

yaitu “politik pluralisme”. Dalam artian pemerintah membangun jembatan dan koridor komunikasi antar komunitas dan identitas kedaerahan menjalin ikatan kebersamaan di seluruh Indonesia yang secara otomatis mengendalikan kekuasaan pemerintahan pada masa Orde Lama Bung Karno sebagai Presiden pertama menggelorakan semangat pengabdian dan gotong-royong. Dengan demikian, perjuangan untuk mengawal Pancasila sebagai Dasar Negara dan ideologi bangsa Indonesia tidak pernah berakhir, sehingga sangat dimungkinkan tampilnya kampus atau universitas sebagai benteng Pancasila.

C. LATAR BELAKANG.

Bhinneka Tunggal Ika yang berarti beraneka ragam suku, bahasa, agama dan budaya, tetapi satu kesatuan. Artinya Pancasila merupakan “*Great Ideas*” atau gagasan besar karena mampu menyatukan keberagaman. Akan tetapi pada kondisi tertentu ada ancaman mudurnya ikatan persatuan dan kesatuan. Untuk itu segala pemikiran pembaharuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diuji terlebih dahulu di kampus. Langkah ini diperuntukkan guna mitigasi risiko yang mempunyai dampak yang sangat besar. Contoh yang paling dekat adalah wacana Presiden 3 periode. Padahal konstitusi mengatur 2 periode. Untuk itu seyogyanya sebelum wacana 3 periode tersebut digulirkan di tengah masyarakat terlebih dahulu diseminarkan di kampus-kampus, baik kampus negeri atau kampus swasta, yang diantaranya adalah kampus Universitas Krisnadwipayana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kampus sebagai filter perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu dapat juga dikatakan bahwa kampus sebagai benteng Pancasila dan sekaligus menumbuhkembangkan Pancasila pada kehidupan sehari-hari.

Ketuhanan Yang Maha Esa pada Sila Pertama Pancasila dapat mengundang 2 jenis kerawanan, yaitu :

1. Raka atau radikal kanan.
2. Raki atau radikal kiri.

Untuk itu, pemikiran yang melatarbelakangi penulisan buku dengan judul “Mewujudkan Universitas Krisnadwipayana Sebagai Benteng Pancasila” adalah sebagai berikut:

1. Membangun kehidupan kampus yang demokratis sebagai bentuk dari kampus merdeka.
2. Meniadakan gejala atau kecenderungan akan adanya paham Raka dan Raki. Raka adalah pemahaman dan pemikiran yang salah terhadap ajaran agama, sehingga bertentangan dengan semangat dan jiwa Pancasila. Dan Raki adalah pemahaman dan pemikiran atheisme atau tidak bertuhan.
3. Mereduksi semangat dan identitas kedaerahan menjadi identitas nasional yang secara historis dikumandangkan pada semangat “Sumpah Pemuda”, yaitu : 1) Bertanah air satu Indonesia; 2) Berbahasa satu bahasa Indonesia; 3) Berbangsa satu bangsa Indonesia.
4. Pentingnya sosialisasi kembali terhadap nilai-nilai yang terkandung pada setiap Sila dari Pancasila agar tidak gagal paham.

Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Kajian pada Sila Kedua ini meliputi 3 hal, yaitu :

1. Nilai kemanusiaan.
2. Nilai keadilan.
3. Nilai beradab.

Nilai kemanusiaan adalah penghargaan dan penghormatan pada nilai-nilai dasar sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan menjunjung tinggi HAM atau Hak Asasi Manusia. Adapun tingkatan kebutuhan manusia meliputi :

1. Sandang.
2. Pangan.
3. Papan.
4. Pendidikan.
5. Kesehatan.
6. Rasa aman, dan sebagainya.

Artinya, ketersediaan sumber-sumber kebutuhan manusia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga diperlukan kombinasi aktif antara program pembangunan yang dipelopori oleh unsur eksekutif serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, upaya rekayasa pertanian, pertambangan, kehutanan, perkebunan dan semua perusahaan manufaktur serta perusahaan jasa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sangat diperlukan. Pada posisi ini, peran civitas akademika sangat diperlukan.

Akses pendidikan harus terbuka secara adil, artinya pemerintah pada Kementerian Pendidikan mengupayakan seluruh masyarakat dari berbagai strata kemampuan dan pendapatan secara ekonomi memperoleh pelayanan pendidikan. Karena melalui pendidikan inilah masyarakat akan

didorong menjadi manusia yang beradab. Peran dan fungsi perguruan tinggi yang termasuk didalamnya adalah Universitas Krisnadwipayana sebagaimana amanat dari Tri Dharma perguruan tinggi dan dengan identitas kampus sebagai benteng Pancasila, maka mengambil langkah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemahaman Pancasila di lingkungan kampus Universitas Krisnadwipayana.
2. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pemerataan pendidikan secara adil.
3. Memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila guna membentengi masyarakat dari paham radikal kanan dan radikal kiri.
4. Melakukan kerjasama dinamis dengan aparat terkait guna sosialisasi nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan nyata, seperti pembangunan rumah ibadah, santunan anak Yatim, fakir miskin dan lain-lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun dari berbagai kelompok, suku, adat istiadat dan berbagai agama. Untuk itu semangat persatuan dan kesatuan menjadi satu komunitas tunggal dengan satu identitas, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*. Yang berarti berbeda-beda tetapi di dalam satu kesatuan yang saling melengkapi dan saling mendukung. Orientasi dasar program pembangunan Nasional harus mampu untuk menempatkan kepentingan Nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kondisi pluralitas bukan menjadi kelemahan, tetapi menjadi kekuatan yang saling mendukung dan saling memperkuat serta saling melengkapi. Untuk itu kehidupan masyarakat kampus Universitas Krisnadwipayana memberikan

ruang yang seluas-luasnya bagi dosen dan mahasiswa serta segenap civitas akademika untuk tetap berjuang tanpa melihat suku, agama dan ras untuk mengabdikan diri dalam dunia pendidikan. Semangat persatuan dan kesatuan didalam proses belajar dan mengajar di dunia kampus sangat mudah dilakukan, yaitu dengan cara belajar kelompok, tugas kelompok, dan berbagai kegiatan mahasiswa ekstrakurikuler secara Bersama-sama. Dengan demikian, peran dan fungsi Universitas Krisnadwipayana sebagai benteng Pancasila terutama pada implementasi Sila Ketiga menjadi nyata secara aplikatif.

Sila Keempat merupakan "*Guidance*" atau panduan pada tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pada Sila Keempat mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Kerakyatan.
2. Kepemimpinan⁵.
3. Hikmah.
4. Musyawarah dan mufakat.
5. Kebijaksanaan.
6. Saling pengertian atau "tepo seliro".

Pada konteks kerakyatan, maka yang paling utama adalah perekat antar hidup itu pada suatu komunitas tertentu. Untuk itu Pancasila harus mampu menjwai segenap pemikiran dan pemahaman seluruh bangsa Indonesia, sehingga menjadi kristal yang kuat dan bercahaya dengan

⁵ Raylis Sumitra, *Konsep Kepemimpinan Super Humble*, Dudung Abdurachman, (Jakarta, PPSN, 2022), 17.

melepaskan semua identitas sectoral menjadi identitas Nasional. Adapun makna kepemimpinan Nasional harus mampu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan dan mempunyai semangat persatuan kesatuan sebagai warga negara yang di dalam kajian agama sebagai hamba atau makhluk ciptaan Tuhan atau “Abdullah”. Sehingga makna hikmah dalam rangkaian kata Sila Keempat menjadi arti kemanfaatan dan keunggulan melalui niat baik yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan dan makna kedalaman keimanan dan ketakwaan.

Musyawarah dan mufakat adalah suatu proses pengambilan keputusan dengan menempatkan semua pihak dalam posisi yang sama dan seimbang. Sehingga semua permasalahan secara Nasional dicarikan jalan pendekat agar semua kepentingan kelompok menjadi terwakili. Meskipun tidak semua kepentingannya menjadi skala prioritas dari kepentingan kelompok yang lain. Hal ini dapat terjadi jika cara berpikirnya adalah mementingkan kepentingan bersama atau kepentingan Nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kebijakan dalam pengambilan keputusan, artinya hasil akhir atau “*final goal*” dari semua kebijakan dan program pembangunan Nasional selalu berorientasi pada kemanfaatan Bersama dan kebaikan bersama. Sehingga saling pengertian atau tepo-seliro, yaitu menghormati kepentingan orang lain secara proporsional harus dijunjung tinggi. Dengan demikian, pada pemaknaan Sila Keempat dapat dilakukan secara optimal pada budaya kehidupan kampus, terutama pada organisasi kemahasiswaan dengan penekanan pada kebebasan mengungkapkan pemikiran dan pendapat, tetapi tetap menghormati kepentingan dan pendapat orang lain.

Sila Kelima, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung pengertian:

1. Keadilan.
2. Sosial.
3. Kerakyatan.
4. Ke-Indonesia-an.

Implikasi secara nyata negara hukum adalah menjamin adanya keadilan, kebebasan dan kesetiakawanan. Analisis terhadap keadilan yaitu perlakuan negara terhadap warga negaranya secara proporsional sama dan merata serta hasil-hasil pembangunan tersebar secara proporsional di seluruh wilayah negara. Demikian juga setiap warga negara mempunyai kesempatan berinteraksi dan menjalin hubungan sosial kemasyarakatan. Adapun pemahaman kerakyatan secara hakiki adalah memposisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan secara politik pada semangat ke-Indonesia-an. Dengan demikian, implementasi Universitas Krisnadwipayana sebagai benteng Pancasila adalah menjaga dan mensosialisasikan pengamalan Sila Kelima Pancasila di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar kampus.

Lebih jauh dari itu, dapat difahami bahwa implementasi penegakkan hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sehingga kepercayaan masyarakat pada pemerintah akan terpelihara dengan baik dan partisipasi masyarakat akan berkembang dinamis.

BAB II

KONSEP EKONOMI PANCASILA

A. PENDAHULUAN.

Dasar pemikiran untuk mencari konsep Ekonomi Pancasila adalah adanya keyakinan bahwa hanya melalui pengkajian filosofi dasar negara sebagai konsensus nasional yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia maka masyarakat Indonesia bisa mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan oleh segenap bangsa Indonesia sendiri sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang adil dan makmur”. Usaha untuk mencari konsep Ekonomi Pancasila sekaligus untuk menangkal pencemaran pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai akibat dari gelombang demokratisasi dewasa ini serta untuk menjaga pemurnian pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga pengamalan Pancasila akan membentuk rasa solidaritas dan penghargaan terhadap perbedaan, menjauhkan diri dari sikap arogansi, dan dominasi mayoritas terhadap minoritas dalam bentuk pemaksaan kehendak atau kekerasan, terror dan pemaksaan ideologi dalam pemahaman yang berbeda, latar belakang penyebab pencemaran dan pergeseran pemahaman Pancasila atau faktor penyebab termarginalkannya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; *Pertama*, Pancasila digunakan oleh rezim penguasa untuk mempertahankan *Status-Quo* kekuasaan; *Kedua*, penghapusan Pancasila sebagai satu-satunya azas setiap organisasi; *Ketiga*, desentralisasi dan semangat otonomi daerah yang berlebihan, sehingga diperlukan upaya

untuk menjaga kerukunan dalam keagamaan seperti yang di amanatkan Pancasila; *Keempat*, pergeseran pemaknaan Pancasila secara sepihak sehingga mengesampingkan rasa persatuan dan kesatuan serta penghormatan terhadap perbedaan, yang pada akhirnya akan bermuara pada pemaksaan kehendak atau kekerasan.⁶

Ketergantungan ekonomi dalam implementasi kehidupan bermasyarakat serta pengelolaan sumber daya alam yang melimpah serta segala potensi yang ada terhadap campur tangan asing telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang konsumtif, tidak mandiri dalam pengelolaan hutang,⁷ dan bangsa yang tidak berdaya dalam pengurusan TKI dan TKW di luar negeri, bahkan lebih jauh dari itu menjadi TKI dan TKW di negeri sendiri, lalu timbul satu pertanyaan besar, mungkinkah segenap bangsa Indonesia ini akan memperoleh kemakmuran bila konsep ekonomi yang dijalankan menggunakan tata nilai pasar bebas yang kapitalis. Pada posisi ini letak pentingnya kampus sebagai benteng Pancasila. Sementara

⁶ Azyumardi Azra, *Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia*, dalam buku *Restorasi Pancasila Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, (Bogor : Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, 2006), 146.

⁷ Konsepsi dasar pemikiran untuk mendapatkan pinjaman yang berkembang saat ini mengikuti pandangan para ekonom neo liberal yaitu ; *Pertama*, untuk menutup atau menghilangkan kesenjangan antara tingkat tabungan masyarakat dengan kebutuhan investasi (*saving investment gap*); *Kedua*, memanfaatkan suku bunga murah dari negara-negara kreditur dan lembaga multilatera. Dengan menggunakan paradigma yang bertumpu pada semboyan "*investor first, people second*" atau dengan ungkapan yang lazim dan lebih halus "bersahabat dengan pasar", sehingga apabila terjadi kenyataan atau kondisi para investor memilih tindakan untuk tidak melakukan investasi, maka para pembuat kebijakan tidak berdaya untuk memaksa mereka, dan jalan yang harus ditempuh dengan tidak ada pilihan adalah menciptakan lingkungan kebijakan politik dan ekonomi yang oleh para investor dinilai positif dan responsif. Jeffrey A. Winters, *Power in Motion*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999), 4.

dilain pihak konsep ekonomi kapitalis sendiri sudah mulai dipertanyakan kemampuannya di negaranya sendiri.⁸

Permasalahan mendasar yang harus segera dicari jalan keluar dan solusinya dalam bentuk konsep pembangunan ekonomi yang mampu mengangkat harkat dan martabat sehingga setara dengan bangsa-bangsa lain dalam pergaulan internasional dengan cara melepaskan diri dari ketergantungan hutang luar negeri, penguatan sektor ekonomi kerakyatan yang mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan serta upaya untuk berdikari secara mandiri di bidang pembangunan ekonomi menyeluruh dan pemerataan hasil pembangunan yang tersebar ke seluruh wilayah Nusantara. Ketidak berdayaan ekonomi nasional secara umum disebabkan oleh; *Pertama*, paradigma lama yang menempatkan cara berfikir bangsa ini sebagai subordinasi negara-negara maju melalui perjanjian atau kontrak yang mengikat sebagai konsekwensi logis atas hutang luar negeri atau bentuk bantuan apapun namanya, seakan menjadi rumus tetap bahwa negara industri maju mengelola bahan mentah menjadi barang siap pakai dengan harga yang cukup tinggi, sementara dilain pihak negara dunia ketiga yang mempunyai kekayaan sumber daya alam dipaksakan oleh keadaan untuk menjadi eksportir bahan mentah dengan harga yang relatif murah. Dengan demikian diperlukan langkah-langkah *recovery* yang mampu merumuskan kebijakan strategis dan keberanian untuk mengambil risiko

⁸ *Dekade Keserakahan (the roaring nineties : a new history of the world`s most prosperous decade)* yang diterjemahkan oleh Aan Suhaeni dari Josept E. Stiglitz (Jakarta : marjin kiri PT. Cipta Lintas Wacana, 2006), 53.

guna merubah arah kebijakan ekonomi saat ini yang berpihak pada pasar bebas dan hanya menguntungkan sebagian kecil dari sudut jumlah pelaku ekonomi kepada kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat secara luas atau dengan istilah kebijakan ekonomi kerakyatan; *Kedua*, ketidakberdayaan ekonomi nasional disebabkan oleh kurang jelinya pemerintah dalam membagi proporsi aktivitas ekonomi yang mengakibatkan dominasi pemodal internasional terhadap sektor-sektor setrategis antara lain : 85,4% menguasai konsesi pertambangan migas, 70% menguasai kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia, dan lebih dari 50% menguasai kepemilikan perbankan (data tersebut telah disampaikan pada forum rektor tahun 2007).⁹

Alasan kuat yang mendorong untuk mencari konsep ekonomi yang berakar dari budaya bangsa adalah terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 yang berakibat pada pergantian tapuk kekuasaan dari era Orde Baru menjadi era reformasi, secara empiris telah terbukti dalam kehidupan ekonomi saat itu, bahwa pihak yang mengalami krisis adalah ekonomi konglemerasi sedangkan ekonomi yang berbasis kerakyatan mampu bertahan menghadapi terpaan badai krisis bahkan lebih jauh dari itu

⁹ Model pembangunan politik Indonesia saat ini telah memposisikan diri masuk dalam perangkap hutang, dan kondisi tersebut dimanfaatkan oleh jaringan lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan internasional seperti IDB, Bank Dunia, IMF dan WTO sebagai alat untuk melaksanakan pemaksaan agenda-agenda ekonomi politik neoliberal kepada Indonesia. Simpul krisis adalah krisis ideologi yang meluas menjadi krisi ekonomi politik, karena kebijakan yang ditempuh setiap rezim pemerintahan selalu berpihak pada Konsensus Washington atau Neoliberalisme, yaitu; penerapan deregulasi, liberalisasi, privatisasi dan penghapusan subsidi. M. Dawam Rahardjo, *Nalar Ekonomi Politik Indonesia*, (Bogor : IPB Press, 2011), xvii.

mampu bangkit dan memposisikan diri sebagai penyelamat perekonomian bangsa. Sehingga konsep pemikiran yang hendak dibangun dalam kajian Ekonomi Pancasila adalah sebagai berikut; *Pertama*, kajian perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan sejarah perjuangan menuju Indonesia merdeka dan sekaligus usaha untuk mempertahankan kemerdekaan dalam menghadapi agresi militer, sehingga menghasilkan nilai dan norma luhur kehidupan berbangsa dan bernegara diposisikan sebagai dasar acuan kerangka berfikir; *Kedua*, mengkaji aturan yang sudah dilembagakan dan dijalankan oleh pemerintah hingga saat ini; *Ketiga*, memposisikan konsep Ekonomi Pancasila sebagai *General Theory* atau teori umum, sedangkan konsep ekonomi kerakyatan atau ekonomi koperasi sebagai landasan empirisnya. Meskipun demikian kondisi tersebut masih membuka peluang untuk menyusun *Grand Theory* yang secara menyeluruh tertuang dalam makna Ekonomi Pancasila yang berorientasi pada usaha kemandirian ekonomi sebagaimana dicita-citakan oleh segenap bangsa Indonesia sejak awal berdirinya negeri ini, sehingga landasan berfikir yang digunakan sebagai acuan adalah memposisikan dasar falsafah bangsa Indonesia Pancasila sebagai satu-satunya barometer pembangunan teori Ekonomi Pancasila yang kemudian dirangkum dalam satu pola pemikiran yang tidak hanya dapat bersaing secara internasional, akan tetapi lebih jauh dari itu menjadi ideologi alternatif bagi dunia setelah pudarnya kekuatan ekonomi pasar bebas yang berlandaskan “Kepuasan Konsumtif”.¹⁰

¹⁰ Membangun suatu teori ekonomi, harus dimulai dari landasan filsafat teori ekonomi itu sendiri, sebab tanpa kerja keras untuk mencari aliran budaya dari zaman prasejarah hingga saat ini dan berpedoman pada filsafat bangsa yang sudah disepakati sebagai konsensus nasional maka akan menjadi teori tambal sulam dari

Kemandirian ekonomi bangsa Indonesia dapat dimaknai sebagai usaha perjuangan untuk menentukan pola ekonomi yang terlepas dari intervensi asing dan berorientasi murni untuk kemakmuran rakyat secara merata, sehingga rumusan kemandirian ekonomi tersebut adalah; *Pertama*, prioritas pola perekonomian mengedepankan kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan sekelompok orang dengan pola konglomerasi; *Kedua*, mengurangi jumlah pinjaman atau hutang luar negeri secara bertahap sampai pada pelunasan hutang secara sempurna dan tidak membuka peluang kesempatan untuk melakukan hutang kembali pada kondisi apapun; *Ketiga*, ekspor produk dilakukan hanya barang jadi atau setengah jadi bukan bahan mentah, demikian juga barang yang diekspor bukan mengejar keuntungan semata tetapi barang yang diekspor adalah komoditi yang lebih dari kebutuhan dalam negeri, artinya selama kebutuhan pasar dalam negeri masih memerlukan dan mampu menyerap maka produk tersebut tidak boleh untuk diekspor, demikian juga produk impor diperlukan ketika barang yang sama tidak tersedia di dalam negeri atau paling tidak barang yang sejenis atau barang substitusi tidak tersedia secara mencukupi, hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi pasar domestik; *Keempat*, menata kembali pola praktik perbankan dan sistem

apa yang sudah ada, sehingga warna dan coraknya hanya bersifat sementara. Ilmu ekonomi yang dirintis oleh Adam Smith dibangun atas landasan konsepsi perilaku manusia atas dasar "Kepuasan Konsumtif", sehingga konsep pemikiran tersebut dapat dimaknai sebagai hasil akulturasi budaya barat yang tidak bersesuaian dengan budaya timur, untuk itu diperlukan kajian yang mendalam pada suatu teori ekonomi ketimuran. Hidayat Nataatmaja, Karsa, *Membangun Ilmu Ekonomi Pancasila* dalam buku *Ekonomi Pancasila* edisi pertama dengan editor Mubyarto dan Boediono yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI, (Yogyakarta : BPF, 1997), 23.

mata uang yang menghindarkan dari praktik ekonomi biaya tinggi serta kebijakan fiskal yang mampu menjadi stimulus untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat; *Kelima*, membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat kampus untuk berpartisipasi pada perekonomian nasional melalui kebijakan kolektif yang berpihak pada rakyat; *Keenam*, membangun pola pemasaran produk lokal yang terstruktur dan mempunyai akses yang luas pada pasar domestik dan pasar ekspor; *Ketujuh*, perekonomian disusun berdasarkan tata nilai sosial budaya gotong royong, kebersamaan dan budaya saling tolong-menolong.¹¹

Consensus nasional sebagaimana telah disepakati bersama mulai dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dengan Proklamator yang sekaligus dikenal sebagai Bapak Pendiri Bangsa “Soekarno - Hatta, *consensus* tersebut telah mengalami pasang surut dalam tataran implementatif, akan tetapi secara filosofis tidak mengalami perubahan apapun, karena daya rekat bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan *consensus* tersebut, ada empat pilar *consensus* yang harus dipegang teguh oleh bangsa Indonesia; *Pertama*, Pancasila sebagai Dasar Negara dan

¹¹ Akumulasi dari kemampuan negara untuk meningkatkan tabungan nasional serta kemampuannya untuk menyerap modal atau *Absorptive Capacity* untuk meningkatkan penanaman modal guna membuka lapangan pekerjaan baru, akan berdampak pada perhitungan selisih antara tabungan dan biaya penanaman modal sehingga menciptakan koridor keperluan modal yang akan dicarikan sumbernya dari luar negeri, artinya dalam proses pembangunan ekonomi berupa penanaman modal guna mengejar angka pertumbuhan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama pihak legislatif telah membuka peluang untuk melakukan penambahan modal dari luar negeri berupa hutang. Zulkarenain Djamin, *Masalah Hutang Luar Negeri bagi Negara-Negara Berkembang dan Bagaimana Indonesia Mengatasinya*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 1995), 23.

sekaligus sebagai tuntunan dan arah kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila mampu memperkokoh peran dan jati dirinya pada setiap hati nurani anak bangsa, dan melalui pengkajian Pancasila secara mendalam dengan sudut pandang obyektif akademis maka akan semakin tampak kedalaman arti dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan alasan itulah penulis berniat untuk menggali potensi Pancasila dari sisi pemberdayaan ekonomi, sehingga dalam kajian ini menggunakan istilah Ekonomi Pancasila; *Kedua*, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa Indonesia. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa sejak era reformasi yang diawali dengan bergantian kekuasaan pemerintahan dari kejayaan Orde Baru menuju Era Reformasi yang dimotori oleh gerakan mahasiswa telah menempatkan keinginan melalui kekuasaan legislatif untuk merubah Batang Tubuh atau Pasal-Pasal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali, meskipun tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang akan terjadi penyempurnaan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh generasi anak bangsa yang akan datang, akan tetapi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh dan tidak akan mengalami perubahan karena disana terdapat semangat dan pernyataan berdirinya sebuah negara, artinya sudah tertutup kemungkinan adanya perubahan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena merubahnya berarti merubah semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merubah pernyataan kemerdekaan. Untuk itu dalam kondisi apapun Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus dipertahankan, untuk itu diperlukan adanya pemikiran kampus sebagai benteng Pancasila yang

termasuk di dalamnya Universitas Krisnadwipayana; *Ketiga*, Bhinneka Tunggal Ika yang secara umum dapat difahami bahwa pengakuan keragaman budaya, keragaman bahasa daerah, keragaman suku, adat istiadat dan keragaman agama akan tetapi dalam satu kerangka budaya bangsa yaitu bangsa Indonesia, keragaman dapat dimaknai sebagai kekayaan warna pemahaman dan kekayaan potensi daerah dengan dasar keyakinan bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam kondisi yang berbeda untuk saling melengkapi dan bukan untuk saling membenci, untuk saling bekerjasama dan bukan untuk saling bercerai berai, sehingga dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia diperlukan faham ke-bhinneka-an serta diperlukan ketangguhan kepemimpinan yang memiliki integritas yang kuat dan mampu menyatukan segala macam perbedaan menjadi potensi energi positif untuk membangun kesatuan negara, dalam kondisi seperti inilah kemudian melahirkan istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi dalam kondisi semangat otonomi daerah, maka tidak menutup kemungkinan munculnya semangat kedaerahan dan semangat kesukuan, disinilah letak strategisnya refitalisasi pemahaman Bhinneka Tunggal Ika agar bangsa Indonesia terlepas dari kemungkinan dis-integrasi bangsa, sehingga semangat yang dibangun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah semangat toleransi dengan menjauhkan diri dari semangat pemaksaan mayoritas terhadap minoritas, semangat toleransi tersebut merupakan semangat saling pengertian dan semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republic Indonesia; *Keempat*, Wawasan Nusantara. Kata “wawasan” berasal dari akar kata “Wawas” yang dalam bahasa Jawa berarti “melihat” atau “memandang” kemudian

mendapat akhiran “an”, sehingga mempunyai pengertian : “cara penglihatan atau cara tinjau atau cara pandang”. Selanjutnya pemahaman secara umum mengandung pengertian tentang cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara, cara pandang tersebut dapat diwujudkan dan dikembangkan pada semangat cinta tanah air dan semangat bela negara, sejangkal tanah dan secangkep air dalam teritorial wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan, demikianlah semboyan semangat kebangsaan yang harus dibangun dalam dada setiap warga negara, termasuk mahasiswa UNKRIS.

Pemahaman terhadap Wawasan Nusantara harus dimulai dari proses edukasi secara terus menerus baik melalui pendidikan formal di bangku sekolah dasar, menengah sampai pada pendidikan perguruan tinggi, demikian juga melalui pendidikan non formal yang dapat dilakukan melalui jalur non formal dalam bentuk penyuluhan, program implementasi yang secara nyata dapat dirasakan masyarakat seperti penanaman pohon untuk menjaga kelestarian hutan dan penghijauan lingkungan. Dari sisi yang berbeda pemaknaan Pancasila dan implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari akan menghasilkan sikap perilaku dan pola pikir yang berakar pada wawasan kebangsaan yang bertumpu pada sejarah perjuangan bangsa, hasil akhir dari proses tersebut adalah terbangunnya jiwa solidaritas nasional, nasionalisme sejati yang mengedepankan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi, serta terjadi saling pengertian antar kelompok agama terhadap pemaknaan agamanya masing-masing, tidak ada satu agama apapun di dunia ini yang mengajarkan

kebencian, mendorong pengikutnya untuk berbuat kerusakan, atau memotivasi pemeluknya untuk melakukan kekerasan tanpa jalur hukum yang benar, sehingga aksi terror dengan menggunakan alasan agama menjadi suatu hal yang tidak realistis dan harus ditindak dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan preventif atau pencegahan dan tindakan penindakan. Demikian juga pemaknaan Jihad dalam ajaran agama Islam telah disalah artikan dan digunakan dasar alasan untuk melakukan terror kekerasan, padahal makna Jihad yang sesungguhnya dalam Islam adalah bekerja secara sungguh-sungguh.¹²

Lebih jauh dari itu “Wawasan Nusantara” dapat diartikan sebagai implementasi wawasan nasional Indonesia guna mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adapun lingkup kajian wawasan Nusantara meliputi : keutuhan wilayah atau Integralistik, kekeluargaan, kebersamaan, dan keserasian. Sehingga pengertian wawasan Nusantara dapat dilihat dari dua sudut yang berbeda; *Pertama*, mawas ke

¹² Nasaruddin Umar dalam kolom *Hikmah Koran Republika* tanggal 27 September 2011 mengatakan; bahwa pengertian Jihad adalah sesuatu yang luhur, dalam tinjauan bahasa Jihad berasal dari kata Jahada yang berarti bersungguh-sungguh, sehingga pemaknaan terhadap kata tersebut menghasilkan tiga pengertian; *Pertama*, Jihad dalam pengertian bersungguh-sungguh dalam perjuangan untuk kemaslahatan atau usaha untuk berbuat baik dalam bentuk kegiatan fisik; *Kedua*, Ijtihad yang merefleksikan usaha sungguh-sungguh dalam bentuk perjuangan dengan nalar, hal tersebut dimaksudkan untuk menata cara berfikir dan pemahaman yang benar terhadap ajaran agama, karena kekerasan terror berakar pada penyimpangan pemaknaan ideologi secara sepihak; *Ketiga*, Mujahadah dalam arti perjuangan dengan kekuatan rohani. Jihad dalam pemaknaan sebenarnya adalah Jihad atau upaya yang sungguh-sungguh dengan tujuan untuk mempertahankan kehidupan manusia yang bermartabat dan dedikasi harga diri sebagai manusia, serta bukan usaha untuk menyengsarakan orang lain, apalagi dengan melakukan perbuatan yang berdampak pada pengerusakan sarana ibadah dan pembunuhan.

dalam yaitu menempatkan segala prioritas pada unsur persatuan dan kesatuan bangsa dalam segala aspek kehidupan, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pertahanan keamanan, dan aspek kelestarian alam atau lingkungan hidup. Adapun mawas ke luar yaitu sinkronisasi hubungan bilateral antar bangsa dan hubungan multilateral dalam pergaulan internasional secara harmonis, bebas aktif, akan tetapi tetap dalam kerangka menjaga kepentingan nasional atau *The Main National Interest*. Hubungan timbal balik antara wawasan Nusantara dan ketahanan nasional menjadi dua unsur yang saling melengkapi antara kerangka berfikir, kajian akademis dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ketahanan nasional dapat difahami sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang harus dijaga kesinambungannya guna menjaga tetap tegaknya dan keutuhan serta semangat guna mencapai tujuan nasional. Salah satu bentuk implementatif dari wawasan Nusantara dan ketahanan nasional adalah kemandirian di bidang ekonomi, sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa generasi anak bangsa dituntut untuk mencari konsep dasar Ekonomi Pancasila yang bersumber dari jati diri bangsa Indonesia.¹³ Kecendrungan terhadap pemahaman ketahanan ekonomi pada era pasar bebas sungguh sangat mengkhawatirkan, hal ini disebabkan adanya pergeseran tata nilai dan akumulasi kepentingan antara negara maju dan negara sedang berkembang, akumulasi tersebut akan bermuara pada paham ekonomi masing-masing negara, sehingga harus dicari garis pendekat antara paham tersebut. Ada satu pertanyaan besar,

¹³ Budisantoso Suryosumarto, *Ketahanan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001), 4.

mungkinkah faham ekonomi kapitalis akan dapat memakmurkan dan mensejahterakan bangsa Indonesia? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut harus dicari sumber dari mana konsep ekonomi kapitalis tersebut dilahirkan, kemudian akan timbul pertanyaan besar berikutnya, apakah akar budaya negara yang melahirkan ekonomi kapitalis bersesuaian atau ada semacam sinkronisasi budaya dengan akar budaya bangsa Indonesia?

Komitmen kebangsaan harus dibangun diatas pilar kerelaan berkorban demi bangsa dan negara, rasa cinta tanah air dan pengabdian yang tulus ikhlas demi membangun rasa kebangsaan tersebut serta pemahaman terhadap harga diri sebagai bangsa yang berdaulat. Bangsa adalah satu kesatuan komunitas manusia yang secara sadar merasa bahwa mereka adalah satu kesatuan pada proses sejarah yang sama dan memiliki tujuan yang sama sehingga terjadi proses timbal-balik kebangsaan yang pada puncaknya melahirkan segenap kesadaran kebangsaan Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan merupakan peristiwa sejarah dan sekaligus sebagai momentum penting bagi bangsa Indonesia yang telah mendeklarasikan rasa kebangsaannya kepada seluruh dunia. Perkembangan dan perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah menempatkan pada posisi pergaulan internasional yang setingkat dan sederajat dengan bangsa lain, maka tidak berlebihan bila dalam pembangunan ekonomi masa depan bangsa Indonesia mencari nilai-nilai luhur bangsa sebagai warisan nasional budaya bangsa, akumulasi dari warisan budaya tersebut akan diformulasikan menjadi sebuah konsep pembangunan ekonomi yaitu Ekonomi Pancasila. Maksud pencarian tata nilai dan budaya tersebut didasarkan pada semangat cinta tanah air dan keyakinan bahwa hanya

dengan tata nilai dan budaya sendiri pembangunan ekonomi akan dapat berjalan dengan baik sesuai cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Founding Fathers atau pendiri bangsa Indonesia sangat sadar bahwa hanya dengan nasionalisme kebangsaan dan toleransi keberagaman yang mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari menuju masyarakat yang adil dan makmur, yang pada akhirnya akan memperoleh kesadaran bahwa nasionalisme dan demokrasi Pancasila akan menjadi landasan perjuangan di masa mendatang pada kondisi apapun, untuk itu peningkatan kualitas kehidupan kebangsaan dan pelaksanaan kehidupan politik yang demokrasi akan menjadi ukuran keberhasilan suatu pemerintahan dan sekaligus sebagai ukuran keberhasilan dalam menata peradaban bangsa. Transformasi budaya antar negara yang ditandai dengan hadirnya perusahaan-perusahaan multinasional yang menciptakan para pelaku ekonomi skala besar, yaitu para konglomerat, sehingga menciptakan kantung-kantung ekonomi yang eksklusif atau *Enclaf* yang sebagian besar manfaatnya tidak dinikmati oleh masyarakat, bahkan dalam kenyataannya menghambat usaha transformasi secara struktural yang dibutuhkan oleh suatu negara dalam membangun potensi ekonominya, dan pada sudut pandang yang berbeda pembangunan ekonomi suatu negara diarahkan menuju suatu bentuk perekonomian yang lebih ter-diversifikasi secara merata sehingga tercipta kemandirian dalam pembangunan ekonomi kebangsaan.¹⁴

¹⁴ Didalam kenyataannya operasional perusahaan multinasional tidak lagi bisa difahami hanya dengan menggunakan perangkat teori perdagangan secara

Pancasila adalah Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Keempat, merupakan *consensus* bersama bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan hasil jerih payah dan kerja keras para pendiri bangsa Indonesia dengan harapan melalui penghayatan dan pengamalan Pancasila, bangsa Indonesia dapat mencapai tujuan nasionalnya. Melalui pemahaman Pancasila dengan baik maka bangsa Indonesia akan terhindar dari perpecahan bangsa, kerusuhan sosial dan bentrokkan massa, bahkan akan terhindar dari dis-integrasi bangsa. Demokrasi Pancasila mengakui dan menghormati perbedaan, bahkan lebih jauh dari itu pemahaman perbedaan diakui sebagai pengkayaan budaya, ke-aneka ragamannya diakui sebagai keindahan dan kebesaran suatu bangsa, serta Pancasila mampu bertindak sebagai wahana dan forum bagi semua golongan dan aliran yang berbeda-beda dan telah berkembang dengan baik di tengah-tengah masyarakat Indonesia dengan prinsip penghormatan antar golongan masyarakat yang berbeda tersebut. Untuk itu segenap anak bangsa sejak dari awal usia dini di bangku Sekolah Dasar harus mengetahui, memahami dan mengamalkan Pancasila secara baik. Sehingga diperlukan pemahaman Pancasila secara dinamis mengikuti perkembangan nilai-nilai universal seperti halnya konsep Hak Asasi Manusia, konsep tentang lingkungan hidup

sederhana, terutama bila dikaitkan dengan distribusi keuntungan, perusahaan raksasa seperti IBM, FORD, Exxon, Philips, Sony, Hitachi, British Petroleum, Volks Wagen, dan Coca-Cola, telah mendunia dalam proses produksinya sehingga kalkulasi atas distribusi keuntungan yang dihasilkan dari produksi internasional tersebut antara penduduk setempat dan pihak asing menjadi semakin sulit dilakukan. Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta : penerbit Erlangga, 2004), 35.

dan isu tentang terorisme sebagai konsekuensi logis dalam pergaulan internasional pada Era Globalisasi. Dinamisasi pemahaman terhadap Pancasila akan menempatkan dirinya sebagai ideologi yang hidup dan berkembang sesuai tuntutan zamannya dengan tidak meninggalkan kandungan nilai-nilai dan norma yang terkandung didalamnya. Pemahaman Pancasila secara universal akan menghadirkan semangat ketangguhan sosial yang memungkinkan berinteraksinya semua lapisan masyarakat secara baik. Ketangguhan sosial tersebut akan berdampak positif untuk memungkinkan suatu bangsa menyesuaikan diri dengan perubahan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan identitas budayanya, ketangguhan sosial memungkinkan masyarakat bertambah kepercayaannya terhadap suatu sistem kenegaraan yang dipilihnya sehingga tercipta nasionalisme sejati.¹⁵ Sehingga pemahaman dinamis terhadap Pancasila tersebut secara tidak langsung menjawab tantangan dan kritikan yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan sebuah wawasan politik yang normatif dan tidak mampu menjangkau persoalan-persoalan ekonomi, permasalahan sosial, memberantas kemiskinan bahkan mampu menjadi jiwa dari setiap solusi dari permasalahan bangsa Indonesia. Dengan demikian menjadi sangat *urgent* akan hadirnya konsep Ekonomi Pancasila guna membuktikan kehandalan konsep yang implementatif dan mampu membawa negara dan bangsa Indonesia menuju cita-cita nasional.

¹⁵ Pemikiran Soejatmoko telah menempatkan konsep kemanusiaan periode nasionalisme adalah kemanusiaan Indonesia yang lebih banyak dikaitkan dengan politik, pandangan tentang konstitusi negara, manusia dan revolusi serta konfigurasi politik nasional dengan mengedepankan tiga pilar posisi ideologis yang diajukan pada sidang konstituante; Pancasila, Islam dan Sosial - Ekonomi . Siswanto Masruri, *Humanitarianisme Soejatmoko*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), 61.

Setiap Negara di dunia ini mempunyai nilai-nilai budaya yang berakar dari perjalanan sejarah bangsa itu sendiri yang sesuai dengan karakter bangsanya, demikian juga bangsa Indonesia, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia harus digali dan dikembangkan sesuai dengan kondisi kontemporer dalam pergaulan internasional, akan tetapi hubungan timbal balik antar negara tidak boleh menggeser atau merubah nilai-nilai budaya bangsa. Dasar argumen yang dibangun adalah “amat tidak mungkin bangsa Indonesia yang besar ini dijalankan dengan menggunakan parameter nilai-nilai bangsa lain”, meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat nilai-nilai yang bersifat universal. Pergeseran budaya dalam tata krama pergaulan internasional terkadang menempatkan para pemimpin bangsa untuk mengambil keputusan yang cenderung merugikan atau paling tidak kurang berpihak pada rakyat Indonesia sendiri dan lebih berpihak pada kepentingan para investor dari luar negeri dengan satu alasan yaitu : ramah dengan pasar. Kenyataan inilah yang sering menjadi penyebab timbulnya ketimpangan kebijakan pangan, ketimpangan kebijakan pertambangan, ketimpangan kebijakan moneter, ketimpangan kebijakan fiskal dan ketimpangan-ketimpangan kebijakan yang lain, kemudian akan timbul satu pertanyaan besar, pantaskah rakyat Indonesia hidup dalam kondisi keterbatasan atau dalam istilah lain kemiskinan, sementara sumber daya alam melimpah yang disediakan oleh Allah SWT pada bangsa Indonesia?¹⁶

¹⁶ Amerika Serikat sebagai Negara Super Power tunggal, bersama dengan Inggris dan Perancis dapat membuat keputusan-keputusan penting dalam bidang politik dan keamanan dunia, serta bersama dengan Jepang dan Jerman dalam persoalan ekonomi. Barat adalah satu-satunya peradaban di dunia yang memiliki kepentingan langsung dan tak langsung dalam tata pergaulan internasional, serta kepentingan substansial di berbagai peradaban atau wilayah-wilayah lain dengan

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa dan meningkatkan daya saing dalam pergaulan internasional adalah mengelola negara secara baik dan benar terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan atau *Running Government* dan penggunaan kekuasaan atau *Exercising Power* serta pengelolaan sumber daya secara baik atau *Good Governance*. Pada posisi ini peran pemerintah sebagai penyelenggara negara menjadi sangat penting dan dominan, akan tetapi didalam pelaksanaannya harus dibantu oleh segenap komponen bangsa lainnya sehingga tercipta efektifitas dan efisisensi secara berkelanjutan.¹⁷

Transformasi budaya lokal yang berinteraksi dengan budaya global akan melahirkan sentuhan budaya baru yang mengalami beberapa perubahan mendasar, hal ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan tata nilai suatu bangsa, akan tetapi amat disayangkan bila dalam implemetasinya sentuhan antar budaya tersebut melahirkan dominasi suatu budaya bangsa yang satu kepada budaya bangsa yang lain sehingga terjadi pemaksaan nilai-nilai dan tata krama nasional atau dengan kata lain penjajahan budaya. Dalam perkembangan selanjutnya budaya suatu bangsa dapat dikatakan mengalami perubahan apabila :

pengaruhnya yang besar di bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Akan tetapi pada sisi yang berbeda, ia adalah sebuah peradaban yang sedang mengalami kemerosotan, baik di bidang politik, ekonomi maupun militer. Kemenangan Barat dalam perang dingin telah melahirkan kejayaan, namun menguras banyak energi dan dihadapkan pada banyak persoalan internal yaitu : pertumbuhan ekonomi yang lamban, populasi yang stagnan, pengangguran, defisit negara yang besar, kemerosotan etika kerja, dan meningkatnya jumlah penyalahgunaan obat-obat terlarang. Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban*, (Yogyakarta : CV Qalam, 2002), 129.

¹⁷ Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 117.

1. Sentuhan budaya antar bangsa dalam pergaulan internasional berlangsung secara terus-menerus pada segala aspek kehidupan dengan diikuti dialog secara langsung dan tak langsung dalam kehidupan sehari-hari sehingga menghasilkan tata perilaku baru dan norma-norma kehidupan yang tidak menyimpang dari budaya dasar bangsa tersebut.
2. Akumulasi nilai yang berkembang sebagai kelanjutan dari proses pembentukan tata nilai baru melalui proses yang alami sehingga dalam kehidupan bermasyarakat tercipta kondisi saling pengertian dalam perbedaan.
3. Budaya yang berkembang, nilai-nilai dan tata krama tumbuh dan berkembang pada paradigma baru akan tetapi dengan tidak merubah nilai-nilai budaya dasar bangsa sebagai identitas nasional.
4. Sinkronisasi budaya yang tercermin dalam komitmen bersama dalam rangka mengembangkan budaya baru mampu mengintegrasikan semua unsur dan kepentingan masyarakat suatu bangsa.
5. Perilaku dan norma-norma dari kesepakatan budaya baru telah tersebar luas di semua lini organisasi kelembagaan yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik secara baik, terukur dan berkesinambungan.
6. Perangkat kebijakan organisasi kelembagaan telah berkembang sedemikian rupa sehingga mampu memberikan landasan proporsional guna memberikan suasana lingkungan yang harmonis budaya baru.

7. Tercipta standar kompetensi baru yang menunjang tumbuh-kembangnya tata nilai budaya baru sehingga tercipta stabilitas budaya yang harmonis.¹⁸

Negara adalah sebuah lembaga purba manusia yang telah ada sekitar 10.000 tahun yang lampau sejak masyarakat pertanian pertama muncul di Mesopotamia.¹⁹ Max Weber (1946) mendefinisikan Negara sebagai kesatuan atau komunitas manusia yang dengan sendirinya mengklaim atas suatu wilayah tertentu dan dapat menggunakan alat pemaksaan kekuatan fisik dalam rangka penegakkan aturan dan mekanisme kenegaraan yang telah ditetapkan. Dengan demikian cakupan hak dan kewenangan negara pada aktivitasnya mempunyai kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan, penegakan hukum dan kegiatan perekonomian secara berkelanjutan. Akan tetapi permasalahan yang sering terjadi adalah kemampuan kelembagaan negara yang dalam implementasinya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Peran Kepemimpinan.

Figur seorang pemimpin pada suatu negara menjadi preposisi sangat penting dan strategis, hal ini disebabkan karena posisi pemimpin negara berada pada garis sepadan pada jajaran eksekutif, legislatif dan yudikatif, peran tersebut akan mampu menjadi pendulum pada tata kehidupan masyarakat, kolektifitas pertumbuhan ekonomi

¹⁸ A.B. Susanto dkk, *Corporate Culture, Organization Culture*, (Jakarta : Divisi Penerbitan The Jakarta Consulting Group, 2008), 162.

¹⁹ Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 1.

nyata yang diikuti dengan tata kelola sumber daya yang ramah lingkungan, kepastian hukum dan kemampuan untuk memposisikan pada pergaulan internasional. Pada kerangka berfikir atau *Framework* peran seorang pemimpin harus mampu menjadi sumber inspirasi bangsa dalam mencari setiap solusi dari suatu dinamika masalah bangsa, hal yang paling mendasar adalah ancaman dis-integrasi bangsa, pecahnya budaya bangsa dan aliran-aliran agama, berkembangnya paham sektoral kesukuan dan krisis ekonomi yang memakan segala potensi bangsa serta ancaman dari rapuhnya sistem pertahanan. Pada posisi ini penting untuk dikaji tentang integritas seorang pemimpin yang merupakan hasil dari proses panjang sistem kepartaian dan merupakan hasil dari pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan Umum yang jujur dan adil sebagai cerminan dari aspirasi masyarakat dalam wilayah hukum kedaulatan negara. Akan tetapi pada sudut pandang yang berbeda peran seorang pemimpin suatu negara harus dapat dikontrol secara kelembagaan dan diawasi langsung oleh pemegang kedaulatan yaitu rakyat, hal tersebut sangat penting guna membatasi kemungkinan terjadinya pemimpin yang otoriter dengan kekuasaan absolute. Pada banyak negara terkadang fungsi kontrol tersebut melahirkan kerugian besar sebagai ongkos sosial pada saat terjadinya benturan kepentingan antara aspirasi masyarakat dengan gaya kepemimpinan seorang diktator yang mempertahankan kekuasaannya, sehingga fungsi kontrol tersebut harus dirumuskan secara bersama antar komponen bangsa secara arif dan bijaksana, baik fungsi kontrol secara kelembagaan atau fungsi kontrol masyarakat

secara langsung melalui media apapun. Akumulasi dari fungsi kepemimpinan tersebut bermuara pada kegiatan ekonomi suatu bangsa dan daya saing internasional melalui pendekatan kebijakan-kebijakan yang dapat mengakumulasi berbagai kepentingan, baik kepentingan nasional, regional dan kepentingan internasional.²⁰

2. Organisasi dan Manajemen.

Pendekatan yang dilakukan pada bidang organisasi dan manajemen adalah memandang suatu bangsa sebagai suatu perusahaan yang sedang beroperasi dalam kegiatan rutinitas dan dalam kegiatan persaingan antar bangsa di dunia, sehingga pandangan dan cara berfikir dalam membangun bangsa selalu berorientasi pada dasar pemikiran bahwa pembangunan suatu bangsa adalah proses berkelanjutan yang secara konsisten mempertimbangkan pemikiran kemana bangsa ini diarahkan untuk mencapai tujuan nasionalnya, dan dengan cara bagaimana, serta selalu mempertimbangkan tingkat risiko yang kemungkinan akan terjadi. Akumulasi dari pemikiran organisasi dan manajemen ini juga selalu mempertimbangkan kondisi masyarakat secara umum, tuntutan dunia usaha dan realitas dari pergaulan internasional, akan tetapi muara dari kesemuanya itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata serta berkesinambungan, sehingga keberhasilan pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan proses kerja keras segenap komponen bangsa dalam waktu yang cukup lama.

²⁰ Philip Kotler, *Pemasaran Keunggulan Bangsa (The Marketing of Nation)*, (Jakarta : PT. Prenhallindo, 1998), 183.

Pembangunan aspek organisasi dan manajemen harus berorientasi pada pembaharuan atau reformasi yang bersifat membangun dengan tanpa merusak struktur yang sudah terbangun secara baik sejak awal berdirinya suatu bangsa atau dengan istilah *To Change Without Destroying*, dasar pemikiran pembangunan aspek organisasi dan manajemen tersebut disandarkan pada tiga pilar utama; *Pertama*, restrukturisasi dalam pengertian merubah struktur organisasi yang sudah memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan lingkungan strategis, dengan harapan terjadi efisiensi kelembagaan, penajaman atau fokus kebijakan publik yang searah dengan tuntutan pembangunan nasional, serta re-orientasi pada implementasi program guna tercapainya tujuan organisasi secara cepat dan tepat; *Kedua*, revitalisasi dalam pengertian memberikan tambahan daya dan semangat untuk mencapai tujuan meskipun dalam pelaksanaannya banyak ditemui hambatan, sehingga uraian tugas, alokasi anggaran dan pembagian hak dan kewajiban pada unit-unit organisasi mengalami peningkatan optimum serta perumusan kembali pada unit pendukung; *Ketiga*, re-fungsionalisasi dalam pengertian untuk mempertajam tingkat profesionalisme setiap unsur organisasi, dengan harapan agar setiap unit organisasi mampu diberdayakan secara optimum di setiap lembaga organisasi dengan didukung oleh kemampuan manajemen yang handal.

Bidang organisasi dan manajemen sangat dekat dengan kemampuan kelembagaan pemerintah dalam usaha untuk menjaga ketahanan ekonomi secara baik, artinya kemampuan perekonomian

yang berkeadilan untuk pemerataan dan perekonomian yang tumbuh dan berkembang serta mampu bersaing pada tataran hubungan internasional, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan menyeluruh atau merata yang berkeadilan, guna mewujudkan kondisi diatas maka Indonesia dihadapkan pada dua kondisi yang harus segera dicari solusinya; *Pertama*, persaingan industri global yang telah memosisikan diri sebagai fenomena dan kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh negara manapun di dunia saat ini, sehingga menuntut adanya peningkatan daya saing atau *Competitiveness* terhadap semua produk ekspor; *Kedua*, permasalahan yang berkaitan dengan praktik otonomi daerah yang hingga saat ini banyak menimbulkan multi tafsir terhadap kandungan makna filosofis otonomi daerah, sehingga banyak menimbulkan penyimpangan dan semangat kedaerahan. Dengan demikian diperlukan upaya komprehensif untuk mengantisipasi terhadap kedua hal tersebut, sehingga mampu meniadakan atau paling tidak meminimise dampak negatif yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Pada sisi yang berbeda ketahanan ekonomi Indonesia masih mengalami beberapa kendala; *Pertama*, jumlah angka kemiskinan yang relatif masih besar, menurut data BPS Maret 2008, masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan 34,96 juta jiwa atau 15,4%, padahal menurut data di lapangan ada kemungkinan data tersebut mengalami peningkatan hingga dua kali lipat pada saat ini; *Kedua*, kendala pada penyiapan lapangan pekerjaan yang bersaing dengan pertumbuhan penduduk, berdasarkan data bulan Februari tahun 2008 angka pengangguran mencapai 8,46 % dari jumlah

penduduk produktif dan masih terbuka kemungkinan angka pengangguran tersebut menjadi dua kali lipat saat ini, melebarnya angka kemiskinan dan meningkatnya angka pengangguran banyak disebabkan faktor pendidikan, kualitas sumber daya manusia dan stratifikasi kemampuan yang tidak seimbang dengan kebutuhan kemampuan yang dipersyaratkan oleh perusahaan; *Ketiga*, lemahnya tingkat koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan LSM sehingga terjadi dis-orientasi perencanaan pembangunan daerah yang berakibat pada lemahnya pemerataan dan pertumbuhan hasil pembangunan serta dapat berakibat pada timbulnya rasa ketidakadilan ekonomi di kalangan masyarakat pedesaan yang dapat memudahkan timbulnya gejolak sosial. Kondisi tersebut harus segera dicarikan jalan keluarnya karena sangat berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi bangsa Indonesia yang dapat menimbulkan *Multiplier Effect* dan *Leverage Effect*.²¹

3. Sistem Politik.

Pokok bahasan pada bidang sistem politik mempunyai cakupan yang sangat luas dan mempunyai kaitan erat dengan perkembangan dan kajian ilmu politik yang berfokus pada bentuk lembaga-lembaga

²¹ *Leverage* atau *Capital Gearing* dapat diartikan sebagai pengungkit modal, artinya proporsi dari modal pinjaman berbunga tetap pada modal saham atau *Share Capital* suatu perusahaan, apabila hampir semua modal perusahaan bersumber dari saham-saham yang diterbitkan dan sebageaian kecil saja yang berasal dari pinjaman bunga tetap, maka perusahaan tersebut mempunyai pengungkit modal yang rendah, apabila hampir semua modal perusahaan berasal dari pinjaman berbunga tetap dan hanya menggunakan sebagian dari saham yang diterbitkan, maka perusahaan tersebut mempunyai daya ungit modal yang tinggi. Collin, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta :Erlangga,1988), 67.

politik dan hukum, bentuk kelembagaan tersebut yang berkaitan erat dengan tata kelola suatu negara dan kebutuhan masyarakat yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Teori yang berkembang tentang sistem politik saat ini meliputi; *Pertama*, tentang kompromi antara beragam tujuan bentuk politik seperti *Re-presentativeness* atau keterwakilan; *Kedua*, tentang *Governability* atau tingkat bisa tidaknya pemerintah dijalankan secara efektif; *Ketiga*, tentang kesatuan tujuan dan perimbangan kekuasaan atau *Checks and Balance*; *Keempat*, tentang kekuasaan yang tersebar dan terpusat atau terdistribusi secara baik; *Kelima*, tentang interaksi kelembagaan dengan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa bila dikaitkan dengan tingkat efektifitasnya; *Keenam*, tentang lembaga-lembaga pelengkap yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengantisipasi persaingan pasar global; *Ketujuh*, tentang lembaga pengontrol anggaran yang berhubungan tingkat alokasi dana anggaran, efektifitas anggaran dan mengontrol defisit anggaran belanja negara.

Pemahaman tentang sistem politik tersebut bertujuan untuk memposisikan diri dalam upaya lebih memantapkan semangat kebangsaan dan memperkuat komitmen masyarakat dalam menjawab setiap perkembangan lingkungan strategis baik pada skala nasional, regional maupun pada skala global. Sehingga pendidikan politik menjadi suatu yang sangat penting terutama bila dikaitkan dengan upaya membangun budaya politik yang berakar pada semangat persatuan dan kesatuan bangsa, semangat demokrasi dan pembaharuan sistem politik yang mampu mengakomodasikan setiap aspirasi politik

masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang. Pendidikan politik dimaksudkan sebagai akumulasi usaha yang secara sadar untuk melakukan sosialisasi dan edukasi nilai-nilai dan norma serta budaya politik berdasarkan ideologi negara.

Pada perkembangan kehidupan bernegara selanjutnya dikenal adanya Globalisasi Politik yang mengedepan proses akumulasi antara kehidupan demokrasi yang ditandai dengan kebebasan berekspresi dan pada sisi yang lain adanya tuntutan eksistensi kelembagaan pemerintahan, akan tetapi apabila secara jernih dilihat berpusar pada satu tujuan yaitu keadilan sosial dalam kehidupan dan kesejahteraan yang merata pada semua aspek kehidupan masyarakat, globalisasi politik yang mengandung berbagai muatan kepentingan dengan skala yang berbeda antar unsur masyarakat haruslah difahami sebagai suatu yang alami dan kewajaran dalam perjalanan sejarah kebangsaan, akan tetapi yang harus diwaspadai adalah jangan sampai pemahaman globalisasi politik yang berwujud bentuk reformasi keluar dari koridor rasa persatuan dan kesatuan yang dapat memporak-porandakan tata nilai dan norma berbangsa dan bernegara sehingga berdampak dis-integrasi bangsa, globalisasi politik yang berorientasi pada pemahaman baru demokrasi yang harus ditanggapi sebagai koreksi efektif untuk kemajuan kehidupan politik kebangsaan yang bebas dari KKN, sehingga pada akhirnya akan terbukti bahwa implementasi konsep demokrasi Pancasila akan mampu membawa bangsa Indonesia menuju kejayaan bangsa dalam pergaulan internasional.

4. Aspek Budaya dan Struktural.

Fenomena yang sangat krusial berada pada pokok bahasan bahwa kemampuan kelembagaan suatu negara banyak dipengaruhi oleh budaya dan norma dasar dari kehidupan masyarakat setempat, pemikiran ini sangat logis karena interaksi masyarakat secara struktural akan berdampak langsung pada kondisi kelembagaan tersebut, kajian dan analisis secara komprehensif lebih lanjut akan menghasilkan kejelasan bahwa pembangunan lembaga formal suatu negara akan banyak dipengaruhi oleh faktor budaya. Untuk melihat lebih jauh tentang kemampuan kelembagaan akan dipengaruhi oleh empat unsur; *Pertama*, bentuk dan manajemen organisasi kelembagaan pada bidang disiplin manajemen, kebijakan dan administrasi publik dan ilmu ekonomi; *Kedua*, bentuk kelembagaan yang meliputi bidang disiplin ilmu politik, pembangunan ekonomi, dan kepastian hukum; *Ketiga*, basis legitimasi meliputi bidang disiplin ilmu politik dan perkembangan pranata kemasyarakatan; *Keempat*, faktor sosial dan budaya yang meliputi bidang disiplin sosiologi dan antropologi suatu bangsa.

5. Aspek Kebijakan Publik.

Secara umum pokok pembahasan tentang pelayanan publik yang meliputi bentuk organisasi pada bidang administrasi negara dapat dikatakan lebih merupakan suatu seni sehingga tingkat fleksibilitasnya cukup besar, dengan demikian kelenturan dari tata kelola kebijakan publik merupakan ciri dari pelayanan yang selalu berorientasi pada tujuan dan bukan berorientasi pada cara pengelolaan kebijakan. Untuk itu segenap pengambil keputusan harus secara cerdas untuk

menerjemah kebutuhan masyarakat menjadi suatu program kegiatan yang secara empiris mampu menerjemahkan keinginan dan harapan publik. Implikasi kebijakan publik secara mendasar harus dapat didifinisikan secara baik guna meminimise kemungkinan dampak negatif yang secara simultan dapat menyebabkan kontra produktif. Penguatan struktur kelembagaan negara menjadi suatu hal yang sangat dominan terutama bila dikaitkan pada keinginan dan program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan optimal bagi masyarakat, sehingga keberagaman dan kompleksitas permasalahan kebijakan publik bermuara pada *Delegated Discretion* atau pendelegasian wewenang dalam konteks pengambilan keputusan, meskipun pada pengertian teori organisasi menempatkan efisiensi komunikasi kelembagaan sebagai proses pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan, sehingga fungsi kontrol dan pengawasan serta proses pendampingan program kegiatan harus ditata secara baik dan berkesinambungan terutama sekali bila dikaitkan pada kebijakan otonomi daerah, dengan demikian akan terjadi efektifitas dan sinkronisasi persepsi tujuan organisasi kelembagaan tersebut.

Ada dua pandangan besar yang berkembang dikalangan pengambil keputusan ekonomi, *Pandangan Pertama*; dengan menitik beratkan pada usaha memperbesar bagian atau porsi hasil pembangunan atau kue hasil pembangunan atau apapun namanya, dengan penguasaan sumber daya pada pihak tertentu yaitu para konglomerat, kemudian kue hasil pembangunan tersebut dibagikan kepada semua masyarakat melalui program pemerataan pembangunan, argumentasi ini dibangun atas

landasan berfikir bahwa hanya dengan memperbesar kue hasil pembangunan itulah maka hasil pembangunan dapat dibagi, atau dengan kata lain tidak mungkin kue pembangunan dapat dibagi kalau kue pembangunan itu porsinya kecil dan terbatas. Argumentasi ini telah dipatahkan oleh kenyataan terjadinya krisis ekonomi pada medio 1998 yang memaksa lengsernya Presiden Soeharto, dimana pada saat itu kondisi makro ekonomi Indonesia yang disanggah oleh para konglemerat tidak mampu menahan badai krisis ekonomi, bahkan kenyataannya para konglemerat mayoritas melarikan potensi dananya di luar negeri sampai mencapai 80%, berdasarkan pengalaman tersebut diatas maka akan timbul pertanyaan, apakah kita akan membiarkan diri masuk dalam lubang yang sama? Peristiwa paradok yang terjadi di tengah masyarakat pada saat krisis ekonomi 1998 pelaku ekonomi yang tetap bertahan di sektor koperasi dan pengusaha kecil. Lalu kemanakah larinya kedigdayaan para konglomerat?²² *Pandangan Kedua*; adalah menitik beratkan pada usaha pemerataan ekonomi dari sektor hulu dan hilir secara paralel sehingga pada awal konsep pembangunan ekonomi ditata dari awal dengan melibatkan potensi masyarakat pada umumnya, konsep ini mengedepankan aspek pemerataan kue pembangunan, pandangan tersebut mengemuka sebagai koreksi atas strategi pembangunan masa orde baru, dan merupakan bentuk tuntutan reformasi di segala bidang tahun 1998 yang dimotori oleh segenap mahasiswa seluruh Indonesia, yang kemudian diikuti dengan konsep otonomi daerah dan melahirkan Undang-Undang Otonomi Daerah tahun

²² Kwik Kian Gie, *Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), 24.

1999 yaitu : Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Pandangan konsep ekonomi kearkyatan atau ekonomi rakyat²³ yang pada masa Presiden Soekarno dengan istilah MARHAEN atau apapun namanya, yang jelas konsep tersebut mengedepankan kepentingan rakyat secara mayoritas miskin dan terpinggirkan, serta sangat terbatas dalam menikmati kue hasil pembangunan, dengan demikian konsep yang dibangun pada pemikiran Ekonomi Pancasila berorientasi pada perjuangan ekonomi rakyat guna mengentaskan kemiskinan, terbukanya lapangan pekerjaan, jaminan sosial dan kesehatan serta terbukanya akses pendidikan sehingga dengan sendirinya cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat terwujud.²⁴

²³ Pada bulan Agustus 1930 Bung Karno melakukan pembelaan di Landraad Bandung menulis bahwa ekonomi rakyat oleh sistem monopoli disempitkan, sama sekali didesak dan dipadamkan. (Soekarno, *Indonesia Menggugat*, 1930), 31.

²⁴ Gambaran umum sistem Ekonomi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau untuk pemilikan anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang. Bumi dan air

Kemudian akan timbul satu pertanyaan, apakah dengan terwujudnya ekonomi rakyat sebagai dasar dari Ekonomi Pancasila terwujud dan rakyat memperoleh kemakmuran semesta lalu pola dan sistem Ekonomi Pancasila dapat ditinggalkan?, maka jawabnya “tidak”, tugas selanjutnya adalah bagaimana cara mempertahankan keutuhan dan perbaikan konsep guna menyongsong perubahan sistem ekonomi global, hal ini berangkat dari kesadaran bahwa tidak ada pelaku ekonomi di dunia ini yang dapat berjalan dengan sendirinya tanpa berintegrasi dan bersosialisasi dengan sistem ekonomi secara internasional, sehingga pada akhirnya pembangunan sistem Ekonomi Pancasila mempunyai implikasi pada perubahan struktur ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik dan budaya.²⁵

Globalisasi dapat dimaknai sebagai kondisi interaksi antar masyarakat dunia dalam berbagai aspek kehidupan, tanda-tanda yang paling dominan pada era globalisasi adalah; *Pertama*, percepatan penyebaran arus informasi secara global atau mendunia sehingga memungkinkan terbukanya informasi yang dulunya tertutup akan menjadi transparan, dan yang dulunya transparan sekarang menjadi terbuka, apalagi dengan didukung oleh kondisi terbukanya akses masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut dengan harga atau biaya yang relatif murah bahkan gratis,

dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (dan sungguh sangat disayangkan, salah satu dampak dari tuntutan reformasi diterjemahkan oleh MPR untuk menghapus atau menghilangkan penjelasan tentang demokrasi ekonomi UUD 1945 dengan alasan yang sederhana bahwa di negara-negara lain tidak ada UUD atau konstitusi yang memakai penjelasan.

²⁵ Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta, PT. Gamedia Pustaka Utama, 2004), 130.

sehingga terbentuk kristalisasi opini publik yang harus diantisipasi terhadap kemungkinan kecenderungannya, dengan harapan agar kondisi tersebut bermuara pada perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara; *Kedua*, perkembangan secara cepat ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi yang mendorong kondisi dunia tanpa batas, akan tetapi yang harus diwaspadai terhadap perkembangan teknologi tersebut adalah perkembangan teknologi persenjataan militer dan teknologi sabotase yang digunakan untuk maksud-maksud negatif. Karena semakin tinggi teknologi kejahatan maka semakin tinggi pula akibat negatif yang ditimbulkannya; *Ketiga*, persaingan pasar bebas yang tidak melihat skala kemampuan antar pesaing, segmentasi pasar dan tidak melihat tingkat pencemaran lingkungan alami dan pencemaran ideologi serta pencemaran budaya suatu bangsa sebagai akibat persaingan pada pasar bebas oleh pelaku ekonomi besar yang berskala internasional yang mengesampingkan segala dampak yang ditimbulkannya; *Keempat*, terjadinya pergeseran kepentingan dan pergeseran *mind set* kelembagaan negara sejak berakhirnya perang dingin yang memposisikan Amerika sebagai negara super power tunggal tanpa pesaing, terjadinya krisis ekonomi pada medio 1997 dan semangat reformasi dalam negeri yang menuntut pola pemerintahan yang desentralistik yang menghasilkan Undang-Undang Otonomi Daerah, sehingga memicu semangat kedaerahan yang memungkinkan berdampak negatif pada rasa persatuan dan kesatuan serta nasionalisme. Akan tetapi pada sudut pandang yang berbeda globalisasi akan membuka peluang pasar baru bagi negara yang sedang berkembang dan mengurangi rasa terisolasi yang banyak dirasakan oleh negara-negara yang sedang berkembang,

sehingga terbuka semua akses ekonomi di berbagai aspek kehidupan masyarakat dunia.²⁶

Distribusi pendapatan serta konsep perimbangan tata kelola keuangan tidak merata antar-wilayah sehingga membuka lebar koridor kesenjangan sosial.²⁷ Distribusi sumber daya yang tidak merata tersebut sebagai akibat dari lemahnya bidang perencanaan dan tanggung jawab sosial bersama, sehingga diperlukan upaya bersama yang secara serentak dapat membangun kesadaran kolektif untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara (bukan yang terbaik bagi dirinya sendiri dan kelompoknya melalui korupsi), fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya kecenderungan para pelaku usaha dan para pengambil keputusan secara bersama melakukan sinkronisasi pelemahan potensi masyarakat untuk berbuat nyata dan berpartisipasi dalam usaha pembangunan bangsa dan negara, hal ini

²⁶ Globalisasi dari sisi positif telah mendorong terbukanya jalan perdagangan internasional sehingga banyak membantu perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi negara yang bertumpu pada ekspor dan banyak meningkatkan kesejahteraan negara di Asia, karena melalui globalisasi banyak orang hidup lebih sejahtera, terjaminnya fasilitas kesehatan sehingga menjadikan hidup lebih lama dan lebih terjamin kelangsungan hidupnya dari pada sebelumnya. Joseph E. Stiglitz, *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*, (Jakarta : PT. Ina Publikatama, 2003), 5. Dengan judul asli *Globalization and Discontents*, yang diterjemahkan oleh Ahmad Lukman.

²⁷ Berdasarkan informasi perbankan bahwa uang beredar di Jakarta lebih dari 70% atau hampir menyentuh angka 80%, dan hasil laporan dari semua kantor Bank Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan besar aliran dana dari daerah ke pusat, dan hal tersebut berlangsung cukup lama hingga saat ini. Tingkat penanaman kembali di daerah lebih rendah (dengan rasio pinjaman terhadap dana/LDR mencapai antara 30% hingga 40%) dari sumber dana yang dapat dimobilisasi, kondisi paradok juga terjadi pada tingkat yang lebih kecil (individual) labih dari 90% simpanan masyarakat yang berada di bank-bank hanya dimiliki oleh kurang dari 10% penabung. Burhanuddin Abdullah, *Menanti Kemakmuran Negeri* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 42.

sebagai akibat dari meningkatnya volume penyimpangan anggaran pemerintah yang berahir pada proses hukum di KPK. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memulai membangun kesadaran nasional secara bersama agar bangsa Indonesia mampu untuk mencapai cita-cita luhur bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, jawaban yang paling tepat adalah dimulai dari para pemimpinnya dengan metode pemberian contoh dan keteladanan hidup yang baik, lalu timbul pertanyaan berikutnya, pemimpin yang mana pada saat ini dapat dijadikan tauladan hidup bagi masyarakat?, inilah pertanyaan yang sangat sulit dijawab karena diantara masyarakat yang berbeda mempunyai parameter dan standar nilai yang berbeda, akan tetapi berbagai pendapat yang berbeda tersebut dapat disatukan pada tata nilai yang harus dibangun sebagai landasan perjuangan ekonomi bangsa adalah; *Pertama*, adanya niat baik untuk sumbangsih pada pembangunan bangsa dan negara; *Kedua*, tertanam jiwa cinta tanah air Indonesia yang kuat dan terpatri dalam diri sanubari; *Ketiga*, terdorong semangat tolong-menolong, semangat berbagi rasa dan semangat untuk bekerjasama; *Keempat*, mempunyai jiwa ketulusan dan keikhlasan tanpa pamrih dalam perjuangan tersebut.²⁸ Demikian juga pada pandangan pakar

²⁸ Diantara nilai-nilai tersebut telah tertuang dalam prinsip dasar koperasi yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang kemudian ditegaskan dalam pernyataan identitas koperasi secara internasional pada tahun 1995 adalah; 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengendalian anggota secara demokratis; 3. Partisipasi ekonomi anggota; 4. Otonomi dan kebebasan; 5. Pendidikan, pelatihan dan informasi; 6. Kerjasama antar koperasi; 7. Kepedulian terhadap komunitas (disunting dari pidato Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada acara peringatan Hari koperasi ke-62 tahun 2009 di Stadion Madya Sempala Samarinda, Kalimantan Timur). Dan pada kesempatan yang sama Presiden Republik Indonesia mengatakan beberapa harapannya yaitu; 1. Meningkatkan permodalan

ekonomi yang merumuskan 4 permasalahan pokok pembangunan ekonomi yaitu ; pertumbuhan, lapangan pekerjaan produktif, lalu lintas perdagangan dan pembayaran luar negeri, serta kestabilan dalam perkembangan harga.²⁹ Pengertian pertumbuhan dapat diimplementasikan secara nyata pada peningkatan produksi barang dan jasa di semua sektor serta terdistribusi secara baik di berbagai daerah, dengan harapan akan terjadi pemerataan sumber daya sehingga dapat menggerakkan ekonomi daerah, hal tersebut juga akan mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah, adapun sasaran yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan angka penyebaran hasil produksi barang dan jasa secara merata dan semakin luas sehingga tingkat ketersediaan barang dan jasa semakin banyak jumlahnya secara beraneka ragam dan semakin baik kualitasnya dan dengan harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat pedesaan secara luas, sehingga secara tidak langsung dapat difahami bahwa terjadi hubungan timbal baik antara

koperasi dengan skim kredit biasa, maupun dengan skim KUR yang pada dua tahun terakhir disiapkan dana oleh pemerintah hingga 34 Trilyun dan pada lima tahun mendatang mencapai angka 100 Trilyun; 2. Peningkatan peran Dekopin pada usaha ketahanan pangan, bukan hanya beras, tetapi juga gandum, kedelai, gula dan jenis-jenis pangan lainnya; 3. Merambah pada potensi baru yaitu dalam bidang energi, termasuk energi terbarukan, energi yang bersumber dari bio energi yang bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak; 4. Membangun usaha di bidang ekonomi kreatif, kerajinan batik serta usaha lain yang cocok untuk Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 5. Percepatan usaha koperasi dalam rangka upaya mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat; 6. Dibangunnya semboyan *Go Lokal* di tengah- tengah semboyan *Go Global*, dengan dasar pemikiran untuk menghidupkan ekonomi pedesaan, *Small but effective bussines* yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

²⁹ Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta : PT. Pustaka LP3ES, 1994), 65.

pembangunan ekonomi dengan kesempatan kerja produktif, disinilah letak pentingnya penyusunan perencanaan obyektif terhadap pembangunan karakter bangsa yang dilandasi oleh perencanaan prioritas pembangunan dengan memperhatikan potensi alam, potensi keterampilan masyarakat, tata nilai dan adat istiadat masyarakat serta perkembangan lingkungan strategis secara internasional. Kemudian akan timbul pertanyaan, akan dibawa kemanakah bahtera Nusantara ini?, dengan muatan lebih dari 200 Juta penduduk dan lebih dari 17.000 gugusan pulau kecil dan pulau besar, dengan segala potensi tambang dan pertanian serta potensi bahari yang belum tergali, rangkaian perencanaan tersebut merupakan akumulasi dari rencana pemberdayaan potensi alam dan potensi masyarakat Indonesia pada strategi pembangunan ekonomi yang berakarkan kerakyatan.³⁰

Faktor terpenting lainnya yang dapat dijadikan rujukan adalah pentingnya pemahaman bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan tingkat penyebaran penduduk yang tidak merata dan dengan luas laut diatas angka 60% dari luas daratan sehingga sangat diperlukan kerja keras untuk melakukan pemetaan potensi serta pemetaan kebutuhan masyarakat, hal yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan alat transportasi laut dan udara dengan segala prasarana pendukungnya guna mendukung lalu lintas ekonomi nasional dan lalu-lintas ekonomi

³⁰ Kajian dan analisis dari pembangunan ekonomi kerakyatan dalam pembangunan nasional adalah; *Pertama*, konsep pembangunan yang berakar pada kerakyatan artinya mengedepankan kepentingan rakyat banyak dengan melihat dua unsur penting; yaitu apa yang di perlukan rakyat? dan apa yang dimiliki rakyat?; *Kedua*, pemberdayaan potensi masyarakat sebagai sebuah strategi dalam menjalankan pembangunan yang berakarkan kerakyatan. Ginanjar Karta Sasmita, *Pembangunan untuk Rakyat*, (Jakarta : CIDES, 1996),133.

internasional, di lain pihak harus dipertimbangkan bahwa lalu-lintas ekonomi internasional sebagai bagian dari perkembangan ekonomi global mempunyai peran yang sangat penting pada negara sedang berkembang seperti Indonesia, dan dalam hubungan ini neraca perdagangan dan pembayaran luar negeri menunjukkan tingkat kedudukan negara dalam pergaulan dan hubungan bisnis secara internasional, sehingga faktor penting yang harus dipertimbangkan adalah tingkat fluktuasi harga barang dan jasa serta laju inflasi sebagaimana tercantum dalam indeks harga konsumen dan indeks harga perdagangan yang berlaku pada kehidupan rumah tangga keluarga dan kegiatan dunia usaha secara luas. Sebagai acuan orientasi perencanaan pembangunan ekonomi negara dapat dilakukan perbandingan bahwa diantara ciri pokok negara industri yang maju adalah : cukup tersedianya dengan baik kapasitas produksi yang sudah terpasang meliputi modal masyarakat berupa prasarana fisik yaitu; jaringan jalan antar-daerah, ketersediaan aliran listrik yang memadai guna mendukung sektor usaha skala kecil, menengah dan usaha besar, saluran irigasi yang sesuai dengan kontur tanah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sarana pelabuhan dengan segala macam perangkat pendukungnya, serta sarana komunikasi. Dan tak kalah pentingnya adalah faktor jaminan keselamatan dan keamanan dunia usaha serta kepastian hukum.

Dalam konsep pembangunan ekonomi sebuah negara secara umum tidak akan lepas dari pembahasan keamanan pangan (*food security*), sehingga diperlukan upaya khusus untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi, karena kerapuhan dan kekuatan suatu

negara akan banyak ditentukan oleh kepandaiannya dalam mengelola sumber daya pangan, manusia tidak dapat hidup tanpa pangan sehingga pangan merupakan syarat mutlak untuk hidup. Para ahli merumuskan bahwa unsur keamanan pangan meliputi dua hal; *Pertama*, ketersediaan pangan secara baik; dan *Kedua*, aksesibilitas masyarakat terhadap pangan tersebut, apabila salah satu unsur tersebut tidak tersedia secara baik maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai keamanan pangan yang baik, sehingga terdapat hubungan yang berbanding lurus antara ketersediaan pangan dengan pola distribusi yang menjamin akses masyarakat untuk memperoleh bahan pangan tersebut, ketersediaan pangan yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas dapat dilakukan melalui dua hal; *Pertama*, produksi dalam negeri dengan memanfaatkan segala potensi sendiri; *Kedua*, melalui mekanisme impor, mengambil langkah impor bahan pangan adalah langkah *emergency* yang dilakukan pemerintah dalam hal penyediaan pangan untuk memperkecil dampak dari *Food Gap*, akan tetapi kenyataan yang ada ketergantungan terhadap impor pangan tidak dapat dihindarkan terutama sejak keberhasilan swasembada pangan pada tahun 1984 dan menjadikan para pengambil kebijakan terlena, sehingga berakibat terjadinya distribusi pangan yang berasal dari impor secara berlebihan pada sentra produksi di daerah-daerah, sehingga cukup beralasan tentang adanya kekhawatiran akan ancaman keberdaulatan pangan Indonesia.³¹

³¹ Organisasi pangan dan pertanian sedunia (FAO) telah menetapkan ketentuan tentang kriteria ancaman ketahanan pangan suatu negara yang meliputi ; 1. Tingginya proporsi penduduk yang kekurangan pangan; 2. Tingginya proporsi kekurangan energi, protein dari rata-rata kebutuhan energi, protein yang

Apabila ditinjau dari kesuburan tanah dan luasnya area pertanian serta didukung oleh aliran sungai yang tersedia maka tidak terlalu berlebihan jika Indonesia nantinya akan menjadi salah satu negara terkemuka dalam memasok kebutuhan pangan dunia dari produk-produk pertanian tropis sehingga akan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui jerih payah dan usaha petani dengan satu syarat yaitu sinergisitas yang baik antara pemerintah, petani dan semua organisasi penggerak pertanian termasuk Dekopin dan HKTl, *The Economist* adalah salah satu majalah yang menerbitkan buku *World in Figures* atau Dunia dalam Angka edisi tahun 2003 yang menempatkan Indonesia sebagai negara terhormat pada bidang produk-produk pertanian tropis yaitu; Indonesia merupakan negara penghasil Biji-bijian terbesar nomor 6 dunia, penghasil Beras nomor 3 dunia setelah China dan India, penghasil Kopi terbesar nomor 4 dunia, penghasil Cokelat terbesar nomor nomor 3 dunia setelah Ghana dan Pantai Gading, penghasil Minyak Sawit nomor 2 di dunia setelah Malaysia dan sekarang menjadi nomor 1, penghasil Lada Putih terbesar di dunia, penghasil Lada Hitam nomor 3 di dunia, penghasil Cengkeh nomor 1 di dunia, penghasil Puli dari buah Pala terbesar di dunia, penghasil Karet alam nomor 2 di dunia

disyaratkan atau *Food Gap*; 3. Besarnya indeks Gini dari *Food Gap* konsumsi energi, protein; 4. Besarnya koefisien variasi konsumsi, energi. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah setiap negara harus belomba untuk melindungi para petaninya guna menjamin ketersediaan pangan warga negaranya, Uni Eropa (UE) mengalokasikan total subsidi rata-rata 40 Miliar Dollar AS per tahun, sedangkan Amerika Serikat (AS) mengalokasikan subsidi 19 Miliar Dollar per tahun kepada petaninya atau sekitar dua kali lipat dari dana yang dicadangkan untuk bantuan internasional atau *Foreign Aid*. Bustanul Arifin, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2004), 38.

setelah Thailand.³² Lalu timbul satu pertanyaan besar, mengapa Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi produk-produk pertanian tropis? dan mengapa hingga saat ini nasib petani tak kunjung mengalami perbaikan? serta dimana letak kesalahannya?, itulah sebabnya diperlukan arah niat dan semangat cinta tanah air dan semangat gotong-royong serta semangat berbagi dalam membangun ekonomi bangsa demi tercapainya cita-cita luhur bangsa Indonesia melalui gerakan ekonomi rakyat dalam bingkai konsep Ekonomi Pancasila, dengan harapan agar terhindar dari praktik kejahatan bisnis di bidang ekonomi.³³

Pembahasan tentang segala aspek kehidupan yang diawali dari pembangunan ekonomi sebuah bangsa yang besar, pemberdayaan potensi pertanian dan pertambangan serta optimalisasi wilayah bahari serta

³² Kata Pengantar Siswono Yudo Husodo dalam bukunya Andreas Maryoto, *Jejak Pangan Sejarah, Silang Budaya dan Masa Depan*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2009), xii. Akan tetapi pada sisi yang berbeda terdapat kondisi yang berlawanan karena Indonesia merupakan negara pengimpor Gula 37% dari kebutuhan nasional, Daging Sapi dari kebutuhan nasional, Garam 50% dari kebutuhan nasional, Kedelai 70% dari kebutuhan nasional, Jagung 11% dari kebutuhan nasional, Kacang Tanah 15% dan 70% kebutuhan Susu Impor.

³³ Bentuk kejahatan bisnis di bidang ekonomi meliputi; *Pertama*, memanipulasi data neraca perusahaan dengan maksud untuk menghindari atau memperkecil kewajiban membayar pajak; *Kedua*, persengkokolan dalam penentuan harga dan mengiklankan produk dengan cara menyestakan; *Ketiga*, kerjasama dengan petugas pajak untuk menghindari atau memperkecil kewajiban membayar pajak; *Keempat*, kegiatan produksi yang tidak memperhatikan lingkungan sehingga berdampak pada polusi limbah cair, debu dan suara; *Kelima*, tidak memperdulikan keselamatan kerja karyawan dan segala macam praktik eksploitasi tenaga kerja tanpa jaminan sosial yang jelas; *Keenam*, memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang; *Ketujuh*, operasional perusahaan dijadikan sebagai lahan untuk pencucian uang semata. John Pieris, Nizam Jim, *Etika Bisnis dan Good Corporate Governance* (Jakarta : Penerbit Pelangi Cendikia, 2007), 160.

supremasi hukum dan kedewasaan berpolitik akan menjadi hampa apabila pendidikan masyarakat secara umum belum menjadi prioritas utama pembangunan bangsa, yang meliputi pendidikan kepribadian dan pendidikan intelektual akademis, sehingga diperlukan usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk membentuk karakter dan budaya bangsa yang berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945.³⁴

Dengan dibangun kesadaran bahwa sumber daya manusia adalah basis dari kekuatan bangsa dan menjadi akar dari segala permasalahan kehidupan, maka sudah sewajarnya bahwa setiap negara di dunia ini akan berlomba untuk meningkatkan kualitas intelektual dan kualitas kepribadian, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas bangsa dalam pergaulan internasional, awal pembangunan sebuah negara besar pasti dimulai dari pembangunan sumber daya manusia, hal ini terbukti bahwa semakin tinggi peradaban sebuah negara baik secara intelektual dan kepribadiannya maka semakin tinggi pula derajat bangsanya dalam pergaulan internasional dan sudah barang tentu akan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan atau

³⁴ Amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31; 1. Setiap Warga Negara berhak mendapatkan pendidikan; 2. Setiap Warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang; 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

kemakmuran masyarakat bangsa tersebut, demikian juga semakin rendah pendidikan intelektual dan kepribadian sebuah bangsa maka akan semakin rendah martabat bangsa tersebut dalam pergaulan internasional dan sudah barang tentu akan diikuti dengan keterbelakangan budaya dan kemiskinan.³⁵ Disinilah letak pentingnya implementasi konsep Ekonomi Pancasila yang harus dimulai dari kesadaran pendidikan manusia seutuhnya, yaitu pembangunan kulaitas intelektual dan kualitas kepribadian melalui jalur pendidikan formal dan informal.

Sebagai contoh jalan tengah atau kompromi kesepakatan dari bebarapa kepentingan pada satu titik temu. Ketika masyarakat memerlukan dana permodalan berupa fasilitas kredit untuk memenuhi kebutuhan usaha para petani, pedagang pasar atau para pegawai rendahan maka timbulah rasa keinginan untuk menolong yang didasari oleh budaya gotong-royong pada seorang Patih Purwokerto Aria Wiriatmaja, sehingga berinisiatif untuk membentuk koperasi simpan pinjam pada tahun 1898 guna melayani masyarakat yang secara umum masih berpendapatan terbatas, pemilihan badan hukum koperasi simpan pinjam tersebut didasarkan pada alasan bahwa koperasi sesuai dengan budaya masyarakat setempat, sehingga

³⁵ Fakta sejarah telah menunjukkan bahwa kejayaan Negara Yunani dan Romawi diawali dengan revolusi pemikiran yang berawal dari ACADEMI atau sekolah yang dirintis oleh Plato dan Socrates di Athena pada 400 tahun sebelum Masehi, dengan sebutan LYCEUM. Di Timur Tengah Jazirah Arab pada masa Harun Al-Rasyid telah dibangun Bayt Al Hikmah sebagai pusat pendidikan yang mengantarkan kejayaan dunia Islam, sehingga melahirkan pemikir-pemikir dunia dibidang *saint*, matematika, fisika, al jabar, serta ilmu kedokteran modern. Para pakar intelektual tersebut antara lain Ibnu Rusd, Ibnu Sina, Al Kindi, Al Farabi dan masih banyak lagi nama-nama besar akademisi pada waktu itu. Aulia Reza Bastian, *Reformasi Pendidikan* (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2002), 93.

secara rasional koperasi dapat diterima oleh masyarakat. Di lain pihak unsur penguasa Van Westrode melakukan tindakan yang rasional, karena badan hukum koperasi sangat bersesuaian dengan semangat kebersamaan di Eropa. Sehingga berdirinya koperasi secara tidak langsung merupakan kompromi rasionalitas antara kelompok miskin pribumi dan penguasa setempat. Garis sepadan dengan kondisi tersebut diatas itulah yang diupayakan oleh penulis untuk mencari ide segar atau menggagas kompromi rasionalitas ekonomi Indonesia kontemporer yang dapat menampung aspirasi masyarakat secara umum, bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, keperpihakan penguasa pemerintahan dan dapat menampung kepentingan para pelaku pasar, sehingga semua elemen masyarakat terwadahi kepentingannya, dalam suatu konsep pemikiran tentang Ekonomi Pancasila.³⁶

B. TINJAUAN HISTORIS DAN FILOSOFIS.

Perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia ini mempunyai hubungan saling keterkaitan dan saling berhubungan serta saling melengkapi, termasuk juga perjalanan budaya bangsa Indonesia. Dikisahkan bahwa sejarah alam semesta ini mempunyai usia lebih panjang dari pada sejarah umat manusia, demikian juga mempunyai usia jauh lebih tua dari pada berdirinya komunitas bangsa dan negara, barang kali inilah salah satu rahasia perencanaan Tuhan untuk menempatkan manusia di muka bumi ini setelah segala sesuatunya tersedia dengan baik, dengan lingkungan alam yang tertata terlebih dahulu serta suhu dan iklim sudah bersahabat baru

³⁶ M. Dawam Rahadjo, *Nalar Ekonomi Politik*, (Bogor : IPB Press, 2011), 5.

kemudian diturunkan di muka bumi ini. Dengan dasar logika tidak mungkin manusia hidup di dunia ini bila alam yang akan ditempati belum tersedia keperluan manusia minimal untuk bertahan hidup. Ahli sejarah mengatakan bahwa masa yang paling tua dalam kehidupan alam semesta ini adalah masa Plestosen yang ditandai dengan adanya pergeseran atau Glasiasi yang berdampak menurunnya suhu permukaan bumi, dan mencairnya es di daerah tertentu yang menyebar di daerah sekelilingnya yang secara tidak langsung berdampak pada tatanan alam, aliran sungai dan lautan dan pergeseran tata letak kepulauan di beberapa wilayah di atas muka bumi ini. Adapun kepulauan Indonesia terdiri dari serangkaian atau gugusan pulau besar dan kecil pada posisi 6 derajat garis Lintang Utara, 11 derajat garis Lintang Selatan, memanjang dari Barat ke Timur antara 95 derajat sampai dengan 140 derajat garis Bujur Timur, seluruh daerah ini beriklim tropis dengan suhu rata-rata di dataran rendah 26 derajat Celsius, dan daerah pegunungan 20 derajat Celsius. Adanya kehidupan di wilayah nusantara ini diperkirakan mulai abad 4 atau 5 Masehi dengan bukti ditemukannya peninggalan tulisan batu pada masa itu, atau bukti-bukti lain yang berhasil ditemukan oleh para peneliti dan para ahli sejarah, dari hasil temuan bukti sejarah tersebut dapat difahami bahwa dalam kehidupan masa itu terdapat kehidupan sosial ekonomi dan kepercayaan, bercocok tanam atau pertanian, pemujaan pada nenek moyang. Dengan demikian dari sisi kependudukan bangsa Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dari perjalanan kehidupan prasejarah, terutama pada sisi faktor biologis dan kultural.³⁷

³⁷ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah*

Para ahli sejarah memperkirakan lima ratus ribu tahun yang lalu daerah es di Kutub Utara dan Selatan mengalami perubahan bentang wilayah karena perubahan suhu sehingga mengakibatkan kenaikan permukaan laut yang berdampak pada perubahan struktur kepulauan dan sebagian daratan terendam, sehingga terjadi perubahan pula struktur ekosistem yang termasuk juga manusia. Pada sisi yang berbeda para ahli sejarah juga memperkirakan bahwa manusia Indonesia telah ada pada satu juta tahun yang lalu dengan hidup berkelompok-kelompok, dan menyebar sesuai dengan keperluan kehidupan masing-masing, para ahli sejarah juga menarik hubungan yang linier antar wilayah penyebaran penduduk yang tidak terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu, tetapi menyebar ke seluruh daratan.³⁸

Semua bangsa di dunia ini mempunyai nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi sebagai warisan budaya yang dijaga dan dihormati, demikian juga latar belakang perjalanan sejarah berdirinya negara Indonesia dengan segala macam pasang surut kehidupan perjuangan dan derai air mata merupakan bagian yang tak terpisahkan dari riwayat bangsa yang tidak hanya untuk dikenang akan tetapi dijadikan pijakan untuk perjuangan generasi berikutnya demi kehidupan yang lebih baik bangsanya sendiri dan demi untuk menata atau memposisikan diri pada pergaulan internasional, hal ini terjadi di setiap negara termasuk sejarah bangsa Indonesia. Kebangsaan atau *Nationhood* adalah akumulasi dari rangkaian interaksi

Nasional Indonesia jilid satu, (Jakarta : Balai Pustaka, 1992), 297.

³⁸ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1999), 15.

keseimbangan antara kepentingan masyarakat atau *Society* di satu pihak dan kekuasaan negara atau *State* di pihak lain, untuk itu perlu dicari suatu formula guna menjaga agar tidak terjadi benturan antara masyarakat dan negara. Sehingga sangat diperlukan adanya tinjauan historis dan filosofis yang memposisikan dan mengfungsikan kedua peran sesuai porsinya masing-masing dan sesuai tuntutan zamannya, proses interaksi antar masyarakat suatu negara dengan negara lain atau interaksi antar keyakinan akan menghasilkan tata nilai atau norma budaya, meskipun kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat berbeda-beda, akan tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri dan sifat yang sama dalam arti *universal*, secara umum sifat-sifat budaya tersebut memiliki ciri yang sama meskipun tidak sama persis, hal ini disebabkan adanya perbedaan ras, lingkungan alam, kebiasaan dan perbedaan tingkat pendidikan. Sifat yang melekat pada kebudayaan tersebut meliputi; *Pertama*, interaksi antar masyarakat yang tercermin dari perilaku sehari-hari akan menjadi kebiasaan yang membentuk budaya; *Kedua*, nilai-nilai budaya telah ada terlebih dahulu sebelum lahirnya suatu generasi tertentu yang mengikuti perkembangan zamannya dan akan diwariskan antar generasi ke generasi berikutnya; *Ketiga*, Budaya sangat diperlukan oleh manusia yang tercermin dari tingkah laku, budaya tersebut meliputi norma-norma dan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur suatu tindakan yang dianjurkan, perbuatan yang dilarang atau tindakan yang menjadi kebanggaan bersama dan tindakan yang merupakan pantangan untuk dikerjakan.

Pada kurun waktu tertentu, sejarah perjalanan bangsa Indonesia sekarang ini tidak terlepas dari proses berdirinya, proses perkembangan

budayanya dan jatuhnya kerajaan-kerajaan yang pernah ada di bumi Nusantara dan banyak dipengaruhi oleh budaya bangsa-bangsa lain, hal ini disebabkan karena letak wilayah Nusantara yang menjadi jalur lalu-lintas perdagangan dunia, diantara budaya yang masuk ke wilayah Nusantara antara lain dipengaruhi oleh agama-agama besar di dunia, yaitu Hindu, Budha, Islam dan Kristen. Untuk itulah kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara tidak bisa lepas dari pengaruh agama tersebut diatas. Diantara tokoh-tokoh sejarah yang bersesuaian dengan masa kerajaan dan pengaruh agama yang memegang peranan penting adalah :

1. Kerajaan Kutai (400 M).

Pendiri Kerajaan Kutai adalah Kundungga, beliau adalah orang Indonesia asli yang belum terpengaruh oleh budaya Hindu, oleh karena itu beliau tidak dianggap sebagai pendiri keluarga kerajaan. Anaknya adalah Aswawarman, dan dianggap sebagai pendiri keluarga kerajaan, karena pada masa itu sudah ada pengaruh dari agama Hindu. Sementara Raja yang paling terkemuka adalah Mulawarman, ia merupakan Raja yang berperadaban baik, kuat dan berkuasa.³⁹

³⁹ Keberadaan kerajaan Kutai dibuktikan dengan adanya Prasasti berupa 7 Yupa atau tiang batu yang menceritakan bahwa Raja Mulawarman keturunan dari Raja Aswawarman mengadakan kenduri sebagai bukti sedekah pada para Brahmana. Dengan demikian masyarakat Kutai adalah masyarakat pertama bangsa Indonesia yang sudah mengenal nilai-nilai sosial dan politik, serta adanya keyakinan akan Ketuhanan dalam wilayah kebijakan kerajaan yang diimplementasikan dalam kegiatan kenduri untuk sedekah pada Brahmana. Potensi ekonomi kerajaan dapat dilihat dari kebiasaan kenduri yang mencerminkan kemakmuran dan kebiasaan berbagi antar masyarakat saat itu serta adanya persembahan Raja berupa perhiasan emas kepada para Brahmana, dan sedekah pada Brahmana mencerminkan adanya penghasilan hasil bumi yang memakmurkan negeri, menurut para ahli sejarah purbakala Indonesia bahwa kerajaan-kerajaan Indonesia

2. Kerajaan Tarumanegara.

Raja yang sangat terkemuka adalah Purnawarman, beliau adalah Raja yang gagah berani dan jujur terhadap tugasnya. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 450 M di Bogor, wilayah kekuasaannya meliputi Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang dan Banten. Agama Hindu diajarkan Tarumanegara oleh seorang Rahib bernama Gunawarman.⁴⁰

3. Kerajaan Bali.

Diantara Raja yang ada di Kerajaan Bali adalah Udayana Warmadewa adalah yang paling terkenal. Udayana adalah anak dari seorang kebangsaan Kamboja yang melarikan diri ke Jawa Timur dan menikah dengan Putri Mahendrata, kemudian ia bersama permaisuri memerintah kerajaan Bali dengan arif dan bijaksana. Dari pernikahannya dengan Gunapriya lahirlah beberapa putra yang salah satunya adalah Airlangga. Kehidupan masyarakat pada waktu itu berkelompok dan saling membantu atau gotong-royong dalam kelompoknya pada setiap pekerjaan bersama sampai pada masa pemerintahan Raja Gunapriya dan Udayana, dan sebagian besar

waktu itu dalam kehidupan makmur dengan dengan perdagangan dan pertanian, hubungan baik antara kerajaan di Nusantara dengan kerajaan di India Selatan melahirkan kerjasama keagamaan sehingga banyak para pendeta atau golongan Brahmana mengajarkan Agama Hindu dan berbagai upacara keagamaan, dengan demikian ada dua pengaruh nyata yang dibawa oleh kaum Brahma Hindu dari India yaitu pengaruh budaya dan pengaruh tata kelola organisasi negara. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta : Paradigma, 2010), 29.

⁴⁰ Tanda-tanda peninggalan tertua terhadap pengaruh kebudayaan Hindu di Jawa adalah batu-batu bertuliskan di pedalaman dekat Sungai Cisadane, Bogor, dengan menggunakan huruf Palawa dan diperkirakan dibuat pada ke-4 Masehi. Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1999), 21.

penduduknya bercocok tanam atau ahli dalam bidang pertanian, akibat pengaruh Agama Hindu India maka pemerintahan Raja Anak Wungsu membagi masyarakat menjadi dua golongan besar yang berfungsi untuk membedakan status sosial mereka, yaitu kelompok Catur Warna dan golongan luar kasta atau budak, dan dalam sebuah prasasti yang ditemukan mengatakan : “apabila orang-orang jahat yang tidak memperhatikan anugerah Raja kepada desa bila sewilayahnya dengan seluruh penduduknya, baik kaum brahmana, ksatria, wesya, sudra, pemimpin, budak, tua-muda, laki-laki dan perempuan, kepala rumah tangga, pendeta, pemimpin, pengawas maupun para Sandhibisa, yang merubah-rubah anugerah Paduka Raja, sampai pada akhir zaman akan selalu dihancurkan oleh kematiannya.⁴¹

4. Kerajaan Pajajaran.

Raja yang terkenal adalah Sang Ratu Jayadewata, beliau mempunyai gelar Prabu Guru Dewantara dan dianugrahi gelar petunjuk Sri Baduga Maharaja Ratu Haji (1), Sang Ratu menjalankan pemerintahannya berdasarkan kitab-kitab hukum yang berlaku, sehingga pemerintahannya berjalan dengan aman dan tenteram, pada

⁴¹ Pada masa itu berlaku struktur masyarakat yang terbagi dalam empat bagian; *Pertama*, pembagian golongan tingkatan dalam masyarakat; *Kedua*, pembagian warisan yang berhubungan dengan sistem kekerabatan; *Ketiga*, aneka kesenian yang kelak menjadi keterampilan lokal dan ciri khas positif kreatifitas masyarakat; *Keempat*, agama dan kepercayaan yang merupakan hasil interaksi antara budaya dan keyakinan masyarakat setempat dengan masyarakat dalam tata pergaulan internasional terutama India. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia* jilid dua, (Jakarta : Balai Pustaka, 1992), 327.

masa itu tidak ada perang, jika ada rasa tidak aman hanyalah terjadi pada mereka yang melanggar aturan saja.

5. Kerajaan Kalingga (Holing).

Kerajaan ini dipimpin oleh seorang Ratu yang bernama Sima, ia memerintah dengan amat baik, keras, serta adil. Barang yang jatuh di jalan tidak ada yang berani menyentuhnya, bahkan pada waktu itu ada pundi-pundi emas yang diletakkan dengan sengaja oleh utusan kerajaan lain, rakyat kerajaan ini menghindari dari pundi-pundi tersebut.

6. Kerajaan Sriwijaya (600 M – 1.400 M).

Raja-Raja Sriwijaya merupakan pelindung agama Budha dan penganut agama yang taat, hal ini bukan merupakan hasil perkembangan dalam waktu singkat dan tidak hilang begitu saja. Raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya adalah Balaputradewa dengan gelar Sailendrawamsatilaka Sri Wirawairimathana. Menurut Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di kaki bukit Siguntang Palembang yang diperkirakan pada tarikh 605 Caka atau 683 M dalam bahasa Melayu kuno dan menggunakan huruf Pallawa yang menceritakan adanya kekuatan maritim dengan kekuatan penuh dari armada laut, sehingga mampu menguasai Selat Sunda pada tahun 686 M serta mampu menguasai Selat Malaka pada tahun 775 M, Tuha An Vatakvura adalah sebutan dari perkumpulan semacam koperasi saat ini yang memudahkan para pengerajin, pedagang dan pegawai raja untuk berinteraksi. Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar pada waktu itu dengan keunggulan armada dan bala tentara yang kuat dan

disiplin sehingga mampu menguasai jalur perdagangan laut semenanjung Malaya. Kekuatan armada Sriwijaya dapat menguasai perniagaan dan mampu menjamin jalur-jalur pelayaran menuju Sriwijaya dan mampu melakukan penggalangan pada para pimpinan bajak laut dalam ikatan dengan kerajaan untuk menjamin keamanan jalur perdagangan.⁴²

Dalam sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya mengenal adanya pegawai kerajaan bidang perpajakan, pegawai kerajaan bidang perbendaharaan kerajaan dan adanya penasehat agama kerajaan yang bertugas untuk mengawasi pembangunan kerajaan serta mengawasi pembuatan patung-patung suci. Dengan demikian pada saat itu dapat dikatakan bahwa Kerajaan dalam menjalankan sistem kenegaraan berdasarkan dengan keyakinan nilai-nilai Ketuhanan. Cita-cita akan adanya konsep kesejahteraan bersama dalam lingkup kerajaan dengan semboyan "*Marvuat Vanua Criwijaya Siddhayatra Subhiksa*" artinya : suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Potensi ekonomi kerajaan Sriwijaya terletak pada kekuatan maritim dengan armada tempurnya yang mampu mengawal setiap armada dagangnya, potensi pertanian dan kerajinan serta menguasai ekspor beras, rempah-rempah, gading, kayu manis, kemenyan dan emas.⁴³

⁴² Pusjarah TNI, *Sejarah Perang-Perang Nusantara*, (Jakarta : Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2003), 26.

⁴³ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta : Paradigma, 2010), 29.

7. Kerajaan Mataram Kuno.

Salah satu Raja yang terkemuka adalah Raja Sanjaya dan dianugerahi gelar petunjuk Sanjaya Abdi Negara (2), Ia dijuluki Raja yang gagah berani yang telah menaklukkan Raja-Raja di sekelilingnya, Ia dihormati oleh para pujangga karena dipandang sebagai Raja yang faham akan isi kitab-kitab suci, rakyatnya dapat tidur nyenyak tanpa ada rasa takut diganggu oleh penjahat. Berdasarkan prasasti yang ditemukan di lokasi Gunung Wukir, Kecamatan Salam, Magelang, menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa sangsekerta, bahwa Raja Sanjaya beragama Siwa dan mendirikan sebuah Lingga di atas bukit, sehingga sang Raja dilukiskan bagai Meru yang menjulang tinggi yang meletakkan kakinya jauh di atas kepala Raja-Raja di sekitarnya, berikat pinggang samudra dan berdada gunung-gunung.⁴⁴

8. Kerajaan Singasari (1.222 M – 1.292 M).

Wangsa Rajasa adalah Wangsa baru berbarengan dengan kemunculan Ken Arok, Wangsa inilah yang menguasai kerajaan Singasari dan Kerajaan Maja Pahit, Ken Arok dilahirkan di Desa Pangkur, sebelah timur Gunung Kawi, ibunya bernama Ken Endok, istri

⁴⁴ Prasasti Canggal berangka tahun 654 Saka atau 6 Oktober 732 mengatakan bahwa Raja Sanjaya telah mendirikan Lingga di atas bukit sebagai tempat pemujaan terhadap Dewa Siwa, Brahma dan Wisnu. Dalam prasasti tersebut juga mengatakan tentang kesuburan tanah Jawa sebagai penghasil padi dan kaya akan tambang emas, dan juga disebutkan bahwa di pulau Jawa terdapat bangunan suci untuk pemujaan Dewa Siwa yang amat indah sebagai simbol dan sumber kesejahteraan dunia. Marwati Djoened poespongoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Indonesia* jilid dua, (Jakarta : Balai Pustaka, 1992), 99.

seorang petani bernama Galirombe.⁴⁵ Kemudian seiring dengan perjalanan waktu tata sosial kemasyarakatan pada waktu terjadi perkembangan yang sangat pesat, akan tetapi dibalik itu terjadi kondisi keragaman antar suku, agama dan ras serta kegiatan perekonomian yang meningkat tanpa disertai tata kelola kerajaan yang baik, sehingga terjadi kekacauan dan timbul benih-benih permusuhan yang akan dapat berakibat pada kehancuran Kerajaan, pada kondisi yang tidak menentu inilah akhirnya Kerajaan diselamatkan oleh seorang pengembara yang tidak pernah diketahui asal usulnya, dia bernama Gajah Para dan di anugrahi gelar petunjuk Gajah Para Abdi (3).

9. Kerajaan Maja Pahit (1.293 M – 1.478 M).

Raden Wijaya adalah Raja Majapahit pertama dengan gelar Kerta Rajasa Jayawardana yang dinobatkan sebagai Raja setelah mengalahkan tentara Tartar Mongol China yang dikirim oleh Kublai Khan, tepatnya pada tanggal 15 bulan Oktober 1293 berdasarkan Kidung Harsawijaya. Dari Kerajaan Singasari, Gajah Para menikah

⁴⁵ Pada akhir runtuhnya Kerajaan Singasari, Kerajaan dapat dikuasai oleh Jayakatwang dari Kerajaan Kediri, akan tetapi berkat kecerdikan menantu Prabu Kertanegara (cita-cita Prabu Kertanegara adalah mempersatukan Nusantara), yaitu Raden Wijaya, maka Kerajaan Kediri dapat dikalahkan dengan bantuan utusan dari tentara Tartar dari Negeri China, utusan tersebut dipimpin oleh tiga orang hulubalang, yaitu Che pi, Ji k`o mi su dan Kau Hsing (1293), pada dasarnya utusan tentara dari China tersebut menuntut balas atas perlakuan Prabu Kertanegara yang memotong telinga utusan Khu Bilai Khan yang bernama Meng Khi. Setelah Kediri dapat dikalahkan dan pasukan Khu Bilai Khan berpesta pora dengan kemenangan, maka dengan kecerdikannya kembali Raden Wijaya menyerang habis pasukan Tartar tersebut dan membakar kapal-kapal layar mereka, demikianlah kisah perjalanan sejarah yang tertulis dalam kitab Pararaton. Purwadi, *Jejak Nasionalisme Gajah Mada*, (Yogyakarta : Penerbit Diva, 2004), 34.

dengan seorang penenun pakaian, anak dari Empu Pandita Perkasa dan mempunyai anak Gajah Panuntun, setelah dengan keperkasannya selalu membela dan mengabdikan kepada Kerajaan, akhirnya Raja Majapahit yang bernama Hayamwuruk mengangkat Gajah Panuntun sebagai Patih Kerajaan dengan diberi gelar petunjuk Gajah Mada Palapa (4), setelah mendapat petunjuk tersebut maka Gajah Mada mempunyai keberanian dan tekad dengan bersumpah yaitu Sumpah Palapa.⁴⁶

Semangat kebangsaan dan cita-cita luhur untuk menyatukan negeri-negeri seluruh Nusantara lahir dari seorang anak bangsa bernama Gajah Mada dari negeri Maja Pahit, Gajah Mada berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi Maja Pahit Raya yang meliputi negeri-negeri seluruh Nusantara sehingga menjadi negeri yang besar dengan kekuatan politik yang tangguh sehingga disegani oleh bangsa-bangsa di dunia. Kerajaan Maja Pahit adalah Kerajaan Nasional yang sangat kuat pada masanya bahkan wilayah yang dikuasainya lebih luas dari wilayah Negara Indonesia saat ini, adapun potensi ekonomi Maja Pahit meliputi bidang perdagangan di wilayah Nusantara, dan perdagangan dengan luar negeri yang meliputi daerah semenanjung Malaya, perdagangan dengan India, China dan Negara Timur Tengah,

⁴⁶ Kejayaan Kerajaan Maja Pahit tahun 1292 dibawah pemerintahan Prabu Hayam Wuruk dan Maha Patih Gajah Mada tercantum dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, yang berisikan tentang keagungan Sang Prabu dan keagungan Sang Maha Patih, serta menguraikan kisah-kisah pembangunan Negara Maja Pahit yang besar pada zamannya. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Bambang Pramudito pada Kata Pengantar dari *Kitab Negara Kertagama* (Yogyakarta : Penerbit Gelombang Pasang, 2006), V.

serta potensi ekonomi dari hasil rempah-rempah, hasil hutan, Emas dan penjualan satwa, dengan demikian kekuasaan Maja Pahit waktu itu mutlak mendapat dukungan sepenuhnya dari kemampuan ekonomi masyarakat.

Dalam perjalanan waktu yang cukup lama dan dengan disebabkan oleh beberapa hal maka Kerajaan hancur satu-persatu, dan pada saat inilah awal dari episode penjajahan.

Informasi dari sebuah buku yang berjudul “Itinerario Near Oost Ofte Portugaels Indien” yang ditulis oleh Jan Huygen Van Linshoten pada tahun 1595, telah menggugah minat bangsa Belanda untuk datang ke Nusantara, rangkuman dari kandungan buku tersebut sebagai berikut : dalam proses perjalanan waktu dan keinginan bangsa Eropa untuk mencari dunia baru dan keinginannya untuk menguasai sumber daya alternatif bagi bangsanya, pada saat yang sama warga pribumi Nusantara hidup dalam kedamaian. Situasi ini berubah drastis saat orang-orang Eropa mulai berdatangan dengan dalih berdagang, namun dengan membawa pasukan tempur lengkap dengan senjatanya, hal yang ironis, tokoh yang menggerakkan roda sejarah dunia masuk kedalam kubangan darah adalah dua orang Paus yang berbeda; *Pertama*, Paus Urbanus II yang mengobarkan Perang Salib untuk merebut Yerusalem dalam konsili Clermont tahun 1096; dan yang *Kedua*, Paus Alexander VI.

Perang Salib tanpa disadari telah membuka mata orang Eropa tentang peradaban yang jauh lebih unggul ketimbang mereka, Eropa mengalami pencerahan akibat bersinggungan dengan orang-orang Islam dalam Perang Salib ini. Merupakan fakta sejarah bahwa jauh sebelum orang Eropa berani

melayari samudra, bangsa Arab telah dikenal dunia sebagai bangsa pedagang yang pemberani yang terbiasa melayari samudra luas hingga ke Nusantara, bahkan kapur barus yang merupakan salah satu zat utama dalam ritual pembalseman para Fir'aun di Mesir pada abad sebelum masehi, didatangkan dari satu kampung kecil bernama Barus yang berada di pesisir barat Sumatera Tengah.

Dari pertemuan peradaban inilah bangsa Eropa mengetahui jika ada satu wilayah di selatan bola dunia yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya, yang tidak terdapat di belahan dunia manapun, negeri tersebut penuh dengan Karet, Lada dan rempah-rempah lainnya dan sangat melimpah hasil tambangnya yaitu Emas dan Batu Permata yang tersimpan dalam perut buminya, tanah tersebut dengan iklimnya yang sangat bersahabat dan alam yang sangat indah, wilayah inilah yang terkenal dengan sebutan Nusantara, mendengar semua informasi tentang kekayaan negeri ini bangsa Eropa sangat bernafsu untuk datang dan mencari apa yang selama ini ia idam-idamkan.

Paus Alexander VI pada tahun 1494 memberikan mandat resmi Gereja kepada kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol melalui perjanjian Tordesillas. Dengan adanya perjanjian ini Paus Alexander secara sepihak telah membelah dunia diluar daratan Eropa menjadi dua kapling besar untuk dianeksasi, garis demarkasi dalam perjanjian Tordesilas itu mengikuti lingkaran garis lintang dari Tanjung Pulau Verde, melampui kedua kutub bumi, hal ini telah meberikan dunia baru yang saat ini disebut Benua Amerika kepada Spanyol, Afrika serta India diserahkan kepada Portugis, kemudian Paus menggeser garis demarkasinya ke arah timur sejauh 1.170

Kilometer dari Tanjung Pulau Verde, Brazil pun jatuh ketangan Portugis, jalur perjalan dalam pencarian kekayaan oleh bangsa Eropa ini ke arah Timur jauh menuju kepulauan Nusantara pun terbagi dua, Spanyol berlayar ke Barat dan Portugis ke Timur, keduanya akhirnya bertemu di Maluku, di Laut Banda.⁴⁷

Sebelumnya, jika dua kekuatan yang tengah berlomba memperbanyak harta jarahan bertemu tepat pada satu titik maka mereka akan besaing dan bahkan berkelahi satu sama lain, namun pada saat bertemu di Maluku, Portugis dan Spanyol mencoba untuk menahan diri, dan pada tanggal 5 September 1494, Spanyol dan Portugis membuat perjanjian Saragossa yang menetapkan garis anti-meridian atau garis sambungan pada setengah lingkaran yang melanjutkan garis 1.170 Kilometer dari Tanjung Verde. Garis itu pada posisi di Timur dari Kepulauan Maluku, di sekitar Guam.⁴⁸

Sejak itulah Portugis dan Spanyol berhasil banyak membawa rempah-rempah dari pelayaran. Seluruh Eropa mendengar hal tersebut dan mulai

⁴⁷ Faktor yang mendorong kedatangan Portugis ke Nusantara adalah: faktor ekonomi, agama dan jiwa petualangan yang mereka miliki. Penguasaan Portugis atas Semenanjung Malaka sangat berpengaruh terhadap jalur pelayaran Pantai Barat Sumatera dan Selat Sunda, di Pelabuhan Jawa dan Banten tumbuh menjadi besar, karena pedagang-pedagang dari Persia, China, India dan lain-lain yang datang pada saat tertentu untuk bertemu di Malaka, mulai bergeser ke Nusantara karena menghindari politik dagang Portugis yang monopoli di Malaka. Pusjarah TNI, *Sejarah Perang-Perang Nusantara*, (Jakarta : Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2003), 99.

⁴⁸ Ambisi Portugis untuk menguasai perdagangan rempah-rempah Nusantara diwujudkan dengan niat untuk merebut Malaka yang saat itu menjadi pusat perdagangan bangsa Arab, Persi, India dan China dengan pedagang Nusantara, adapun komoditi yang diperdagangkan waktu itu adalah hasil bumi, Cengkeh, Lada, Pala, Tekstil dari India dan kerajinan dari China. Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, (Jakarta : Buku Kompas, 2006), 33.

berlomba-lomba untuk mengirim armada layarnya ke wilayah baru di Selatan. Ketika Eropa mengirim ekspidisi laut untuk menemukan dunia baru, pengertian antara perdagangan, peperangan dan penyebaran Agama Kristen, misi imprealisme Eropa ini sampai sekarang sangat dikenal dengan “Tiga G” : *Gold, Glory* dan *Gospel*. Seluruh penguasa, para Raja dan para pedagang yang berada di Eropa membahas tentang Negeri Selatan yang sangat kaya raya ini, mereka berlomba-lomba mencapai Nusantara dari berbagai jalur laut pelayaran, kondisi saat itu belum tersedia peta perjalanan laut yang secara utuh dan detail dari Eropa ke wilayah tersebut, yang oleh orang Eropa disebut dengan Hindia Timur, peta bangsa Eropa baru mencapai daratan India, sedang wilayah sebelah timurnya masih gelap.

Dibanding Spanyol, Portugis lebih unggul dalam banyak hal, para pelaut Portugis yang merupakan tokoh-tokoh pelarian Templar yang mendirikan “*Kingt of Christ*”, dengan ketat berupaya merahasiakan peta-peta terbaru mereka yang berisi jalur laut menuju Asia Tenggara, peta-peta tersebut saat itu merupakan benda yang paling diburu oleh banyak Raja dan Saudagar Eropa, namun ibarat pepatah sepandai-pandai tupai melompat ahirnya jatuh juga, maka demikianlah pula dengan peta rahasia yang dipegang pelaut-pelaut Portugis. Sejumlah orang Belanda yang telah bekerja lama pada pelaut-pelaut Portugis mengetahui hal ini, salah satu dari mereka bernama Jan Huygen Van Linschoten. Pada tahun 1595 dia menerbitkan buku berjudul “*Itinerario Near Oost Ofte Portugael Indien*”, pedoman perjalanan ke Timur atau Hindia Portugis, yang memuat berbagai

peta dan deskripsi amat rinci mengenai jalur pelayaran yang dilakukan Portugis ke Hindia Timur yang di lengkapi dengan segala problematikanya.

Buku tersebut laku keras di Eropa, namun dilain pihak Portugis sangat tidak menyukai akan hal ini, bahkan mempunyai rasa dendam pada orang-orang Belanda, berkat Van Linschoten inilah, Belanda akhirnya mengetahui banyak persoalan yang dihadapi Portugis di wilayah baru tersebut dan juga dapat diketahui rahasia-rahasia kapal serta jalur pelayarannya. Para pengusaha dan penguasa Belanda menyempurnakan armada kapal lautnya dengan segera, agar mereka juga bisa menguasai kekayaan Dunia Selatan yang kaya raya tersebut. Pada tahun 1595 Belanda mengirim satu ekspedisi pertama menuju Nusantara yang di sebutnya Hindia Timur. Ekspedisi ini terdiri dari empat buah kapal dengan 249 awak dipimpin oleh Cornelis De Houtman, dia adalah salah satu orang belanda yang telah bekerja lama pada Portugis di Lisbon. Lebih kurang satu tahun kemudian pada Juni 1596, De Houtman mendarat di pelabuhan Banten yang merupakan pelabuhan utama perdagangan Lada di Jawa.⁴⁹ Kemudian menyusuri Pantai Utara dan singgah di Sedayu, Madura dan seterusnya. Kepemimpinan De Houtman tergolong yang buruk pada saat itu. Dengan sikap sombong dan cenderung sesukanya pada orang-orang pribumi dan juga terhadap sesama pedagang Eropa, sejumlah konflik menyebabkan dia harus kehilangan satu perahu dan banyak awaknya, sehingga ketika mendarat di Belanda pada tahun 1597,

⁴⁹ Cornelis De Houtman adalah bagian dari liga atau gabungan pedagang yang nantinya menjelma menjadi VOC, hubungan baik antara pedagang Belanda dengan masyarakat setempat ditandai dengan saling kunjungan resmi antara penumpang kapal dengan para pejabat daerah Banten waktu itu, pejabat daerah tersebut adalah Syahbandar, Adipati dan para Bangsawan lainnya. Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, (Jakarta : Buku Kompas, 2006), 34.

dia hanya menyisahkan tiga kapal dan 89 awaknya. Walaupun demikian tiga kapal tersebut penuh berisi rempah-rempah dan benda berharga lainnya.⁵⁰

Orang-orang Belanda berpikiran, jika seorang De Houtman yang tidak cakap memimpin mampu mendapatkan keuntungan melimpah, apalagi jika dipimpin oleh orang yang mempunyai figur pemimpin yang baik dan dengan dilengkapi armada pelayaran yang baik pula, kedatangan kembali tim De Houtman menimbulkan semangat yang menyala-nyala di banyak pedagang Belanda untuk mengikuti jejaknya. Langka De Houtman diikuti oleh puluhan bahkan ratusan saudagar-saudagar Belanda yang mengirim armada mereka Hindia Timur dan hal tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama yang berahir pada periode penjajahan Belanda atas Nusantara sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Dalam perjalanan waktu sejarah di awal periode pergaulan perdagangan antar-negara wilayah ini dikenal dengan sebutan Hindia Timur, Nusantara dan masih banyak lagi sebutan yang lain. Sedangkan sebutan nama Indonesia melalui proses kronologis sebagai berikut :

1. J.R. Logan, dia adalah salah seorang pegawai pemerintah Inggris di Penang atau Malaysia sekarang, Logan menyebutkan istilah Indonesia didalam suatu tulisan pada majalah yang dipimpinnya, Ia menggunakan nama Indonesia untuk menyebut kepulauan dan penduduk Nusantara, Ia menulis istilah itu pada tahun 1850 M, artikel yang ditulis oleh J.R.

⁵⁰ Kota Gresik berkembang menjadi kota pelabuhan yang sangat berpengaruh karena lokasinya yang sangat strategis, merupakan kota pelabuhan dan perdagangan internasional di kawasan paling timur Benua Asia, komunitas baru tumbuh dengan subur sebagai hasil interaksi yang baik antara penduduk pribumi dan para pedagang dari China, Gujarat dan Portugis. Oemar Zainuddin, *Kota Gresik 1896 - 1916*, (Jakarta : Ruas, 2010), 7

Logan tentang Indonesia, karena Indonesia mempunyai potensi yang besar bagi Inggris, yaitu penduduk yang cukup banyak dan dapat dijadikan sasaran didalam perdagangan hasil-hasil industrinya, demikian juga wilayahnya sangat potensial untuk mendapatkan bahan mentah guna memenuhi keperluan produksi industri Inggris.

2. Earl G. Windsor, pada tahun 1850 didalam media milik J.R. Logan, ia menyebutkan kata Indonesia bagi penduduk Nusantara yang memiliki potensi didalam perdagangan hasil industrinya, karena pada masa itu jumlah penduduk Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Adapun tokoh-tokoh yang mempopulerkan istilah Indonesia di dunia internasional antara lain Adolf Bastian pada tahun 1884, Van Vollenhollen, Snouck Hurgronja, Kern dan masih banyak lagi nama-nama tokoh yang lain. Disamping tokoh-tokoh tersebut adalah para tokoh dari bangsa Indonesia sendiri pada masa pergerakan kemerdekaan, seperti para tokoh dari Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda, yang dalam rapat umum dilaksanakan pada bulan Januari 1924, Perhimpunan Indonesia yang semula bernama *Indische Vereeniging* kemudian berganti menjadi *Indonesische Vereeniging*. Dengan nama Indonesia berarti telah menunjukkan sikap lebih kuat sebagai orang Indonesia dan bukan sebagai orang Hindia Belanda. Perhimpunan Indonesia berdiri di negeri Belanda dan mempunyai majalah sebagai alat komunikasi dan alat perjuangan dengan nama "Hindia Putra", kemudian seiring dengan perjalanan waktu dan dinamika perjuangan majalah tersebut berganti nama "Indonesia Merdeka". Kata merdeka itu mengandung ungkapan tentang tujuan

dan usaha kerja keras bangsa Indonesia untuk mencapainya, Indonesia Merdeka selalu menjadi semboyan perjuangan waktu itu, merdeka adalah cita-cita umat manusia, yang setiap bangsa memiliki keinginan kuat untuk hidup bebas dan merdeka, gagasan tentang kemerdekaan merupakan cita-cita umat manusia, dengan demikian *Indonesische Vereeniging* atau Perhimpunan Indonesia yang terus berjuang untuk memperkenalkan istilah Indonesia dimata dunia internasional, bahkan didalam menghadapi Kongres-kongres Liga Anti Imperalisme di Eropa selalu menggunakan nama Indonesia dalam organisasinya. Dalam perkembangan selanjutnya kata Indonesia dikukuhkan menjadi identitas nasional melalui Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Istilah Indonesia tercantum dalam isi Sumpah Pemuda; *Pertama*, kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah tumpah darah satu tanah air Indonesia; *Kedua*, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia; *Ketiga*, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan melalui Sumpah Pemuda itulah istilah Indonesia kemudian ditetapkan menjadi identitas nasional bangsa Indonesia.

Demikian juga sejarah perjuangan Bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan melalui beberapa tahap perjuangan yang meliputi :

1. Sejarah Perjuangan Bangsa. Perjalanan Bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan dilanjutkan dengan era merebut dan mempertahankan kemerdekaan sampai dengan era mengisi kemerdekaan, menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya, kondisi dan tuntutan yang berbeda

tersebut ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai semangat kebangsaan kejuangan yang senantiasa tumbuh dan berkembang dengan dilandasi oleh jiwa, tekad dan semangat kebangsaan, kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya NKRI.

2. Era Sebelum Penjajahan. Sejak tahun 400 Masehi sampai dengan tahun 1617, Kerajaan-kerajaan yang berada di bumi persada Nusantara adalah ; Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Kediri, Singasari, Majapahit, Samudra Pasai, Aceh, Demak, Mataram, Goa dan lain sebagainya, merupakan Kerajaan besar pada masanya. Nilai yang terkandung pada era sebelum penjajahan adalah rakyat yang patuh dan setia kepada rajanya dan menjunjung tinggi kehormatan dan kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka di bumi Nusantara. Pada era sebelum penjajahan ini budaya dan tata kelola kerajaan banyak dipengaruhi oleh keyakinan terhadap Agama, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara Raja dan pemuka agama yang saling melengkapi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Era Selama Penjajahan. Bangsa Indonesia dijajah mulai tahun 1511 sampai dengan tahun 1945 oleh bangsa Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Selama penjajahan peristiwa yang menonjol adalah tahun 1908 yang dikenal sebagai Gerakan Kebangkitan Nasional Pertama, yaitu lahirnya organisasi pergerakan Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Sutomo dengan gelar petunjuk Sutomo Abdi Negara (5) dan Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan gelar petunjuk

Sudiro Abdi Mangku Negoro (6). Perjuangan Beliau dimulai dari usaha untuk membangkitkan semangat kebangsaan melalui media surat kabar dan majalah waktu itu dengan berbahasa daerah atau bahasa Melayu, nama majalah tersebut “Retnodhoemilah” yang terbit tiga kali dalam seminggu, dan melalui media inilah Wahidin memperkenalkan cita-citanya, fikiran cemerlangnya dan ide-ide pembangunan karakter bangsa yang melatakan pemahaman bahwa melalui pendidikan modern dan pendalaman budaya Jawa maka akan terbentuk masyarakat yang kuat dan mandiri, kemudian untuk mewujudkan cita-citanya tersebut Wahidin keliling Jawa untuk mengumpulkan dana pendidikan, respon masyarakat terutama siswa Sekolah Dokter Bumiputra STOVIA berlanjut dan berkembang menjadi organisasi yang saat ini dikenal dengan Boedi Oetomo dengan Soetomo sebagai ketua dan Goenawan Soewarno sebagai sekretaris, yang diresmikan berdirinya pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, jam Sembilan pagi.⁵¹ Pada perjalanan sejarah 20 tahun kemudian tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928 yang ditandai dengan Sumpah Pemuda sebagai titik awal dari kesadaran masyarakat untuk berbangsa Indonesia, yaitu dengan ikrar putra-putri Bangsa Indonesia : Berbangsa satu, bertanah air satu dan berbahasa satu : INDONESIA. Pernyataan ikrar ini mempunyai nilai tujuan yang sangat strategis di masa depan yaitu persatuan dan kesatuan Indonesia untuk mengembangkan nilai-nilai dan dasar filosofis selama penjajahan adalah

⁵¹ Parakirti T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, (Jakarta : Buku Kompas, 2006), 248.

harga diri bangsa, solidaritas nasional, persatuan dan kesatuan serta jati diri Bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia sendiri.

4. Era Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan. Dimulai dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1949, yang ditandai dengan penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati. Selama penjajahan Jepang pemuda-pemudi Indonesia dilatih dalam olah kemiliteran dengan tujuan untuk membantu Jepang memenangkan perang Asia Timur Raya, pelatihan tersebut melalui Seinendan, Heiho, Peta, dan lain-lain, sehingga secara tidak langsung pemuda Indonesia sudah memiliki bekal dan keterampilan militer, kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu, hal tersebut terjadi karena sekutu berhasil melakukan pengeboman dengan menggunakan bom atom yang meluluh lantakkan di dua kota Jepang yaitu kota Herosima dan Nagasaki. Kekalahan Jepang kepada sekutu dan kekosongan kekuasaan yang terjadi di Indonesia digunakan sebaik-baiknya oleh para pemuda Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Dengan semangat juang yang tidak mengenal menyerah yang dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta keikhlasan berkorban telah terpatri dalam jiwa para pemuda dan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaannya, yang kemudian diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh

Soekarno - Hatta, Soekarno mendapat anugerah gelar petunjuk Soekarno Abdi Nuswantoro (7).⁵²

Setelah merdeka Bangsa Indonesia harus menghadapi Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia dengan melancarkan aksi militernya pada tahun 1948 yaitu aksi militer Belanda pertama, dan pada tahun 1949 merupakan aksi militer belanda kedua, kemudian ujian kemerdekaan juga datang dari dalam negeri sendiri yaitu pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Muso dan Amir Syarifuddin pada tahun 1948. Era merebut dan mempertahankan kemerdekaan mengandung nilai juang yang paling syarat dengan ujian dan cobaan sebagai titik kulminasi adalah perang kemerdekaan. Dasar filosofi yang terkandung didalam nilai-nilai kejuangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai Kejuangan Relegius. Yaitu iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adanya keyakinan akan Ketuhanan dan keimanan kepada Tuhan adalah faktor utama keberhasilan dalam perjuangan, karena didalamnya terkandung kekuatan niat dan keikhlasan, tanpa kekuatan niat perjuangan tidak akan pernah berhasil, kekuatan niat akan menghasilkan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi setiap

⁵² Gelar petunjuk dapat diidentikkan dengan Wahyu atau Pulung atau Ndaru yang dalam terminologi Jawa mengandung pengertian bahwa akan adanya tanggung jawab moral bagi seorang pemimpin, dalam keyakinan masyarakat Jawa bahwa seorang dapat menjadi raja bila ia memperoleh Wahyu Keraton atau Pulung tersebut. Pulung dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang dapat berupa Wahyu Cokroningrat, Cokro adalah lingkaran, Nyokro artinya menggenggam, Nikrat berarti dunia. Dengan demikian arti keseluruhannya Cokroningrat adalah menggenggam lingkaran dunia. Purwadi, *Strategi Politik Ken Arok*, (Yogyakarta : Gelombang Pasang, 2004), 47

ujian dan cobaan, perjalanan perjuangan banyak berbenturan dengan beberapa kepentingan yang menghasilkan penderitaan, pengorbanan bahkan derai air mata dan kucuran darah, itulah sebabnya nilai kejuangan relegius yang diwujudkan dengan keyakinan ketauhidan akan menjadi motor penggerak dan sekaligus sebagai penopang keteguhan hati untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sejarah telah membuktikan bahwa hanya dengan dasar kepercayaan kepada Tuhan maka jalur perjuangan menjadi lurus, tanpa tergiur dengan keinginan keduniaan, tipuan kenikmatan kekayaan dan indahnya menduduki suatu jabatan penting, sehingga pejuang sejati atau nasionalisme sejati akan selalu berfikir “tidak penting mau jadi apa, tetapi yang paling penting dapat berbuat yang terbaik demi nusa dan bangsa”. Demikian juga keyakinan akan adanya pertolongan Tuhan dalam setiap perjuangan akan melahirkan rasa optimisme yang luar biasa sehingga menjadi kekuatan baru, semangat baru dan wawasan baru yang mendominasi langkah kedepan menuju cita-cita nasional. Perjuangan memerlukan panduan dan konsep nyata serta ketauladanan, sehingga perjuangan akan berdiri sesuai dengan garis ketulusan dan keikhlasan. Disaat perjuangan telah bergeser dari niat awal perjuangan maka akan menghasilkan kegagalan. Dengan demikian ketaqwaan kepada Tuhan adalah syarat mutlak dan modal dasar perjuangan.

2. Nilai Kejuangan Rela dan Ikhlas Berkorban. Sejarah perjuangan berdirinya suatu bangsa dimanapun berada, dan dari bangsa manapun di dunia ini menuntut adanya pengorbanan, tidak terbilang air mata

dan darah tumpah, tidak sedikit nyawa melayang dan penderitaan hidup silih berganti, pada saat perjuangan bangsa di awal-awal periode perjuangan tidak ada pejuang yang digaji atau mendapat imbalan apapun, tapi semangat tetap berkobar, itulah bukti adanya kerelaan dan keikhlasan untuk berjuang, semangat idealisme dan nasionalisme telah diuji dengan penderitaan perjuangan, akan tetapi para pejuang sejati tidak akan pernah mundur karena alasan penderitaan tersebut, pedoman kerelaan dan keikhlasan telah mengilhami dan mengalir ke sekujur tubuh para pejuang bangsa, sehingga menciptakan semangat dan ketangguhan yang tak kenal menyerah, akankah Indonesia merdeka bila para pejuang pada periode pertama perjuangan tidak berpegang pada nilai kejuangan untuk rela dan ikhlas berkorban? Akankah Indonesia merdeka bila para pejuang berfikir untuk kepentingan diri mereka masing-masing? Itulah bukti kebulatan tekad dan kuatnya keinginan niat untuk merdeka yang diwariskan pada generasi muda bangsa, yaitu para mahasiswa UNKRIS.

3. Nilai Kejuangan Tidak Mengenal Menyerah. Tidak terbilang nyawa melayang dan tidak terhitung harta disedekahkan demi perjuangan. Perebutan kekuasaan antara penjajah dan bangsa Indonesia telah memakan banyak korban, akan tetapi para pejuang waktu itu tidak pernah mengenal kata menyerah, lalu dimana letak kekuatan pejuang waktu itu? Semangat tidak mengenal menyerah itulah yang menjadi motor penggerak untuk tetap berjuang demi bangsa dan negara. Tidak sedikit para pejuang yang dipenjarakan dan disiksa bahkan sampai ajalpun tiba, tapi semangat tidak pernah surut. Nilai-nilai kejuangan

tidak mengenal menyerah harus diwariskan dan menjadi panutan generasi mendatang, termasuk mahasiswa UNKRIS, agar langkah perjuangan tidak bergeser dari garis lurus perjuangannya, agar generasi mendatang tidak tertipu dan terperdaya oleh kepentingan luar negeri yang hendak menguasai secara langsung dan tak langsung potensi dan kekayaan alam Indonesia, sejarah telah membuktikan bahwa pada periode awal berdirinya bangsa ini selalu menjadi incaran kekuatan luar negeri karena daya pikat kekayaan alamnya, sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa ujian terberat para pemimpin mendatang bangsa Indonesia adalah tipuan kekayaan duniawi dan kemegahan jabatan yang ditawarkan oleh pihak luar negeri, sehingga terjadi hubungan saling menguntungkan atau mutualisma antara para penguasa dan kepentingan luar negeri, bila kondisi ini terjadi maka petanda hancurnya suatu negeri. Untuk itulah perlu dibangun semangat perjuangan tidak mengenal menyerah dan lurus pada garis perjuangan demi cita-cita nasional sebagai benteng Pancasila.

4. Nilai Kejuangan Harga Diri. Proses interaksi pada dunia internasional di periode awal perdagangan dengan Portugis, Spanyol dan Belanda yang dilanjutkan dengan hadirnya serikat dagang Belanda yaitu VOC dan berakhir pada periode panjang penjajahan telah menempatkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hina, bangsa kuli dan bangsa yang diperbudak. Kenyataan ini telah menggugah timbulnya kejuangan harga diri, semangat perlawanan dan pemberontakan terhadap penjajah. Harga diri yang tersisakan dari warisan kejayaan kerajaan Sriwijaya, warisan dari kekuatan dan

ketangguhan kerajaan Majapahit telah menjadi motor penggerak untuk berjuang melawan kepentingan luar negeri. Dan tidak berlebihan bila dikatakan sampai kapanpun kekuatan luar negeri akan tetap mengintai kelemahan bangsa Indonesia dengan satu niat untuk menguasai potensi dan kekayaan alamnya.

5. Nilai Kejuangan Percaya Diri. Kemampuan armada laut Kerajaan Sriwijaya dan ketangguhan serta kejayaan kekuatan armada laut Kerajaan Majapahit pada masa lalu adalah bukti adanya kejuangan percaya diri bangsa Indonesia sehingga pada waktu itu Kerajaan Majapahit mampu menjadi salah satu kekuatan armada laut yang disegani dalam pergaulan dunia internasional, sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa bangsa ini lahir dari warisan budaya yang besar, warisan dari kekuatan harga diri bangsa yang besar. Nilai kejuangan percaya diri ini juga menjadi modal dasar untuk merebut kembali Irian Barat dari kekuasaan penjajah Belanda.⁵³

6. Nilai Kejuangan Pantang Mundur. Dinamika perjuangan diwarnai oleh berbagai kondisi yang menyertainya, terkadang menyenangkan

⁵³ Pada tahun 1960, salah Satu kekuatan militer di dunia adalah Indonesia dengan didukung oleh armada tempur : kapal perang terbesar dan tercepat di dunia buatan Soviet dari kelas Sverdlov, pesawat MiG-21, Tu-16 Tupolev, pada saat itu hanya empat negara yang memiliki pesawat pengebom strategis yaitu : Amerika, Rusia, Inggris dan Indonesia. Disamping itu Indonesia juga memiliki 12 kapal selam kelas Whiskey dan banyak lagi armada tempur waktu itu. Dengan dilatarbelakangi kejuangan percaya diri yang kuat, maka Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat Trikora; *Pertama*, gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Kolonial Belanda; *Kedua*, kibarkan Sang Saka Merah Putih di seluruh Irian Barat; *Ketiga*, bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa (Sumber : Koran Republika, Selasa 13 September 2011).

akan keberhasilan tetapi sebagian besar menyakitkan secara fisik, sehingga diperlukan nilai-nilai kejuangan pantang mundur. Sejarah telah membuktikan bahwa kekutan luar negeri akan pasang surut mengambil keuntungan dari kehidupan bangsa Indonesia, yang terkadang bangsa ini tidak sadar untuk dikondisikan menjadi bangsa yang konsumtif dan menjadi bangsa tempat sasaran penjualan produk-produk luar negeri dengan transaksi yang tidak seimbang, yaitu proses barter secara tak langsung dengan eksploitasi kekayaan alam, eksploitasi kekayaan laut, eksploitasi kekayaan hutan dan eksploitasi pertambangan.

7. Nilai Kejuangan Patriotisme. Sifat patriotisme pejuang untuk merebut kemerdekaan bangsa telah dibuktikan dengan segala pengorbanan, semangat pantang menyerah dan selalu berusaha untuk berjuang dalam kondisi apapun, jiwa patriot yang tertanam dalam dada setiap pejuang anak bangsa telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, demikian juga saat kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan kemasyhuran Kerajaan Majapahit didasari oleh semangat patriot sejati yang mampu ditanamkan oleh para pemimpin kerajaan pada para prajuritnya. Dengan demikian nilai kejuangan patriot sejati harus tetap dipertahankan oleh generasi penerus bangsa untuk mencapai cita-cita nasional, yaitu mahasiswa UNKRIS.

8. Nilai Kejuangan Heroisme. Didalam kanca pertempuran perang melawan penjajah diperlukan semangat heroisme, karena penjajah saat itu dilengkapi dengan senjata yang kuat dan prajurit yang terlatih,

adapun pada pihak pribumi dipersenjatai dengan bambu runcing dan dengan personel apa adanya, akan tetapi kenyataan di lapangan berkata lain, yaitu dengan semangat kepahlawanan bangsa Indonesia yang bersenjatakan bambu runcing dapat mengalahkan penjajah yang bersenjatakan modern.

9. Nilai Kejuangan Rasa Senasib dan Sepenanggungan. Penderitaan bangsa Indonesia dibawah kekusaan penjajah sangat memprihatinkan, pendidikan terabaikan, kesehatan masyarakat tercampakkan bahkan harga diri sebagai bangsa sudah tidak ada lagi. Maka ditengah kehidupan yang tidak menentu itu lahirlah rasa kepedulian dan rasa senasib sepenanggungan sebagai anak bangsa, dan lahirlah organisasi perjuangan seperti Boedi Oetomo. Nilai kejuangan rasa senasib sepenanggungan akan meniadakan sikap egoisme yang mementingkan diri sendiri atau mementingkan kelompoknya sendiri, akan tetapi sebaliknya akan melahirkan sikap saling asih dan saling mencintai sesama anak bangsa. Kerukunan antar penduduk suatu wilayah, kerukunan antar pemeluk agama yang berbeda dan kerukunan antar suku akan melahirkan kebesaran suatu bangsa yang beradab dan berkepribadian.

10. Nilai kejuangan rasa setia kawan, Nasionalisme, Persatuan dan Kesatuan. Pasang surutnya kondisi perjuangan kemerdekaan, serta pahit perihnya penderitaan bangsa Indonesia saat penjajahan telah melahirkan rasa kejuangan setia kawan, sehingga akan terhindar rasa saling mencurigai atau keinginan untuk menang sendiri, demikian juga perasaan tertindas oleh penjajah telah menggugah dan menumbuh

suburkan semangat nasionalisme sehingga terbentuk semangat persatuan dan kesatuan. Kesadaran yang demikian itu tumbuh seiring dengan keyakinan bahwa hanya melalui rasa setia kawan, jiwa nasionalisme, dan rasa persatuan kesatuan Indonesia bisa kuat dan merdeka.

Setelah melihat perjalanan sejarah bangsa Indonesia masa lalu, kemudian akan menjadi perbandingan perjuangan masa kini yang telah menempatkan bangsa Indonesia dalam kancah pergaulan internasional. Ada sebagian masyarakat yang telah menikmati hasil pembangunan dengan baik, akan tetapi pada sisi yang berbeda masih banyak lagi dari generasi bangsa hingga saat ini belum menikmati hasil kemerdekaan, para pemimpin hanya melakukan kegiatan rutinitas biasa tanpa ada usaha untuk menjadikan bangsa ini menjadi tuan di negerinya sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sebagian orang merasakan menjadi TKI di negeri sendiri, Indonesia merindukan pemimpin bangsa yang berani mengambil risiko yang besar untuk menjadi contoh dan memelopori semua usaha guna mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu pemimpin bangsa yang mencintai rakyatnya dan mencintai bangsanya demi kemakmuran Bangsa dan Negara Indonesia tercinta.

Peran pemimpin nasional harus mampu mencerminkan kedalaman pemahaman Pancasila dalam setiap kebijakan dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mempunyai pemahaman yang utuh terhadap wawasan nasional Indonesia, dengan demikian hadirnya figur pemimpin nasional harus bersikap ke-bhinekaan atau plural dengan

menerima segala keberagaman pemahaman dalam satu kerangka tujuan nasional yang telah dicita-citakan bangsa Indonesia. Wawasan Nasional Indonesia lahir dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan berdasarkan pandangan geopolitik bangsa Indonesia sehingga mampu menjadi acuan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep dasar wawasan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan konsep dasar kemandirian ekonomi bangsa, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Makna Pancasila secara Ekonomi.

Perjalanan panjang bangsa Indonesia yang dimulai pada masa sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan Nusantara sampai pada periode Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Maja Pahit dan selanjutnya mengalami pembaharuan nilai-nilai keyakinan berdasarkan pengaruh Agama Hindu, Budha, Islam dan Nasrani. Akumulasi dari perjalanan pengalaman hidup dan akumulasi dari interaksi berbagai nilai agama tersebut telah melahirkan suatu budaya bangsa Indonesia sebagai sintesa yang nantinya akan melahirkan jati diri bangsa yang mengandung ciri khas, karakter dan sifat serta parameter sehingga berbeda dengan bangsa lain, rumusan tersebut menjadi Dasar Negara yang oleh pendiri bangsa Indonesia disimpulkan menjadi lima sila atau Pancasila. Secara historis nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari sentesa perjalanan hidup bangsa Indonesia, sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Pancasila sudah ada sejak awal keberadaan bangsa Indonesia, akan tetapi belum dirumuskan secara sistematis dalam satu sila-persila. Oleh karena itu secara fakta

obyektif dan secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan pengamalan Pancasila akan menjadi alat perekat bangsa tanpa membedakan status sosial, tanpa membedakan suku, adat, ras dan agama. Dengan dasar pengertian diatas maka para generasi penerus bangsa dari manapun sumbernya berkewajiban untuk menjaga kelestarian nilai-nilai Pancasila, dan sekaligus untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan pemahaman Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam kajian ilmiah. Sehingga dikemudian hari para generasi penerus akan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dan tak lekang oleh waktu serta tidak sirna oleh pergeseran nilai dan budaya dalam pergaulan dunia internasional.⁵⁴

Dasar pemahaman terhadap falsafah Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa manusia Indonesia adalah makhluk sosial sekaligus sebagai makhluk individu yang mempunyai naluri, akhlak perilaku, daya pikir intelektual dan sebagai makhluk yang harus berkarya dalam fungsinya sebagai khalifah atau pemimpin diatas dunia, sehingga mampu berbuat yang terbaik dan memberi manfaat

⁵⁴ Pengertian Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan sekaligus sebagai pandangan filosofis bangsa Indonesia mempunyai korelasi dan konsekuensi logis bahwa bangsa Indonesia mempunyai kewajiban untuk meletakkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat dan bernegara. Secara filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, demikian juga dalam konsep bernegara bangsa Indonesia secara filosofis mengedepankan persatuan dan berkerakyatan, karena konsekuensi rakyat merupakan dasar ontologis demokrasi dan sekaligus rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Jakarta : Paradigma, 2010), 4.

bagi dirinya, orang lain dan bermanfaat bagi sekalian alam. Pembahasan Pancasila sebagai kerangka ilmiah menempatkan Pancasila sebagai obyek yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, akan tetapi dalam kajian ini menggunakan pendekatan Pancasila dalam sudut pandang ekonomi, sehingga dapat difokuskan menjadi sudut pandang Ekonomi Pancasila. Kajian tersebut dapat bersifat empiris akademis atau filosofis murni. Dengan demikian harus difahami terlebih dahulu bahwa Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia, sehingga Pancasila dapat dilihat dari kajian hasil budaya berupa, lembaran sejarah berupa kitab-kitab para pujangga, bukti-bukti sejarah berupa Prasasti dan peninggalan kejayaan kerajaan zaman dahulu, benda-benda budaya yang bernilai sejarah, lembaran negara dan naskah-naskah kenegaraan. Adapun dari sisi non empiris berupa nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral dan tata krama adat istiadat, nilai-nilai dan norma bersifat keagamaan atau religius yang dapat dimanifestasikan pada kepribadian bangsa, sifat dan karakter masyarakat secara umum, serta tata pola budaya bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Pemahaman terhadap implementasi Pancasila dalam kehidupan kebangsa dan bernegara tidak boleh mematikan aspirasi dari budaya lokal kedaerahan, artinya Pancasila memberikan ruang gerak tumbuh dan berkembangnya budaya lokal dengan tidak bertentangan pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri, hal tersebut beriringan dengan konsep eksistensi negara dan bangsa atau *Nation Building*. Sehingga pada tataran implementatif Pancasila mampu menyatukan dan sekaligus

sebagai alat perekat budaya antar daerah. Dengan demikian komitmen terhadap Pancasila tidak didasarkan pada pemahaman perorangan belaka atau suatu kelompok tertentu, akan tetapi didasarkan pada konsep kemanusiaan atau humanisme. Dengan demikian pemahaman Pancasila dapat dikembangkan menjadi konsep kepedulian terhadap masalah-masalah kemanusiaan seperti masalah kesehatan masyarakat, pemerataan hasil pembangunan, pembukaan lapangan pekerjaan bagi pengangguran, tingkat pendidikan rakyat dan upaya menetralisasi perbedaan antar masyarakat sehingga terhindar dari perselisihan yang berakibat pada permusuhan atau bencana perang. Dalam konsep berbangsa dan bernegara serta tatanan pada pergaulan internasional secara umum melalui tahapan konsep nasionalisme (politik), kemudian humanisme *universal (cultural)* dan pada puncaknya mencapai tataran norma humanitarianisme (kemanusiaan bersama).⁵⁵

Pancasila dapat diartikan sebagai simbol ke-bhinekaan atau keberagaman dengan kata lain pemahaman terhadap Pancasila masih memberikan ruang gerak dari berbagai pola tingkah laku atau *patterns of behavior* dari setiap kelompok kebangsaan, suku, adat dan ras dari semua warga negara. Bila dilihat dari sejarah lahirnya, Pancasila merupakan hasil kompromi politik yang mampu menyatukan keberagaman kelompok atau heteroginitas kepentingan. Hal tersebut juga berkaitan dengan kenyataan bahwa tidak ada bangsa di dunia ini yang dibangun atas dasar satu kebudayaan nasional tunggal, sehingga

⁵⁵ Siswanto Masruri, *Humanitarianisme Soejatmoko*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), x.

makna Pancasila menjadi perekat dari keberagaman tersebut atau multi kulturalisme. Sehingga lebih jauh dari itu diperlukan adanya pendidikan kewarganegaraan atau *Civic Education* di kampus-kampus perguruan tinggi yang terasuk UNKRIS dengan harapan dapat menumbuh-kembangkan pemahaman terhadap demokrasi Pancasila, makna pluralitas serta toleransi terhadap keberagaman. Pada sudut pandang yang berbeda, harus dihindari adanya pemahaman Pancasila sebagai ideologi formal yang pemaknaannya dan penafsirannya serta implementasinya tergantung pada penguasa negara, sehingga Pancasila hanya dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan, dan apabila penguasa tersebut melakukan kelalaian atau kecerobohan politik yang berakibat pada tumbangny suatu rezim kekuasaan maka Pancasila terkena dampak negatifnya, untuk itulah diperlukan berbagai pendalaman konsep implementatif Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang menyentuh berbagai aspek kebutuhan masyarakat, dan pemurnian konsep implementatif yang dalam hal ini adalah konsep Ekonomi Pancasila.

Memang sekilas Pancasila sebagai suatu ideologi negara masih bersifat normatif, belum menyentuh hal-hal yang substansial, maka sudah sepatutnya generasi penerus bangsa ini melanjutkan penjabaran Pancasila menjadi konsep yang secara khusus menyentuh langsung dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya koridor sebagai jarak pemahaman inilah maka konsep pemikiran Pancasila menjadi dominasi penguasa. Pada zaman Orde Lama, Pancasila dapat diterjemahkan dalam kebijakan negara berupa

konsep Nasakom atau Nasionalisme, Agama dan Komunis. Kemudian diterjemahkan menjadi ekonomi terpimpin dan selanjutnya menjadi demokrasi terpimpin, akan tetapi kesemuanya kebijakan tersebut berakhir pada kemutlakan penguasa dalam pemaknaan Pancasila. Kemudian pada zaman Orde Baru Pancasila diposisikan sebagai alat untuk *hegemoni* dan integritas kekuasaan, kemudian dengan alasan yang sama Pancasila digunakan sebagai alat pembersih pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah, dan terakhir pada era reformasi para pemimpin bangsa seakan menjaga jarak dengan konsep pemahaman atau konsep implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga sangat jarang sekali para pemimpin bangsa ini berbicara tentang Pancasila, bahkan dalam sambutan kenegaraan sekalipun terkecuali pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober.

Pemahaman Pancasila dalam tataran wacana akademis yang telah dilakukan pada masa Orde Baru dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang; *Pertama*, sudut pandang wacana akademis bidang politik yang menempatkan Pancasila dalam konsep akademis Sistem Politik Demokrasi Pancasila, kajian dan penelitian para akademisi bersifat politis - ideologis dalam upaya untuk memasyarakatkan ideologi Pancasila secara efektif di setiap daerah atau pada setiap kelompok budaya lokal daerah, hal ini banyak difahami oleh para akademisi yang lain sebagai jenis penelitian sponsor, artinya dalam penelitian tersebut lebih mengutamakan kepentingan penguasa; *Kedua*, pemahaman Pancasila yang secara akademis dilihat dari sudut pandang ekonomi

atau sistem Ekonomi Pancasila, pada kajian ini menempatkan para akademisi sebagai pihak yang mengkritisi kebijakan ekonomi Orde Baru yang lebih mengutamakan aspek pertumbuhan atau *Economics Growth* dengan memberikan peluang sebesar-besarnya pada pelaku ekonomi besar atau para konglomerat dibandingkan dengan kesempatan yang diberikan pada pengusaha kecil, atau garis besarnya adalah konsep ekonomi Orde Baru tidak berpihak pada rakyat, karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada masa Orde Baru tidak terjadi *Trickle Down Effect*, bahkan semakin memperbesar jurang kesenjangan sosial antara para konglomerat yang berjumlah sedikit tetapi menikmati kekayaan yang melimpah, sementara rakyat yang berjumlah banyak menikmati porsi kekayaan yang terbatas sehingga angka kemiskinan cukup besar.⁵⁶

Pancasila merupakan hasil dari refleksi kontemplatif dari warisan sosio historis bangsa Indonesia, dengan demikian dapat difahami bahwa butiran nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila sudah tertanam pada diri masyarakat Indonesia jauh sebelum merdeka, bahkan jauh sebelum masa kerajaan-kerajaan di Nusantara, hal

⁵⁶ Para akademisi yang melakukan penelitian di bidang sistem politik Demokrasi Pancasila adalah Dr. Alfian (Alm) dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan juga staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). Sedangkan para akademisi yang melakukan kajian dan pemikiran mengenai sistem Ekonomi Pancasila adalah Prof. Dr. Mubyarto dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Dengan hadirnya pemikiran tentang sistem ekonomi kerakyatan atau sistem Ekonomi Pancasila menimbulkan polemik akademis bahkan menimbulkan kontraversi pendapat dikalangan para ahli ekonomi itu sendiri. Manuel Kaisiepo, *Pancasila dan Keadilan Sosial : Peran Negara* dalam buku *Restorasi Pancasila Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, (Yogyakarta : Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, 2006), 183.

tersebut terjadi karena butiran nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila secara bertahap tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Istilah Pancasila berasal dari bahasa sansekerta yang berarti lima batu karang atau lima prinsip moral, akan tetapi dibalik pemahaman Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari masih harus dicari oleh generasi penerus bangsa Indonesia, hal tersebut didasarkan pada sebagian pendapat para ahli bahwa Pancasila masih bersifat normatif dan abstrak, sehingga masih terdapat ruang untuk menggali kembali tata nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila yang selanjutnya mampu diaplikasikan secara kongkret dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah telah membuktikan bahwa dalam perjalanan bangsa Indonesia telah terjadi pergeseran pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara dipergunakan sebagai alat untuk mengekalkan atau mempertahankan kekuasaan dengan mentafsirkan Pancasila secara sepihak, yang pada akhirnya berdampak negatif bagi pemahaman Pancasila ketika terjadi pergantian kekuasaan. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga dalam memahami Pancasila, artinya sifat fleksibilitas atau kelenturan dalam pemahaman Pancasila mengandung kerawanan, dengan demikian diperlukan suatu konsep baku terhadap implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta suatu panduan baku bagi masyarakat atau pemerintah, sehingga tidak akan pernah terjadi pergeseran pemahaman, meskipun dasar pemikiran tersebut tidak menutup kemungkinan pemahaman Pancasila sebagai ideologi terbuka, artinya pemaknaan Pancasila

dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan pemikiran bangsa Indonesia dengan tidak melupakan nilai dan norma dasar yang terkandung di dalam Pancasila.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan filosofis yang merangkum tata nilai budaya bangsa Indonesia bersifat universal serta dapat dimaknai secara kongkrit dalam kehidupan sehari yang meliputi tiga tata hubungan dasar manusia; *Pertama*, memberikan pedoman dasar terhadap persepsi manusia sebagai makhluk yang berkeyakinan terhadap hakekat Ketuhanan sehingga mampu melahirkan sikap keimanan dan ketakwaan serta kepercayaan akan adanya hari pembalasan dari segenap amal perbuatan yang dilakukan di dunia ini setelah proses kematian. Keyakinan akan Ketuhanan tersebut juga akan melahirkan sikap keikhlasan dalam berbakti pada bangsa dan negara, serta menumbuhkan sikap kepedulian pada sesama manusia serta sikap bertanggung jawab pada kelestarian alam demi menjaga lingkungan yang harmonis untuk generasi mendatang; *Kedua*, memberikan pedoman dasar tata pergaulan antar sesama manusia dalam bentuk etika pergaulan sesama anak bangsa Indonesia dan etika pergaulan internasional, sikap tersebut juga melahirkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab pada keluarga, tanggung jawab pada lingkungan sosial dan tanggung jawab pada Tuhan. Implementasi sikap tersebut akan melahirkan sikap toleransi atas perbedaan dan dapat menerima paham pluralisme dengan mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan, hal tersebut sangat bersesuaian dengan semboyan

bangsa Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” artinya berbeda-beda tetapi dalam satu rangkaian kemajemukan Negara Kesatuan Republik Indonesia; *Ketiga*, memberikan pedoman dasar dalam menjaga kelestarian lingkungan, sehingga mampu berkarya dalam bentuk tata kelola ekonomi yang tidak merusak lingkungan ekosistem yang telah disediakan oleh Tuhan berupa kekayaan alam dan kesuburan tanah serta aneka potensi kelautan. Dengan demikian pemaknaan Pancasila secara filosofis akan menghasilkan sikap ketertiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di segala aspek kehidupan, sehingga lebih jauh dari itu diharapkan dengan pengamalan Pancasila secara utuh dan dengan semangat religius agama akan menjauhkan diri dari kemungkinan terjadinya praktik KKN atau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam sudut pandang yang berbeda nilai-nilai filosofis Pancasila dapat dimaknai menjadi tiga pokok bahasan; *Pertama*, hakekat keyakinan akan Ketuhanan yang menghasilkan ketakwaan; *Kedua*, pemaknaan rasa kemanusiaan yang melahirkan sikap saling pengertian dalam perbedaan dan kerukunan antar masyarakat dalam berbangsa dan bernegara serta sikap kepedulian dan gotong-royong; *Ketiga*, pemaknaan pada sila persatuan, sila kerakyatan dan sila keadilan yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan.⁵⁷

⁵⁷ Meskipun nilai-nilai luhur dan norma yang terkandung dalam pemaknaan sila-sila Pancasila mempunyai nilai universal dan memiliki tafsir beragam, akan tetapi terangkum dalam satu kesatuan. Sehingga realisasi nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila harus mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan tata sosial kemasyarakatan, kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akan melahirkan masyarakat yang tertib hukum dan kesadaran akan pentingnya tata pemerintahan yang bersih dari KKN

Pemikiran tentang Ekonomi Pancasila secara umum didasarkan atas keinginan luhur dan rasa nasionalisme sejati serta adanya kepedulian sosial atas nasib bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita nasionalnya, yaitu perekonomian yang adil dan menjamin kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia atau paling tidak secara bertahap dapat mengurangi angka pengangguran dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat secara merata. Konsepsi tentang Ekonomi Pancasila pada awal berdirinya negeri ini telah digagas dan oleh pendiri bangsa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yang selanjutnya oleh para ahli dicoba untuk dijabarkan dalam kerangka teori pemikiran sehingga mampu diaplikasikan oleh bangsa Indonesia dalam bentuk tata kelola perekonomian yang memposisikan masyarakat Indonesia sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek dalam proses pembangunan berbangsa dan bernegara. Pada awal kesadaran untuk berfikir ulang terhadap konsep Ekonomi Pancasila yang dimotori oleh kalangan akademisi yaitu : Emil Salim, Sri Edi Swasono, Mubyarto dan masih banyak lagi para pemikir yang berusaha untuk menggali wujud konsep pemikiran tentang Ekonomi Pancasila, rangkuman pendapat para ahli tersebut tentang ciri-ciri sistem Ekonomi Pancasila sebagai berikut; *Pertama*, dasar pemikiran Ekonomi Pancasila didorong oleh semangat nasionalisme dan cinta tanah air yang memposisikan keikhlasan tanpa pamrih dan secara tulus untuk berjuang di bidang ekonomi demi

bangsa dan negara dengan keyakinan dan kemantapan berfikir bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan jalan bagi ketulusan niat segenap elemen bangsa untuk membangun negerinya; *Kedua*, adanya kesadaran kolektif segenap anak bangsa untuk berpartisipasi aktif dalam semua bidang kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi, bentuk partisipasi tersebut dalam wujud pemikiran, partisipasi dalam membuka lapangan pekerjaan baru atau berusaha secara langsung dan tak langsung berpengaruh terhadap perbaikan nasib bangsa; *Ketiga*, terbukanya kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia untuk mengembangkan potensi kewirausahaan atau terbukanya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, sehingga konsep konglomeratisasi atau terbukanya kran peluang ekonomi hanya pada para konglomerat atau pelaku ekonomi besar menjadi sesuatu yang tabu; *Keempat*, keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi harus berorientasi pada kemakmuran rakyat semesta, artinya kemakmuran masyarakat secara umum harus diutamakan; *Kelima*, secara bersama-sama, gotong-royong menjalin persatuan dan kesatuan bangsa secara proporsional guna mewujudkan suatu sistem ekonomi yang tangguh dan mampu bersaing dengan faham ekonomi bangsa lain yang tidak sesuai dengan dasar budaya bangsa Indonesia; *Keenam*, berusaha seoptimal mungkin untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi dominasi asing terhadap kehidupan perekonomian bangsa Indonesia, yang secara bertahap akan menuju sistem perekonomian yang mandiri; *Ketujuh*, adanya pola dan tata kelola ekonomi yang aplikatif yang secara akademis mudah

difahami oleh masyarakat secara luas dan secara langsung dan tak langsung berdampak pada kenaikan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh.⁵⁸

Istilah Pancasila terdapat pada Kitab Negarakertagama pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit yang berlokasi di Jawa Timur. Saat ini pengarang kitab tersebut adalah Empu Prapanca. Meskipun secara formal istilah Pancasila muncul pada Kerajaan Majapahit (1296 - 1478 M) akan tetapi dalam sudut pandang implementatif nilai dan norma Pancasila telah tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia, karena Pancasila digali dari kepribadian bangsa yang tercermin dari sikap kebhinekaan dan keragaman suku, kebudayaan, dan agama yang dianut oleh bangsa

⁵⁸ Pendapat Mubyarto (1981) tentang ciri-ciri sistem Ekonomi Pancasila; 1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral; 2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial (Egalitarianisme) sesuai asas-asas kemanusiaan; 3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap-tiap kebijakan ekonomi; 4. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling kongkret dari usaha bersama; 5. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan sosial. Sedangkan Sri Edi Swasono (1981) yang menggambarkan orientasi atau wawasan sistem Ekonomi Pancasila pada sila-sila Pancasila yaitu; 1. Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya atau berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan antar sesama, pengisapan dan subordinasi ekonomi - modern); 3. Persatuan (kebersamaan, kekeluargaan, gotong-royong, tidak saling mematikan - nasionalisme); 4. Kerakyatan (demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan ekonomi rakyat, mengutamakan hajat hidup orang banyak); 5. Keadilan sosial (persamaan, pemerataan, kemakmuran rakyat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang). Sri - Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika, Mewaspada Globalisme dan Pasar Bebas*, (Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Pancasila - UGM, 2005), 99.

Indonesia yang tersebar di belasan ribu pulau dalam wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan disatukan oleh satu prinsip dasar yaitu satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa persatuan sehingga dapat menetralsir atau setidaknya mampu untuk menyesuaikan diri pada era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan perdagangan antar negara, kemajuan dan kecanggihan teknologi serta perkembangan secara cepat arus informasi, arus pergerakan barang dan jasa serta transaksi keuangan antar wilayah yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Sehingga dalam kehidupan tata pemerintahan diperlukan penegakkan hukum yang kuat berdasarkan nilai filosofis bangsa Indonesia sendiri, serta berdasarkan nilai yuridis yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian dalam tata pergaulan internasional mampu menempatkan Indonesia sebagai negara yang tertib dan berbudaya serta negara yang menjunjung tinggi kehormatan di mata hukum.⁵⁹

Pancasila sebagai ideologi negara diyakini dapat mempersatukan berbagai perbedaan pendapat dan tafsir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mampu menjadi simbol kebanggaan bangsa dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang mengandung arti penghormatan terhadap kemajemukan, sehingga pemahaman dan pemikiran murni terhadap Pancasila mampu merefleksikan sikap

⁵⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, (Jakarta : Pusataka LP3ES, 1985), 16.

persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat menghindarkan terjadinya konflik sosial budaya karena perbedaan dalam kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang dilatarbelakangi oleh lemahnya penyelenggara negara dalam mengimplementasikan nilai dan norma Pancasila karena didorong oleh sikap feodalistis dan paternalistis yang berdampak pada konflik horizontal sehingga berakibat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam bidang ekonomi penyimpangan terhadap nilai dan norma Pancasila akan melahirkan praktik ekonomi yang bernuansa korupsi, kolusi dan nepotisme melahirkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada pengusaha besar atau konglomerat, sehingga hasil pembangunan terkonsentrasi pada sebagian kecil masyarakat. Praktik ekonomi tersebut berdampak pada melebarnya jurang antara yang kaya dan yang miskin, yang pada akhirnya melahirkan rasa ketidak-adilan dalam kehidupan ekonomi. Bentuk aspirasi masyarakat terhadap ketidak-adilan ekonomi tersebut salah satunya direspon dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang diharapkan akan melahirkan pemerataan hasil pembangunan dimasa yang akan datang.⁶⁰

⁶⁰ Kebijakan otonomi daerah diarahkan kepada pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut; *Pertama*, peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas masyarakat serta aparatur pemerintahan daerah; *Kedua*, kesetaraan hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah dan antar pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan; *Ketiga*, untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah; *Keempat*, menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah. (Ketetapan MPR RI nomor IV/MPR/2000 tentang *Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*).

Perdebatan para ahli yang memposisikan Pancasila pada sudut pandang yang berbeda; *Pertama*, Pancasila diposisikan sebagai konsep pemikiran yang murni, netral dan sekuler sebagai hasil dari kompromi politik dari berbagai latar belakang kelompok masyarakat; *Kedua*, Pancasila diposisikan sebagai ideologi terbuka sehingga terdapat suatu ruang gerak untuk mengelaborasi Pancasila sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang berlaku pada zamannya. Bila dilihat dari kedua cara pandang tersebut sekilas sepertinya terjadi harmonisasi keseimbangan pemikiran yang saling melengkapi, yaitu bertumpu pada satu titik temu pemikiran untuk mengembangkan proses pencarian dan sekaligus pendalaman konsep Pancasila yang secara nyata dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Pancasila dapat menjadi pedoman dasar guna mempertemukan semua pandangan yang berbeda dari segenap anak bangsa pada zamannya. Akan tetapi bila dilihat lebih mendalam terhadap pertemuan kedua pemikiran tersebut maka mengandung beberapa unsur kerawanan; *Pertama*, memposisikan Pancasila sebagai hasil pemikiran yang abstrak dalam implementasinya untuk kehidupan sehari-hari yang sekaligus memposisikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka kerawanan yang timbul adalah multi tafsir terhadap Pancasila yang sangat dipengaruhi oleh dasar filosofis kepentingan atau penafsiran sepihak; *Kedua*, kerawanan yang ditimbulkan oleh gempuran Era Globalisasi dan faham ekonomi pasar bebas yang akan mampu menarik semua elemen bangsa pada posisi untuk mengutamakan kepentingan kelompoknya masing-masing bahkan

kepentingan pribadi, kenyataan inilah yang pada era reformasi melahirkan istilah KKN atau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; *Ketiga*, menurunnya ketertarikan semua elemen masyarakat baik pada kalangan para pejabat birokrasi, para akademisi bahkan para pakar serta masyarakat untuk berbicara kembali tentang Pancasila, atau bahkan lebih jauh dari itu berusaha menggali potensi nilai dan norma yang terkandung pada Pancasila, atau dalam istilah lain terjadi semacam trauma mayoritas, dimana secara mayoritas para elemen bangsa yang semestinya menjadi unsur penopang tetap tegaknya Pancasila sebagai ideologi negara, tatapi memposisikan diri pada pihak yang berlawanan atau paling tidak memposisikan sebagai pihak yang pasif tanpa ekspresi; *Keempat*, dikhawatirkannya akan muncul generasi yang tidak peduli lagi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus tidak peduli lagi terhadap Pancasila.

Solusi yang dikembangkan dalam pemikiran secara obyektif akademis guna menetralsir terhadap kerawanan pemahaman pemikiran kepada Pancasila sekaligus untuk mencari kompromi kepentingan antar masyarakat dengan berbagai latar belakang pendidikan dan berbagai latar belakang sosial yaitu; *Pertama*, harus dibangun kembali kepercayaan antar elemen bangsa dengan memposisikan semua pihak sebagai generasi penerus bangsa yang secara proporsional mempunyai tanggung jawab bersama dalam mengawal tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, sehingga tercipta satu kesatuan dan persatuan yang utuh dan menyeluruh untuk memikul tanggung jawab

sesuai posisi dan proporsi masing-masing, hal tersebut sudah lebih awal dimotori oleh para pemuda pendahulu bangsa dalam wujud gerakan perjuangan yang melahirkan Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa Indonesia; *Kedua*, segenap elemen bangsa yang secara akademis mempunyai kepedulian dan pemahaman terhadap Pancasila untuk duduk bersama guna mencari formula baku atau mencari rumusan nyata terhadap Pancasila untuk mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama rumusan tentang dasar filosofis dan implementatif tentang konsep demokrasi Pancasila yang mampu mempersatukan semua elemen bangsa sehingga terhindar dari konflik horizontal dan konflik vertikal, dengan demikian akan tertanam semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta merumuskan konsep Ekonomi Pancasila yang dalam tataran pergaulan internasional mampu mencegah timbulnya dampak negatif Era Globalisasi ekonomi, dan secara nasional mampu memberi arah bagi pelaku ekonomi dan sekaligus memberikan rambu-rambu bagi penguasa dalam mengeluarkan produk kebijakan ekonomi; *Ketiga*, merumuskan kembali norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman dasar yang mampu memosisikan secara harmonis, untuk menata hubungan antara penguasa, kalangan akademis dan masyarakat dalam satu tujuan dan cita-cita nasional.

Kerangka pemikiran untuk meletakkan norma dasar Ekonomi Pancasila bertumpu pada; *Pertama*, budaya dasar bangsa Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia; *Kedua*, aturan-aturan baku yang sudah ditetapkan menjadi

kesepakatan bersama atau hasil konsensus dan kesepakatan; *Ketiga*, mengakomodasi kepentingan dan tuntutan era globalisasi sebagai bentuk penyesuaian diri dalam pergaulan internasional dengan tidak mengabaikan kepentingan dalam negeri, artinya kepentingan masyarakat secara luas lebih diutamakan, sehingga arah kebijakan nasional lebih mengutamakan pemerataan hasil pembangunan dari pada hanya mengejar pertumbuhan semata yang menciptakan sistem konglomerasi ekonomi. Rambu-rambu yang dapat diakomodasikan sebagai bahan acuan untuk menyusun konsep Ekonomi Pancasila adalah; *Pertama*, yaitu acuan sebagai mana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 : a. Pada akhir alinea pertama yang berbunyi “perikemanusiaan dan perikeadilan”, b. Pada akhir alinea kedua yang berbunyi “merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”, c. Alenia ketiga berbunyi “berkehidupan kebangsaan yang bebas”, d. Alenia keempat yang meliputi “pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, berkedaulatan rakyat”. Kemudian pada akhir alenia keempat mencantumkan lima sila dalam Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; Acuan *Kedua*, adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada awalnya dan belum dilakukan perubahan adalah sebagai berikut :

a. Pendalaman materi Pasal 33 telah memosisikan dasar demokrasi atau keadilan sosial yang dapat diartikan sebagai pemerataan hasil pembangunan, sehingga implementasi demokrasi ekonomi secara nyata adalah menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan dan sekaligus subyek, sehingga garis batas yang harus ditepati adalah sinkronisasi antara demokrasi ekonomi dengan demokrasi Pancasila, tarik ulur antara keduanya secara sinergis akan menghasilkan kemakmuran secara merata, sehingga pemaknaan selanjutnya adalah perekonomian yang disusun atas dasar semangat kerakyatan bukan semangat perkongsian konglomerat yang membuat perekonomian terpusat pada satu kelompok pelaku ekonomi, tetapi perekonomian yang mengedepankan keadilan sosial. Sehingga demokrasi ekonomi Indonesia harus bebas dari sistem *Free Fight Liberalism* atau persaingan pasar bebas yang banyak melahirkan kemiskinan model baru, karena dengan dasar asumsi yang berbeda antara teori dan praktik di lapangan.

b. Prioritas pembangunan mengedepankan kemakmuran masyarakat secara umum, bukan kemakmuran kelompok tertentu atau orang-orang tertentu, aspek tersebut merupakan cermin dari sikap ksatria yang mengutamakan kepentingan orang banyak, olahan kepribadian ini merupakan hasil dari sentesa norma dan nilai-nilai luhur masa perjuangan kemerdekaan dan era sebelum dan sesudahnya. Sehingga tercipta semangat kebersamaan dan gotong-royong yang menonjol dari kepribadian bangsa Indonesia.

c. Hubungan harmonis antara pemilik modal dan pekerja dalam kehidupan pertanian atau tata niaga perdagangan bahkan usaha kelautan oleh nelayan yang tidak jarang diikat dengan pola hubungan kekerabatan atau kekeluargaan sehingga terjalin hubungan emosional yang tidak jarang diteruskan dalam ikatan pernikahan antar keluarga. Hubungan kekerabatan yang akrab disebut dengan gotong-royong atau *Olobis Kuntol Baris* telah menempatkan budaya bangsa dalam perilaku keseharian menjadi perilaku ekonomi yang diabadikan dalam satu wadah organisasi gerakan ekonomi rakyat dengan nama KOPERASI.

d. Liberalisme ekonomi yang dirancang dalam tata kelola perekonomian eropa secara filosofi tidak sesuai dengan semangat yang tercermin dari demokrasi Pancasila, hal tersebut lebih nyata bila dilihat dari segi legislasi yang menyatakan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

2. Kajian Pemikiran Dasar Negara.

Dinamika perjalanan bangsa Indonesia untuk menuju kompromi politik dan kesepakatan bersama dalam rangka menentukan Dasar Negara telah mencapai titik harmonis kesefahaman, pada tanggal 1 Juni 1945 saat rapat Dokoritsu Tyoosakai disampaikan konsep dasar falsafah negara oleh Bung Karno sebagai pembicara tunggal pada acara pandangan Oemoem dengan judul "Lahirnya Pancasila", dalam penyampaian tersebut Bung Karno tanpa menggunakan teks naskah, sehingga naskah yang tersimpan hingga saat ini adalah merupakan hasil laporan stenografi, sehingga dari laporan stenografis tersebut

difahami bahwa Konsep Pancasila pada waktu itu bukan merupakan hasil pengembangan tesis ilmiah, akan tetapi lebih merupakan tawaran dan ajakan politik atau *Political Appeal* untuk menentukan Dasar Negara, tawaran tersebut menjadi tiga pilihan yaitu : Pancasila, Trisila dan Ekasila. Dengan wacana tiga pilihan tersebut berarti membuka peluang perdebatan para peserta rapat waktu itu, akan tetapi pada akhirnya disepakati dengan pilihan Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara atau *Philosophische Grondslag* yang perumusan resminya terdapat pada Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian dapat difahami bahwa sejak kelahirannya Pancasila mengundang perdebatan pemahaman, terutama dalam menempatkan posisi dan proporsi antar sila, pada sebagian ahli menempatkan sila Pancasila sejajar satu dengan yang lain, tetapi ada juga pendapat ahli yang memposisikan satu sila menjiwai sila-sila yang lain, terlepas dari perdebatan para ahli tersebut para generasi penerus bangsa memahaminya bahwa konsep dan pemahaman implementatif Pancasila membuka ruang untuk memperdalam kandungan butir-butir yang terkandung di dalamnya. Artinya pemaknaan Pancasila secara Implementatif terutama penekanan pada konsep Ekonomi Pancasila masih membuka ruang gerak nalar secara konseptual, sehingga nantinya Pancasila akan terlindungi dari tarikan-tarikan kepentingan politik yang menafsirkan Pancasila secara sepihak, artinya karena kepentingan sekelompok orang atau bahkan untuk kepentingan pribadi Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi memperoleh kelanggengan kekuasaan sehingga apabila rezim penguasa tersebut melakukan

kesalahan dalam manajemen kekuasaan maka berdampak negatif pada tafsir implementatif Pancasila. Dengan demikian rumusan terhadap hadirnya konsep Ekonomi Pancasila menjadi wacana strategis untuk dibahas dan didiskusikan secara bersama antar berbagai elemen bangsa sehingga konsep implementatifnya tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dan perkembangan budaya dan kepentingan masyarakat secara umum. Adapun rumusan norma dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya secara prinsip tidak berubah, sehingga dari pemahaman tersebut diatas diperlukan tafsir resmi Pancasila sebagai Dasar Negara pada bidang ekonomi yang mampu menjadi acuan bagi masyarakat, pedoman bagi pelaku ekonomi serta menjadi pegangan dan dasar referensi bagi penguasa pemerintahan dalam menentukan suatu kebijakan ekonomi.

3. Pengembangan Nilai Luhur Bangsa.

Proses pendewasaan bangsa Indonesia pada pengembangan nilai luhur bangsa, aspek ekonomi telah mengalami pasang dan surut seiring dengan perjalanan waktu, berlalu dan silih berganti tetapi kenangan itu begitu indah untuk dilupakan bahkan harus diposisikan sebagai rangkaian sejarah perjalanan bangsa sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ekonomi di masa yang akan datang. Pada kurun waktu tertentu bangsa Indonesia telah mengalami dua kali periode perekonomian yaitu; *Pertama*, pada masa perekonomian liberal yang mengedepankan kebebasan berkreasi pada para pelaku ekonomi tanpa memperdulikan dampak menyeluruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara serta dampak pada pencemaran

lingkungan; *Kedua*, pada masa perekonomian dipimpin yang memprioritaskan jalur komando, sehingga perkembangan perekonomian diatur secara sentralistik tanpa memedulikan pemerataan atau tanpa mempertimbangkan kepentingan daerah. Dampak dari implementasi kedua pemikiran ekonomi tersebut telah berakibat berakhirnya rezim kekuasaan Orde Lama maupun Orde Baru yang melakukan tingkat kesalahan yang sama yaitu meningkatnya angka inflasi yang tak terprediksikan, kenaikan harga kebutuhan pokok yang tak sesuai dengan kemampuan masyarakat serta menurunnya kepercayaan pelaku ekonomi terhadap fundamental perekonomian Indonesia baik dari sudut pandang mikro ekonomi ataupun makro ekonomi.⁶¹

Puncak dari perjuangan bangsa Indonesia untuk dapat hidup secara mandiri dalam segala aspek kehidupan terutama kemandirian ekonomi telah sampai pada tonggak baru perjuangan, yaitu Kemerdekaan dengan Proklamator Soekarno - Hatta. Pernyataan Kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tekad dan kepercayaan pada diri sendiri untuk memasuki kehidupan kebangsaan yang bebas dengan cita-cita bulat menuju kehidupan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Mengandung pengertian untuk mencari

⁶¹ Antisipasi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat secara cepat dapat dilakukan seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersamaan dalam menata perekonomian utamanya perekonomian yang disandarkan pada kesepakatan bersama atau konsensus nasional, yaitu Ekonomi Pancasila. Boediono dan Mubyarto pada buku *Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta : BPFE, 1997), 2.

format baru pembangunan berbangsa dan bernegara setelah melalui proses panjang penjajahan, menuju kemandirian ekonomi yang ditopang oleh kekuatan bangsa sendiri. Dengan lahirnya Pancasila sebagai Ideologi dan Falsafah Negara, maka kondisi tersebut dapat dimaknai sebagai puncak prestasi kultural dan intelektual bangsa Indonesia dan sebagai bentuk dari akumulasi pengembangan nilai luhur bangsa. Pancasila bersifat integratif dan merakyat karena merupakan hasil jerih payah bangsa Indonesia yang merupakan akumulasi selektif dari berbagai unsur budaya bangsa Indonesia. Sehingga arah kebijakan pembangunan bangsa Indonesia di masa depan harus berorientasi pada pencarian makna Pancasila dalam proses pembangunan berbangsa dan bernegara, yang secara empiris mencerminkan kepribadian bangsa yang unggul dalam budaya ditengah pergaulan internasional.

Tingkat kesadaran bangsa Indonesia dalam berperilaku dan bertindak merupakan hasil dari proses perjalanan panjang yang mencerminkan adat ketimuran dengan menjunjung tinggi sopan santun dan tata krama atau unggah-unggoh dalam terminologi Jawa, sehingga etika ketimuran secara otomatis berinteraksi dengan nilai-nilai dan norma agama yang dianut oleh setiap bangsa Indonesia sehingga secara otomatis menjadi warisan budaya luhur bangsa Indonesia. Pada periode pengembangan berfikir tentang filosofi dasar negara dalam tataran kehidupan sehari-hari, maka pengertian Pancasila harus ditempatkan menjadi landasan etika untuk mengambil suatu kebijakan atau landasan untuk membuat suatu aturan yang

berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, etika tersebut merupakan warisan budaya luhur sebagai wujud keikhlasan untuk berbuat bagi orang lain tanpa pamrih dan mampu mewujudkan sikap tenggang rasa serta kepedulian sosial yang bermuara pada sikap kebersamaan dan gotong-royong, etika dapat dimaknai sebagai refleksi kritis dari tata nilai dan moralitas yang telah berlaku pada kehidupan masyarakat secara umum.⁶²

Nilai luhur bangsa yang merupakan hasil sintesa dari akumulasi nilai budaya dan sentuhan dasar religius dapat diwujudkan menjadi tiga sudut pandang; *Pertama*, kesadaran akan Ketuhanan yang memposisikan manusia sebagai hamba Tuhan dan sekaligus sebagai wakil Tuhan di dunia ini atau Khalifah Fil Ard, dengan kesadaran tersebut maka manusia mempunyai dua misi suci yaitu berbuat baik di dunia sebagaimana Tuhan berbuat baik pada manusia dan menjaga kelestarian alam dari kerusakan. Dengan keyakinan akan Ketuhanan tersebut akan melahirkan rasa cinta kasih terhadap sesama dan cinta kasih terhadap alam, memposisikan diri sebagai hamba dan makhluk Tuhan adalah bentuk kesadaran prima, karena melalui kesadaran inilah akan melahirkan sikap perilaku bahkan cara berfikir dan terbangunnya *Mind Set* secara optimal, karena pada posisi ini manusia akan sadar bahwa dirinya selalu diawasi dan dikontrol langsung oleh Tuhan dalam

⁶² Para ahli membagi etika menjadi tiga pengertian yaitu; *Pertama*, etika dalam bentuk sopan santun pada kehidupan sehari-hari; *Kedua*, etika yang bersandarkan norma hukum yang berlaku pada batasan wilayah tertentu dan pada masa tertentu pula; *Ketiga*, etika yang berlandaskan nilai moral sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia. A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998), 19.

setiap tindakannya, demikian juga akan terbangun rasa pertanggung jawaban hakiki pada Tuhan terhadap apa yang dilakukan di dunia ini, dengan demikian terbangun sekaligus dua kesadaran yaitu kesadaran akan fungsi diri sendiri dan kesadaran akan tanggung jawab terhadap lingkungan. Semangat kejujuran dan rela berkorban serta kejujuran adalah bentuk kesadaran Ketuhanan yang mempunyai korelasi langsung pada sesama manusia dan sekalian alam semesta; *Kedua*, sudut pandang kesadaran akan nilai kemanusiaan yang tercermin dari sikap saling pengertian, tenggang rasa dan dapat menerima perbedaan dengan kerelaan; *Ketiga*, sudut pandang kesadaran akan peran manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, sehingga kelestarian alam dan menjaga ekosistem hewani adalah tugas manusia secara universal.

Kesadaran akan Ketuhanan akan menjadi rujukan dari kesadaran yang lainnya, karena pusat dari kesadaran adalah kesadaran beragama. Apabila dikaji lebih dalam bahwa kesadaran kemanusiaan, kesadaran intelektual, kesadaran untuk berkarya, kesadaran untuk berjuang, kesadaran akan kejujuran dan keikhlasan, kesadaran menjaga dan melestarikan alam, kesadaran untuk hidup rukun dan gotong-royong pada dinamika berbangsa dan bernegara serta kesadaran akan kerja keras dan menerima perbedaan dan berbagai jenis kesadaran lainnya adalah perwujudan dari kesadaran Ketuhanan. Sehingga para ahli dapat menganalogikan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah menjwai sila-sila Pancasila lainnya. Apabila dilihat pada masa perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa Indonesia pada

periode kerajaan dan periode perjuangan untuk merdeka sampai dengan saat ini periode untuk mengisi kemerdekaan sangat lekat dan diwarnai dengan kehidupan beragama, mulai dari agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen. Sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa manusia Indonesia adalah manusia religius, yang pada akhirnya setiap permasalahan aspek kehidupan sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman akan agamanya. Kekeliruan dalam penafsirkan pengertian agama akan melahirkan kerusakan fatal dan kerugian pada manusia yang lain seperti aksi teroris yang berdampak sangat luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara, demikian juga pemahaman yang baik dan kesadaran yang baik terhadap agamanya masing-masing akan melahirkan sikap kesetiakawanan sosial, kepedulian terhadap sesama serta mampu mendorong semangat perjuangan dan rela berkorban demi bangsa dan negara yang akan melahirkan kesejahteraan bersama.⁶³

Hasil akhir dari kesadaran akan Ketuhanan adalah Taqwa, yang memosisikan manusia untuk bergerak, berucap, berfikir bahkan berkeyakinan dengan dasar Ketuhanan, sehingga pada kondisi ini akan terlahir sikap kejujuran, keikhlasan dan kegemaran untuk membantu

⁶³ Tingkat kesejahteraan masyarakat akan ditentukan oleh kerja keras masyarakat itu sendiri, tingkat intelektualnya dan kemampuannya untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya, sehingga tercipta efisiensi optimum dalam perekonomian dengan memanfaatkan secara maksimum terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam satu rangkaian kegiatan usaha. Dan perekonomian dapat dikatakan berkeadilan apabila akses ekonomi terbuka secara proporsional pada masyarakat luas serta hasil semua produksi baik berupa jasa pelayanan dan barang konsumtif mampu terdistribusi secara adil dan merata. M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), 5.

sesama manusia yang lain. Manusia yang bertaqwa kepada Tuhan apapun agamanya akan mampu membimbing dirinya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan secara adil dan bijaksana, artinya kehidupannya tidak boros dan tidak mengambil yang bukan haknya, dengan demikian ketaqwaan akan melahirkan sikap kontrol yang permanen, karena hakekat ketaqwaan adalah kondisi kesadaran penuh manusia pada pengawasan Tuhan sehingga terhindar dari keinginan korupsi, kolusi atau nepotisme yang berujung pada kerusakan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa pendiri bangsa ini telah memperoleh petunjuk Ketuhanan yang menempatkan sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada posisi inilah terjadi perbedaan yang mengandung unsur perdebatan dasar berfikir antara konsep ekonomi liberal yang mengagungkan “kepuasaan konsumtif” untuk dipersandingkan dasar berfikir yang mengedepankan “ketaqwaan dalam perspektif ekonomi”. Sehingga pemahaman terhadap pokok perdebatan landasan filsafat teori ekonomi tersebut menjadi perbedaan orientasi yang membatasi warna dan corak perekonomian yang akan dibentuk atau pembeda pada implementasinya.⁶⁴

⁶⁴ Kejujuran adalah tanda ketaqwaan, indahny kerahasiaan dan kesempurnaan agama dan dunia. Transaksi ekonomi yang dilandaskan atas kejujuran dan ketulusan akan menghasilkan kemaslahatan atau kebaikan antar pihak, karena terhindar dari sikap penipuan, perjudian dan riba. Dengan demikian semua pihak akan diuntungkan, karena keterbukaan pada obyek transaksi bahkan lebih jauh dari itu terselamatkan dari niat jahat yang tersimpan dalam hati para pihak. Syaikh `Abdul Qadir Al - Jailani dalam bukunya *Raihlah Hakikat Jangan Abaikan Syariat* yang diterjemahkan oleh Tatang Wahyudin dari judul aslinya *Adab*

Perdebatan pemikiran tersebut akan terlihat lebih nyata bila digunakan pisau analisis obyektivitas akademis, artinya kedua argumen tersebut disejajarkan pada posisi dan proporsi yang sama. *Pertama*, argumen yang dibangun pada kepuasan konsumtif akan melahirkan kreatifitas produksi guna memenuhi permintaan pasar baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Ujung dari argumen tersebut adalah perolehan laba perusahaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya ongkos produksi secara keseluruhan dan pengembangan perusahaan. Dari sisi yang berbeda dapat dilihat bahwa kepuasan konsumtif adalah suatu hal yang berkembang bahkan bisa dikatakan tanpa batas, kepuasan manusia akan kekayaan tanpa batas, kepuasan tak akan pernah terpuaskan selamanya karena kepuasan akan berkembang seiring perjalanan waktu dan seiring dengan pemahaman manusia atas kepuasan itu sendiri, kepuasan akan datang seiring dengan terpenuhinya keinginan. Sehingga terjadi kejar-mengejar antara kepuasan dan keinginan yang dapat diibaratkan orang berlari cepat maka yang terjadi adalah kejar-mengejar antara kaki kanan dan kaki kiri pelari tersebut secara bergantian sampai pada ujung kelelahan fisik sang pelari. Demikian juga teori ekonomi yang dibangun atas dasar kepuasan konsumtif akan berakhir pada tingkat kejenuhan pasar dan keterbatasan sumber daya alam atau keterbatasan waktu yang dialokasikan oleh Tuhan kepada manusia. Dan kecenderungan manusia pada pemahaman konsep ini adalah sikap

berlebih-lebihan serta hasrat untuk menguasai manusia yang lain. *Kedua*, argumen yang dibangun pada dasar filosofis ketaqwaan dalam perspektif ekonomi akan memposisikan manusia sebagai wakil Tuhan di dunia yang ditugaskan untuk mengelola segala sumber daya yang tersedia dan yang disediakan oleh Tuhan, sehingga manusia diposisikan sebagai pengelola saja dan bukan yang empunya. Pemahaman tersebut akan mempertebal keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia pada proses ekonomi akan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, sikap ini akan melahirkan perilaku kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan dalam aspek ekonomi. Dari sisi yang berbeda, penghayatan akan ketaqwaan akan melahirkan kejujuran dalam bertransaksi, sikap saling tolong-menolong yang memposisikan akhir transaksi bukan keuntungan semata tetapi kepuasan untuk bisa membantu atau menolong manusia yang lain. Dengan demikian transaksi ekonomi pada dasar filosofis ini akan melahirkan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan, keseimbangan antara keuntungan dan beramal dan keseimbangan antara kepuasan lahiriyah dan batiniyah. Sehingga ujung dari kegiatan ekonomi adalah Rahmatan Lil Alamin atau kesejahteraan bagi seluruh sekalian alam, bukan hanya manusia semata tetapi keseimbangan dan kelestarian alam semesta.

Perdebatan pada alam pemikiran menjadi sangat penting ketika manusia diposisikan sebagai obyek sekaligus sebagai subyek, sehingga akan menjadi tantangan yang cukup menarik bagi kalangan akademisi dan pemikir serta praktisi, pada alam pemikiran yang berbeda para ahli

mencoba untuk mengurai kerangka teori pemikiran dan sinkronisasi pemahaman yang menjadikan aspek budaya dan agama sebagai sentral perdebatan. Secara teologis diyakini agama bersumber dari Tuhan sehingga proses penalaran akal fikiran akan beriringan dengan keyakinan akan Ketuhanan, sedangkan pada posisi yang berbeda untuk obyek demokrasi adalah perwujudan dari kreasi manusia yang secara bebas beraktualisasi sebagai mahluk sosial yang selalu berinteraksi satu dan yang lain dalam suatu komunitas, akan tetapi titik temu antara agama dan demokrasi adalah manusia sebagai obyek dan subyek. Sering kali agama dijadikan alat legitimasi kekuasaan oleh para penguasa dan bahkan oleh tokoh agama itu sendiri untuk mendapatkan loyalitas tunggal dari masyarakat secara mutlak. Para ahli atau pemikir haluan kiri menyebutkan bahwa agama hanyalah tempat pelarian sementara bagi pemeluknya untuk mendapatkan ketenangan sementara dan penghiburan semu dengan harapan syurga, sementara itu agama tidak mampu menguraikan segala bentuk problematika dari segala aspek kehidupan, sehingga pemahaman sementara agama diposisikan sebagai obat penenang sementara atau daya tahan atas ketidakmampuan dan ketidakberdayaan, agama selalu mencari dasar rujukan pada Tuhan, sementara itu Tuhan tidak hadir secara empiris, dilain pihak demokrasi difahami sebagai persoalan empiris, kongkrit dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil nalar yang obyektif dari pemikir haluan kiri adalah memisahkan secara tegas batas koridor antara agama dan politik, konsep model inilah yang dikenal dengan sekularisasi politik. Pendapat berbeda

disampaikan oleh para pemikir haluan kanan yang memposisikan agama sebagai nuansa spirit semangat yang dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan sehingga menghasilkan tindakan positif dan berperilaku menuju keseimbangan dan kelestarian alam, agama memang tidak secara mendetail mengajarkan secara teknis manusia berperilaku ekonomi dan agama juga tidak mendorong proses transaksi dalam bentuk tertentu, akan tetapi agama mengajarkan kejujuran dalam bertransaksi, agama mengajarkan akan pentingnya tolong-menolong atau saling membantu dalam aspek ekonomi, sehingga hadirnya agama mampu memberi ruang dan sekaligus memberikan batasan agar manusia saling memberi, saling mengisi dan saling melengkapi.⁶⁵

Perdebatan ideologi yang sistematis antara liberalisme dan Islam akan menjadi perbincangan yang menarik dalam diskusi panjang, tarik menarik dalam percaturan pengaruh pemikiran pengikutnya akan menempatkan dasar argumen yang berbeda baik dari sudut pandang kajian intelektual maupun secara empiris. Sebagian pemikir akademis atau para ahli mempercayai terhadap superior liberalisme terhadap Islam dengan berasumsi bahwa ide-ide liberalisme dalam jangka

⁶⁵ Pada tahun 1843 Karl Marx yang disokong oleh Weber membuat pernyataan negatif terhadap keyakinan agama; ketika bangsawan Eropa dan penguasa gereja pada puncak kejayaannya, ia mengatakan bahwa agama adalah keluh kesah orang tertindas, dan sentimen dari dunia yang tertindas yang hanya mampu memberikan solusi sementara dan bersifat semu, karena agama tidak mampu memberikan jalan keluar terhadap setiap masalah yang mengakibatkan penderitaan. Komaruddin Hidayat, *Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi* dalam buku *Demokratisasi Politik, Budaya, dan Ekonomi*, (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), 191.

panjang secara bertahap dan meyakinkan akan menyerang dunia Islam melalui pengikut Islam tradisional, sebagaimana kemenangan liberalisme terhadap ideologi Fasisme dan komunisme yang merupakan pesaing utama demokrasi liberal, sejarah telah mengungkapkan bahwa Fasisme adalah bentuk gerakan sosial politik di Italia yang anti marxis, yaitu falsafat sosial yang pertama kali timbul di Italia yang menolak demokrasi dan kebebasan, serta mendewakan negara sebagai alat kekuasaan sebagai perwujudan dari prinsip totalitarianisme. Akan tetapi pada sisi yang berbeda para pemikir tersebut juga mengakui adanya keunggulan Islam terhadap Demokrasi Liberalisme pada negara tertentu. Perdebatan selanjutnya yang merupakan harapan konklusi masa depan adalah memposisikan demokrasi Pancasila diantara pusaran benang merah pemaknaan antara ideologi liberalisme dan pengaruh Islam yang secara universal mengandung tata nilai tentang konsep moralitas dan keadilan. Sehingga orientasi pemikiran tentang demokrasi Pancasila, liberalisme dan Islam bertemu pada satu titik yaitu Keadilan Ekonomi dengan pemahaman dan implementasi masing-masing.⁶⁶

Kesadaran akan nilai kemanusiaan secara langsung dan tak langsung dapat menjiwai bahkan mendominasi pembangunan budaya

⁶⁶ Kebenaran akan ajaran Islam yang berkaitan pada aspek kehidupan terutama demokrasi merupakan sebuah ideologi yang sistematis dan seruan Islam bersifat universal, yang dapat menjangkau semua manusia tanpa membedakan etnis atau bangsa tertentu, sehingga diakui bahwa Islam di sebagian wilayah tertentu dapat mengalahkan demokrasi liberal. Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, yang diterjemahkan oleh M.H. Amrullah, (Yogyakarta : CV. Qalam, 1992), 78.

bangsa, korelasi antara budaya dan kepribadian yang dilatarbelakangi oleh kesadaran kemanusiaan akan mempengaruhi pola tindak dan pola pikir dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa, karena secara kultural ada kaitan erat antara proses pembangunan ekonomi dan pandangan hidup. Sehingga harus dijaga konsistensi antara proses pembangunan dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan pemahaman dimensi manusia sebagai inti dari kebudayaan tersebut. Dan secara sederhana pengertian kebudayaan berasal dari kata “budi” yang mengandung arti potensi kemanusiaan dan nurani yang mengedepankan pemahaman daya fikir dan daya nalar terhadap nilai - norma yang sudah terbangun, dan kata “daya” yang mengandung arti kekuatan dan rekayasa untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan keyakinannya tersebut, sehingga secara luas pengertian budaya nasional adalah akumulasi dari tata nilai - norma yang tumbuh dan berkembang dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai keunggulan potensi bangsa. Potensi budaya tersebut pada akhirnya akan melahirkan martabat kemanusiaan sebagaimana ditakdirkan oleh Tuhan menjadi wakil di atas bumi dan sekaligus menjaga martabat kemanusiaan.⁶⁷

⁶⁷ Ada sementara pendapat para ahli yang mengkhawatirkan akan pengaruh budaya asing pada budaya bangsa Indonesia, hal tersebut dapat difahami karena penjajahan budaya akan lebih permanen dari pada penjajahan fisik kewilayahan, sehingga diperlukan daya tangkal budaya dalam bentuk ketahanan budaya yang diilhami oleh wawasan budaya bangsa, akan tetapi harus dibangun kesadaran bahwa tidak ada suatu bangsapun di dunia ini yang menutup diri dari pengaruh budaya bangsa lain. Siswanto Masruri, *Humanitarianisme Soedjatmoko, Visi Kemanusiaan Kontemporer*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), 119.

Kesadaran untuk menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem yang telah disiapkan oleh Tuhan kepada manusia merupakan bentuk cinta kasih manusia pada manusia itu sendiri, karena pada hakekatnya Tuhan tidak memerlukan legitimasi alam untuk menjadikan diri-NYA sebagai Tuhan, tetapi manusia yang memerlukan alam untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, sedangkan hubungan manusia dengan Tuhan adalah kesadaran manusia dalam wujud ketaatan. Manusia memiliki sifat kepemilikan terhadap materi kebendaan kemudian Tuhan menurunkan aturan dan takaran serta hak dan kewajiban manusia, tentang cara dan sikap dalam memperoleh hak atas kebendaan tersebut. Hasrat untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi manusia pada umumnya akan berkembang menjadi nafsu keinginan untuk memperoleh lebih dari manusia yang lainnya, yang pada akhirnya menjadi keinginan yang tak terbatas, kondisi ini akan mendorong sikap individu sentris dan egois sehingga menjadikan manusia tanpa peduli dengan nasib manusia yang lain, dan lebih jauh dari itu akan menciptakan lomba kemewahan antar sesama, sehingga membuka kemungkinan untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme yang merugikan organisasi secara kelembagaan dan merugikan manusia yang lain, apalagi bila perolehan harta kekayaan tersebut melalui eksploitasi kekayaan alam secara berlebihan yang berakibat kerusakan permanen pada alam.

Pada suatu kesempatan Bung Karno sang Proklamator mengajukan konsep dan pemahaman tentang Nasionalisme sejati yang melahirkan semangat perjuangan dan membangkitkan rasa percaya

diri sebagai nilai budaya yang diwariskan pada generasi penerus bangsa, artinya melalui pemahaman terhadap jiwa Nasionalisme tersebut mampu menempatkan manusia Indonesia untuk duduk secara bersama dengan manusia yang lain yang berbeda ideologi, berbeda suku dan berbeda adat-istiadat dalam satu wadah kepentingan yaitu kepentingan nasional, dengan demikian semangat Nasionalisme sejati mampu menundukan keinginan sementara kelompok bahkan nafsu keinginan pribadi lebur dalam keinginan bersama yang bernama Wawasan Kebangsaan yang didasari oleh semangat Nasionalisme sejati. Bahkan lebih jauh Bung Karno mengkritik pola kolonisasi dalam bentuk penjajahan secara fisik kewilayahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap negeri-negeri Asia dengan satu alasan yaitu memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya melalui eksploitasi kekayaan alam dan kemampuan sumber daya manusia bangsa lain. Dengan demikian apabila dilihat dari awal tata hubungan antara masyarakat Eropa dengan dunia masyarakat Asia terutama Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa kepentingan; *Pertama*, keinginan bangsa kolonial untuk menguasai sumber daya alam Indonesia guna memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup di negaranya, keinginan tersebut tersembunyi pada setiap kebijakan pemerintahannya baik dalam bentuk perdagangan yang tidak seimbang atau bahkan dengan alasan alih teknologi atau dengan alasan apapun dalam bentuk apapun terkandung maksud penguasaan terhadap potensi Indonesia, akan tetapi sikap skeptif atau perasangka negatif terhadap peran bangsa Eropa tidak dapat digeneralisasi bahkan

tidak menutup mata bahwa alih teknologi yang mengalir melalui dunia pendidikan cukup dirasakan manfaatnya, hal tersebut merupakan kenyataan yang tak dapat dipungkiri. Akan tetapi kesadaran sebagai sosok nasionalisme sejati yang telah diwariskan oleh nilai luhur para pendahulu bangsa ini harus membawa pada generasi bangsa ini mempunyai sikap waspada; *Kedua*, penjajahan melalui ideologi ekonomi yang dipaksakan oleh bangsa Eropa melalui jalur indoktrinasi pendidikan dengan program bantuan pendidikan atau bantuan kemanusiaan dengan dalih sebagai faham universalitas kemanusiaan atau isu-isu negatif terhadap dunia ketimuran yang memosisikan sebagai bangsa dunia ketiga, sementara bangsa Eropa ditempatkan pada posisi superior atau pihak pengambil kebijakan internasional. Kenyataan tersebut telah mengantarkan jarak pergaulan antara Timur dan Barat, karena dengan alasan apapun pada tinjauan akademis bangsa Timur dan Barat tidak sepatutnya untuk diperbandingkan, karena dunia Barat adalah milik bangsa Barat, sedangkan dunia Timur adalah milik bangsa Ttimur, masing-masing mempunyai nilai positif dan negatifnya, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya dalam sudut pandang masing-masing, segala sesuatu yang dipandang bangsa Barat sebagai nilai keluhuran belum tentu merupakan kebaikan pada dunia Timur, demikian juga sebaliknya. Karena setiap bangsa mempunyai tata nilai dan proses sejarah yang berbeda, dengan demikian sinkronisasi pemikiran antara bangsa Timur dan bangsa Barat terletak pada satu titik yaitu saling menghormati pada porsi dan posisi yang seimbang dan setara, bukan atas bawah

dan bukan minoritas mayoritas; *Ketiga*, budaya bangsa yang berbeda banyak diwarnai oleh komunitas agama yang berbeda, dalam hal ini Bung Karno melihat sinkronisasi antara nasionalisme dan islamisme di Indonesia.⁶⁸

Warisan dasar budaya bangsa Indonesia menempatkan keluhuran dan perilaku bangsa yang menjunjung tinggi keharmonisan kehidupan, ketenangan dalam keyakinan serta keselarasan dalam pergaulan, secara sadar atau tidak sadar dalam implementasinya akan berbenturan dengan faham liberalisasi ekonomi dan pasar bebas yang menjunjung tinggi kebebasan dalam persaingan ekonomi, sehingga liberalisasi menempatkan pelaku ekonomi lokal menjadi pihak yang terpinggirkan dalam persaingan pasar global karena terbatasnya akses pasar, terbatasnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya kekuatan modal, sehingga liberalisasi ekonomi yang dipaksakan mempunyai dampak yang harus diantisipasi; *Pertama*, pelaku ekonomi lokal akan berhadapan dengan pelaku ekonomi global tanpa perlindungan dan proses transisi yang disepakati dan dikondisikan sehingga akan terjadi persaingan ekonomi yang tidak seimbang dan saling meniadakan; *Kedua*, persaingan antara pelaku ekonomi lokal dan global akan menjadikan posisi pengambil keputusan yang dalam hal ini pemerintah pada titik dilematik, akan tetapi pada akhirnya

⁶⁸ Sebagian besar Nasionalisme dan Islamisme Indonesia dalam wujud gerakan masyarakat pada waktu itu didorong oleh satu semangat, yaitu dorongan untuk mengimbangi dominasi negara dan bangsa Barat, atau lebih tegas lagi untuk melawan ideologi kapitalisme dan imrealisme Barat. Soekarno, *Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme*, dalam buku *Bung Karno dan Wacana Islam*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), 7.

kebijakan akan disejajarkan dengan respon pasar internasional karena berkaitan dengan persaingan investasi; *Ketiga*, sumber daya dan potensi alam negara ketiga perlahan tapi pasti akan bergeser ke wilayah pelaku ekonomi global dengan pasar bebas karena tidak adanya proteksi terhadap kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang; *Keempat*, nilai tawar atau *Bargaining Position* negara dunia ketiga akan lemah karena dihadapkan pada dua pilihan yang membingungkan antara kepentingan rakyat secara luas dalam bentuk pemerataan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan oleh pihak legislatif.

Warisan nilai luhur bangsa Indonesia yang perlu untuk dikembangkan pada aspek ekonomi sebagaimana diabadikan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum mengalami perubahan pada Pasal 33 yang didalamnya tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh untuk semua, dibawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan, sehingga perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang, oleh sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, maka akan dikuasai oleh orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat

hidup orang banyak yang boleh ada ditangan perorangan. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Semangat yang tergambar pada rumusan Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas mencerminkan visi sistem ekonomi Indonesia yang hendak dicapai dalam mengisi kemerdekaan nantinya, yang merupakan sistem alternatif terhadap kapitalisme atau komunisme. Ada empat poin yang dapat dijadikan pedoman dalam membangun sistem perekonomian yang demokratis; *Pertama*, perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan atau bersifat kooperatif sehingga paham pasar bebas dengan berpedoman pada azas *free fight* liberalisme menjadi tidak berlaku lagi untuk dijalankan; *Kedua*, peranan negara untuk menguasai cabang-cabang produksi strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga negara dilarang untuk absen atau tidak terlibat dalam mekanisme ekonomi yang berhubungan dengan nilai strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak, artinya negara harus tampil menjalankan fungsinya untuk melindungi cabang-cabang produksi tersebut; *Ketiga*, perusahaan dengan badan hukum swasta diposisikan pada bidang-bidang diluar cabang produksi strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, artinya usaha swasta dibangun sebagai pendukung dan penopang serta lingkaran luar dari cabang produksi strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, semangat dari pendahulu bangsa ini dapat dibaca dari ungkapan bahasa yang menjunjung tinggi

kemandirian ekonomi dan semangat nasionalisme sejati; *Keempat*, pengelolaan kekayaan alam berupa hasil pertambangan, kelautan, perkebunan dan lain sebagainya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; *Kelima*, tidak tampak jelas atau transparan terhadap peran investor asing pelaku ekonomi liberal. Pada koridor inilah akan menjadi perdebatan guna menata perekonomian Indonesia masa depan yang merupakan hasil kompromi rasionalitas, dan hasil perenungan secara mendalam yang memposisikan garis sepadan antara kepentingan rakyat pada umumnya, kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional dan kepentingan diplomatik ekonomi dalam pergaulan internasional. Tantangan untuk mengelaborasi berbagai kepentingan bidang ekonomi negara merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen bangsa.

Pada penjelasan lebih lanjut tentang posisi perekonomian Indonesia maka terlihat ada kecenderungan pada pola ekonomi sosialis dari pada kapitalisme dan liberalisme. Pemaknaan sistem ekonomi Indonesia adalah sebuah sistem perekonomian terpimpin yang mendekati konsep *Welfare State*. Akan tetapi dalam pola implementatif perekonomian yang didasarkan pada Ekonomi Pancasila mempunyai kekhususan tersendiri yang meliputi; *Pertama*, badan hukum yang digunakan dalam aktivitas ekonomi yaitu Koperasi, BUMN dan Swasta yang secara proporsional mempunyai segmen pasar tersendiri, sehingga ketiga-tiganya dalam menjalankan aktivitas ekonominya tidak saling bersaing bahkan saling membantu dan saling melengkapi karena masing-masing mempunyai wilayah berbeda

menurut segmentasi pasar masing-masing; *Kedua*, proses mekanisme Ekonomi Pancasila secara empiris sepenuhnya diserahkan pada ekonomi pasar tetapi pemerintah wajib melakukan pemantauan, pengawasan bahkan turut memberikan dasar kebijakan atau stimulus untuk menjinakan dan mendinginkan transaksi yang panas atau *over heating* yang dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat; *Ketiga*, akumulasi peran negara, swasta dan koperasi tetap dalam koridor dan semangat nasionalisme sejati, yang menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hal ini merupakan tata nilai warisan leluhur bangsa yang harus dijadikan pedoman pada generasi penerus bangsa.⁶⁹

Kesejajaran antara konsep liberalisasi ekonomi oleh bangsa Eropa dan konsep demokrasi ekonomi yang secara empiris diramu pada konsep Ekonomi Pancasila harus ditempatkan secara proporsional dalam pergaulan ekonomi internasional, akan tetapi dalam menyikapi kebutuhan akan adanya norma kebijakan transaksi ekonomi dalam negeri Indonesia harus menggunakan pedoman budaya bangsa sebagai warisan nilai luhur yang diaktualisasikan pada paham Ekonomi

⁶⁹ Bung Karno dan Bung Hatta dalam berbagai pernyataannya menolak sistem kapitalisme dan liberalisme yang didasarkan pada filsafat individualisme, tetapi paham sosialisme tidak ditolak. H.O.S. Tjokroaminoto menggunakan istilah Sosialisme Islam, Partai Sosialis Indonesia menggunakan istilah Sosialisme Kerakyatan, Sjafruddin Prawiranegara menggunakan istilah Sosialisme Relegius, Ruslan Abdulgani menggunakan istilah Sosialisme ala Indonesia, dan Bung Hatta menggunakan istilah Sosialisme Indonesia. Akan tetapi semua paham sosialisme tersebut di atas menolak paham Sosialisme Marxis. M. Dawam Rahardjo, *Demokrasi Ekonomi dalam Alam Liberalisasi Ekonomi* dalam buku *Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta : Pusat Pengembangan Manajemen FE UII, 1997), 247.

Pancasila, karena dengan pemahaman Pancasila sebagai hasil perjalanan panjang bangsa Indonesia dari penggalian nilai-nilai luhur bangsa dan sekaligus sebagai hasil perasan dari nilai kultural bangsa maka akan mampu mengantarkan bangsa pada bentuk masyarakat yang adil dan makmur sebagai mana dicita-citakan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa harus ditempatkan sebagai sosok acuan kebijakan setiap pengambilan keputusan oleh penguasa terutama dalam kehidupan bernegara aspek ekonomi, sehingga secara tidak langsung akan mendapatkan manfaat ganda; *Pertama*, dengan menempatkan Pancasila sebagai acuan kebijakan yang secara teknis dapat difahami melalui turunan butir-butir nilai dan norma yang terkandung didalamnya maka kebijakan negara tersebut akan mendapat respon positif dari masyarakat, karena hasil kebijakan tersebut akan mewakili secara kultural masyarakat sebagai obyek kebijakan tersebut; *Kedua*, dengan menempatkan Pancasila sebagai acuan kebijakan maka dapat dijamin produk turunan dari kebijakan pemerintah tersebut berupa aturan palaksanaan atau aturan teknis di daerah tidak akan menyimpang dari kebijakan di pusat pemerintahan, hal ini disebabkan karena menyatunya semangat dan jiwa Nasionalisme sejati antara pusat dan daerah.⁷⁰

⁷⁰ Terdapat banyak alasan tentang menurunnya semangat penggalian nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang salah satunya disebabkan oleh lemahnya pemerintah dalam memposisikan Pancasila sebagai acuan kebijakan negara, bahkan Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi pada acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Islamic Center Al - Ghazaly Kota Bogor mengatakan bahwa "rakyat enggan menjalankan Pancasila karena tidak terangkum dalam kebijakan penguasa", dengan demikian pengamalan

Sikap dan perilaku untuk berani mengambil risiko dan kerelaan berkorban demi bangsa dan negara adalah salah satu warisan nilai luhur yang harus dikembangkan dan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini; *Pertama*, kejayaan bangsa Indonesia pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit adalah bukti ketangguhan bangsa pada tataran pergaulan internasional; *Kedua*, diteruskan perjuangan pada periode untuk merebut kemerdekaan; *Ketiga*, perjuangan untuk mempertahankan eksistensi kemerdekaan; *Keempat*, perjuangan untuk mengisi kemerdekaan berupa pembangunan menyeluruh pada seluruh aspek kehidupan masyarakat;

nilai-nilai Pancasila membutuhkan sikap keteladanan dari para pemimpin bangsa sehingga cita-cita untuk menjadikan Pancasila sebagai pilar kebangsaan dalam segala aspek kehidupan dapat terwujud. Pada sisi yang berbeda Maruarar Sirait anggota Komisi XI DPR RI mengatakan bahwa; Pancasila merupakan hadiah terbesar yang diberikan umat Islam kepada bangsa Indonesia. Demikian juga pada bidang diplomasi, keunggulan Pancasila telah disuarakan lantang oleh pendahulu bangsa dalam forum internasional; *Pertama*, pada bulan November 1951 Menteri Luar Negeri Indonesia Ahmad Subarjo memperkenalkan Pancasila sebagai pedoman filosofi kehidupan bangsa yang menjanjikan kemakmuran bersama masyarakat internasional, kesempatan itu disampaikan pada pidato pertama sekali Indonesia di Majelis Umum PBB ke 6; *Kedua*, pada Sidang Umum PBB ke 9 September 1954, Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo menawarkan kepada forum untuk menjadikan Pancasila sebagai solusi damai bagi konflik ideologi di antara negara-negara internasional saat era perang dingin; *Ketiga*, pada Sidang Umum PBB ke 15 tanggal 30 September 1960 dengan judul "*To Build The World Anew*", pidato tersebut sangat legendaris karena Soekarno Presiden Republik Indonesia menyangkal pendapat filsuf Inggris Bertrand Russel yang membagi ideologi menjadi dua kutub dunia yaitu liberalisme dan komunisme, dari pemikiran tersebut kemudian melahirkan Gerakan Non Blok yang dilanjutkan dengan Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung tahun 1955; *Keempat*, pada Sidang Umum PBB ke 24 tanggal 1 Oktober 1969, Menteri Luar Negeri Adam Malik berpidato yang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila yang menegaskan tentang keunggulan Pancasila sebagai ideologi alternatif bangsa di dunia. (Koran Republika, Senin 3 Oktober 2011), 2-4.

dan *Kelima*, adalah periode reformasi yang ditandai dengan masa transisi dan kegamangan birokrasi yang secara sepihak menempatkan kebijakan pada posisi mengambang, sehingga kenyataan kehidupan masyarakat diwarnai dengan berbagai petaka sosial pada kasus terorrisme, bentrok massa antar kepentingan, pergeseran faham ideologi keagamaan dan yang sangat menyakitkan bagi masyarakat adalah terbukanya ruang pembatas informasi yang memperlihatkan betapa para petinggi negeri dan para pejabat negara dari mulai unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif terlibat baik langsung dan tak langsung pada upaya memperkaya diri melalui korupsi. Masyarakat sangat faham bahwa keadilan sosial yang mereka harapkan tidak kunjung didapatkan bahkan kesengsaraan dari hasil kebijakan pemerintah pusat seperti pada kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur yang tak kunjung rampung penyelesaiannya, kondisi inilah yang nantinya akan berakibat kekecewaan massal yang pada satu titik akan mengkristal menjadi gerakan massa yang menyimpang dari tata krama sosial sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur bangsa ini pada nilai - norma dari butir-butir yang terkandung pada Pancasila.

Untuk lebih membuka pemahaman dan memperjelas kandungan butir-butir Pancasila sebagai warisan leluhur bangsa maka diperlukan upaya dan kesabaran menggali satu demi satu nilai-nilai tersebut, kemudian dapat dikembangkan secara empiris kontemporer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Pertama*, pada warisan kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang memposisikan Nusantara sebagai kawasan perdagangan internasional dengan aneka produk

unggulan, pruduk tersebut meliputi hasil pertanian, kelautan, pertambangan, perkebunan dengan berbagai hasil rempah-rempah, kerajinan dengan berbagai produk keterampilan pusaka dan bermacam produk manufaktur dan produk-produk lain sebagai komoditi perdagangan internasional. Bidang Budaya Nusantara bangsa Indonesia waktu telah mampu menciptakan berbagai hasil budaya kelas dunia yang meliputi candi-candi tempat pemujaan agama, karya sastra para empu dan pujangga serta kemampuan bidang intelektual dalam berbagai ilmu yang berkembang saat itu termasuk ilmu Tata Negara dan kajian ilmu agama. Bidang Bahari, kemampuan armada tempur dan seni perang laut merupakan kedigdayaan prajurit waktu itu sehingga dapat memperluas pengaruh kerajaan melebihi wilayah Negara Indonesia dewasa ini. Dari sini akan tercermin nilai ketanggahan, percaya diri dan keuletan serta kemahiran dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Tekad kuat untuk menyatukan wilayah Nusantara tercermin dari Sumpah Palapa atau Amukti Palapa pada tahun 1350 oleh Gajah Mada yang saat itu sebagai Patih Amangkubhumi atau Perdana Menteri saat Hayam Wuruk sebagai Raja, arti sumpah tersebut adalah tekad untuk tidak hidup dalam kesenangan sebelum seluruh Nusantara menyatu dalam kesatuan Kerajaan Majapahit, nilai yang terkandung dalam sumpah tersebut adalah tergeraknya jiwa Nasionalisme sejati yang rela berkorban terhadap kepentingan pribadi demi cita-cita luhur kejaan kerajaan waktu itu, Kedua kandungan nilai pada masa merebut kemerdekaan yang tercermin dalam semangat perjuangan waktu itu dengan

semboyan “Merdeka atau Mati”, artinya semangat nasionalisme dan jiwa patriotisme membara waktu itu, sehingga pilihannya hanya satu, yaitu “MERDEKA”. Kemampuan untuk memobilisasi semangat perjuangan dipelopori oleh Bung Karno dengan rekan-rekan seangkatannya mampu menjadikan Negara sebagai tujuan tunggal tanpa melihat asal-usul daerahnya, suku, agama dan ras. Kecerdasan emosional yang dibangun diletakkan pada satu pondasi dasar, yaitu “Semangat Cinta Tanah Air Indonesia”. Seiring dengan perjalanan waktu dan dengan tempaan berbagai nilai dan budaya asing, maka pemahaman tentang “Cinta Tanah Air Indonesia” mulai melemah dan pudar di makan oleh ketamakan, kerakusan dan keserakahan untuk hidup mewah dengan bergelimang harta kekayaan untuk mengejar kesenangan dunia, sehingga nilai-nilai yang sudah terbangun selama ini menjadi rapuh, bahkan terasa asing bila ada sekelompok orang yang berbicara tentang PANCASILA atau sekelompok orang yang berusaha mengganti nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Inilah kenyataan dan paradigma yang banyak berkembang di masyarakat yang harus segera diluruskan. Analisis tentang pentingnya menggali kembali potensi bangsa yang dikemas dalam satu pemikiran tentang ekonomi Pancasila menjadi sangat strategis guna meluruskan roda pembangunan nasional dan sekaligus meluruskan cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungannya, kemudian dikemas menjadi satu formula baru, yaitu Pancasila sebagai dasar Ideologi Ekonomi yang mampu memposisikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dalam pergaulan

Internasional dan sekaligus mampu membagi kesejahteraan kepada seluruh masyarakat secara adil.

C. PERDEBATAN ALIRAN KONSEP EKONOMI.

Pada fase komparasi antar pemikiran konsep ekonomi akan dihadapkan pada empat konsep pemikiran kontemporer yang oleh para ahli atau akademisi di kelompokkan berdasarkan landasan filosofis dan argumen implementatifnya; *Pertama*, ekonomi yang berbasis pasar bebas atau liberal sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak untuk melakukan segala aktivitas ekonomi tanpa hambatan kewilayahan atau region serta pertukaran ekonomi berdasarkan kepemilikan pribadi dan pasar, artinya dalam tata perekonomian masyarakat diberikan ruang kebebasan bersaing sebebaskan-bebasnya tanpa adanya campur tangan pemerintah, sehingga akan terjadi kondisi yang kuat mengalahkan yang lemah. Sebagai bentuk keseimbangan pada fase ini harus dilengkapi dengan regulasi atau aturan main yang jelas dan pasti, sehingga pada hasil akhir praktik ekonomi pasar bebas tidak menghasilkan jurang kesenjangan kesejahteraan yang sangat lebar, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kerusuhan sosial; *Kedua*, ekonomi yang diatur secara ketat oleh Negara, artinya semua kegiatan ekonomi dikendalikan secara penuh oleh pemerintah. Istilah yang sering digunakan adalah ekonomi terpimpin atau ekonomi komando, pada praktik fase kedua ini menghasilkan bentuk kegiatan ekonomi terpusat, terjeratnya ruang kreativitas sumber produksi, kegiatan perekonomian pasif tidak berkembang serta membuka kran korupsi di kalangan birokrasi. Pada praktiknya ekonomi terpimpin banyak menciptakan pengangguran dan

stagnasi ekonomi; *Ketiga*, jenis praktik ekonomi yang secara total disandarkan pada keyakinan agama, misalnya Ekonomi Syariah, yaitu semua kegiatan ekonomi masyarakat bersandar pada Al-Qur'an dan Hadist serta kesepakatan para pemimpin agama atau ulama; *Keempat*, yaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang disandarkan pada rangkuman dari ketiga jenis ekonomi tersebut di atas, yaitu membagi secara baik peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi dengan tetap memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kreatifitas kegiatan ekonomi serta kegiatan ekonomi masyarakat tidak menyimpang dari norma-norma dan ketentuan Agama.

Dalam terminologi Agama, manusia pertama diciptakan oleh Tuhan menempati di belantara bumi ini adalah Adam dan diikuti oleh penciptaan manusia kedua, yaitu Hawa. Penciptaan Adam dan Hawa adalah sepasang manusia sebagai suami dan istri, kemudian melahirkan beberapa anak (sampai saat ini secara akademis belum ditemukan angka yang pasti tentang jumlah anak dari pasangan Adam dan Hawa). Dari sejumlah anak Adam dan Hawa tersebut secara bertahap tersebar di seluruh dunia dan terus berkembang secara alamiah. Hubungan harmonis yang seimbang antara manusia yang berhasrat atau berkehendak atau berperilaku untuk memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan ketersediaan kebutuhan hidupnya oleh alam merupakan kegiatan ekonomi. Dengan demikian secara umum konsep ekonomi dapat dimaknai sebagai hasil pemikiran manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 7 tahapan yang harus dilalui oleh manusia sebagai bahan analisis. Secara alamiah kebutuhan manusia

terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat kebutuhan, lingkungan hidupnya dan cara berfikirnya.

1. Proses pertama manusia dihadapkan pada cara pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan menyesuaikan kondisi alam masing-masing dan sesuai dengan perputaran musim, sehingga sangat berbeda antara manusia yang hidup pada 4 musim (musim panas, musim hujan, musim semi dan musim gugur), apabila dibandingkan dengan manusia yang hidup pada 2 musim (musim panas dan musim hujan), sangat berbeda juga perilaku manusia yang hidup di pegunungan dan manusia yang hidup di pantai, dan juga sangat berbeda cara berfikir manusia yang hidup di daratan yang tandus (padang pasir) dan manusia yang hidup di alam yang subur. Dengan demikian karena faktor kondisi alam dan faktor musim akan menghasilkan berbagai perilaku ekonomi manusia, berbagai keterampilan dan perolehan yang diciptakan, terbentuk berbagai watak dan perilaku serta bahasa, dan juga yang paling penting adalah perbedaan cara berfikir serta budaya masing-masing.

2. Salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu berkembang biak atau mempunyai keturunan dan secara alami manusia sangat mencintai keluarga dan kelompoknya, sehingga seiring dengan perjalanan waktu, jumlah manusia terus berkembang dan semakin tersebar di semua penjuru dunia, ikatan keluarga selanjutnya membentuk kelompok, maka terbentuklah masyarakat dengan ikatan budaya dan tradisi masing-masing. Proses interaksi alami antar pribadi, interaksi antar kelompok kecil masyarakat, sampai dengan proses interaksi antar

masyarakat dalam jumlah yang besar akan menghasilkan ikatan dan identitas yang saat ini dikenal dengan “desa”, “kota” dan “negara”. Secara umum proses interaksi tersebut akan menghasilkan ciri bahasa, perilaku cara berfikir, keterampilan dan keahlian sampai dengan persepsi akan adanya Agama dan Tuhan. Karena kebutuhan manusia dapat bersifat jasmani dan rohani, sinkronisasi pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani inilah yang akan menjadi titik dasar dan pijakan akan pentingnya sebuah konsep pemikiran tentang perilaku ekonomi manusia yang sangat disesuaikan dengan kondisi alam, cara berfikir, budaya dan perkembangan ikatan sejarah kelompoknya masing-masing. Sejarah perkembangan masyarakat maritime sangat berbeda dengan sejarah masyarakat pengerajin atau industry. Kultur masyarakat akan banyak dipengaruhi oleh faktor alam dan cara pemenuhan kebutuhan hidupnya masing-masing . Perkembangan kehidupan kelompok-kelompok masyarakat pemula tersebut selanjutnya seiring dengan perkembangan waktu dan jumlah personel kelompok tersebut, maka terbentuklah seorang pemimpin kelompok yang sangat disegani dan diikuti perintahnya oleh kelompok tersebut, sehingga terbentuklah aturan-aturan kelompok masyarakat.

3. Kecenderungan dominasi kelompok masyarakat yang satu terhadap kelompok masyarakat yang lain akan menimbulkan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup manusia pada kelompoknya masing-masing, akan tetapi yang terjadi adalah “persaingan ringan”, proses interaksi antar kelompok masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh cara berfikir masing-masing kelompok serta dipengaruhi oleh

sikap dan figure pemimpin masing-masing kelompok. Persaingan ringan tersebut dicirikan dengan adanya persaingan kualitas hasil dari keterampilan SDM masing-masing, serta dipengaruhi oleh kondisi alam. Sebagai tempat interaksi dan tempat persaingan tersebut adalah pasar-pasar tradisional yang sering berlokasi di pinggiran sungai atau pantai dengan pertimbangan mempermudah dan memperlancar pendistribusian melalui sarana transportasi perahu dan kapal-kapal dagang. Jalur distribusi melalui sarana air lebih memungkinkan pada saat awal-awal kegiatan ekonomi dibandingkan dengan sarana transportasi melalui darat, karena tidak semua daerah tersedia jalan penghubung serta kendaraan yang sangat sederhana dengan menggunakan hewan sebagai alat penggerak transportasi. Friksi-friksi kecil sangat mungkin terjadi, akan tetapi secara sederhana dapat teratasi karena jumlah masyarakat relative sedikit dan jumlah kebutuhan masyarakat sangat terbatas serta masih banyak tersedianya barang-barang kebutuhan subsitusi yang disediakan oleh alam. Persaingan ringan ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat sejak awal akan pentingnya kualitas barang yang dihasilkan, baik berupa hasil pertanian atau hasil keterampilan tangan. Proses transaksi pada awal terbentuknya masyarakat menggunakan cara barter atau tukar menukar barang, kemudian timbul kesadaran menggunakan alat tukar berupa mata uang yang diciptakan dari emas, perak, perunggu atau benda-benda lain yang dianggap sangat berharga dan bernilai di masyarakat. Perbedaan alat tukar antara kelompok yang satu dengan

kelompok yang lain sangat berbeda tergantung pada budaya dan kebiasaan masing-masing masyarakat.

4. Tahapan berikutnya adalah hasrat manusia untuk menyimpan atau mengawetkan semua barang keperluannya. Dari sinilah akan lahir berbagai disiplin ilmu tentang pergudangan dan ilmu tentang mengawetkan suatu jenis tertentu atau masing-masing keperluan manusia, terutama keperluan makanan pokok lebih khusus masyarakat yang hidup pada 4 musim yang terkadang pada musim dingin dengan suhu dibawah Nol Derajat, sehingga semua aktivitas ekonomi terhenti pada waktu itu. Hasrat untuk menyimpan ini secara positif dapat dimaknai bahwa dengan diorng untuk bertahan hidup dan mencintai keluarga dan kelompoknya, akan tetapi dari sisi negatif mendorong manusia untuk bersifat rakus dan serakah untuk menumpuk kekayaan yang sementara di pihak lain atau kelompok lain kekurangan bahkan kelaparan. Sedangkan perkembangan ilmu tentang cara mengawetkan berbagai jenis barang, terutama bahan pokok sangat dipengaruhi oleh pengalaman atau hasil riset dan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam masing-masing kelompok masyarakat tersebut. Proses ini juga mendorong meningkatnya persaingan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga setiap kelompok berlomba-lomba untuk memperkaya diri guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan kelompoknya. Secara tidak langsung hasrat untuk menyimpan dan menimbun barang keperluan ini mendorong timbulnya friksi yang semakin terbuka antar kelompok yang tidak jarang berakibat perang suku, perang antar daerah bahkan perang saudara. Setelah merasakan akibat negative

perang tersebut, maka manusia mulai sadar akan pentingnya arti kesepakatan, kesepahaman dan pentingnya suatu aturan yang membagi kelompok-kelompok tersebut dalam suatu komunitas dengan suatu hukum tertentu yang lazim disebut dengan “Hukum Adat”. Kelahiran Hukum Adat antar kelompok masyarakat akan memposisikan antar masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai akan kepentingan orang lain. Selanjutnya akan lahir kesadaran perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang disepakati dan lahirlah aparat untuk menjaga agar dipatuhinya aturan-aturan tersebut.

5. Kegiatan ekonomi masyarakat yang bermuara pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan secara alami atau secara naluriah manusia berharap dilakukan secara mudah dan dengan hasil yang optimal atau dengan istilah efektif dan efisien, artinya kegiatan ekonomi dilakukan dengan ongkos produksi yang sangat terbatas atau minimal dan dengan hasil yang besar atau maksimal. Semangat untuk kemudahan kegiatan ekonomi tersebut telah mendorong manusia untuk melakukan penelitian, riset dan kajian serta analisis ilmu pengetahuan secara berulang-ulang, sehingga manusia berhasil menemukan aneka peralatan dengan teknologi modern, yaitu penemuan mesin uap, penemuan listrik, penemuan lampu pijar, penemuan alat telekomunikasi, penemuan komputer sampai dengan penemuan pesawat terbang. Kecerdasan manusia telah terbuka dan berkembang pesat dengan didorong oleh semangat persaingan kegiatan ekonomi untuk kemakmuran dirinya, keluarganya,

kelompoknya dan bahkan negaranya. Akan tetapi dari sisi negatif juga lahir hasrat untuk menguasai orang lain dengan mengambil alih sumber daya alamnya, maka lahirlah peralatan perang modern seperti bom nuklir, peawat tempur, kapal induk untuk keperluan perang, rudal dan lain sebagainya. Semua peralatan perang tersebut dipergunakan untuk mempertahankan diri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan sebagai alat paksa untuk menundukkan kelompok masyarakat lain. Pada era ini terjadi persaingan hebat antar kelompok dan terjadi kegiatan saling mencuri informasi melalui aparat intelijen, sehingga seiring dengan berjalannya waktu terjadilah mobilisasi kekuatan dan mobilisasi modal. Persaingan antar kelompok masyarakat ini melahirkan suatu keadaan yang disebut dengan “era globalisasi”, karena batas ruang dan waktu seakan dapat ditundukkan oleh teknologi, jarak antar negara terasa amat dekat dan waktu berputar seakan terlalu cepat. Kemajuan teknologi informasi telah menjadikan manusia semakin pintar dan cerda, akan tetapi dari sisi negatif terkadang manusia melupakan akan keseimbangan alam. Dengan demikian diperlukan aturan dan organisasi internasional.

6. Berbagai isu-isu internasional telah disebarluaskan oleh negara yang memiliki alat paksa atau negara yang mempunyai kekuatan ekonomi atau negara yang mempunyai kemampuan teknologi unggul, yaitu isu hak asasi manusia, isu lingkungan hidup dan isu pasar bebas. Sehingga isu tersebut seakan menjadi standar subyektif negara-negara maju sebagai alat paksa diplomatik untuk menundukkan bangsa lain. Untuk itu diperlukan perundang-undangann yang bersifat nasional,

regional dan internasional serta diperlukan perangkat organisasi yang berfungsi untuk mewartakan kepentingan antar negara dan sekaligus untuk mengatur hubungan diplomatik secara harmonis, akan tetapi secara sepihak terkadang negara yang mempunyai daya saing tinggi akan memaksakan kehendaknya pada negara dunia ketiga atau negara yang sedang berkembang dengan berbagai alasan. Untuk itu masing-masing negara harus mempunyai daya tangkal sesuai dengan identitas negaranya masing-masing dan sesuai dengan budayanya masing-masing, terutama bangsa Indonesia. Kemampuan masyarakat Indonesia untuk merefleksikan diri dalam pergaulan internasional, terutama kegiatan ekonomi harus bersumber dari nilai-nilai bangsa Indonesia sendiri sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Pancasila. Pada alasan inilah terletak pentingnya menggali potensi nilai-nilai Pancasila yang dapat dimanifestasikan dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai ideologi politik, akan tetapi lebih jauh dari itu, Pancasila dapat dikembangkan sebagai “Ideologi Ekonomi”. Kemampuan menggali potensi Pancasila sebagai Ideologi Ekonomi disandarkan pada kesadaran hakiki bahwa hanya melalui akar budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila, masyarakat Indonesia akan menemukan titik kemakmuran sebagaimana dicita-citakan oleh pendiri bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang adil dan makmur, artinya terjadi pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada segenap masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

7. Tahap terakhir kegiatan ekonomi masyarakat adalah era persaingan keras atau perebutan kepentingan secara ketat antar bangsa-bangsa di dunia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara dengan dihadapkan peningkatan jumlah penduduk dalam hitungan angka yang sangat signifikan, sehingga analisis dengan mengedepankan faktor geografi dan demografi menjadi sangat menonjol. Kajian tentang semua potensi negara akan berkaitan erat dengan kedua faktor tersebut, sehingga semua negara akan melakukan upaya untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan mencukupi semua kebutuhan hidupnya dalam waktu yang lama berupa cadangan barang-barang kebutuhan masyarakat yang akan memaksa bangsa lain dengan cara apapun. Kajian geografi akan membahas tentang sumber daya alam, letak geografis dan analisis tentang bentuk negara daratan atau negara kepulauan akan menjadi bahan kajian atau *mapping* terhadap kemampuan atau kandungan alam negaranya bila dihadapkan dengan kebutuhan masyarakatnya, Kekurangan ketersediaan alam akan kebutuhan masyarakatnya oleh pemimpin negara tersebut baik Raja, Presiden atau Perdana Menteri dipaksakan untuk diperoleh dari negara lain dengan cara perdagangan bilateral, diplomatik atau dengan cara perang yang dikamuflesi dengan alasan ketiga isu tersebut di atas, yaitu isu hak asasi manusia, isu lingkungan hidup dan isu pasar bebas. Sedangkan kajian tentang makna demografi akan menitik beratkan pada jumlah kuantitatif penduduk, tingkat intelektual dan kecerdasan serta kajian budaya dan nilai yang berkembang di masyarakat negara

tersebut. Kombinasi antara kajian geografi dan kajian demografi akan menghasilkan konsep pemikiran yang secara komprehensif menjadi rencana strategis negara tersebut untuk melakukan kegiatan ekonomi secara terus-menerus dapat menguasai teknologi pejuang ekonomi, diplomasi ekonomi, intelijen ekonomi dan politik ekonomi global dengan memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan dunia guna mendominasi kegiatan ekonomi dunia.

1. Sejarah Pemikiran Ekonomi.

Kegiatan ekonomi manusia untuk mempertahankan hidupnya, kelangsungan hidup keturunan dan usaha mensejahterakan dirinya serta keluarganya adalah kesadaran awal yang secara alamiah dan sampai kapanpun dimulai dari orang pertama, yaitu Adam dan Hawa sampai dengan orang terakhir yang terlahir di dunia ini. Maka pemikiran awal tersebut akan selalu menjadi tumpuan dan pijakan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Proses kesadaran akan pentingnya pemikiran ekonomi yang mampu terekam dalam sejarah, yaitu :

a. Pemikiran pada masa Yunani, Aristoteles (384-322 SM), Plato (427-347 SM) dan Sokrates (469-399 SM), inti pemikirannya para intelektual pendahulu tersebut, yaitu kehidupan masyarakat yang harmonis akan terbentuk bila terjadi keseimbangan antara kegiatan ekonomi manusia dan pelestarian alam dengan dasar keyakinan bahwa semua yang disediakan oleh Tuhan berupa alam semesta ini berjalan secara harmonis (filsafat hukum alam).

b. Pemikiran ekonomi oleh intelektual muslim sebagai akibat hubungan interaksi antara dunia latin yang beragama Kristen dan masyarakat Arab yang beragama Islam. Hubungan intelektual tersebut di daratan Spanyol yang melahirkan para pemikir ekonomi muslim, yaitu Ibnu Rusdi atau Averroes (1126-1198) dan Ibn Khaldun (1332/1395). Inti pendapat pemikiran muslim tersebut tentang : organisasi kemasyarakatan, pembangunan, perdagangan dan peran pemerintah dalam perekonomian, sehingga pada saat ini sudah timbul pemikiran tentang muara dari semua nilai manusia dapat diukur dari “proses kerja atau kegiatan ekonomi dan nilai tenaga kerja” serta munculnya kesadaran tentang pajak pada negara sebagai kelangsungan hidup pemerintahan. Tingkat pajak dapat diukur dengan tingkat pendapatan dan penghasilan seseorang dengan kekayaannya, sedangkan tingkat pendapatannya dapat diukur dari tingkat keterampilannya yang berdampak langsung pada hasil produksi.

c. Pemahaman tentang perilaku ekonomi manusia yang diperoleh dari pemikiran ilmuwan muslim di Spanyol oleh masyarakat terpelajar pada Abad XIII dan XIV di Eropa, yaitu “Thomas Aquinas” menghasilkan 4 (empat) hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia, yaitu : *Eternal Law* (Hukum Abadi), *Natural Law* (Hukum Alami), *Human Law* (Hukum Manusia) dan *Divine Law* (Hukum Suci).

d. Pemikiran tentang perilaku ekonomi manusia oleh aliran “Pemikiran *Merkantilisme*” yang salah satunya berpendapat bahwa kegiatan ekonomi manusia yang menjadikan kaya secara material dan

dapat menguasai sebanyak-banyaknya emas dan perak serta menimbunnya. Pemikiran tersebut dapat mempengaruhi semua kegiatan ekonomi masyarakat bahwa melalui penguasaan emas dan perak maka akan memperoleh syurga dunia, karena melalui kedua barang tersebut manusia dapat dengan leluasa menikmati kemakmuran hidup di dunia.

e. Perkembangan pemikiran tentang perilaku ekonomi manusia adalah pemikiran ekonomi kaum fisiokrasi yang disebut juga sebagai sistem pertanian atau *agricultural system*.

f. Pemikiran ekonomi tentang perilaku manusia dan masyarakat dalam usaha mencapai pemenuhan kebutuhannya serta interaksinya dengan alam yang disesuaikan dengan zamannya dapat difahami dalam kelompok pemikiran Adam Smith, pemikiran kaum klasik, pemikiran Karl Marx, pemikiran kaum neoklasik dan pemikiran Keynes (1883-1946) yang selanjutnya kekayaan pemikiran tentang perilaku ekonomi para ilmuwan tersebut akan dipakai sebagai bahan aliran pemikiran menuju konsep pemikiran Ekonomi Pancasila, akan tetapi rujukan pemikiran tersebut akan berinteraksi dengan kondisi geografi dan demografi Indonesia yang disesuaikan dengan kultur masyarakatnya serta dengan mengakomodasikan situasi dan kondisi saat ini dan kondisi perekonomian yang akan datang yang dapat diprediksikan terjadi dikemudian hari.

2. Konsep Ekonomi Kerakyatan.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, sehingga makna yang terkandung didalamnya adalah “Demokrasi Ekonomi”. Kegiatan perekonomian masyarakat yang mengutamakan kesejahteraan sosial kemasyarakatan adalah inti dari pemahaman demokrasi ekonomi, dengan demikian alur pemikirannya sebagai berikut ; *Pertama*, Pancasila sebagai Dasar Ideologi Ekonomi yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia; *Kedua*, penegasan tentang pola perekonomian yang didasarkan pada implementasi pemikiran bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan; *Ketiga*, makna dari pemahaman pemikiran tersebut diatas adalah “Demokrasi Ekonomi”; *Keempat*, dengan demikian, terjadi sinkronisasi antara demokrasi ekonomi dengan semangat yang dibangun dalam organisasi ekonomi masyarakat yang bernama “Koperasi”; *Kelima*, sehingga secara sederhana dapat disimpulkan bahwa konsep ekonomi kerakyatan yaitu perilaku ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran masyarakat secara menyeluruh, bukan kemakmuran orang-perorang. Hal inilah yang nantinya menjadi landasan berfikir untuk menggali konsep Ekonomi Pancasila yang diharapkan dapat mempersempit jarak antara yang kaya dengan yang miskin serta mampu membagi secara proporsional arti sebuah kemakmuran melalui terbukanya lapangan pekerjaan yang layak, usaha pendidikan yang memadai serta terduduknya fasilitas kesehatan yang mencukupi.

Hubungan simbiosis mutualisma antara masyarakat, pemerintah dan swasta harus ditata secara kelembagaan dan proporsional sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, sehingga harapan dan cita-cita Bapak Pendiri bangsa (*Founding Fathers*) dapat tercipta, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara umum konsep pemikiran ekonomi kerakyatan dapat disandarkan pada kemakmuran; *Pertama*, Demokrasi Ekonomi, artinya semua warga negara turut aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sehingga prasyarat utamanya ketersediaannya lapangan pekerjaan yang layak pada satu sisi dan tingkat keterampilan serta kemampuan intelektual pendidikan pada sisi yang lain, dengan demikian akan terjadi sinkronisasi antara tersedianya lapangan pekerjaan dengan tenaga kerja yang ada. Karena permasalahan utama yang sering terjadi di masyarakat adalah ketidakcocokan antara *skill* tenaga kerja dengan kebutuhan karyawan sektor riil; *Kedua*, *Final Goal* Ekonomi Kerakyatan adalah tercapainya pemenuhan kebutuhan rakyat secara optimal, terutama pada 5 (lima) pokok kebutuhan dasar manusia, yaitu : sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Demikian juga pemerataan hasil-hasil pembangunan harus tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan warna kulit, suku, adat, agama dan kelompok, dengan demikian akan terjadi keadilan ekonomi secara merata di setiap daerah. Hal ini bersesuaian dengan semangat Undang-Undang Otonomi Daerah; *Ketiga*, pelayanan masyarakat harus diutamakan, artinya semua aparatur negara harus mampu merubah *mindset* dari “dilayani” menjadi “melayani”, sehingga para pejabat pemerintah selalu berfikir untuk melayani

masyarakat secara prima, *feed back* yang akan terjadi adalah kegiatan masyarakat kepada para pemimpinnya yang menjadi dasar loyalitas masyarakat; *Keempat*, keadilan yang merata atas kesejahteraan. Hal ini sangat penting menjadi dasar berfikir ekonomi kerakyatan, karena pokok masalah yang sering timbul di masyarakat adalah simpang-siurnya prioritas pembangunan antar daerah, misalnya pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur antara Pulau Jawa dengan Pulau di luar Jawa, bahkan pembangunan dan penataan pendidikan di wilayah Indonesia Timur sangat jauh tertinggal bila dibandingkan dengan pembangunan dan penataan pendidikan di Pulau Jawa; *Kelima*, pendidikan menjadi titik sentral pembangunan, artinya semua penggunaan dan strategi pembangunan harus berorientasi pada pendidikan. Pemikiran ini dibangun atas kesadaran bahwa rantai kemiskinan hanya dapat diputus dengan pendidikan, karena dengan peningkatan jenjang pendidikan masyarakat yang dibangun atas dasar kesadaran akan pentingnya makna pendidikan akan berdampak langsung pada kualitas intelektual dan keterampilan masyarakat, dengan demikian kreatifitas kegiatan ekonomi masyarakat akan berkembang dengan pesat dengan didukung kekayaan alam Indonesia serta kesuburan tanahnya serta luasnya usaha di sektor kelautan yang belum optimal diberdayakan, padahal pada sektor kelautan ini paling banyak menyerap tenaga kerja. Upaya pemerintah dan semua potensi bangsa untuk membangun kesadaran akan pentingnya dunia pendidikan akan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat dan sekaligus mengurangi beban ketergantungan ekonomi, karena sudah menjadi ketentuan umum bahwa orang yang kurang pendidikan dan keterampilan akan menjadi pekerja

kasar kelas bawah dengan pendapatan yang pas-pas-an atau standar upah minimum regional atau UMR. Konsep kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat lahir dan batin selalu bermuara pada tingkat pendidikan. Dampak secara langsung dari peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat adalah bergeraknya sektor riil dan usaha manufaktur yang menghasilkan barang-barang produksi yang berkualitas tinggi dan mempunyai daya saing internasional, sehingga dengan sendirinya potensi ekspor meningkat dan sekaligus akan meningkatkan penerimaan devisa Negara. Kesadaran akan pentingnya pendidikan yang memadai, tenaga pengajar, yaitu guru dan dosen yang mumpuni serta tersedianya sarana prasarana yang cukup; *Keenam*, pembangunan yang berkesinambungan, artinya konsep ekonomi kerakyatan sejak awal harus direncanakan secara berjenjang dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan per-daerah dengan mempertimbangkan kondisi dan budaya masing-masing daerah. Pada tataran perekonomian ini, penting untuk dilakukan mapping penataan awal program kegiatan, karena kondisi saat ini terdapat perbedaan yang cukup tajam antar daerah, sehingga tiap-tiap daerah harus mempunyai perencanaan masing-masing, akan tetapi dengan tujuan yang satu, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang serasi antara pembangunan lahir dan batinnya. Dilain pihak juga harus dipertimbangkan akan adanya perubahan kepemimpinan, baik pemimpin nasional hasil Pemilu atau pemimpin daerah hasil Pilkada, sehingga perubahan kepemimpinan tidak akan merubah secara drastis strategi pembangunan. Untuk itu perlu dibuat perencanaan pembangunan jangka panjang pada kurun waktu 25 tahun, pembangunan jangka sedang pada

waktu 15 tahun dan pembangunan jangka pendek pada kurun waktu 5 tahun. Dengan demikian perubahan kepemimpinan eksekutif, yudikatif dan legislatif tidak merubah secara signifikan kebijakan pembangunan, terutama pada sektor pembangunan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Kenyataan yang ada pada saat ini, setiap pergantian pemimpin nasional dan daerah juga akan merubah arah. Dan prioritas pembangunan yang terkadang bertolak belakang, sehingga hasil pembangunan tidak tuntas untuk dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan yang berkesinambungan juga akan mempermudah pelaksana di lapangan dan sekaligus akan meningkatkan beban anggaran pemerintah, karena program yang satu menjadi penyanggah program yang lain dan pemimpin yang satu akan melengkapi pemikiran pemimpin yang lain. Dengan demikian pencapaian sasaran pembangunan akan menjadi efektif dan efisien; *Ketujuh*, kelestarian alam, artinya dalam menata konsep perekonomian rakyat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

- a. Pembangunan yang memposisikan manusia sebagai subyek dan alam sebagai objek, sehingga kerangka berfikir pada pokok masalah ini adalah manusia memanfaatkan alam secara maksimal dalam kegiatan ekonominya, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi eksploitasi alam secara berlebihan yang dilakukan oleh manusia tanpa memperdulikan dampak lingkungan. Akibat yang lebih jauh pada proses kegiatan ekonomi ini akan berdampak merusak ekosistem yang ada dan pengerusakkan alam secara terus-menerus. Apabila dilihat secara sekilas dan dalam periode waktu yang singkat, manusia akan mendapatkan manfaat dan keuntungan yang besar, akan tetapi pada

jangka waktu yang panjang, generasi penerus akan mewarisi kerusakan alam yang tak terukur, dampak terakhir adalah pembangunan ekonomi dengan mengeksploitasi akan menimbulkan kerugian yang berkepanjangan bahkan secara financial keuntungan eksploitasi alam jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan biaya memperbaiki alam tersebut.

b. Memposisikan alam sebagai subyek, sehingga pada kegiatan ekonomi menitik beratkan pembangunan dan menata lingkungan dengan baik. Pada fase ini manusia diposisikan pada pihak yang dirugikan secara financial, karena membangun alam tanpa bisa memanfaatkan secara ekonomis. Kondisi ini sering terjadi pada daerah yang tandus dan memerlukan dana yang besar untuk pengelolaannya.

c. Bentuk kegiatan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan dengan perencanaan yang baik, artinya RUTR atau Rencana Umum Tata Ruang penggunaan sumber daya alam melalui mekanisme perencanaan yang baik terjadi hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Keserasian dan hubungan timbale balik yang baik antara alam, sehingga tidak merugikan rakyat inilah sebagai ciri ekonomi kerakyatan.

Kedelapan, bebas korupsi, artinya konsep ekonomi kerakyatan harus bebas dari praktik korupsi, sehingga semua anggaran pemerintah melebihi program APBN yang telah disepakati antara DPR dan pemerintah secara utuh tersalur. Dalam program pembangunan tanpa adanya kebocoran. Korupsi dapat diartikan secara umum adalah perbuatan aparaturnegara

atau warga masyarakat yang menyelewengkan anggaran pemerintah dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain. Dengan demikian korupsi merupakan perbuatan yang berbanding terbalik dari pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat. Adapun sebab-sebab korupsi itu terjadi antara lain dikarenakan oleh : adanya niat yang tidak baik, kontrol mental pribadi yang bertentangan dengan agama dan etika sosial serta bertentangan dengan semangat ekonomi pancasila, adanya kesempatan yang terbuka untuk melakukan korupsi, adanya alasan pembenar untuk melakukan korupsi, misalnya karena rendahnya anggaran pada pos Tertentu atau rendahnya gaji, dan yang terakhir adalah karena sistem kontrol mekanisme organisasi yang lemah. Adapun solusi yang harus dijalankan agar terhindar dari perbuatan korupsi, yaitu :

- a. Adanya pemahaman terhadap nilai-nilai Agama, sehingga menimbulkan kesadaran bahwa perbuatan korupsi itu melanggar perintah Agama serta bertentangan dengan Sila Pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Adanya budaya malu, artinya perbuatan korupsi itu adalah perbuatan yang memalukan diri sendiri dan memalukan keluarga.
- c. Adanya semangat cinta Tanah Air Indonesia karena korupsi adalah perbuatan yang merugikan Bangsa dan Negara.
- d. Adanya kontrol mekanisme organisasi dengan baik, dengan cara membuat SOP atau Standar Operasional Prosedur yang difahami oleh semua perangkat organisasi.

e. Adanya kecukupan alokasi anggaran secara proporsional, sehingga semua lini organisasi tertutup terhadap peluang untuk melakukan perbuatan korupsi, dengan demikian semua APBN terserap secara utuh untuk kesejahteraan rakyat semata.

Kesembilan, dasar filosofi yang dibangun dalam konsep ekonomi kerakyatan adalah kemakmuran bangsa Indonesia yang akan dapat tercapai secara optimal hanya dari usaha dan upaya Bangsa Indonesia, sehingga porsi PMA atau Penanaman Modal Asing hanya bersifat sebagai pelengkap atau katalisator. Hal ini sangat bersesuaian dengan semangat yang terkandung dalam makna Pasal 33 UUD 1945. Akan tetapi dalam tata pergaulan diplomatik internasional, masyarakat Indonesia tidak bisa menutup diri dari pergaulan internasional, sehingga investasi yang bersumber dari luar negeri secara bertahap dikurangi sampai menyentuh angka 20% dari semua sektor pembangunan, yaitu : sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan sektor perbankan. Orientasi asing untuk melakukan investasi di Indonesia adalah murni untuk mencari keuntungan semata, dan menjadi tidak mungkin apabila kepentingan asing untuk berinvestasi di Indonesia dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa proses penjajahan berlangsung dalam kurun waktu sekitar 350 tahun sampai berakhir pada kemerdekaan 17 Agustus 1945. Adalah kenyataan sejarah bahwa porsi peran investasi asing yang tidak terkendali dan tidak dibatasi secara Undang-Undang, maka akan meluas dan akan menjadi bentuk baru penjajahan. Artinya semua sektor nantinya akan dikuasai oleh negara asing lebih dari 50%. Kesadaran semua anak bangsa dan semua komponen

kebangsaan harus secara dini ditanamkan bahwa kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa dan negara dibangun diatas kepentingan pribadi dan golongan, akan tetapi dilain pihak, konsep ekonomi kerakyatan juga memerlukan peran negara asing pada sektor tertentu, terutama pada sektor yang tenaga ahlinya tidak tersedia di dalam negeri, artinya dalam rangka alih teknologi.

Konsep Ekonomi Kerakyatan saat ini yang berkembang dikalangan para intelektual dan para pemikir tentang ekonomi tidak terlepas dari konsep ekonomi yang dibangun atas dasar dan prinsip koperasi. Akan tetapi keselarasan dan kesepadanan antara Konsep Ekonomi Pancasila, Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Konsep Ekonomi Koperasi masih memerlukan perdebatan panjang yang harus dirumuskan secara bersama antara pemerintah, tokoh masyarakat dan para akademisi. Untuk tu menjadi sangat penting merumuskan pemikiran tentang perspektif koperasi terhadap Konsep Ekonomi Kerakyatan; *Pertama*, keserasian antara Konsep Ekonomi Pancasila, Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Konsep Ekonomi Koperasi bertemu pada satu titik, yaitu semangat implementasi Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian proses pembangunan ekonomi masyarakat saai ini harus bersesuaian dengan barometer atau parameter atau pedoman atau apapun namanya pada satu pijakan, yaitu “semangat implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang dijiwai dari nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila”; *Kedua*, Konsep Ekonomi Koperasi berfungsi sebagai sarana demokrasi ekonomi, karena dalam organisasi koperasi secara kelembagaan semua aturan, mekanisme organisasi dan kebijakan serta arah kegiatan ekonomi ditentukan dalam

RAT (Rapat Anggota Tahunan); *Ketiga*, koperasi juga dapat berfungsi sebagai alat interaksi sosial, karena dalam mekanisme organisasi mengedepankan semangat musyawarah untuk mufakat, sehingga semua pihak harus dapat memahami kepentingan pihak lain; *Keempat*, semangat toleransi dan kepedulian sosial juga tercermin dalam mekanisme organisasi koperasi; *Kelima*, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat memposisikan sebagai penyeimbang antara BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Swasta; *Keenam*, unsur pendidikan anggota menjadi pilar penting dalam koperasi; *Ketujuh*, koperasi sebagai alat perjuangan atau gerakan ekonomi untuk menolong diri sendiri (*self help*).

3. Strategi Bersaing.

Secara umum semua pemimpin negara di dunia ini selalu berorientasi untuk mensejahterahkan bangsa dan negaranya masing-masing dengan dihadapkan pokok masalah yang sama, yaitu seiring dengan perjalanan waktu, jumlah warga negara secara kuantitatif bertambah dan dengan dihadapkan dengan kebutuhan sumber daya alam, artinya pada satu sisi jumlah masyarakat pengguna dan pemanfaat alam bertambah, tetapi alam yang disiapkan oleh Tuhan pada manusia tetap sejak awal diciptakannya alam raya ini hingga sekarang. Untuk menjadi suatu kenyataan tanpa pilihan bahwa masyarakat dunia harus bersaing dalam mensejahterahkan bangsa dan negaranya masing-masing. Untuk itu diperlukan adanya strategi bersaing dalam batasan etika bersaing yang tidak merugikan bangsa lain akan tetapi secara bersama merasa diuntungkan yang dalam istilah Jawa

“menang tanpo ngadorake liyan”, artinya menang tanpa merendahkan orang lain.

Fokus dalam strategi bersaing ada dua, yaitu persaingan kualitas sumber daya manusia dan persaingan kekayaan alam. Sehingga dominasi manusia sebagai subyek pembangunan dan kegiatan ekonomi serta alam sebagai obyek pembangunan merupakan hubungan timbal balik yang harus dirumuskan serta dituangkan dalam aturan perundang-undangan, sehingga tercipta keseimbangan yang harmonis antara alam dan manusia. Kebutuhan manusia untuk mengkonsumsi semua hajat hidup guna menjaga dan kelestarian serta kelangsungan hidup manusia itu sangat terbatas, akan tetapi keinginan manusia untuk menguasai sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraannya itu tidak terbatas karena keinginan manusia untuk menyimpan harta kekayaan di dunia ini menjadi tidak terbatas. Untuk itu diperlukan etika ekonomi yang disandarkan pada kesadaran moral yang bersumber dari budaya bangsa dan keyakinan Agama agar manusia terhindar dari sifat rakus dan serakah dengan merugikan orang lain.

Dalam kegiatan ekonomi masyarakat strategi bersaing meliputi dua hal, yaitu bersaing dalam hal sumber daya manusia yang dapat dari dua sisi, yaitu jasmani dan rohani serta bersaing dalam hal kualitas dan keanekaragaman sumber daya alam yang langsung disiapkan oleh Tuhan pada manusia dengan batasan region atau wilayah negara masing-masing, sehingga porsi strategi bersaing yaitu usaha manusia sebagai warga negara secara komprehensif mengoptimalkan peran manusia dan alam guna

menjaga dan meningkatkan kegiatan ekonomi dalam rangka tercapainya kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara masing-masing.

Strategi bersaing di bidang SDM yaitu; *Pertama*, optimalisasi peran pendidikan melalui dua jalur, yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal dengan satu tujuan yaitu peningkatan intelektual dan keterampilan masyarakat suatu negara bila dihadapkan pada tingkat kualitas intelektual dan keterampilan masyarakat internasional. Dengan demikian standar kualitas pendidikan berorientasi pada daya saing internasional dengan selalu mempertimbangkan kondisi alam masing-masing; *Kedua*, strategi bersaing di bidang budaya, karena budaya masyarakat yang tinggi dapat mempengaruhi cara berfikir budaya masyarakat lokal yang dalam strata atau posisi di bawah. Untuk itu perlu digali kembali budaya lokal yang mampu bersaing secara internasional; *Ketiga*, strategi bersaing di bidang pemikiran, karena konsep pemikiran para intelektual dapat merubah kebijakan negara dalam pergaulan internasional. Artinya hasil pemikiran para intelektual merupakan out-put paling berharga dalam sebuah negara; *Keempat*, kesadaran relegius yaitu pemahaman masyarakat terhadap suatu Agama menjadi alat pemersatu kebangsaan; *Kelima*, kondisi fisik dan kesehatan masyarakat merupakan modal bersaing yang dominan dalam menunjang keberhasilan di segala bidang; *Keenam*, bersaing dalam menata semangat juang dan kerukunan nasional dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Kesadara secara religius yang memposisikan manusia sebagai khalifah di dunia merupakan kesadaran utama yang mendasari tindakan moral manusia untuk memanfaatkan alam dengan tetap menjaga lingkungan dan

kelestarian alam yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia. Oleh sebab itu, pemikiran tentang strategi bersaing dalam pengelolaan alam meliputi ; *Pertama*, diperlukan kesadaran intelektual dalam kegiatan ekonomi untuk melakukan riset dan mapping sumber daya alam, baik dalam jumlah kandungan suatu jenis kekayaan alam pada satu lokasi tertentu sampai pada keanekaragaman potensi alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan tetap menjaga kualitas lingkungan serta dapat mengurangi dampak negatif paska pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Pembangunan ekonomi sebuah negara merupakan proses panjang yang berisi akumulasi kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga harus dipertimbangkan kepentingan generasi mendatang; *Kedua*, teknologi pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi secara efektif dan efisien, sehingga pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dihitung dari hasil pengelolaannya tetapi juga harus dihitung dampak yang ditinggalkannya. Untuk itu orientasi teknologi tepat guna dan teknologi yang secara sederhana dan murah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; *Ketiga*, bidang legislasi atau aturan perundang-undangan harus dibuat sejak awal dengan selalu berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Kepastian hukum dalam menata tata kelola sumber daya alam sangat penting guna menjaga kelestarian alam serta menjaga ekosistem alam secara terbuka, untuk itu perlu dibuat RUTR atau Rencana Umum Tata Ruang secara nasional, sehingga semangat otonomi daerah tidak bertentangan dengan RUTR secara nasional. Membangun kesadaran akan pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga

kualitas lingkungan menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat.

D. GLOBALISASI EKONOMI.

Perkembangan teknologi informasi yang cukup cepat dan diikuti dengan berbagai perkembangan disiplin ilmu telah membawa masyarakat dunia dalam satu mata rantai pergaulan yang seakan tanpa batas, semua jurang pemisah seakan sempit, batas antar negara dapat diperpendek dengan teknologi kedirgantaraan, ribuan penerbangan bahkan jutaan sarte penerbangan pesawat yang menembus batas negara. Mobilitas pendidikan yang besar antara negara yang satu menuju warga negara yang lain kerap terjadi. Arus informasi berkembang pesat menyebar keseluruh dunia. Masyarakat dunia seakan dihadapkan pada tata dunia baru, yaitu sistem pergaulan masyarakat internasional dengan satu budaya, yaitu budaya internasional dengan satu kepentingan ekonomi, yaitu kesejahteraan masyarakat internaional secara menyeluruh.

Masyarakat dunia terbentuk atas jajaran dan susunan masyarakat pada semua negara yang satu dengan yang lain berinteraksi dalam aturan kepentingan negaranya masing-masing, sehingga untuk menata pergaulan internasional antar negara terutama berkaitan dengan kegiatan ekonomi dunia, maka dibentuklah lembaga-lembaga internasional dalam naungan organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Interaksi sosial antar masyarakat dunia tersebut dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi masing-masing negara, masing-masing kelompok dan masing-masing individu disebut dengan Era Globalisasi, artinya masyarakat dunia ditata

dalam norma etika global yang menyeluruh mengikat antar negaranya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan besar adalah alat pengikat antar masyarakat dunia tersebut. Secara kasat mata, ikatan tersebut bertumpu pada satu titik, yaitu “kepentingan”, artinya hanya kepentingan kelompok dan individu yang mendorong atau dasar motivasi dalam kegiatan ekonomi masyarakat dunia.

Interaksi sosial masyarakat dunia pada era globalisasi saat ini mendorong timbulnya persaingan aktivitas ekonomi, sehingga setiap negara harus merumuskan secara tepat porsi peran aktivitas ekonomi asing atau luar negeri dalam suatu negara. Merumuskan aturan dalam suatu perundang-undangan menjadi sangat penting dalam rangka melindungi kepentingan ekonomi masyarakat negara dan dalam rangka menjaga eksploitasi PMA secara berlebih-lebihan yang dalam jangka pendek sekitar 5 tahun seakan memakmurkan masyarakat setempat dengan membuka lapangan pekerjaan baru, serta menambah perolehan pajak dan menambah cadangan devisa negara, tetapi dalam kurun waktu 10 tahun sampai dengan 25 tahun kedepan, nilai keruakan alam akan menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh selama ini. Dengan demikian praktik korporasi global oleh perusahaan-perusahaan internasional harus dibatasi dengan peraturan perundang-undangan yang proporsional agar pelaksanaan kegiatan ekonomi perusahaan korporasi dunia tidak bersifat liar dan merugikan masyarakat setempat dalam waktu yang lama.

Ada beberapa sudut pandang dalam melakukan kajian terhadap

globalisasi ekonomi yang berkaitan dengan keajahteraan masyarakat dunia dan sekaligus membangun kesejahteraan setiap warga negara.

1. Peran Lembaga Internasional.

Sebagian akademisi, pengamat dan praktisi menilai bahwa keputusan dan kebijakan ekonomi yang dibuat bahkan dipaksakan pada negara yang sedang berkembang oleh lembaga-lembaga internasional bukan hanya atas dasar kepentingan perekonomian secara adil dan mampu mensejahterahkan masyarakat warga negara setempat, akan tetapi banyak keputusan tersebut dibuat atas pertimbangan ideologi dan politik, sehingga peran lembaga internasional dalam kegiatan ekonomi di sebuah negara menjadi bias bahkan berdampak negatif pada waktu yang lama.

Lembaga internasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi suatu negara, antara lain IMF (*International Monetary Fund*), IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*) atau yang dikenal dengan sebutan "Bank Dunia", dan lembaga perdagangan internasional atau disebut *International Trade Organization*. Hampir semua lembaga internasional dibangun atas dasar tujuan yang mulia, yaitu membuat aturan tata kelola antar negara secara adil dan proporsional dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat internasional. Akan tetapi permasalahan mendasar yang menjadi akar dari perbedaan persepsi dan perselisihan antar negara yaitu; *Pertama*, perbedaan kepentingan prioritas antar anggota, sehingga ada rasa kegamangan atas kemampuan lembaga tersebut dalam menyelesaikan masalah internasional; *Kedua*, dominasi negara adikuasa, yaitu Amerika dalam menentukan semua kebijakan organisasi, sehingga peran dari perangkat organisasi negara selain Amerika

menjadi terpinggirkan; *Ketiga*, generalisasi masalah, padahal masing-masing negara mempunyai ciri khas dan permasalahan yang khas juga, misalnya permasalahan perdagangan di Eropa sangat berbeda dengan permasalahan di Asia; *Keempat*, adanya kekhawatiran internasional atau bahkan kecurigaan internasional bahwa ada tersimpan agenda khusus kepentingan negara-negara maju yang berkembang pada setiap program kebijakan organisasi lembaga internasional tersebut. Kekhawatiran dan kecurigaan itu menjadi sangat wajar, karena berdasarkan fakta di lapangan sering terjadi pemaksaan kebijakan ekonomi secara drastis pada sebuah negara, sehingga berdampak menyengsarakan warga negaranya. Sehingga ada sebagian negara yang menolak intervensi atau bantuan dari lembaga internasional tersebut dengan alasan untuk melindungi kepentingan internal negaranya yang sekaligus menjaga kemakmuran rakyatnya.

2. Globalisasi Sandang.

Jumlah masyarakat Indonesia diperkirakan akan menyentuh angka 300 juta orang per akhir tahun 2014, artinya keperluan akan pakaian mulai dari sepatu, sandal, celana, baju dan sampai dengan tutup kepala serta kebutuhan lain yang berkaitan dengan *fashion* yaitu tas, kosmetik, parfum dan lain-lain sangat tinggi. Kekuatan produksi dalam negeri tidak sebanding dengan angka permintaan, sehingga terjadi kepincangan antara *supply and demand* di pasar dalam negeri. Tingginya angka permintaan kebutuhan sandang dalam negeri akan banyak ditutupi dari hasil impor luar negeri, terutama dari Cina, India dan Eropa. Kenyataan ini lebih diperpahit dengan tutupnya pabrik *garment* di dalam negeri, karena tidak mampu bersaing dengan membanjirnya produk-produk sandang dari negara Cina yang

melalui jalur resmi impor dan melalui jalur pasar gelap atau barang-barang selundupan. Sampai saat ini pemerintah dari berbagai kalangan belum bisa berbuat banyak, baik dari sisi legislasi atau penetapan atau kuota impor sandang, insentif permodalan pada penguasa local atau membantu terbukanya jalur *marketing* sandang guna membuka akses pasar dalam dan luar negeri.

Ketahanan dan keamanan produk sandang dalam negeri harus diukur dari segi kuantitas dan kualitas, sehingga masyarakat per-tekstil-an Indonesia merasa menjadi tuan di dalam negeri sendiri. Demikian juga masyarakat pengerajin batik, sepatu dan sandal dapat memperoleh berkah dari pasar dalam negeri, terutama pada musim hari raya Idul Fitri, Natal dan tahun Baru. Pemerintah harus segera memikirkan bentuk regulasi yang mendorong konsep kemandirian sandang dengan mendukung hasil-hasil produk dalam negeri serta dapat mengembangkan produk yang berkualitas ekspor.

Pemerintah harus turun tangan karena terjadi ketimpangan persaingan antara pemain sandang luar negeri dan dalam negeri. Porsi akses pasar impor sandang harus ditata sedemikian rupa sampai menyentuh angka 20% untuk pasar produk impor dan 80% untuk produk dalam negeri, sehingga amanat Pasal 33 UUD 1945, kebutuhan yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia sendiri, bukan dinikmati oleh masyarakat luar negeri. Apalagi bila dikaitkan bahwa sektor sandang dapat menyerap tenaga kerja yang relatif besar, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Ekonomi pasar bebas tidak boleh dibuka sebebas-bebasnya yang menyebabkan para pelaku pasar liar tanpa kontrol

dan menjadi tidak adil apabila para pelaku pasar luar negeri dengan modal besar dan tingkat keterampilan serta penguasaan teknologi yang tinggi dilepas secara bebas untuk bersaing dengan pemain lokal yang memiliki modal terbatas dan penguasaan teknologi yang rendah. Disinilah letak pentingnya pemerintah menetapkan regulasi dengan pemetaan segmen pasar yang tepat dan dengan porsi yang seimbang antara pemain lokal dan pemain internasional.

Dengan demikian, konsep pemikiran Ekonomi Pancasila pada implementasi kebijakan globalisasi sandang yaitu mengupayakan 80% minimal kebutuhan sandang diproduksi di dalam negeri dan pemerintah melalui mekanisme program bersama kelembagaan eksekutif, legislatif dan yudikatif guna menyusun program bersama dengan para pelaku produksi lokal untuk secara sinergi mengoptimalkan potensi dalam negeri. Apapun alasannya kepentingan rakyat dan bangsa sendiri harus diutamakan dan diprioritaskan. Kepentingan internasional tetap diakomodasikan, tetapi tidak lebih dari 20% porsi kebutuhan nasional.

3. Globalisasi Pangan.

Kehidupan beragama yang baik, cinta kepada bangsa dan negara serta selalu berorientasi pada kemakmuran bersama antar masyarakat Indonesia adalah dasar berfikir untuk mengelaborasi permasalahan kedaulatan pangan. Kajian tentang globalisasi pangan berkaitan erat dengan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, artinya dasar analisis berfikirnya adalah :

- a. Jumlah total masyarakat Indonesia dikalikan dengan total kebutuhan pangan dalam hitungan hari, bulan dan tahun, maka akan ditemukan angka kebutuhan pokok, untuk kebutuhan beras harus

dihitung dengan rentan waktu musim panen, artinya kebutuhan *stock* beras minimal dalam periode satu kali panen dan yang penting aman pada rentan waktu tiga kali panen, sehingga ketahanan pangan relatif aman dengan tingkat kebutuhan rata-rata 3 Ons sampai dengan 8 Ons beras per-hari untuk per-kepala. Dengan dasar perhitungan garis tengah dapat diukur jumlah kebutuhan beras total, yaitu jumlah total penduduk dikalikan 5 Ons beras dan dilakikan lama waktu tiga kali panen. Apabila dalam persediaan *stock* melebihi total kebutuhan tersebut, maka bisa dilakukan ekspor beras.

Total kebutuhan *stock* beras tersebut dapat berkurang apabila masyarakat dapat menggunakan jenis makanan selain beras, misalnya ubi-ubian, sagu, buah-buahan dan berbagai macam jenis makanan substansi yang tersedia secara melimpah di bumi Indonesia. Apabila semua jajaran pemerintah dan tokoh masyarakat dapat melakukan sosialisasi secara bersama untuk menggeser pola makan masyarakat dari beras menjadi ubi-ubian, maka ketergantungan terhadap tanaman padi akan berkurang. Oleh sebab itu riset kesehatan tentang manfaat ubi-ubian terhadap daya tahan tubuh dan sebagainya harus segera dilakukan, kemudian dilakukan proses edukasi pada masyarakat secara besar-besaran melalui media

Dalam perspektif Ekonomi Pancasila, globalisasi pangan harus dimaknai sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya kedaulatan pangan dan ketahanan pangan yang bersumber dari peranian, perkebunan, perikanan dan peternakan, sehingga kesiapan pangan dapat diukur dengan kebutuhna dasar per-orang dan

kebutuhan maksimal per-orang. Standarisasi ukuran tersebut akan menjadi bahan perdebatan secara akademis batasan manusia Indonesia untuk bertahan hidup dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Kebutuhan pangan orang Indonesia sangat berbeda dengan kebutuhan pangan orang Eropa karena perbedaan struktur anatomi tubuh. Akan tetapi yang menjadi ukuran adalah *output* atau kinerja dalam aktivitas sehari-hari.

Proses edukasi masyarakat terhadap pola makan harus dilakukan melalui hasil riset dan dilakukan sosialisasi secara besar-besaran agar masyarakat tidak terjebak dengan pola makan, pemborosan dan makan yang berlebih-lebihan yang mengakibatkan penyakit, fleksibilitas pola makan dan jenis makanan menjadi sangat penting, sehingga campur tangan pemerintah semakin berkurang, karena masyarakat secara sendiri-sendiri dapat melakukan kemandirian pangan setiap kepala rumah tangga.

Kondisi yang sering terjadi adalah menjelang musim panen, pemerintah *disodori* dengan data seolah-olah *stock* pangan menipis, kemudian pemerintah membuka kran impor dengan *quota* yang cukup besar. Pada saat panen, *stock* beras melimpah dan harga beras turun, maka petani sangat dirugikan, kemudian yang kualitas bagus dari petani dibeli oleh pedagang dengan harga yang murah karena mekanisme pasar, setelah itu para pedagang melakukan ekspor beras kualitas tinggi dengan harga pasaran internasional, dan masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras kualitas rendah dari hasil impor. Kenyataan ini tidak boleh terjadi, pemerintah dan DPR serta LSM

harus terus memantau perkembangan pangan dan mendeteksi dini mekanisme globalisasi pangan.

Apabila fokus kajian ketahanan pangan pada pertanian, khususnya tanaman padi, maka analisisnya mencakup hal yang sangat kompleks; *Pertama*, permasalahan SDM, karena mayoritas para petani berpendidikan formal setingkat SD dan SMP, sehingga secara akademis, para petani hanya sebagai pekerja kasar dengan mengandalkan rutinitas dan pengalaman belaka, inovasi dan kreasi sulit didapatkan, untuk itu diperlukan tim penyuluh pertanian dari kalangan akademisi dan peneliti; *Kedua*, permasalahan lahan, lahan garapan petani sebagian besar kurang dari 1 Hektar, apalagi saat ini lahan-lahan subur sudah beralih menjadi perumahan dan area industri, kenyataan ini menunjukkan bahwa aparat daerah belum mempunyai perencanaan/RUTR yang berorientasi pada mekanisme ketahanan pangan; *Ketiga*, permasalahan bibit, riset pemerintah dan swasta harus diarahkan untuk melakukan kajian jenis tanaman padi yang cocok dengan lahan tertentu baik dari unsur jenis tanah, air atau curah hujan, ketinggian tanah dan permukaan laut, sinar matahari dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut harus dilakukan kajian riset, sehingga melalui tim penyuluh pemerintah dapat mengarahkan pada jenis bibit yang tepat, dan pemerintah juga harus mampu menyiapkan bibit yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Artinya capur tangan pemerintah tentang masalah bibit sangat diperlukan guna melindungi petani dari kecurangan oknum tertentu; Keempat, Masalah irigrasi/pengairan, hal tersebut sangat penting dalam pertanian

terutama tanaman padi, hingga saat ini masih banyak air aliran sungai tidak bisa dimanfaatkan secara optimal pada lahan pertanian, upaya pemerintah untuk memanfaatkan aliran sungai melalui pembangunan waduk atau bendungan mempunyai manfaat ganda, yaitu manfaat untuk aliran irigrasi pertanian, manfaat untuk sumber daya listrik dan manfaat untuk air bersih. Semua upaya tersebut harus menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah, garis sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah serta kebutuhan masyarakat akan memberikan efek positif untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan *multiplier effect*; *Kelima*, masalah pembiayaan, faktor pembiayaan untuk usaha pertanian hingga saat ini dirasakan sangat mendesak, ada beberapa faktor keengganan kalangan perbankan untuk menyalurkan kredit pada para petani, yaitu jarang sekali petani mempunyai jaminan yang memadai dengan standar perbankan, dan potensi gagal untuk membayarnya cukup tinggi. Disamping itu juga faktor pendidikan para petani yang relatif rendah, untuk itu sudah saatnya pemerintah membentuk bank khusus melayani para petani dengan prosedur dan mekanisme yang sederhana serta pemerintah memberikan insentif bunga atau mekanisme bagi hasil yang minimum, atau kalau memungkinkan, pemerintah memberikan pinjaman kepada petani dengan pinjaman “*qordlu hasan*” atau pinjaman tanpa bunga.

Insentif pemerintah di bidang pembiayaan pertanian harus dilakukan dengan dasar pertimbangan bahwa mayoritas penduduk miskin adalah petani, sehingga upaya pemerintah untuk

mensejahterakan petani berarti juga upaya untuk memberantas kemiskinan, dan dilain pihak sektor pertanian dapat menyerap tenaga kerja yang sangat banyak melebihi sektor industri, dengan demikian program pemerintah untuk menambah kesempatan kerja juga terpenuhi. Peruntukan pembiayaan dapat berupa subsidi pupuk, subsidi bibit dan subsidi pengolahan lahan pertanian. Untuk menjaga kelangsungan pembiayaan bagi petani semestinya tertuang dalam perundang-undangan yang dalam hal ini sebagai porsi DPR, sehingga dikemudian hari dengan perubahan pemimpin nasional, karena faktor tidak merubah kebijakan pembiayaan sektor pertanian, mind set kalangan perbankan dan pemerintah harus berubah dari jenis pinjaman petani yang bersifat bisnis dengan bunga acuan pasar menjadi suku bunga isentif, karena sektor pertanian secara langsung dan tidak langsung memutar roda perekonomian nasional.

Dari sudut pandang Ekonomi Pancasila, pembiayaan sektor pertanian adalah tugas pemerintah melalui lembaga perbankan atau melalui lembaga pembiayaan, itu bukan merupakan pilihan mekanisme penyaluran saja, tetapi yang terpenting adalah lembaga tersebut tidak boleh berorientasi keuntungan, tetapi juga tidak boleh merugi, sehingga kewajiban petani untuk mengembalikan dana yang dipinjam merupakan keharusan agar dana tersebut dapat bergulir ke sektor lain. Dengan demikian harus dicarikan pola dan mekanisme yang sesuai dengan kepentingan semua pihak, yaitu petani, pemerintah dan lembaga penyalur pinjaman kepada petani; *Keenam*, permasalahan *marketing/pemasaran*, semua hasil produk pertanian, baik yang masih

mentah atau produk olahan tidak diperbolehkan untuk di-ekspor, meskipun harga internasional lebih baik bila dibandingkan dengan harga di dalam negeri sebelum kebutuhan dalam negeri terpenuhi, artinya konsentrasi kebutuhan dalam negeri menjadi prioritas utama, kemudian kelebihan atau sisa dari kebutuhan dalam negeri dilakukan ekspor dengan menggunakan aturan perdagangan internasional (WTO), pemerintah dalam hal ini atase perdagangan luar negeri dibawah koordinasi Duta Besar Indonesia yang berposisi di negara-negara sahabat harus aktif melakukan kegiatan marketing yang disesuaikan dengan potensi ekspor dalam negeri.

Mekanisme marketing dalam dan luar negeri melalui koordinasi instansi terkait, yaitu Menteri dalam Negeri dan jajaran Pemerintah daerah yang lebih mengetahui potensi daerahnya masing-masing, Menteri Luar Negeri yang dalam hal ini Atase Perdagangan, Menteri Perdagangan dan Kementrian Koperasi, senergi antar instansi harus dilakukan dalam satu tim dan satu atap guna mempercepat proses dan mempersingkat jalur birokrasi; Ketujuh, masalah kelembagaan, akomodasi kepentingan masyarakat dalam kegiatan ekonomi disatukan dalam satu atau beberapa lembaga guna menyatukan potensi dan sekaligus menjadi sarana untuk mencari solusi bila terjadi permasalahan yang harus dipecahkan bersama. Petani adalah mayoritas peserta pemilu dalam suksesi pemimpin nasional dan pemimpin daerah, oleh sebab itu keterwakilan para petani dalam hal kepentingan untuk memperjuangkan nasibnya harusnya terwakili secara kelembagaan, akan tetapi terkadang kondisinya terbalik,

karena semua lembaga mengurus petani atau paling tidak petani sebagai alasan sasaran program setiap lembaga departemen. Akhirnya nasib dan kepentingan petani hanya sebatas sebagai obyek. Untuk itu dalam pandangan Ekonomi Pancasila, petani harus diposisikan sebagai obyek sekaligus sebagai subyek, artinya ada ruang gerak petani untuk mengeksplorasi diri dalam kegiatan berbangsa dan bernegara.

Kelembagaan yang terlibat langsung terhadap sektor pangan maupun yang tidak terlibat langsung antara lain : Kementerian Pertanian, Lembaga Perbankan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Lembaga Sosial lainnya (LSM).

Kementerian Pertanian harus menyusun rencana strategis tentang ketahanan pangan dan kedaulatan pangan secara nasional, mulai dari kesiapan lahan, pengolahan lahan, masalah bibit, ketersediaan pupuk dan sampai dengan industri dan distribusi hasil olahan pangan. Kementerian Pertanian harus mampu memposisikan sektor pangan sebagai suatu keharusan ideologi dalam arti demi alasan kemanusiaan, sehingga yang menjadi dasar berfikir bukan menggerakkan pangan dengan parameter pasar bebas, tetapi sektor pangan menjadi kewajiban bersama antara pemerintah, petani dan pihak swasta.

Lembaga Perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya kemandirian pangan dan ketahanan pangan, karena kegagalan pada lembaga perbankan untuk menyalurkan modal ke sektor

pertanian akan berdampak besar pada kehidupan berbangsa dan bernegara⁷¹.

Kementerian Kehutanan harus mewaspadai penggunaan potensi hutan yang secara berlebih-lebihan di eksploitasi tanpa diimbangi dengan reboisasi, sehingga keseimbangan ekosistem hutan terganggu dan menyebabkan bencana bagi masyarakat luas. Hutan merupakan mata rantai kehidupan mulai dari penyiapan udara segar untuk fungsi paru-paru dunia, fungsi resapan air hujan agar tidak terjadi musibah banjir dan tanah longsor serta hutan menyimpan berbagai variasi tumbuhan dan hewan. Dengan demikian dalam konsep Ekonomi Pancasila, hutan dipandang sebagai salah satu sumber kehidupan yang diamankan kepada manusia untuk dimanfaatkan dan sekaligus harus dijaga kelestariannya, sehingga manfaat hutan dapat berkesinambungan antar generasi dengan dasar filosofi bahwa hutan bukan warisan para pendahulu, tetapi hutan adalah titipan anak cucu generasi yang akan datang⁷².

⁷¹ Wakil Presiden, DR Boediono dalam acara “Indonesia Banking Expo 2013”, mengatakan yang intinya adanya kekhawatiran terhadap dominasi pihak asing di lembaga perbankan nasional. Negara yang mengalami krisis atau kerapuhan secara finansial adalah Elandia dan Siprus, karena sebagian besar lembaga keuangan dikuasai oleh pihak asing. Tidak ada alasan karena pasar bebas kemudian asing bebas menguasai semua kelembagaan sehingga berdampak pada rapuhnya struktur kebangsaan. Kelemahan struktur kelembagaan nasional disebabkan oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham bank Umum pada Pasal 3 yang diperbolehkan hingga batas 99% oleh pihak asing.

⁷² Pada tanggal 23 November 1950 diselang gerakan rapat umum Tarutung, Bung Hatta (Proklamator Kemerdekaan R.I.) mengatakan : “bahwa setiap pohon yang diolah perlu disertai penanaman bibit baru”, makna ungkapan tersebut adalah kesadaran akan kelestarian fungsi hutan, danau dan sungai serta berbagai kandungan potensi yang tersimpan didalamnya. Artinya setiap pengelolaan dan

Kementerian Koperasi turut berperan aktif dalam memobilisasi petani melalui gerakan Koperasi yang disinergikan dengan program fasilitasi oleh Dekopin, secara kultur gerakan Koperasi mempunyai kedekatan dengan petani, nelayan dan gerakan ekonomi rakyat lainnya, sehingga melalui wadah gerakan Koperasi, ketahanan pangan dan kemandirian pangan dapat dioptimalkan. Dalam kaitan ini, nilai yang dibangun pada Koperasi sejalan dan seiring dengan konsep Ekonomi Pancasila, meskipun tidak sama persis karena proses demokrasi Koperasi adalah “ONE MAN ONE VOTE”, sedangkan konsep Demokrasi Ekonomi Pancasila adalah keterwakilan dengan cara musyawarah yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Kesadaran tersebut dibangun atas dasar pemikiran kualitas SDM yang membedakan antara seorang Profesor dengan Mahasiswa, antara seorang Kyai dengan Santri. Perbedaan status dan perilaku itu menjadi suatu kewajaran seperti halnya seorang Direktur perusahaan akan sangat berbeda perannya dengan seorang pekerja kasar di perusahaan tersebut, tanpa ijasah dan keahlian. Demikian juga perbedaan antara seorang Panglima dan Prajurit⁷³.

pemanfaatan lahan harus mempertimbangkan ciri-ciri khas dan jenis wilayah, terutama dalam hal kandungan unsur dalam tanah dan volumenya, tinggi rendahnya dari permukaan air laut, komposisi kimiawinya serta arah sudut matahari dan tingkat kemiringan tanah.

⁷³ Emil Salim dalam bukunya “Kerakyatan dalam Pembangunan”, mengatakan bahwa : “Koperasi bukan badan usaha milik swasta atau perorangan, karena motivasinya tidak mengejar keuntungan bagi orang per-orang. Koperasi bukan pula Badan Usaha Milik Negara, karena yang memilikinya bukan negara. Koperasi adalah badan usaha milik masyarakat, karena sifat Koperasi mengemban kepentingan

Peran Kementerian Perdagangan dalam fungsi kelembagaan secara jeli harus melakukan *mapping product* yang menjadi skala prioritas ekspor dalam menyongsong era globalisasi pangan, akan tetapi jajaran Kementerian Perdagangan juga harus membagi produk barang-barang termasuk hasil pertanian yang dikhususkan untuk keperluan ketahanan pangan dan kemandirian pangan, jangan sampai terjadi kondisi kesalahan koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Perdagangan, karena kesalahan data, yaitu pada saat menjelang musim panen padi melakukan impor beras dalam skala besar, sehingga harga beras dalam negeri hancur. Hubungan timbal balik secara kelembagaan antara petani dan pemerintah dalam perspektif Ekonomi Pancasila harus selalu berorientasi pada kepentingan rakyat banyak dan kepentingan bangsa dan negara. Globalisasi perdagangan dapat dikatakan berjalan secara adil bila para pelaku pasar bebas itu dalam tataran yang sama atau satu level, kesamaan tingkatan SDM, kesetaraan permodalan dan kesesuaian dengan kemampuan akses pasar. Ada istilah “jangan salahkan bila Harimau memakan kambing bila antara Harimau dan kambing dijadikan dalam satu kandang, tetapi yang salah adalah yang membuat aturan kalau Harimau harus satu kandang dengan Kambing”. Inilah makna dari pengaturan segmentasi pasar.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perumahan dan Kementerian Dalam Negeri

anggotanya sebagai anggota masyarakat yang memiliki hubungan kekeluargaan sosial yang kepentingannya untuk memajukan masyarakat, sehingga pendekatan dalam pengembangan Koperasi adalah “Halistik Integratif”.

membentuk Tim secara bersama-sama, melakukan kerja satu atap dalam satu tugas besar, yaitu melakukan upaya “Revitalisasi Pertanian” dengan maksud untuk menjaga kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Langkah nyata yang dilakukan oleh Tim tersebut adalah; *Pertama*, Tim harus mempunyai database dari hulu ke hilir tentang senua produk yang berkaitan dengan pangan serta data jumlah penduduk per-daerah sekaligus tingkat konsumsi tiap jenis pangan, karena masing-masing penduduk suatu daerah mempunyai pola makan yang berbeda dan melalui database tersebut memudahkan pemerintah untuk menentukan strategi pembinaan dan pengembangan serta pembangunan sumber-sumber pangan; *Kedua*, Tim melakukan pemetaan lahan subur untuk area tanaman pangan, hal ini untuk menghindari penggunaan lahan subur untuk kepentingan industri dan perumahan. Untuk pengembangan industri dan pembangunan perumahan diarahkan ke daerah tandus atau daerah yang kurang berpotensi untuk lahan pangan. Dengan demikian akan terjadi konsentrasi lahan tiap Propinsi tentang jenis-jenis bahan pangan tertentu, kemudian masing-masing daerah dapat melakukan mekanisme perdagangan antar daerah; *Ketiga*, Tim membuat aturan internal dalam negeri, wilayah usaha yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pengusaha besar, sedang dan sektor UMKM dan Koperasi, misalnya untuk sektor tanaman padi hanya bisa digarap oleh petani dan UMKM serta Koperasi, untuk sektor perikanan ikan budidaya dilakukan oleh pengusaha tingkat menengah dan untuk sektor kelautan dan perikanan ikan tangkap dilakukan oleh pengusaha besar.

Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih kebijakan serta semua pihak kalangan petani dan pengusaha mempunyai wilayah bisnis masing-masing. Karena apabila tidak dilakukan segmentasi pasar yang baik, maka pengusaha sektor UMKM dan Koperasi serta para petani gurem akan dimangsa habis oleh pengusaha besar; *Keempat*, tugas Tim adalah menjaga lingkungan hidup yang baik dan asri, artinya kegiatan untuk menjaga kedaulatan pangan dan kemandirian pangan tidak diperbolehkan untuk merusak lingkungan, baik wilayah daratan maupun wilayah laut. Ekosistem di daratan dan di laut harus terjaga dengan baik, karena untuk kelangsungan hidup generasi mendatang. Kerusakan bisa diakibatkan oleh kegiatan ekonomi dalam negeri dan kegiatan ekonomi pihak luar negeri. Hingga saat ini potensi ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) tidak terjaga dengan baik dan tidak menghasilkan potensi ekonomi apapun, yang seharusnya setiap kapal-kapal asing yang melalui jalur ALKI harus dipantau bahkan dikawal dengan ketat untuk kepentingan keamanan dan kelancaran kapal-kapal luar negeri dan sekaligus melakukan *monitoring* dari dekat, jangan sampai kapal-kapal asing yang melalui jalur ALKI tersebut sambil membuang sampah nuklir yang membahayakan atau mengambil kekayaan laut. Lemahnya monitoring kegiatan kapal-kapal asing yang melalui jalur ALKI disebabkan oleh lemahnya armada laut Indonesia dan terbatasnya pesawat pengintai. Dengan adanya jaminan kemampuan dan pengawasan sampai ke luar batas wilayah kedaulatan R.I. di laut, maka sudah sepantasnya kapal-kapal yang melalui jalur ALKI harus membayar kompensasi ekonomi. Hal tersebut dapat

diperjuangkan melalui jalur diplomatik, sehingga dalam perspektif Ekonomi Pancasila, kelestarian alam dan lingkungan hidup yang baik menjadi porsi khusus dalam kerangka pembangunan nasional. Sehingga makna “Revitalisasi Pertanian” sebagai bagian dari ketahanan pangan dan kedaulatan terjaga dengan baik⁷⁴.

4. Globalisasi Papan.

Salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka kelangsungan hidup selanjutnya untuk dirinya dan orang-orang yang dicintainya, yaitu segenap keluarganya seperti kebutuhan akan perumahan atau kebutuhan papan. Rumah sebagai tempat tinggal mempunyai bentuk yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh budaya setempat dan dibatasi oleh kondisi alam sekitarnya sebagai bahan material perumahan. Dalam konsep Ekonomi Pancasila, ketersediaan perumahan yang layak huni dan berlokasi pada wilayah yang aman dan sehat adalah merupakan hak warga negara, sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan perumahan dengan syarat-syarat tertentu dan dengan mekanisme kepemilikan atau proses

⁷⁴ Anton Apriyantono, Menteri Pertanian, dalam sambutannya pada buku “Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban”, mengatakan bahwa ; “kompleksitas masalah pertanian meliputi hal-hal sebagai berikut ; *Pertama*, pertanian disamping sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri juga untuk konsumsi luar negeri, dan pola makan masyarakat bergeser dengan lebih banyak mengkonsumsi protein, lemak, vitamin dan mineral; *Kedua*, pertanian sebagai lahan untuk lapangan pekerjaan yang menyerab banyak tenaga kerja; *Ketiga*, misi kemanusiaan pertanian, karena 1,2 Milyar manusia di dunia berada pada kondisi kemiskinan absolute dan 840 Juta jiwa menderita karena kelaparan dan gizi yang buruk; *Keempat*, kelanjutan pertanian sebagai sistem ekologis; *Kelima*, pertanian merupakan harapan dan tuntutan masyarakat global; *Keenam*, pada era globalisasi dan pasar bebas, maka pertanian merupakan bagian dari sistem persaingan global terbuka.

transaksi yang sederhana. Berdasarkan data statistik yang ada, jumlah penduduk Indonesia sekitar 210 Juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2% atau setara dengan 4,2 Juta jiwa atau sekitar 1 juta kepala keluarga, dengan perkiraan kebutuhan perumahan pata 10 tahun mendatang 1,5 Juta unit. Penyiapan perumahan dengan campur tangan pemerintah secara langsung adalah amanat atau tugas pemerintah sebagaimana diatur dalam GBHN Tahaun 1999/2001.

Resonansi pemikiran sebagian para praktisi dan pelaku pasar dalam negeri serta cara berfikir sebagian birokrasi dan pejabat pemerintah atau bahkan para akademisi, bahwa hak kepemilikan secara pribadi perumahan terhadap warga negara asing dibuka dengan selebar-lebarnya dengan alasan untuk menarik investor dan masuknya modal asing kedalam negeri guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Cara berfikir tersebut didasarkan pada praduga bahwa hanya dengan peningkatan investasi melalui PMA (Penanaman Modal Asing), maka ekonomi nasional bisa berkembang dan rakyat bisa hidup lebih sejahtera. Akan tetapi bila dilihat dengan pendekatan history investasi asing secara berlebihan didalam negeri, apalagi dengan didukung kepemilikan perumahan secara pribadi, maka akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari yang dampak risikonya jauh lebih besar daripada manfaat masuknya modal asing tersebut ke Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa proses penjajahan Belanda melalui VOC adalah melalui mekanisme perdagangan dan kemudian disusul dengan investasi kepemilikan lahan dan yang terakhir adalah dipergunakannya kekuatan militer negara tersebut untuk mempertahankan kepentingan ekonominya di dalam negeri. Masyarakat

Indonesia harus sadar, bahwa setiap investasi asing dengan besaran tertentu akan diikuti oleh hadirnya tim inteligen asing guna memantau kepentingan tersebut. Logika berfikir para akademisi, para politisi, para aparat pemerintah serta para praktisi harus segera diluruskan, bahwa kemakmuran masyarakat Indonesia itu berada diatas usaha dan upaya Bangsa Indonesia sendiri. Adapun peran asing dalam tata perekonomian hanya sebagai katalisator dan hanya sebagai refleksi pergaulan internasional di era globalisasi saat ini, sehingga tidak benar apabila kepentingan nasional bangsa Indonesia diposisikan dalam status ketergantungan pada investor asing. Campur tangan pemerintah guna menata pola perumahan rakyat harus segera dioptimalkan dengan dasar logika pembangunan bahwa prioritas dan orientasi pembangunan perumahan berpihak pada kepentingan rakyat dan selalu berpedoman dengan kesatuan wilayah NKRI⁷⁵.

Perdebatan pemikiran tentang globalisasi papan atau menata kebijakan perumahan terutama berkaitan dengan Warga Negara Asing (WNA), maka harus diletakkan pada kerangka berfikir; *Pertama*, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat berbeda

⁷⁵ Rheinald Kasali, seorang guru besar manajemen Universitas Indonesia pada Harian Kompas tanggal 8 Februari 2010 menyatakan pemikirannya tentang perlunya membuka pintu seluas-luasnya untuk kepemilikan properti bagi warga negara asing. Pemikiran seperti ini sering terjadi dikalangan akademisi dan praktisi perumahan dengan dasar pertimbangan akan masuknya investasi asing sebesar 3 hingga 6 Milyar Dollar AS per-tahun. Berdasarkan data statistik yang ada, keberadaan pekerja asing di Indonesia tercatat 83.452 orang, sehingga angka permintaan apartemen atau perumahan 10.000 unit per-tahun. Dengan demikian menurut pandangan Ekonomi Pancasila adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat penting dengan didukung investasi PMA, tetapi dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

dengan negara daratan dalam menata kebijakan pembangunan; *Kedua*, PMA hanya sebagai katalisator proses pembangunan dalam rangka alih teknologi dan dalam rangka pergaulan internasional; *Ketiga*, Prioritas strategi pembangunan dan kegiatan ekonomi masyarakat adalah satu kesatuan wilayah NKRI; *Keempat*, perlu adanya tempat khusus untuk melokalisir WNA guna mempermudah fungsi kontrol; *Kelima*, harus diantisipasi pencemaran budaya oleh WNA yang berdomisili di dalam negeri; *Keenam*, waspadai keterlibatan inteligen asing pada setiap kegiatan ekonomi PMA; *Ketujuh*, penanaman konsep wawasan nusantara yang melekat pada pola pikir praktisi, politisi dan akademisi.

Perdebatan hangat antara kepentingan ekonomi yang disandarkan pada argumen, bahwa dengan pemberian hak milik terhadap orang asing untuk menempati rumah dan tanah di Indonesia akan menambah volume investasi serta sekaligus akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pendapat tersebut berhadapan dengan prinsip Nasionalitas dalam kepemilikan tanah, artinya segala bentuk kepentingan pembangunan termasuk kepentingan ekonomi harus tunduk kepada kepentingan nasional yang memposisikan bahwa bumi, air, ruang angkasa dan semua kekayaan alam yang terkandung didalamnya menjadi hak milik Bangsa Indonesia secara penuh dan pengelolaannya bertujuan hanya satu, yaitu kemakmuran Rakyat Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat⁷⁶.

Arah pembangunan nasional bidang perumahan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sampai kapanpun harus berpedoman secara mendasar pada konstitusi, terutama UUD 1945. Sedangkan aturan pelaksanaannya dapat berubah sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini. RUTR atau Rencana Umum Tata Ruang untuk pembangunan rumah dan perumahan, kawasan pemukiman, rumah susun (rumah susun hunian dan rumah susun non hunian) harus selalu berorientasi perencanaan yang didasarkan pada fungsi tanah dan manfaat lahan secara optimal, artinya jangan sampai lahan subur untuk pertanian dimanfaatkan sebagai kawasan pemukiman, sehingga berdampak negatif pada pengembangan sektor pertanian. Untuk itu perencanaan pembangunan harus disusun secara terintegratif dan menyeluruh. Dasar filosofi pembangunan rumah dan kawasan pemukiman adalah memberikan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia lahir dan bathin dan dengan selalu berorientasi pada

⁷⁶ Dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa hubungan antara Bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa itu adalah hubungan yang bersifat abadi, sehingga tidak ada alasan apapun dan tidak ada kepentingan ekonomi bagaimanapun yang dapat memisahkan antara Rakyat Indonesia dengan bumi dan air atau tanah airnya. Hal ini adalah buah dari Kemerdekaan yang di-Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Argumen ini dibangun atas dasar pengalaman sejarah atau pendekatan historis bahwa kepentingan asing dengan alasan dan dalih kemuliaan atau alasan kemanusiaan sekalipun pasti akan berujung pada keuntungan dan kepentingan bangsa dan rakyat mereka sendiri. Pendirian terakhir yang harus dipegang teguh dalam konsep Ekonomi Pancasila adalah : "Hanya Bangsa Indonesia sendiri yang dapat mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia dan hanya dengan kerja keras Bangsa Indonesia dengan semangat persatuan dan kesatuan serta gotong-royong yang dapat membangun NKRI secara lahir dan bathin.

kesinambungan kelangsungan hidup generasi mendatang serta terjaganya lingkungan yang asri dan secara prinsip tanggung jawab perumahan adalah tugas negara.

Kewajiban negara untuk menyiapkan perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1, yang menyatakan bahwa ; “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, artinya penyiapan perumahan menjadi porsi pemerintah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan unsur pelaku pembangunan, yaitu badan usaha negara atau daerah, koperasi dan swasta serta keterlibatan semua komponen bangsa guna menata lingkungan kehidupan yang aman, tenteram dan harmonis. Ketentuan tentang pembangunan perumahan telah diatur dalam UU Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang selanjutnya disempurnakan dengan terbitnya ketentuan UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dengan demikian sinergi antara pemerintah, swasta dan koperasi mutlak diperlukan guna menata perumahan yang layak huni, yaman dan lingkungan yang asri⁷⁷.

⁷⁷ Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rohim Lubis dalam bukunya “Kepemilikan Properti di Indonesia termasuk Kepemilikan Rumah oleh Orang Asing”, penerbit Mandar Maju, 2013, Bandung, Hal.19, mengatakan bahwa hak perorangan Warga Negara Indonesia atas tanah yaitu ; a) Hak Milik, artinya kepemilikan dan penguasaan seseorang atas satuan luas tanah yang dapat dimanfaatkan atas obyek tersebut dengan berbagai kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika sosial dalam waktu yang tidak terbatas, Hak Milik adalah hak terkuat dan terpenuh yang dimiliki oleh warga negara; b) Hak Guna Usaha, yaitu hak untuk menguasai atas tanah dalam luas tertentu yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan untuk pengembangan usaha pertanian,

Pembangunan perekonomian di Indonesia yang terus tumbuh dan meningkat disemua sektor harus dimaknai sebagai pembangunan yang berkelanjutan, artinya jangan sampai pemerintah dalam program pembangunannya hanya mengejar data pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengedepankan investasi asing yang dalam REI (Real Estate Indonesia) yang hanya berorientasi pada keuntungan sesaat, tetapi mengorbankan kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan antara kepentingan bisnis dan kepentingan nasional dalam artian konsep berbangsa dan bernegara harus diletakkan dalam sudut pandang pemikiran secara proporsional dengan pendekatan historis, sehingga pembangunan ekonomi Indonesia tidak kebablasan atau kacang lupa kulitnya. Rasionalitas konsep perumahan adalah hak konstitusi warga negara, bukan kepentingan bisnis yang diutamakan. Inilah arti penting dari Demokrasi Ekonomi⁷⁸.

perikanan, peternakan dan usaha lain yang sah; c) Hak Guna bangunan, yaitu hak untuk mendirikan bangunan; d) Hak Pakai, yaitu hak untuk memperoleh hasil dan manfaat dari tanah yang diperoleh atas perjanjian tertentu; e) hak Pengelolaan, yaitu hak menguasai dari negara yang kewenangan pengelolaannya dilimpahkan kepada pemegang hak.

⁷⁸ Koran Jakarta Pos, tanggal 7 Januari 2010, F. Teguh Satria, Ketua Dewan Pengurus Pusat REI mengatakan : meski harga property di Indonesia murah, tetapi orang asing tidak berminat membelinya. Suharso Manuarfa, Menpera atau Menteri Negara Perumahan Rakyat mengatakan bahwa jika orang asing bisa membeli dan memiliki property di Indonesia, maka hal itu akan berdampak positif bagi perekonomian nasional. Kedua pemikiran tersebut di atas harus diuji secara akademis tentang manfaat dan kerugian jangka panjang terhadap kepemilikan asing atas property terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi secara prinsip argumen yang dibangun adalah fungsi pemerintah dalam konstitusi adalah menyiapkan perumahan bagi rakyat, bukan menyiapkan perumahan bagi orang asing.

5. Globalisasi Pendidikan.

Kemajuan budaya suatu bangsa dimanapun di dunia ini diawali dengan kesadaran pendidikan, karena hanya dengan ilmu pengetahuan, harkat dan martabat manusia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, pola pikir dan pola tindak manusia berubah kearah yang lebih baik juga melalui pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah cara hidup manusia dengan teknologi transportasi, jarak antar negara menjadi dekat dan dalam waktu yang tidak terlalu lama ribuan manusia dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, bahkan jutaan manusia dapat bergerak sekaligus dalam satu tempat, seperti halnya pada saat ibadah Haji bagi umat Muslim. Teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat manusia untuk melakukan transformasi barita, bahkan dapat melakukan kegiatan ekonomi transaksi bisnis antar benua dapat dilakukan melalui media internet dan telepon. Kemajuan sains dan teknologi juga membuat pergeseran perilaku manusia sebagai dampak interaksi budaya antar negara melalui media televisi. Hal inilah yang menjadi bukti kenyataan Era Globalisasi yang tidak dapat dihindari oleh semua negara di dunia.

Era Globalisasi dapat diartikan sebagai proses interaksi secara menyeluruh semua sistem kehidupan manusia dari berbagai aspek kepentingan menuju satu titik tujuan, yaitu kesejahteraan bersama. Globalisasi harus difahami sebagai suatu proses, sehingga kesiapan semua pihak melalui pendidikan untuk berinteraksi sosial, proses interaksi tersebut menjadi sempurna bila derajat pendidikan setara antar anggota masyarakat, oleh sebab itu parameter globalisasi adalah kesetaraan,

sehingga diperlukan waktu yang berbeda antar manusia untuk memahami suatu aspek kehidupan, karena perbedaan kecerdasan, perbedaan pendidikan dan perbedaan budaya. Apabila aplikasi globalisasi dimaknai sebagai bentuk persaingan kegiatan ekonomi, maka sudah jelas hasilnya kelompok yang kuat, kelompok yang lebih cerdas dan kelompok pemodal besar akan memakan pada kelompok yang lemah. Maka disinilah letak pentingnya fungsi negara guna melindungi rakyatnya dan melindungi sumber daya alamnya dari keserakahan dan penguasaan oleh warga negara asing karena keunggulan penguasaan teknologi dan keunggulan dari sisi permodalan. Dari sisi positif, era globalisasi akan mempercepat proses kemajuan budaya warga masyarakat negara yang sedang berkembang. Tetapi dari sisi negatif, era globalisasi akan menjadi alat penjajahan modal baru oleh negara maju kepada negara yang sedang berkembang. Seluruh kekayaan negara yang sedang berkembang akan diserap habis oleh negara maju dan warga masyarakat negara yang sedang berkembang akan dijadikan kuli atau pekerja kasar di negaranya sendiri⁷⁹.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan secara konstitusional telah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alenia Keempat yang berbunyi, “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

⁷⁹ Adi Sasono dalam bukunya “Menjadi Tuan di Negeri Sendiri, Pergulatan Kerakyatan, Kemartabatan dan Kemakmuran”, penerbit Grafindo Books Media, Jakarta, 2013, pada kata pengantar penulis mengatakan yang intinya ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap sumber daya asing akan menjadikan negara tersebut “kuli di negeri sendiri”, sehingga Bangsa Indonesia harus bangkit dan saatnya untuk berani mandiri agar “menjadi tuan di negeri sendiri”.

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”, kemudian dalam Pasal 31 UUD 1945 ditegaskan bahwa ; *Pertama*, adanya kesadaran semua pihak dan semua komponen bangsa bahwa memperoleh pendidikan yang layak dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia adalah hak warga negara yang harus disiapkan dengan baik oleh pemerintah; *Kedua*, pada tataran pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP setingkat adalah kewajiban setiap warga negara yang semestinya diikuti oleh sanksi hukum, karena merupakan kewajiban, sehingga pemerintah harus dapat memaksa setiap warga negara pada usia SD dan SMP untuk mengikuti pendidikan, akan tetapi pemerintah juga harus menyiapkan semua sarana dan perangkat pendidikan dengan baik; *Ketiga*, adanya kesadaran akan pentingnya sistem pendidikan nasional yang mampu menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta perilaku yang baik sesuai dengan norma sosial dan norma agama, yaitu akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan demikian menata sistem pendidikan nasional harus berorientasi pada dua hal, yaitu kecerdasan fikiran dan keunggulan pribadi yang berakhlak; *Keempat*, 20% APBN dan APBD harus diprioritaskan untuk anggaran pendidikan, angka tersebut adalah batas minimal, sehingga pemerintah dapat meningkatkan anggaran tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat; *Kelima*, adanya kesadaran keseimbangan pendidikan sains-teknologi dan nilai-nilai agama serta persatuan bangsa untuk secara simultan dapat memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, artinya tidak mungkin kesejahteraan itu

dapat dicapai tanpa adanya pendidikan. Bangsa yang besar itu diawali oleh kesadaran pendidikan yang baik⁸⁰.

Analisis globalisasi pendidikan saat ini diarahkan pada pokok bahasan tentang ; a) pendidikan yang berorientasi pada semangat cinta tanah air dengan dasar kesadaran Nasionalisme kebangsaan; b) revolusi pendidikan sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan perangkat pendidikan dan hasil didik serta membangun budaya pendidikan disetiap lini kehidupan masyarakat Indonesia; c) pendidikan sebagai komoditi, artinya pemahaman sebagai pencemaran orientasi pendidikan yang semula menjadi wadah perjuangan menjadi bergeser ke orientasi bisnis yang menguntungkan secara materi; d) pendidikan tepat guna, artinya pendidikan yang berorientasi langsung pada dunia kerja, sehingga terjadi sinkronisasi antara kurikulum, bahan pengajaran dengan tuntutan dunia kerja; e) pendidikan sains-teknologi dan agama, artinya terjadi harmonisasi dan keseimbangan antara penguasaan ilmu yang mempelajari tentang sains-teknologi dengan pemahaman ilmu agama; f) perangkat pendidikan, yaitu segala sesuatu

⁸⁰ Aulia Rezabastian dalam bukunya "Reformasi Pendidikan", penerbit Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2002, Halaman 93. Mengatakan bahwa kemajuan dan kejayaan bangsa Yunani dan Romawi diawali oleh revolusi pendidikan dengan revolusi pendidikan academy yang dirintis oleh Plato dan gurunya Socrates di Athena pada 400 tahun Sebelum Masehi. Kemajuan dan kejayaan bangsa Arab pada masa Islam diawali dengan revolusi pendidikan di Bayt Al-Hikmah pada masa kepemimpinan Harun Al-Rasyid, sehingga melahirkan berbagai ilmu dan sains di bidang Ilmu Kedokteran moderen, matematika, fisika dengan para ilmuwan yang terkenal waktu itu adalah Ibnu Rusd, Ibnu Sina, Al Kundi, Al Farabi, dan sebagainya. Pada kejayaan bangsa Eropa diawali dengan revolusi pendidikan House of Wisdom yang melahirkan peradaban baru dunia dengan ilmuwan Francis Bacon, James Watt, Sir Isaac Newton, dan sebagainya.

yang mendukung secara langsung dan tidak langsung pada proses belajar-mengajar.

Secara empiris-obyektif setelah masa Orde Baru dan berganti dengan Era Globalisasi, seakan-akan terjadi letupan dan semangat demokrasi yang kurang terarah. Kenyataan tersebut secara obyektif dapat dilihat pada dua sisi yang berbeda; *Pertama*, mungkin disebabkan oleh gelora semangat yang terpendam masa Orde baru dengan segala keterbatasan untuk berekspresi dan semangat untuk ikut serta berpartisipasi secara langsung dalam dunia politik tidak tersalurkan, maka pada masa reformasi, semuanya dikeluarkan atau semua yang ada di dalam hati dan fikiran dimuntahkan dalam suasana yang berbeda, sehingga semua terasa tidak proporsional, masyarakat kebanyakan baru mencari bentuk implementatif demokrasi, para pelopor reformasi seolah-olah lupa bahwa masyarakat memerlukan proses edukasi atau pendidikan demokrasi yang memerlukan waktu pemahaman, sehingga reformasi menjadi sosok bayangan fatamorgana, seakan-akan terputus benang merah hukum sebab dan akibat, sehingga para pelopor demokrasi sendiri tidak mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilu berikutnya. Inilah bukti secara empiris bahwa reformasi berjalan dengan mencari bentuknya sendiri seperti bayi yang baru lahir dan ditinggal begitu saja oleh orang tuanya; *Kedua*, secara kelembagaan dan personal reformasi telah menjaga jarak dengan induknya, yaitu Pancasila dan UUD 1945, sehingga sangat jarang para tokoh reformasi berbicara tentang nilai-nilai kultur Bangsa Indonesia yang tertanam secara ideologis dalam Pancasila. Untuk itu perlu ditata kembali pemahaman dan

pengembangan Pancasila, sehingga sangat terasa sekali generasi muda bangsa ini membutuhkan Pancasila⁸¹.

Kegagalan hasil didik saat ini yang menampilkan para tokoh terpelajar terdidik dalam perguruan tinggi, baik yang bersifat sains-teknologi atau yang berlatar belakang agama melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara. Secara empiris menjadi bukti akan pentingnya pembangunan pendidikan yang berwawasan nasionalisme-kebangsaan dengan semangat Pancasila sebagai perekat antar golongan, antar partai dan antar suku, sehingga terbangun keutuhan ikatan kesatuan dalam bingkai NKRI apapun profesinya dan apapun latar belakang pendidikannya, karena pada hakekatnya Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan bangsa Indonesia seperti halnya tidak dapat dipisahkan antara jasad manusia dan roh untuk hidup dan kehidupan.

⁸¹ Koran Kompas, Minggu 2 juni 2013, dengan judul tukisan “Pancasila makin dibutuhkan Bangsa ini” (revitalisasi situs Bung Karno), yaitu : Nilai-nilai Pancasila kini terus tergerus, baik dalam praktik tata kelola pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari, padahal Pancasila merupakan roh bangsa yang semakin dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan persoalan bangsa ini. Selanjutnya Wakil Presiden, Boediyono dalam peringatan hari Lahirnya Pancasila di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan peresmian situs Bung Karno, mengatakan : yang intinya bahwa takdir Indonesia adalah hidup dalam kebhinekaan yang telah ada sejak sebelum berdirinya negeri ini. Dengan mengutip kalimat Bung Karno : kebhinekaan itu harus dirawat dan dikelola dengan cara keberadaban, tidak ada tindakan kekerasan, tindakan menindas dan tindakan menyingkirkan, terutama terhadap yang lemah, sungguh bertentangan dengan yang berkeadaban itu. Indonesia masih menghadapi ketegangan dan konflik komunal di sejumlah daerah. Pancasila akan efektif dalam praktik sosial bangsa jika diwujudkan dalam berbagai hukum positif yang mengatur hidup bersama. Ideologi Pancasila sangat penting dalam politik untuk membangun Bangsa Indonesia dalam kebhinekaan dan kesatuan yang diperjuangkan oleh Bapak Pendiri Bangsa.

Globalisasi pendidikan sebagai respon dari perkembangan atas kemajuan teknologi informasi harus dimaknai dalam batasan koridor ke-Indonesiaan, artinya dalam konteks pemahaman kultur dan nilai-nilai serta norma-norma Bangsa Indonesia yang tetap terjaga dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan Indonesia. Pancasila sebagai perwujudan dari sintesa nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia harus dijadikan sebagai acuan dan pedoman pendidikan nasional. Agar jiwa raga para peserta didik tidak terpisahkan dengan gelora semangat nasionalisme kebangsaan dan akan terhindarkan dari godaan untuk membawa bangsa ini menuju dasar ideologi agama⁸².

Sudah saatnya bangsa ini merumuskan dengan baik pola pendidikan dengan meletakkan kerangka dasar pemahaman Pancasila dan semangat cinta Tanah Air Indonesia serta kesadaran kebhinekaan budaya dan agama. Kesadaran tersebut dituangkan dalam bentuk bahan pengajaran yang

⁸² Koran Republika, tanggal 1 Juni 2013, hari Sabtu, dengan judul tulisan "Pancasila dan Demokrasi Kita", yang intinya mengatakan : sejak dirumuskan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI atau Badan Persiapan Usaha Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia waktu itu, Pancasila mampu menjadi alat perekat sekaligus sebagai wahana penghubung dan dapat menyatukan beraneka ragam suku, aliran, agama, adat istiadat di Indonesia. Godaan untuk mendirikan agama dalam konteks Indonesia tidak sesuai dengan morabilitas dan multikulturalitas Indonesia. Pada tahun 1970-an Orde baru berhasil untuk mengangkat isu asas tunggal Pancasila yang dapat diterima oleh semua golongan, suku dan berbagai kelompok agama. Akan tetapi pasca reformasi, godaan untuk mengangkat tema perdebatan untuk menegakkan negara agama, sehingga seakan-akan Bangsa Indonesia jalan di tempat dalam aspek politik tentang ideologi negara. Untuk itu segenap komponen bangsa mulai saat ini bertekad bulat bahwa tidak akan tergoda lagi untuk mengangkat isu tentang kembalinya "Piagam Jakarta", sehingga energi bangsa dapat dimanfaatkan pada aspek yang lain guna mengisi kegiatan yang positif untuk pembangunan nasional yang dapat mensejahterahkan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

masuk dalam kurikulum pendidikan mulai daritingkat SD, SMP, SMU dan Perguruan Tinggi. Secara berjenjang materi ajaran disampaikan dengan menarik, sehingga tidak membosankan mulai dari tataran filosofi, legislasi atau perundangan dan implementasi sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Rapuhnya pemahaman tentang Pancasila dan lemahnya semangat juang untuk cinta Tanah Air Indonesia akan berdampak pada lemahnya rasa memiliki sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, sehingga kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok menjadi dominan jauh diatas kepentingan nasional. Hal inilah yang menjadi sebab salah satunya korupsi yang dilakukan oleh praktisi partai politik, seakan terjadi perlombaan menguras kekayaan bangsa secara nasional menjadi kekayaan pribadi dan kelompok. Untuk itu pendidikan nasional harus dapat mendistribusikan secara benar pemahaman Pancasila kedalam semua aspek kehidupan. Pancasila bukan hanya sebagai ideologi politik dan sosial kemasyarakatan, tetapi Pancasila juga sebagai ideologi ekonomi Bangsa Indonesia yang kedepan diharapkan akan mampu menjawab tantangan zaman pada era globalisasi⁸³.

⁸³ Koran Republika, tanggal 3 Juni 2013, dengan judul tulisan “Kemanakah Ekonomi Pancasila?, yang ditulis oleh Iman Sugerna, inti tulisan tersebut adalah ; *Pertama*, Pancasila merupakan dasar dan sumber dari ideologi Ekonomi Pancasila yang keberadaannya sebagai autitesis dari ideology besar ekonomi yang sudah berjalan saat ini, yaitu Kapitalisme dan Komunisme; *Kedua*, Ideologi Komunisme sudah hamper punah dan ideologi Kapitalisme sedang terkoyak dan kehilangan arah dalam menghadapi krisis keuangan di Amerika dan Eropa; *Ketiga*, diperlukan pijakan yang jelas untuk menyusun konsep pemikiran Ekonomi Pancasila; *Keempat*, gagasan Ekonomi Pancasila yang dirintis oleh Profesor Mubyanto dari Universitas Gajah mada harus ditindaklanjuti oleh akademisi generasi sekarang; *Kelima*, adanya kesadaran akan dangkalnya tujuan akhir Kapitalisme dan Komunisme yang menempatkan kesejahteraan materialisme sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi,

Revolusi pendidikan, artinya harus dibuka opini dan isu dalam masyarakat secara besar-besaran untuk melakukan sosialisasi akan pentingnya pendidikan masyarakat yang berkelanjutan, terarah dan adanya sinkronisasi dengan dunia kerja, orientasi pendidikan lebih fokus pada aspek efektif dan psikomotorik, yaitu arah pendidikan yang lebih menitikberatkan pada pembentukan karakter dan pembentukan keterampilan atau *skill*. Strategi pendidikan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut ; a) Faktor perkembangan dan strategi ekonomi global yang berkaitan dengan tenaga kerja yang harus disiapkan oleh dunia pendidikan sehingga semua hasil didik dapat terserap secara keseluruhan pada kegiatan ekonomi; b) Kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan tanah yang subur dan dengan dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan, sehingga dapat dilihat melalui pendekatan historis empiris bahwa sektor kelautan dan pertanian akan menyerap tenaga kerja yang paling banyak, untuk itu prioritas dan perhatian masyarakat dan pemerintah mulai dari anggaran, peraturan perundangan sampai dengan prioritas industri dan pendidikan tertuju pada dua sektor tersebut, yaitu kelautan dan pertanian tanaman pangan; c) Harus melihat kecenderungan masyarakat atas pilihan untuk memasuki dunia kerja, karena kecenderungan tersebut akan mendatangkan niat dan motivasi belajar peserta didik; d) Secara bertahap pemerintah harus berani membebaskan biaya pendidikan di tingkat perguruan tinggi atau Diploma dengan prioritas pendidikan yang mendukung pengembangan

sehingga tujuan tersebut menjadi kering dan dangkal, karena posisi manusia tidak banyak berbeda dengan makhluk lain, hewan yang hanya mencari kebutuhan hidup di dunia tidak disertai dengan keyakinan di akhirat kelak.

sektor kelautan, pertanian tanaman pangan, transportasi yaitu pendidikan pilot dan pelayanan kedokteran dan perawat, serta pendidikan yang berorientasi pada teknologi terapan. Strategi prioritas pendidikan tersebut sekaligus untuk memenuhi pasar tenaga kerja internasional.

Revolusi pendidikan dengan memberikan beasiswa pada sektor prioritas, yaitu perawat, bidan dan dokter, pilot, kapten kapal, *maintenance* peralatan rumah tangga dan montir kendaraan bermotor akan menjadi fokus utama atau sebagai tujuh sektor andalan untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja internasional. Sehingga strategi global pendidikan fokus pada tujuh bidang tersebut. Dengan demikian pemerintah akan dapat menyerap pengiriman TKW untuk pembantu rumah tangga yang merendahkan martabat dan harga diri bangsa secara internasional. Arus masuknya cadangan devisa negara melalui TKI yang disebut dengan istilah sebagai “pahlawan devisa” dapat melalui tujuh sektor tersebut. Pasar tenaga kerja global akan dibanjiri oleh tenaga-tenaga terampil yang berkualitas tinggi dari Indonesia yang tersebar keseluruh dunia.

Tujuh sektor pendidikan prioritas yaitu; perawat, bidan, dokter, pilot, kapten kapal, *maintenance* peralatan rumah tangga dan montir kendaraan bermotor akan menjadi prioritas dan revolusi pendidikan yang secara tersendiri ditangani oleh tim khusus dan mendapat prioritas anggaran, baik di pusat dan daerah. Strategi untuk merebut pasar tenaga kerja global tersebut melalui pendidikan yang secara penuh dan bertahap dibiayai oleh negara. Pemerintah daerah juga harus bergerak untuk mengambil salah satu dari tujuh sektor revolusi pendidikan tersebut menjadi andalan daerahnya masing-masing dan khusus para siswa atau peserta didik

diberikan beasiswa pendidikan di luar negeri. Tujuh sektor prioritas pendidikan tersebut secara bertahap akan dapat menguasai opini global bahwa tenaga kerja Indonesia pada tujuh sektor tersebut dapat mengungguli tingkat profesionalitas dari tenaga kerja negara manapun.

Pendidikan sebagai komoditi ekonomi yang menguntungkan adalah orientasi para pemain investasi pendidikan yang menanamkan modalnya di Indonesia sebagai dampak dari globalisasi pendidikan. Peluang bisnis pendidikan global ini muncul dari adanya kecenderungan masyarakat Indonesia yang tingkat ekonominya menengah keatas untuk menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi ternama di luar negeri, terutama di Amerika dan Eropa. Ada tiga alasan munculnya kecenderungan tersebut; *Pertama*, para orang tua menengah keatas berpendapat berharap putra dan putrinya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tinggi di luar negeri dan sekaligus membuka wawasan internasional bagi generasi penerus, akan tetapi dibalik artian tersebut adalah tingkat kepercayaan masyarakat ekonomi menengah keatas terhadap kualitas pendidikan menurun, sehingga lebih percaya terhadap kualitas pendidikan di luar negeri; *Kedua*, terbatasnya jumlah peserta didik pada perguruan tinggi negeri fakultas tertentu; *Ketiga*, faktor gengsi atau harga diri keluarga apabila anak-anaknya dapat menimba ilmu di luar negeri.

Ketiga alasan tersebut yang mendorong para orang tua dengan tingkat pendapatan menengah keatas oleh para pelaku ekonomi global ditangkap sebagai peluang bisnis yang menggiurkan, karena akan mendatangkan keuntungan yang besar dan dengan risiko yang relatif kecil, akan tetapi bila dilihat secara mendalam bahwa memposisikan pendidikan sebagai bagian

komoditi ekonomi global adalah proses polusi atau pencemaran atmosfer pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan menjadi orientasi untung dan rugi. Pergeseran niat inilah yang menjadi fokus utama dalam penghayatan secara implementatif Ekonomi Pancasila, yaitu menempatkan tanggung jawab moral di atas kepentingan ekonomi semata.

Pendidikan tepat guna, yaitu arah pendidikan nasional disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini didasarkan pada hukum sebab dan akibat, sehingga semua hasil didik akan dapat mengisi keperluan atau kekosongan dunia kerja, dengan demikian sistem pendidikan harus diatur secara berjenjang dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, kebutuhan tenaga kerja secara nasional dan global. Hubungan timbal balik antara dunia kerja dan dunia pendidikan akan berjalan dengan baik apabila terjadi tingkat harmonisasi antara pihak yang bergerak di sektor perdagangan dan industri seirama dengan pihak yang bergerak dibidang pendidikan, yang dalam hal ini pemerintah, yaitu Menteri Pendidikan dan semua perangkatnya secara aktif bekerjasama dengan kementerian lainnya, terutama Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan semua pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam penggunaan tenaga kerja sebagai hasil didik, kemudian dituangkan dalam suatu kebijakan secara nasional, akan tetapi secara desentralisasi dapat dilakukan dengan baik di daerah.

Kesadaran akan pentingnya sistem pendidikan yang mengkomodasikan kepentingan lokal, nasional dan global telah terwujud

dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, didalam Undang-Undang tersebut secara sadar melibatkan masyarakat secara langsung dalam menata arah pendidikan nasional. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan yang mengatakan bahwa; masyarakat berhak berperan aktif dalam sistem pendidikan. Dengan demikian sistem pendidikan saat ini bersifat terbuka untuk membuka peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat, artinya sistem pendidikan saat ini bukan monopoli aparat dan perangkat Menteri Pendidikan semata.

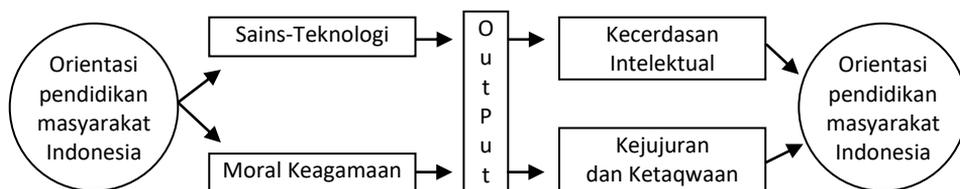
Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, secara tidal langsung tersirat pengertian bahwa sistem pendidikan nasional saat ini harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan bagi semua warga negara, peningkatan mata pendidikan dan kualitas hasil didik, serta relevansi dan efisien seistem pendidikan dan manajemen pendidikan untuk menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga sangat mutlak dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan semua kemampuan bangsa⁸⁴.

⁸⁴ Soegeng Sarjadi Sukardi Rinakit dalam bukunya "Memahami Indonesia", Jakarta, 2006, Hal. 7-8, yang intinya mengatakan bahwa masalah pokok Bangsa Indonesia adalah masalah kemiskinan, ketenaga kerjaan, pendidikan dan kesehatan. Khusus masalah pendidikan sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah optimalisasi peran Pesantren, taman belajar dan bermain untuk anak-anak guna mengakomodasi kepentingan rakyat yang tidak mampu untuk biaya sekolah, hal ini sebagai jawaban atas maraknya komersialisasi pendidikan.

Untuk menuju pendidikan yang tepat guna, maka setiap kabupaten, propinsi dan tingkat nasional harus mempunyai database tentang kebutuhan riil tenaga kerja pada setiap sektor dan jumlah pertumbuhan angkatan kerja yang siap pakai, artinya dengan tingkat keterampilan tertentu yang dipersyaratkan serta jumlah tenaga kerja yang tidak terampil atau tenaga kerja yang tidak terdidik. Kemudian database tersebut digunakan sebagai acuan dan pedoman untuk menentukan strategi pembangunan nasional bidang pendidikan, dengan demikian akan terjadi sinkronisasi antara dunia kerja dan dunia pendidikan.

Pendidikan sains-teknologi dan Agama secara proporsional, artinya keseimbangan antara pendidikan yang berlatar belakang teknologi sehingga *output* bagi hasil didik adalah kecerdasan intelektual dan pendidikan moral keagamaan, sehingga *output* bagi hasil didik adalah kejujuran dan kecerdasan emosional yang terbentuk dalam pembangunan karakter atau *character building*.

Gambar 4
Alur Proses Pendidikan



Maraknya korupsi saat ini bukan dilakukan oleh orang-orang yang tidak terdidik, tetapi dilakukan oleh orang-orang terpelajar sebagai akibat lemahnya sistem pengajaran yang hanya memprioritaskan intelektual semata, terkadang pendidikan Agama pun hanya sebatas pengetahuan

Agama saja, tidak menyentuh pada pembentuk karakter dan pembentuk pola pikir serta pola tindak, sehingga korupsi tetap jalan meskipun mereka mengetahui bahwa korupsi itu merugikan negara dan bertentangan dengan norma Agama. Sikap seperti ini merupakan dampak tidak langsung dari globalisasi pendidikan yang berkolerasi dengan globalisasi cara berfikir yang negatif. Untuk itu kurikulum pendidikan dan semua guru, dosen dan pendidik lainnya termasuk para Ustadz dan tokoh masyarakat serta para peserta didik, yaitu para murid, mahasiswa dan para santri serta semua *stakeholder* yang berkaitan dengan pendidikan secara bersama-sama berupaya dengan penuh kesadaran untuk membangun masyarakat Indonesia seutuhnya, yaitu sejahtera lahir dan bathin. Pembangunan manusia seutuhnya melalui jalur pendidikan formal dan non formal akan menghasilkan generasi bangsa yang unggul di tengah pergaulan internasional⁸⁵.

⁸⁵ Darsono Prawironegara dalam bukunya, "Ekonomi Politik Globalisasi" yang dalam satu tulisan Muji Sutkiso (Penerbit : Nusantara Consulting, Jakarta, 2010) Hal. 17 mengatakan yang intinya adalah : dewasa ini telah terjadi krisis moral sebagai dampak dari globalisasi, moral religius secara bertahap tetapi pasti terkikis dan tergerus oleh gelombang capital global. Ada istilah "*Homo Homini Lupus* dan *Homo Economicus*", artinya secara umum manusia akan menjadi Srigala bagi manusia yang lain dan manusia hanya berfikir untung dan rugi, artinya terjadi pergeseran nilai dan moral Agama menjadi moral dunia semata. Globalisasi telah membawa manusia dari hidup berdampingan, saling membantu, gotong royong dalam kedamaian menjadi hidup dalam persaingan, saling memangsa satu sama lain karena berebut harta. Dan globalisasi telah merubah kemuliaan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang dipercaya sebagai khalifah atau wakil Tuhan untuk menjaga dan memelihara alam seisinya menjadi manusia yang rakus dan serakah yang tidak jarang mengeksploitasi sesama manusia, merusak alam dan mencemari lingkungan dengan segala macam polusi.

Dari sudut pandang pendidikan masyarakat, globalisasi harus dimaknai sebagai kenyataan yang harus diterima tetapi dengan sikap kehati-hatian, karena jangan sampai isu globalisasi hanya dipakai sebagai alat oleh negara maju untuk menguasai sumber daya alam negara yang sedang berkembang, demikian juga jumlah penduduk Indonesia yang besar nomor empat di dunia setelah Cina, Amerika dan India hanya sebagai target pasar dari semua produk dari negara maju, sehingga Indonesia dikemudian hari menjadi pusat proyek dan percobaan teknologi negara maju. Kenyataan pahit ini akan terjadi bila proses pendidikan masyarakat Indonesia gagal membentuk masyarakat yang unggul dalam *sains* dan teknologi serta santun dalam bersikap dan berperilaku serta terpelihara dari kecurangan, korupsi dan penistaan bangsa sendiri.

Hal yang paling penting sebagai seorang guru atau dosen adalah membangun sikap, perilaku dan pola pikir untuk mengerti alasan pentingnya belajar. Dasar motivasi yang berfungsi sebagai tenaga pendorong semangat belajar antar siswa sangat berbeda karena dilatar belakangi oleh kondisi keluarganya masing-masing dan kehidupan siswa sehari-hari, misalnya anak seorang petani, anak seorang pedagang, anak seorang penjahit, anak seorang guru, dan lain-lain mempunyai alasan berbeda untuk belajar. Terkadang perilaku di sekolah atau di kampus juga berbeda, heteroginitas sikap dan perilaku tersebut merupakan tantangan bagi penduduk untuk mengantar kondisi awal yang berbeda menjadi hasil kompetensi yang sama atau dengan *input* yang berbeda-beda, tetapi *output* harus sama atau tidak jauh berbeda, sehingga pengaruh proses sangat dominan. Adapun proses yang paling dominan adalah latar belakang guru

atau dosen untuk mengajar dan mendidik serta latar belakang motivasi siswa untuk belajar, akan tetapi bila antara guru dan siswa sudah seiring satu niat dan motivasi yang sama dalam proses belajar, maka dengan sendirinya standar kompetensi sesuai jenjang pendidikan akan terlampaui. Ibarat makan, tidak usah kepingin kenyang, tetapi bila makan terus maka perut pasti akan kenyang, dan tidak usah kepingin pintar, tapi kalau belajar terus maka pintar itu akan datang dengan sendirinya, dan tidak usah kepingin standar kompetensi itu tercapai, kalau terjadi sinkronisasi niat dan motivasi yang sama antara guru dan siswa dengan baik maka standar kompetensi itu akan tercapai dengan sendirinya. Pemikiran ini disandarkan pada satu keyakinan norma Agama, bahwa manusia hanya letaknya berusaha dan kerja keras, sedangkan hasil akhir Tuhan yang menentukan, akan tetapi ketentuan Tuhan tidak akan jauh dari usaha manusia, karena inilah hukum sebab-akibat.

Sistem pendidikan yang sentralistis tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang digantikan oleh sistem pendidikan desentralistis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Signifikansi perbedaannya adalah pada proses pengambilan keputusan. Artinya pada sistem pendidikan yang sentralistis semua keputusan pengelolaan kualitas dan standar kompetensi pendidikan sampai pada tataran teknis diatur oleh Pusat. Pendek kata, sistem manajemen pengelolaan pendidikan dari hulu ke hilir ditentukan oleh Pusat. Adapun sistem pendidikan desentralistis, proses manajemen pendidikan melibatkan unsur Daerah bahkan masyarakat dilibatkan secara langsung dalam sistem tersebut. Secara umum, yang menentukan hasil didik dan kualitas pendidikan adalah proses interaksi antara guru dan

murid. Adapun unsur-unsur yang lain adalah unsur pendukung. Tidak jarang pendidikan dengan fasilitas apa adanya tetapi dengan semangat mengajar guru yang dibarengi oleh motivasi belajar siswa yang baik akan menghasilkan hasil didik yang baik, demikian juga tidak jarang pendidikan dengan fasilitas memadai semua sarana dan prasarana terdukung dan perangkat pendidikan yang tercukupi tetapi menghasilkan hasil didik yang tidak baik, misalnya para koruptor tingkat kakap atau koruptor besar adalah mayoritas hasil dari proses pendidikan dengan fasilitas yang memadai. Oleh sebab itu, faktor mental manusianya yang menjadi dominan dalam menentukan hasil didik. Terkadang para akademisi dan politisi terjebak menilai kualitas pendidikan dari yang lahir dan nyata tetapi unsur mental dan kepribadian luput dari penilaian. Oleh sebab itu penting untuk ditata kembali menentukan parameter guna mengukur hasil didik dengan dua sudut pandang, yaitu aspek lahir dan aspek bathin, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional.

Semua bangsa di dunia menyadari bahwa sektor pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia tiap-tiap negara. Karena tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia yang bagus, niscaya semua aspek pembangunan akan menemui kegagalan. Untuk itu, khususnya Bangsa Indonesia harus pandai merumuskan tantangan yang dihadapi bidang pendidikan di era globalisasi, karena kegagalan merumuskan tantangan yang dihadapi maka akan menimbulkan kegagalan dalam menentukan arah dan model pendidikan yang dilaksanakan saat ini dan yang akan datang, sehingga berdampak luas pada generasi yang akan datang. Analogi yang digunakan adalah seperti pasukan

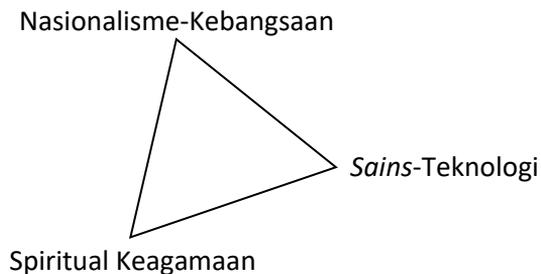
yang sedang berperang, harus mengetahui jenis senjata lawan, jumlah pasukannya dan ketahanan mental tempur lawan, sehingga dengan data awal tersebut, Sang Panglima Perang akan dapat menentukan jenis senjata, jumlah personel dan karakter satuan dan karakter masing-masing personel serta pengalaman tempur dalam pertimbangan untuk berhadapan dengan lawan tersebut. Dengan demikian harus dengan cermat untuk merumuskan tantangan pendidikan di era globalisasi saat ini. Adapun rumusan tantangan tersebut ada empat, yaitu; *Pertama*, proses alkulturasi budaya atau pembauran budaya secara internasional yang berdampak pada pencemaran budaya lokal; *Kedua*, kompetisi riset dan teknologi; *Ketiga*, pasar tenaga kerja internasional yang kompetitif; *Keempat*, SDM pengelolaan potensi ekonomi nasional, sehingga dengan perumusan tersebut dapat dicarikan solusi kreasi pendidikan guna menghadapi era globalisasi pendidikan. Harapan kedepan Bangsa Indonesia akan tampil sebagai pemenang dalam kompetisi pendidikan yang akan mengangkat harkat dan martabat bangsa di dunia internasional.

Setelah berhasil merumuskan dengan baik tantangan pendidikan di era Globalisasi saat ini, maka harus pula dirumuskan langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Adapun rumusan tersebut adalah sebagai berikut; *Pertama*, arah pendidikan nasional harus berorientasi pada ketahanan budaya lokal dan budaya nasional dengan skala prioritas pada pemahaman jiwa patriotisme-nasionalisme kebangsaan; *Kedua*, prioritas anggaran pendidikan pada pembangunan kesadaran dan keterampilan bidang riset dan teknologi serta pengembangannya; *Ketiga*, pembangunan pendidikan nasional berorientasi pada pasar tenaga kerja internasional; *Keempat*,

arah pendidikan nasional adalah pendidikan yang tepat guna sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Secara umum juga dapat difahami bahwa ketahanan dan kewaspadaan sektor pendidikan nasional guna menghadapi kompetisi pendidikan global harus diciptakan bangunan untuk prioritas pendidikan pada tiga pokok materi, yaitu nasionalisme kebangsaan, spiritual keagamaan dan kecerdasan *sains*-teknologi.

Gambar 5
Ketahanan Dan Kewaspadaan Sektor Pendidikan



Dengan demikian akan terbangun semua potensi bangsa menuju kualitas manusia Indonesia yang tangguh lahir dan bathin guna menyongsong era globalisasi pendidikan saat ini dan tantangan masa depan⁸⁶.

⁸⁶ UNESCO (*United Nation Educational Scientific and Cultural Organization*) merumuskan tentang empat pilar pendidikan; a) *Learning to know*; b) *Learning to do*; c) *Learning to be*; d) *Learning to live together*, dengan demikian guna menjawab kebutuhan tersebut diatas, maka dibutuhkan orientasi pendidikan di Indonesia yang meliputi; a) Kekuatan kelembagaan yang terintegratif; b) Sistem pendidikan yang berwawasan pada tantangan kedepan serta sesuai dengan tuntutan masyarakat pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; c) Pendidikan yang berwawasan nasionalitas kebangsaan dengan dilandasi pada pemahaman

Dengan demikian, dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep Ekonomi Pancasila sangat disadari bahwa pembangunan suatu bangsa harus dimulai dari tertatanya dengan baik sistem pendidikan nasional sehingga menghasilkan generasi yang unggul lahir dan bathin, berkualitas dalam sains-teknologi serta mampu mengimplementasikan dengan baik nilai spiritual keagamaan dalam bingkai kesadaran kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kualitas SDM masyarakat Indonesia secara menyeluruh adalah modal dasar bangsa untuk menghadapi era globalisasi yang dari sisi positif menjanjikan kemakmuran masyarakat dunia, tetapi dari sisi negatif adalah bentuk baru penjajahan atau kolonialisme negara maju terhadap negara yang sedang berkembang dan sekaligus sebagai alat legalisasi penyerapan kekayaan alam negara sedang berkembang oleh negara maju yang didukung dengan berbagai teknologi modern serta kemampuan permodalan yang besar. Hasil laut, tambang, kekayaan hutan tropis dan berbagai kekayaan alam lainnya akan dikuras habis oleh negara maju dengan kendaraan pasar bebas.

Kunci pokok keberhasilan suatu negara dimanapun di dunia ini adalah ditentukan oleh kesadaran bangsa itu sendiri terhadap dunia pendidikan. Sejarah telah membuktikan bahwa negara yang terbelakang di bidang pendidikan, maka akan menghasilkan SDM yang lemah dan tidak berdaya, apalagi ditengah-tengah gempuran gelombang globalisasi. Dan SDM yang lemah adalah awal dari ketidakberdayaan dan akan mengundang segala

secara luas mental keagamaan; d) Penghayatan pada jiwa toleransi dan pluralisme dan kebhinekaan.

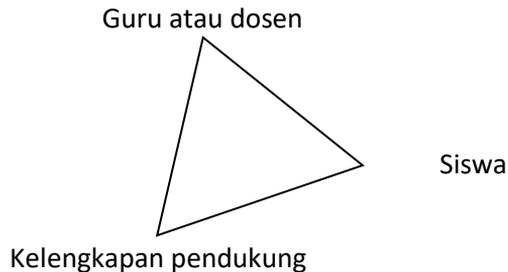
macam bentuk penjajahan baru, artinya kebodohan adalah awal dari bentuk penjajahan kontemporer.

Dalam konteks Indonesia yang melimpah sumber daya alamnya dan dengan jumlah penduduk yang besar nomor empat di dunia setelah Cina, Amerika, India, maka akan menjadi incaran negara-negara maju untuk pada dua sisi, yaitu; *Pertama*, incaran sumber daya alam atau SDA untuk dieksploitasi guna kepentingan negara maju dan sedikit sekali untuk kepentingan Indonesia; *Kedua*, jumlah SDM yang besar akan menjadi pangsa yang besar bagi produk-produk negara maju. Dengan demikian untuk mempertahankan eksistensi Bangsa dan Negara dalam pergaulan Internasional agar Bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, maka diperlukan satu dan satu-satunya program unggulan, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Kemajuan bidang pendidikan akan berdampak positif pada pembangunan ekonomi Bangsa Indonesia untuk saat ini dan di masa yang akan datang dan keberhasilan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya “*character building*”, baik dari sisi sikap mental spiritual yang menghasilkan kesadaran kejujuran, cinta tanah air dan toleransi dalam kebhinekaan serta kecerdasan intelektual dengan penguasaan *sains-teknologi* modern.

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh, tersebar merata diatas bentangan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ditentukan oleh tiga faktor utama; *Pertama*, ketulusan guru atau dosen dalam melakukan kegiatan mengajar atau *transfer knowledge*, sehingga tercermin dalam semangat juang guru dan dosen

dalam upaya untuk meningkatkan keunggulan sikap perilaku, kecerdasan intelektual dan kualitas keterampilan peserta didik siswa atau mahasiswa.

Gambar 6
Tiga Pilar Keberhasilan Pendidikan



Kedua, semangat siswa dan mahasiswa dengan didorong oleh motivasi yang kuat untuk mengikuti pendidikan. Karena proses pendidikan memerlukan kekuatan niat, keuletan dalam proses dan motivasi belajar yang tangguh, sehingga dapat melawan rasa malas, capek dan suntuk dalam belajar; *Ketiga*, kelengkapan sarana pendukung dalam proses belajar akan menjadi modal tambahan dalam percepatan proses belajar dan mengajar. Akan tetapi unsur utama yang menjadi pilar keberhasilan proses pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat guru dan murid. Semangat belajar akan terpelihara dengan baik bahkan akan tumbuh dan berkembang bila didasari oleh motivasi belajar dan mengajar yang baik, dan motivasi yang baik itu didasari oleh rasa cinta tanah air dan pengamalan kesadaran mental spiritual keagamaan yang baik pula⁸⁷.

⁸⁷ Dalam melaksanakan tugasnya, guru dan dosen mempunyai kewajiban sebagai tanggung jawab keprofesionalannya yang tertuang dalam Pasal 20 dan Pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan;

Fakta sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan suatu bangsa harus diawali dengan kesadaran akan pentingnya pendidikan oleh semua komponen bangsa dan dengan dihadapkan pada kenyataan saat ini yang memposisikan Indonesia pada peringkat level lebih rendah dari negara tetangga, maka sudah waktunya untuk melakukan langkah percepatan pendidikan skala Nasional dengan istilah yang dipopulerkan adalah “Revolusi Pendidikan Nasional” atau disingkat dengan RPN. Adapun tahapan perencanaan, anggaran, kelembagaan dan operasional menempuh langkah-langkah implementatif sebagai bentuk analisis yang terpadu dan berkesinambungan; a) analisis dasar pijakan Perundang-undangan yang berlaku saat ini; b) sumber anggaran dan berbagai alternatif yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada serta tertutup kemungkinan korupsi; c) kelembagaan dan tata organisasi dari pusat sampai ke desa yang tertata dengan melibatkan semua komponen masyarakat; d) melibatkan semua aparat pemerintah, LSM dan masyarakat; e) operasional yang efektif dan efisien; f) evaluasi sebagai sarana intropeksi program dan perbaikan pada periode pendidikan yang akan datang; g) masa transisi pelaksanaan,

-
- a) Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai, mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - c) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan *sains*;
 - d) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, Agama, Suku, Ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - e) Menjunjung tinggi peraturan Perundang-undangan, hukum dan ode etik serta nilai-nilai Agama dan etika;
 - f) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

masa pematapan konsep dan penentuan sasaran *final goal* setiap tahap pelaksanaan, sehingga semua program jelas sarasannya, jelas manfaatnya, jelas biayanya dan jelas waktunya serta jelas SDM yang terlibat dan yang bertanggung jawab yaitu “siapa dan berbuat apa”.

Pertama, untuk mengelaborasi RPN atau Revolusi Pendidikan nasional harus mempunyai dasar pijakan yang kuat agar berjalan dengan baik dan berkesinambungan serta tidak menimbulkan fitnah pada generasi yang akan datang. Adapun dasar Perundang-undangnya yaitu :

- a. Pembukaan UUD 1945 Alenia Keempat yang berbunyi : “kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.
- b. Pasal 31 UUD 1945 yang telah di-Amandemen yang Keempat ; 1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan Nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur Undang-Undang; 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan Belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Nasional; 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan

teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

c. Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Ayat satu menyebutkan : “Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kepada guru dan/atau WNI lainnya yang memenuhi kualifikasi akademis dalam kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah NKRI”.

d. Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian Kelima tentang Pendidikan Non Formal ada tujuh ayat dan hanya disampaikan empat ayat dalam kajian ini yang berkaitan langsung dengan RPN atau Revolusi Pendidikan Nasional, yaitu : 1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat; 2) Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesi; 3) Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan

peserta didik; 4) Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan Majelis Ta'lim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Berdasarkan empat ketentuan pokok tersebut kemudian pemerintah membuat Peraturan Pemerintah atau PP pengganti Undang-Undang sebagai dasar operasional RPN dengan pertimbangan percepatan waktu. Kemudian secara paralel dapat melakukan proses legislasi pada DPR dengan tingkat koordinasi secara kelembagaan lintas fraksi. Sehingga program RPN mendapatkan legalitas penuh dari anggota dewan yang terhormat.

Kedua, Sumber anggaran RPN. Kegiatan yang besar dengan skala Nasional harus didukung dengan biaya yang besar untuk itu diperlukan adanya politik anggaran yang memadai dan tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan. Menurut kajian sementara, ada tiga sumber anggaran yang besar tetapi diperlukan *lobby* politik dan menempuh jalur diplomasi yang panjang, akan tetapi dengan niat yang kuat dan dasar argumen yang rasional, obyek akan ditemukan jalan keluar yang baik; a) Sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 31, maka biaya pendidikan 20% penuh tersalur pada obyek pendidikan; b) Melakukan *lobby* Internasional dengan jalur diplomatik bahwa Indonesia meminta *re-scheduling* pembayaran hutang luar negeri selama tiga tahun tidak membayar atau *gross period* dengan alasan darurat pendidikan dan dasar argumen bahwa dengan berhasilnya program pendidikan akan meningkatkan SDM masyarakat Indonesia yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi berkembang dengan pesat dan secara langsung akan

meningkatkan devisa negara untuk membayar hutang pada tahun keempatnya; c) Dana perolehan dari pengalihan subsidi BBM secara penuh disalurkan untuk program RPN, dengan dasar argumen bahwa masyarakat bukan diberikan ikan oleh pemerintah, tetapi diberikan kail untuk memancing ikan, sehingga dasar argumen ini memposisikan masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi masyarakat diposisikan sebagai subyek pembangunan. Dengan demikian harkat dan martabat masyarakat akan meningkat dan sekaligus mendidik masyarakat untuk tidak memiliki mental meminta belas kasihan dari pemerintah, tetapi masyarakat mempunyai keyakinan akan potensi dirinya dan harga dirinya, dan lebih jauh dari itu akan menghindarkan diri dari isu negatif bagi pemerintah guna melakukan money politic dalam rangka pemenangan Pemilu pada suksesi kepemimpinan Nasional atau Pilkada.

Ketiga, Kelembagaan dan tata organisasi. Suatu misi tidak akan berhasil; tanpa adanya lembaga dan tata organisasi yang baik, untuk itu RPN harus dibuat lembaga tersendiri terpisah dari lembaga yang ada, sehingga untuk memudahkan faktor koordinasi, karena tidak ada tumpang tindih kebijakan. Lembaga ini bersifat *Adhock* dan berlaku sampai tiga tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu tiga tahun kembali. Wilayah organisasi RPN bersifat nasional dan terpisah secara kelembagaan dengan Kementerian Pendidikan. Lembaga ini mempunyai otoritas dari level Nasional sampai pedesaan dan semua instansi harus mendukungnya. Kelengkapan gedung dan sarana pendidikan dapat bekerjasama dengan semua instansi pemerintah, yaitu Pemda, TNI-Polri, Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain, bahkan dapat menggunakan sarana tenda-tenda

militer atau barak prajurit, gedung-gedung pertemuan. Organisasinya harus ditata secara berjenjang, mulai dari pedesaan, Kecamatan, Kabupaten, Walikota, Gubernur sampai dengan Kementerian.

Dengan demikian struktur organisasi RPN akan tertata rapih. Bagi masyarakat yang tidak mengikuti program ini harus ada sanksi hukumnya, demikian juga aparat pemerintah yang dengan sengaja menghindar atau menghambat program RPN harus mendapatkan sanksi, mulai dari mutasi, pencopotan jabatan sampai dengan pidana karena melawan program pemerintah atau insubordinasi, sehingga semua energi bangsa fokus pada masalah pendidikan. Kerangka besarnya adalah tema pembangunan Negara dan Bangsa ini adalah “pendidikan”, dampak kegiatan ini akan terasa sampai ratusan tahun kemudian bahkan *multiplier effect* dapat bergulir sampai 200 tahun.

Keempat, Secara umum perlibatan yang terkait dengan program RPN adalah unsur pemerintah sipil dan militer, masyarakat dan swasta. Semua energi bangsa harus difokuskan pada bidang pendidikan, dari pusat hingga daerah. Rencana perlibatan ini secara tidak langsung akan membantu pemerintah selain bidang pendidikan adalah terjadinya asimilasi kependudukan sehingga mengurangi potensi konflik di masyarakat serta terjadinya bauran masyarakat antar propinsi sehingga berdampak pada program Transmigrasi. Dari sisi perbankan akan membantu terdistribusinya mata uang dalam jumlah dan nominal yang mencukupi. Hal ini adalah tugas Perundang-undangan Bank Indonesia, karena peserta didik mendapatkan uang saku. Dari sisi program Kementerian Perdagangan dan Koperasi akan dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan dan *Home Industry*, karena para

peserta diwajibkan memakai seragam dari hasil kerajinan lokal, seperti Batik tenun. Dari sudut TNI akan tercipta program “manunggalnya TNI dan Rakyat”, karena para prajurit dilibatkan sebagai guru dan instruktur serta tenda dan asrama serta gedung-gedung TNI di daerah dapat dimanfaatkan. Dan dari sisi Kementerian Dalam Negeri dan Polri akan banyak manfaatnya, karena masyarakat terkonsentrasi pada bidang pendidikan, tingkat kriminal akan semakin berkurang, konflik antar desa, antar suku dan antar Agama juga akan berkurang. Dan dampak yang paling besar adalah menciptakan harga diri Bangsa dan tertanam jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan serta jiwa gotong-royong. Dengan demikian melalui RPN dapat terbentuk semangat Kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan toleransi hidup bersama antar suku, beda Agama, beda warna kulit dan beda bahasa daerah. Semua kepentingan dan perbedaan akan lebur bersama semangat nasionalisme kebangsaan.

Kelima, Bidang operasional RPN. Kegiatan pendidikan masyarakat secara serentak dengan skup wilayah nasional pasti melibatkan banyak pihak dan melibatkan banyak sarana pendukung, untuk itu pula operasional harus digunakan dengan metode desentralisasi, artinya setiap unit Kabupaten mempunyai standar operasional masing-masing dengan diketuai oleh Pimpinan Unit Kabupaten atau PUK. Sedangkan untuk tingkat Propinsi dipimpin oleh Pimpinan Cabang Propinsi atau PCP, adapun untuk di Pusat atau level Nasional dipimpin oleh Pimpinan Pusat atau Pinpus. Jenjang organisasi ini bersifat sentralistik untuk pelaporan, evaluasi dan keuangan.

Adapun materi pelajaran yang disampaikan meliputi; a) Pendidikan Kepribadian Pancasila; b) Pendidikan Keagamaan; c) Pendidikan Kewirausahaan; d) Pendidikan Teknologi Terapan; e) Pendidikan keguruan; f) Pendidikan Kesadaran Bela Negara; g) Pendidikan dasar Hukum; h) Pendidikan Kebhinekaan dan Pluralisme; i) Pendidikan Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Kerakyatan.

Kemudian dalam menentukan kurikulum dan materi pokok ajaran, setiap PUK membuat perencanaan untuk disampaikan ke PC{ dan diteruskan ke Pinpus, selanjutnya akan mendapatkan dropping anggaran yang dikawal ketat oleh aparat tertentu untuk menghindari terjadinya korupsi.

Keenam, Tahap evaluasi dan sistem pelaporan, guna mengoptimalkan hasil dan tercapainya sasaran pendidikan, maka dibuat database tiap PUK dan setiap saat dilakukan evaluasi oleh tim khusus. Pelaporan meliputi dua hal, yaitu pelaporan kegiatan dan pelaporan penggunaan anggaran. Adapun sistem pelaporan menggunakan jalur komputer yang *online* dari Pusat sampai ke daerah-daerah. Jenis pelaporan meliputi; a) Laporan Harian; b) Laporan Mingguan; c) Laporan Bulanan; d) Laporan Kejadian Khusus; dan e) laporan Prosentase Pencapaian Sasaran tiap Kegiatan.

Personel pelaksana kegiatan dan personel evaluasi ada dua tim yang berbeda guna tercapainya sistem pelaporan yang obyektif. Dengan demikian semua kegiatan dan semua anggaran akan terkontrol dan termonitor dengan baik. Agar tercapai hasil yang efektif dan efisien, maka unsur masyarakat dan LSM dilibatkan secara langsung dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Semua pihak harus transparan

dan semua harus menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan RPN adalah bertujuan untuk kepentingan Bangsa dalam waktu yang lama, sehingga dalam praktiknya harus terhindar dari niat mencari keuntungan atau niatan untuk mementingkan kelompoknya sendiri.

Tahap evaluasi dan sistem pelaporan ini akan berfungsi sebagai kontrol organisasi dan sekaligus sebagai pihak yang menjaga kelurusan tujuan organisasi dengan baik. Dengan demikian keberadaannya sangat strategis guna menjaga kaidah-kaidah organisasi sekaligus melakukan tindakan preventif agar terhindar dari kecurangan dan korupsi anggaran. Demikian juga setiap penyimpangan harus dengan cepat ditindak dan setiap prestasi juga harus dengan cepat mendapat penghargaan.

Ketujuh, Tahap transisi dan penentuan tujuan akhir atau *final goal* tiap bahasan dan tiap pelaksanaan pendidikan. Pada tahap transisi selama satu bulan atau tiga puluh hari digunakan sebagai waktu perencanaan dan koordinasi dengan instansi terkait di daerah, pendataan dan penentuan tujuan akhir setiap kegiatan.

Koordinasi tingkat Pusat akan ditanda tangani oleh Pinpus, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri dan Panglima TNI plus Kapolri. Sedangkan pada tingkat Propinsi akan secara otomatis keterlibatannya dan jalur koordinasinya sesuai organisasi jenjang di atasnya. Semua pihak harus menyadari bahwa dasar filosofi RPN adalah semangat cinta tanah air Indonesia dan kesadaran bahwa pembangunan Bangsa yang besar itu harus dimulai dari kesadaran akan pentingnya pendidikan masyarakat secara menyeluruh.

Ada beberapa hal yang harus diwaspadai terjadi. Jangan sampai RPN yang di-*design* dan direncanakan dengan maksud yang baik demi kesejahteraan Bangsa Indonesia lahir dan bathin akan berdampak negatif atau bahkan dalam pelaksanaannya dilakukan secara berlebih-lebihan, sehingga akan menyengsarakan rakyat. Untuk itu semua tindakan harus dilakukan dengan baik dan melibatkan semua komponen bangsa agar RPN dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari kegiatan kontra produktif yang menyengsarakan rakyat. Untuk itu tahap perencanaan pelaksanaan dan evaluasi harus berjalan sesuai dengan batasan koridor yang ditetapkan secara terpusat dan dikoordinasikan dengan daerah, sehingga tercipta kearifan lokal yang berdimensi global.

6. Globalisasi Kesehatan.

Bonderless World atau dunia tanpa batas adalah salah satu fenomena kenyataan yang suka atau tidak suka harus dihadapi dan dilalui oleh semua negara, karena meningkatnya perkembangan teknologi informasi, teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Sehingga jaman globalisasi yang dapat dimaknai sebagai proses interaksi antar masyarakat dunia dalam segala aspek kehidupan termasuk aspek kesehatan telah menembus batas dominasi sebuah negara. Regulasi negara dapat dikalahkan dengan regulasi lembaga organisasi internasional, sehingga semua negara yang telah meratifikasi kesepakatan harus tunduk pada aturan tersebut⁸⁸.

⁸⁸ Pada pertemuan tingkat Menteri di Maricakesh, Maroko, tanggal 15 April 1994, Indonesia telah menandatangani *Agreement Establishing The World Trade Organization*, kemudian ditindaklanjuti dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan dan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. WTO memposisikan kesehatan sebagai jasa yang bisa diperjual belikan, yang

Salah satu syarat pembangunan bangsa dan negara adalah terjaminnya kesehatan masyarakat dengan baik. Karena tersedianya lingkungan hidup yang sehat dan tersedianya fasilitas kesehatan masyarakat adalah Hak Warga Negara terhadap Pemerintah, dengan demikian analisis terhadap penyiapan fasilitas kesehatan untuk masyarakat dapat dibagi menjadi dua; *Pertama*, Konsep pelayanan dengan mengedepankan fasilitas pokok atau fasilitas kesehatan standar untuk perorangan dan keluarga; *Kedua*, Konsep pelayanan kesehatan dengan fasilitas tambahan bagi masyarakat dan kelompok keluarga menengah keatas dengan mengedepankan unsur kenyamanan dan kemewahan konsep ini sering disebut dengan istilah "*Medical Tourism*".

Konsep pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yaitu sejahtera lahir dan batin merupakan bagian dari konsep peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan keluarga sebagai modal dasar pembangunan nasional. Implementasi pelayanan kesehatan harus mengedepankan prinsip Nondiskriminatif, partisipatif dan berkesinambungan, sehingga terciptanya lingkungan hidup yang sehat merupakan unsur yang sangat penting.

secara teknis diatur dalam ketentuan GATS atau *General Agreement on Trade and Service*. Dengan demikian pintu persaingan bisnis-bisnis kesehatan di bidang Rumah Sakit dan Farmasi menjadi lading yang menggiurkan bagi perusahaan internasional. Kenyataan tersebut harus dipadukan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 Ayat 1, yang mengatakan bahwa "setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya bidang kesehatan tanpa disadari bahwa globalisasi bidang kesehatan telah menggeser landasan filosofi aspek kesehatan masyarakat sebagai rasa kemanusiaan dalam pelayanan publik menjadi bisnis oriented yang menghilangkan perasaan kemanusiaan menjadi keuntungan semata.

Hubungan timbal balik antara derajat kesehatan masyarakat dan keberhasilan pembangunan ekonomi merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain, karena penurunan derajat kesehatan masyarakat akan berdampak langsung dan tidak langsung terhadap hasil-hasil pembangunan, terutama apabila dilihat secara kuantitatif pada angka pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, sehingga pemerintah harus menyusun program pelayanan kesehatan yang terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan, baik pada tataran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proporsional, akan tetapi pemerintah dan masyarakat secara luas dan semua komponen bangsa harus secara sinergis berusaha menyongsong era globalisasi kesehatan dengan baik dan mempunyai daya saing tinggi, sehingga kenyataan dalam pergaulan berbangsa dan bernegara dalam bidang globalisasi kesehatan tidak berdampak negatif pada pelayanan masyarakat dan tidak mengurangi derajat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi nilai-nilai dari hasil pembangunan.

Semua aktifitas masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok, baik secara perorangan atau keluarga di bidang ekonomi, pertahanan dan lain sebagainya harus didukung dengan derajat kesehatan yang tinggi atau kesehatan yang prima, sehingga semua aktifitas berjalan lancar.

Kendala yang paling utama dalam pelayanan kesehatan masyarakat adalah; *Pertama*, Terbatasnya fasilitas kesehatan terutama di daerah

pedalaman, pedesaan dan pulau-pulau terluar Indonesia; *Kedua*, Terbatasnya tenaga medis baik secara kualitas maupun kuantitasnya; *Ketiga*, Terbatasnya akses informasi kesehatan dan pendidikan pola hidup sehat bagi masyarakat pedesaan; *Keempat*, mahalnnya harga pelayanan kesehatan pada jenis penyakit tertentu serta mahalnnya harga obat-obatan bila dibandingkan dengan pendapatan masyarakat.

Tugas pemerintah secara umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 adalah :

- a. Pemerintah menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat secara baik dan menyeluruh.
- b. Pemerintah mengupayakan dan sekaligus bertanggungjawab secara penuh atas ketersediaan akses informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat serta terpeliharanya lingkungan hidup yang sehat guna tercapainya derajat kesehatan rakyat yang optimal.
- c. Pemerintah melaksanakan sistem jaminan sosial nasional aspek kesehatan serta mengupayakan ketersediaan tenaga medis atau tenaga kesehatan dan obat-obatan yang mencukupi kebutuhan masyarakat.
- d. Pemerintah mendorong peran aktif semua komponen bangsa untuk turut serta dalam menjaga dan memelihara segala bentuk upaya kesehatan

Dalam sudut pandang Ekonomi Pancasila, faktor kesehatan merupakan unsur penting untuk membangun kesejahteraan masyarakat, baik secara individu perorangan atau untuk membangun keluarga sejahtera⁸⁹.

Kombinasi analisis tentang globalisasi kesehatan dan konsep Ekonomi Pancasila dapat di elaborasi pada sub bahasan sebagai berikut :

- a. Konsep sehat melalui *Home care*.
 - b. Kesehatan sebagai komoditi.
 - c. Analisis Legislasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).
 - d. Konsep *Medical Tourism*.
 - e. Perpindahan tenaga kesehatan antar negara atau *Brain Drain*.
 - f. Produk herbal.
 - g. Konsep *Marketing* meditasi ketimuran.
 - h. Strategi bisnis "Indonesia sebagai Syurganya Lanjut Usia".
- a. Inti dari pengertian *Home Care* adalah pelayanan kesehatan melekat, artinya tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, baik perorangan atau keluarga di tempat tinggal mereka sendiri, sehingga kenyamanan lingkungan pelayanan kesehatan ditentukan oleh pasien itu sendiri dan bagi pihak tenaga kesehatan tidak perlu

⁸⁹ Pada Koran Republika, Sabtu tanggal 29 Juni 2013 menyebutkan bahwa ; ketahanan keluarga merupakan akar dan dasar dari ketahanan Nasional Indonesia dengan jumlah penduduk 237 juta jiwa. Hanya keluarga yang berkualitas yang melahirkan generasi berkualitas juga. Untuk itu generasi penerus bangsa harus mendapatkan akses pendidikan yang seluas-luasnya guna menghadapi persaingan bangsa di dunia yang semakin kompleks. Permasalahan yang kompleks tersebut meliputi persoalan pengangguran dan ketersediaan lapangan pekerjaan, kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan, persoalan sosial yang negatif yaitu ; kriminalitas, narkoba dan korupsi.

menyiapkan tempat. Ada banyak keuntungan pada Home care ini; *Pertama*, Meringankan ongkos pelayanan masyarakat, karena tidak memerlukan tempat khusus untuk pengobatan; *Kedua*, Pasien tidak berpindah berpisah dengan rumah tempat tinggalnya, karena rumah pada budaya masyarakat tertentu dianggap sebagai perjalanan hidup, dan rumah merupakan hasil dari rangkaian cerita dan peristiwa; *Ketiga*, Bagi keluarga yang mendampingi pasien tidak memerlukan waktu tersendiri untuk mencurahkan perhatian pada pasien, sehingga dari sudut pandang waktu lebih efisien; *Keempat*, tercipta rasa nyaman dan lebih tenang di lingkungan yang tidak asing bagi pasien, sehingga mempercepat proses penyembuhan, akan tetapi menjadi kendala besar bila rumah tinggal dan lingkungan sekitarnya tidak sehat atau tinggal di tempat kumuh padat penduduk yang kotor dan tidak tertata dengan baik, maka akan menyulitkan bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dan tidak jarang lingkungan tersebut akan mengancam pribadi petugas kesehatan⁹⁰.

Guna mendasari pengertian dan implementasi Home Care, maka harus difahami terlebih dahulu pengertian Tenaga Kesehatan. Menurut Peraturan

⁹⁰ Definisi yang diberikan oleh “American Medical Association”, bahwa *Home care* adalah tindakan untuk memberikan pelayanan kesehatan atau perawatan pasien di rumah mereka sendiri dengan tujuan untuk memulihkan dan mempertahankan secara maksimal tingkat kenyamanan dan kesehatan. Pada sudut pandang yang sama, Departemen Kesehatan mendefinisikan bahwa *Home Care* adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka sendiri dengan tujuan utama adalah meningkatkan dan mempertahankan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 2 Ayat

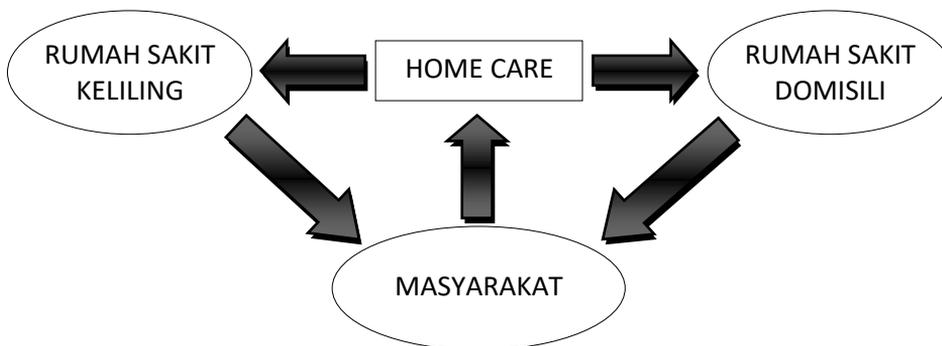
(1) bahwa yang dikatakan Tenaga Kesehatan meliputi :

- a. Tenaga medis.
- b. Tenaga Keperawatan.
- c. Tenaga Kefarmasian.
- d. Tenaga Kesehatan Masyarakat.
- e. Tenaga Gizi.
- f. Tenaga Keterampilan Fisik.
- g. Tenaga Keteknisan Medis.

Adapun menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, bahwa Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep *Home Care* adalah mempertemukan antara tenaga kesehatan dan pasien di rumah kediaman pasien, sehingga upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tidak melalui Rumah Sakit.

Kombinasi konsep antara *Home Care*, Rumah Sakit Domisili, Rumah Sakit Keliling dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dapat dilihat dalam gambar 7

Gambar 7
Globalisasi Pelayanan Kesehatan



Rumah Sakit Keliling atau RSK adalah bentuk pelayanan baru yang memposisikan masyarakat sebagai tuan di negerinya sendiri, sehingga akses untuk memperoleh pelayanan sangat mudah dan merata serta terjangkau dari sisi biaya, demikian juga ketersediaan obat-obatan sangat mencukupi keperluan masyarakat. Kondisi seperti ini akan terjadi bila semua komponen bangsa secara bersama-sama membangun ketahanan kesehatan masyarakat. Apabila RSK bisa terwujud di setiap desa, maka akan terlihat kemakmuran negeri ini. Karena apabila masyarakat sehat, maka akan dapat mengoptimalkan potensinya, terutama pada produktivitas ekonomi. Dengan demikian bentuk kebijakan pemerintah dalam mengupayakan terciptanya RSK adalah bentuk kepedulian yang sangat diharapkan oleh masyarakat.

b. Era globalisasi telah menjadikan pelayanan kesehatan sebagai komoditi, sehingga semua penyakit ada harganya, seperti layaknya di pasar swalayan. Masyarakat yang mampu membayar dengan harga yang ditentukan akan mendapatkan pelayanan kesehatan, sedangkan

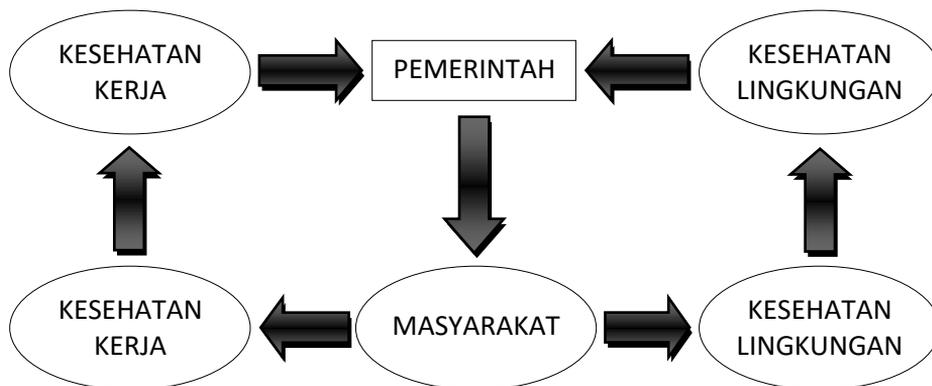
masyarakat yang tidak mampu membayar maka harus menerima kenyataan atau menunggu ajal tiba. Dengan kondisi tersebut, maka muncul jargon “Orang Miskin Dilarang Sakit”, karena biaya pelayanan kesehatan yang sangat mahal.

Organisasi perdagangan dunia atau WTO telah membagi dua bidang kerjasama internasional perdagangan dunia; *Pertama*, Perdagangan barang diatur dengan GATT atau *General Agreement on Tariff and Trade*; *Kedua*, perdagangan jasa yang diatur oleh GATS atau *General Agreement on Trade and Service*. Semua negara termasuk Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian kesepakatan tersebut harus tunduk pada peraturan internasional, termasuk juga memposisikan pelayanan kesehatan sebagai komoditi. Dengan demikian secara filosofi terjadi pergeseran yang sangat prinsip antara makna pemahaman pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat (3) dan pemahaman pada UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan apabila dibandingkan dengan pemahaman GATS dalam melakukan pelayanan kesehatan masyarakat. Hak untuk sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang semula merupakan kewajiban pemerintah bergeser menjadikan kewajiban masyarakat untuk menyiapkan dana bila memerlukan pelayanan kesehatan. Kondisi ini telah membawa situasi benturan pemikiran antara arus globalisasi kesehatan dengan konsep pemikiran berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan perdebatan akademis guna mencari solusi atau titik temu pemahaman pemikiran agar masyarakat tidak dirugikan.

c. Analisis legislasi atau aturan Perundang-undangan tentang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 menitik

beratkan pada dua hal penting; *Pertama*, Permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, karena pengaruh dan dampak kesehatan lingkungan cukup luas cakupannya terhadap semua aspek kehidupan; *Kedua*, Kesehatan kerja, karena pada permasalahan ini terjadi tarik ulur kepentingan antara pekerja dan pengusaha dengan dasar argumen yang berbeda serta memposisikan Pemerintah pada posisi tengah tanpa keperpihakkan.

Gambar 8
Siklus Kesehatan



Pemahaman terhadap peraturan atau perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan meliputi beberapa hal; *Pertama*, Lingkungan dalam perspektif langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat, yaitu lingkungan perumahan penduduk yang dapat dilihat dari berbagai aspek dan dampaknya pada kesehatan masyarakat; *Kedua*, Aspek udara dan cuaca yang harus secara simultan dan terus menerus melakukan riset dan penelitian kopehensif guna mencari titik keseimbangan antara perkembangan industri dengan segala macam pencemarannya, kebutuhan hidup manusia terhadap hasil-hasil industri dan terpeliharanya kawasan

hutan yang sehat sebagai paru-paru dunia; *Ketiga*, Aspek air yang meliputi kecukupan ketersediaan air bagi masyarakat dan kebersihan dan kesehatan. Fungsi air sangat dominan, sehingga pemantauan frekuensi hujan dan debit air sungai yang dipadukan dengan analisis kependudukan menjadi sangat penting; Keempat, Aspek tanah yang menerapkan dasar pijakan dan sumber kehidupan pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan harus diolah secara simultan dengan mengedepankan kandungan unsur-unsur yang produktif bagi kehidupan manusia harus segera dibuat RUTR yang baku dan diawasi secara ketat penggunaan tanah-tanah produktif untuk penyiapan dan pengolahan kebutuhan pokok pertanian dan perkebunan sebagai lahan subur berubah fungsi menjadi lahan industri dan perumahan; *Keempat*, Lingkungan sosial masyarakat harus dilakukan kajian dari berbagai sudut pandang, yaitu kesehatan mental dan budaya, kesehatan lingkungan pendidikan bagi anak serta kesehatan pemahaman keagamaan. Dengan demikian analisis kesehatan lingkungan mencakup dua hal, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non fisik⁹¹.

Pada perspektif Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kesehatan lingkungan adalah segala usaha dan proses untuk mewujudkan tingkat kesehatan lingkungan yang baik dan kualitas

⁹¹ Tarik ulur antara kepentingan masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan kepentingan pemenuhan hajat hidup, salah satunya terbentur pada satu titik, yaitu kawasan kehutanan. Konflik dengan pokok masalah alih fungsi hutan dapat dibatasi dengan pokok pikiran pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Pasal 38 ayat (1) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Kemudian pada Pasal (4) Kawasan hutan lindung dilarang melakukan penebangan dengan pola penebangan terbuka. "Koran Republika, Senin 15 Juli 2013".

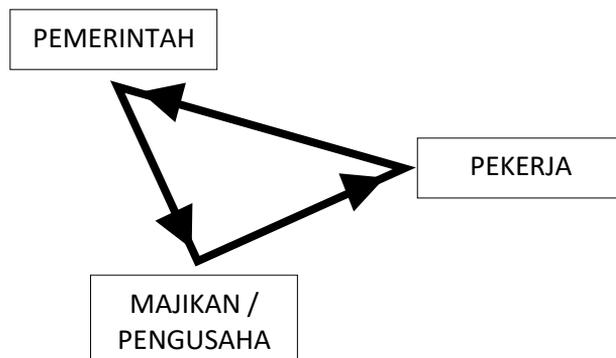
lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial dengan tujuan akhirnya adalah masyarakat dengan derajat kesehatan yang optimal. Adapun unsur yang berpotensi untuk mengganggu atau mengurangi derajat kesehatan adalah : limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi sinar penguin dan non penguin, air yang tercemar, udara yang tercemar, makanan yang terkontaminasi dan berbagai zat yang secara langsung dan tak langsung berpotensi untuk mengurangi derajat kesehatan masyarakat. Konsep umum Ekonomi Pancasila terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah konsep saling bertaut, artinya argumen yang dibangun adalah tingkat dan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi akan berdampak positif pada kegiatan ekonomi yang tinggi dan merata juga akan berdampak positif terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Hubungan timbal balik antara derajat kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi merupakan ketentuan dasar di semua negara di dunia. Karena menurunnya tingkat ekonomi masyarakat akan berakibat terjadinya kemiskinan dan keterbatasan konsumsi makanan pokok dan makanan tambahan, sehingga menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan pada akhirnya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya adalah “kesehatan adalah faktor mutlak pertumbuhan ekonomi”.

Masyarakat yang dalam posisi sebagai pekerja sama halnya dengan masyarakat yang dalam posisi sebagai majikan atau pengusaha, status

keduanya secara proporsional sama didepan hukum dan sama perilakunya dalam sudut pandang pemerintah. Artinya keduanya mendapatkan perlindungan hukum. Pemerintah harus menjaga jarak yang sepadan adar keduanya mempunyai hubungan yang harmonis, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian dengan baik.

Gambar 9
Kesehatan Publik



Secara umum majikan atau pengusaha harus memperhatikan kesehatan pekerjanya dan dilarang melakukan eksploitasi terhadap pekerja, akan tetapi para pekerja juga dituntut untuk memenuhi hasil kerja yang optimal sesuai dengan kontrak kerja yang disertai dengan motivasi kerja yang baik serta disiplin dan jujur dalam bekerja. Adapun fungsi pemerintah menjaga harmonisasi kerja antara kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja, dengan demikian dalam sudut pandang Ekonomi Pancasila posisi pekerja dan pengusaha berada pada garis sepadan setingkat saling membutuhkan dan saling mengisi dengan peran masing-masing. Adapun pemerintah sebagai penjaga regulator yang seimbang dalam rangka

pembangunan nasional yang efektif dan efisien.

Yang paling menarik pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009 memposisikan TNI-POLRI menjadi obyek pekerja yang harus dijamin kesehatan kerjanya, padahal dalam organisasi TNI-POLRI tidak dikenal adanya majikan atau pengusaha, akan tetapi semangat yang terkandung dalam Pasal 164 Ayat (4) yang mengatakan bahwa upaya kesehatan kerja juga beraku pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia baik Darat, Laut maupun Udara serta POLRI.⁹²

Untuk memposisikan TNI-POLRI sebagai pekerja seperti layaknya para pekerja perusahaan harus dilakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu. Akan tetapi niatan baik untuk meningkatkan derajat kesehatan anggota TNI-POLRI merupakan kemuliaan karena profesi sebagai anggota TNI-POLRI adalah salah satu jenis profesi yang mempunyai kandungan risiko besar.

⁹² Implementasi tugas pokok TNI meliputi; *Pertama*, Operasi Militer untuk Perang (OMP); dan *Kedua*, Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dapat didefinisikan pada tugas-tugas sebagai berikut ; a) mengatasi gerakan separatis bersenjata; b) mengatasi pemberontakan bersenjata; c) mengatasi aksi terorisme; d) mengamankan wilayah perbatasan; e) mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis; f) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; g) mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; h) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta; i) membantu tugas pemerintah di daerah; j) membantu POLRI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat; k) membantu mengamankan tamu negara; l) membantu menanggulangi bencana atau SAR; m) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan dan penyelundupan.

BAB III

RESTORASI PANCASILA

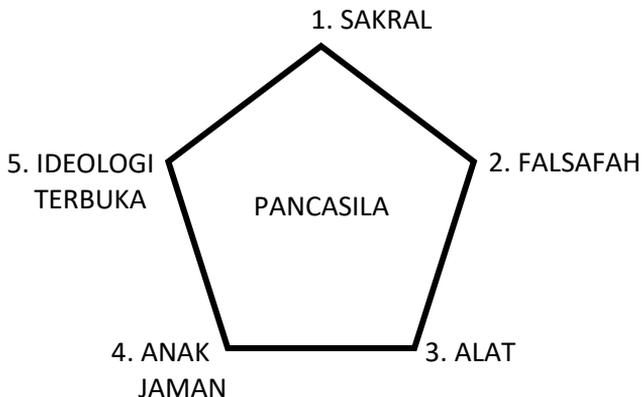
A. PENDAHULUAN

Restorasi dalam pengertian umum pengembalian atau pemulihan sesuatu kepada bentuk dan kondisi semula, maka secara sederhana pengertian “Restorasi Pancasila” adalah pemurnian pemikiran tentang Pancasila, ada beberapa analisis untuk memposisikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu :

1. Pancasila adalah sesuatu yang sakral seperti layaknya ajimat dan kramat.
2. Pancasila sebagai dasar negara, falsafah dan ideologi bangsa.
3. Pancasila sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional.
4. Pancasila sebagai hasil perenungan dan pemikiran anak jaman yang dipengaruhi oleh kondisi kelahirannya sehingga sangat dimungkinkan untuk disempurnakan sesuai dengan perkembangan jaman.
5. Pancasila diposisikan sebagai ideologi terbuka sehingga dapat berinteraksi dengan ideologi lainnya.

Pancasila merupakan persembahan hasil pemikiran generasi pejuang kemerdekaan yang utama, sehingga mampu menjadi perekat jiwa persatuan dan kesatuan dari berbagai suku, adat istiadat, ras dan agama menjadi satu identitas tunggal, yaitu budaya bangsa Indonesia.

Gambar 10
Restorasi Pancasila



Peran serta kampus yang termasuk di dalamnya adalah Universitas Krisnadwipayana mengambil posisi sebagai benteng Pancasila artinya segenap civitas akademika memposisikan diri secara proporsional untuk menjaga keutuhan dan kelestarian Pancasila yang secara akademis empiris adalah hasil pemikiran "*Founding Fathers*", akan tetapi menjadi perdebatan yang dinamis dalam dunia kampus Ketika sampai pada pertanyaan yang rentan dengan berbagai persepsi yaitu : apa mungkin pada kondisi tertentu pada masa yang akan datang Pancasila dapat berubah?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut di atas maka perlu dibangun argumentasi pada lima poin, posisi Pancasila dalam konsep restorasi Pancasila.

Pertama; memposisikan Pancasila adalah sesuatu yang sakral laksana ajimat atau pusaka ritual kekuasaan, sehingga siapapun yang menggugat eksistensi Pancasila maka dianggap tidak pancasilais dan layak untuk disingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika ada komunitas

yang menjaga jarak dengan persepsi komunitas lainnya tentang Pancasila maka komunitas tersebut layak diberikan cap atau “*brand*” anti Pancasila sehingga harus disingkirkan pada posisi ini mengundang peran aktif pihak Universitas untuk menjaga titik keseimbangan pemahaman sehingga terhindar dari perpecahan dan friksi yang berkepanjangan antar komunitas pada pemikiran daya pemahaman yang berbeda terhadap Pancasila, untuk itu segenap civitas akademika Universitas harus merumuskan pemahaman yang benar terhadap Pancasila.

Garis batas untuk memposisikan pemahaman Pancasila pada rambu-rambu yang halus dan fleksibel sehingga semua pihak pada strata pemikiran dan pada periode jaman pemikiran dapat menerima konsep pemikiran dan penalaran Pancasila dengan damai dan dinamis serta romantis. Adapun batasan berpikir tersebut sebagai berikut :

1. Pancasila itu bukan kitab suci agama sehingga masih terbuka tafsir dan pemahaman implementasinya.
2. Pancasila secara keutuhan pemahaman harus dipertahankan agar tidak bias untuk itu harus ada pola yang terstruktur dan tidak bertentangan dengan perkembangan peradaban yang ada.
3. Secara empiris akademis butir-butir pemikiran yang terkandung dalam Pancasila harus mampu diuraikan secara nyata oleh civitas akademika Universitas Krisnadwipayana dan selanjutnya di *share* kepada masyarakat.

Kedua; memposisikan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara serta sumber dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila juga dipandang sebagai pondasinya negara, artinya jika pondasi

suatu rumah atau bangunan berubah maka rusaklah struktur bangunan tersebut. Oleh sebab itu pada kelompok pemahaman ini melarang bahkan menghindari perdebatan sehingga Pancasila menjadi semacam dogma yang tidak boleh dikutak-katik lagi. Kekakuan pemahaman seperti ini biasanya dipegang secara kuat dan kokoh oleh aparaturnegara, akan tetapi berbeda pada akademisi yang dengan bebas untuk mengelaborasi Pancasila mulai dari tinjauan historis penyusunannya sampai pada pengkajian multi tafsir pada konteks jaman nya tetapi dengan tidak mengesampingkan keutuhan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan satu konsep pemikiran bahwa pancasila hasil dari pemikiran manusia sehingga terbuka untuk multi tafsir pemahaman sesuai dengan konteks jaman nya.

Bagaimanapun pemahamannya dari sudut pandang disiplin ilmu apapun, segenap civitas akademika Universitas Krisnadwipayana harus mampu tampil sebagai benteng Pancasila, artinya berusaha secara optimal untuk mempertahankan Pancasila dalam kehidupan kampus, meskipun multi tafsir dan penjabaran setiap sila dapat berkembang sesuai dengan kondisi jaman setiap generasi. Argumentasi yang dibangun adalah sebagai berikut :

1. Jika ada usaha untuk merubah Pancasila pada sila persilanya oleh kelompok tertentu baik dari radikal kanan dan radikal kiri maka akan berdampak pada perpecahan.
2. Persitiwa G30S PKI tahun 1965 adalah bukti nyata yang di catat dalam sejarah berbangsa dan bernegara tentang Gerakan radikal kiri untuk merubah Pancasila yang berdampak jatuhnya korban baik dari kalangan militer dan sipil.

3. Pancasila digali dari perjalanan budaya bangsa bersumber dari perkembangan peradaban nenek moyang bangsa Indonesia, oleh sebab itu harus ada generasi muda bangsa yang tampil sebagai benteng Pancasila agar Pancasila tidak tercabut dari akarnya, artinya usaha untuk merubah atau mengganti Pancasila tidak boleh terjadi untuk itu segenap civitas akademika Universitas Krisnadwipayana memposisikan diri sebagai benteng Pancasila.

4. Pancasila jika dikaji lebih dalam banyak bersentuhan dengan ajaran agama, artinya semua butir yang terkandung setiap sila dalam Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama, untuk itu tidak ada alasan para rohaniawan agama dan para penggiat agama serta para pejabat terkait untuk membuat isu adanya pertentangan antara butir-butir yang terkandung pada Pancasila bertentangan dengan ajaran agama.

5. Generasi muda bangsa yang termasuk juga mahasiswa Universitas Krisnadwipayana harus berusaha untuk memposisikan diri sebagai benteng Pancasila.

Ketiga; Pancasila sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Pemahaman seperti ini dapat dikembangkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Hanya dengan Pancasila, bangsa Indonesia dapat mencapai tujuan dan cita-cita nasional.
2. Tidak ada pihak manapun yang mencoba menggugat eksistensi Pancasila.

3. Hari kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tahun setelah bangsa Indonesia mampu melewati peristiwa pemberontakan G30S PKI adalah bukti nyata bagaimana para generasi muda bangsa Bersama aparat untuk berjuang melawan segala upaya mengganti Pancasila.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perlawanan terhadap eksistensi Pancasila sebagai alat atau sarana untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur terjadi pada kondisi perjalanan sejarah perjuangan bangsa sebagai ujian berbangsa dan bernegara.

Keempat; Pancasila merupakan hasil jarih payah dan pemikiran para pejuang pendiri bangsa atau sering disebut dengan "*Founding Fathers*" saat itu, secara akademis dapat diperkirakan seandainya peristiwa kemerdekaan negara Republik Indonesia lebih awal 20 tahun maka dapat dimungkinkan rumusan dasar negara tidak seperti Pancasila saat ini, mengapa? Karena pelaku sejarahnya berbeda dengan situasi dan kondisi yang berbeda, oleh sebab itu secara sepintas dapat dikatakan Pancasila merupakan anak jamannya, artinya merupakan hasil pemikiran yang bersesuaian dengan konteks dan konten saat itu, sehingga lebih jauh dari itu dapat dikatakan bahwa produk terbaik generasi pada saat itu adalah Pancasila, dengan demikian generasi muda bangsa, para mahasiswa, yang termasuk di dalamnya adalah mahasiswa Universitas Krisnadwipayana harus mampu tampil kedepan sebagai garda terdepan sebagai banteng Pancasila.

Kelima; Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya dalam pelaksanaannya pada kehidupan sehari-hari dapat dikatakan :

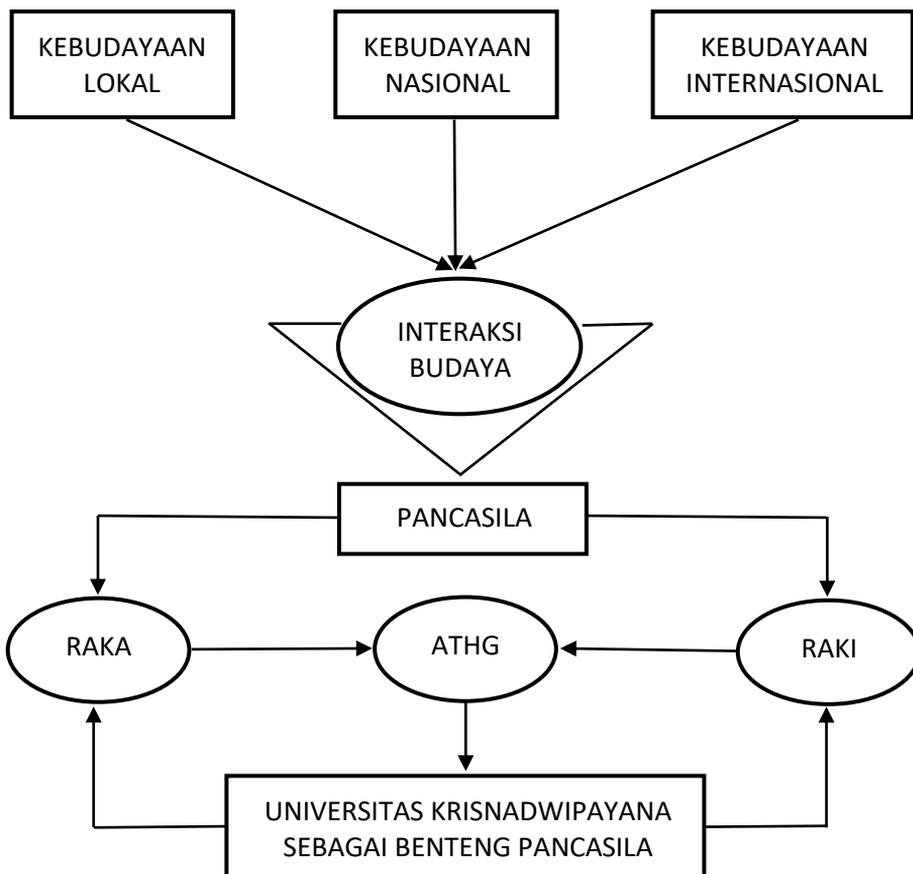
1. Pancasila dan seluruh kalimat dan kata-katanya tetap atau tidak boleh berubah.
2. Makna yang terkandung di dalam butir-butir Pancasila secara pemikiran dapat berinteraksi dengan ideologi yang berada di sekitarnya, artinya implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berkorelasi dengan ideologi masyarakat internasional yang salah satu contohnya adalah diselenggarakan “Kongres Asia-Afrika” di Bandung yang diprakarsai oleh Bung Karno dengan demikian makna hakiki Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu bangsa dan negara lain dapat memanfaatkan Pancasila untuk mewarnai pemahaman negara tersebut dalam bentuk konsep pemikiran, artinya Pancasila mampu memberikan ruang positif untuk negara lain.
3. Dalam pergaulan internasional Pancasila dapat diadopsi atau ditiru oleh negara lain, bahkan organisasi internasional di bawah naungan PBB dapat menjadikan Pancasila sebagai sumber pemikiran yang dinamis.
4. Sebagai ideologi terbuka pemahaman pada butir-butir Pancasila menjadi fleksibel dan dapat menjembatani aturan agama di dunia dan menjadikan harmonis komunikasi antar budaya dan peradaban masyarakat dunia.

Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi terbuka banyak membuka peluang kemanfaatan, meskipun kemungkinan cenderung negatif tidak dapat dipungkiri artinya pada pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka harus ada pihak yang tampil sebagai penjaga atau banteng Pancasila yang dalam hal ini adalah mahasiswa Universitas Krisnadwipayana.

B. BENTENG PANCASILA.

Sintesa pemikiran dalam perdebatan para pejuang kemerdekaan yang tergabung pada BPUPKI dan PPKI mencapai titik kesepakatan konsensus nasional berupa Pancasila, sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa Indonesia yang pada setiap sila Pancasila tercantum pada naskah pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat.

Gambar 11
Interaksi Budaya



Pemahaman secara mendalam nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila Pancasila akan menemukan berbagai keistimewaan pemikiran yaitu :

1. Pancasila dapat menyatukan dan menghubungkan pemahaman agama dan aliran kepercayaan sehingga tercipta kehidupan yang saling menghormati dan toleransi agama yang harmonis dan dinamis.
2. Pancasila menciptakan semangat kesetiakawanan sosial, saling berbagi dan membangun jiwa empati.
3. Pancasila mendorong kehidupan yang demokratis berkeadilan, jujur dan bermartabat.
4. Pancasila menciptakan semangat juang, cinta tanah air, rela berkorban dan berjiwa patriot
5. Pancasila menjadikan api semangat untuk berprestasi
6. Pancasila menjadi perekat kehidupan berbangsa dan bernegara dengan semboyan “bhineka tunggal ika”
7. Pancasila harus mampu menyajikan “Pendidikan multi-kultural” atau dengan sebutan “cross-cultural education” artinya pada konsep pemikiran ini generasi muda bangsa harus mampu menemukan titik keseimbangan baru tafsir Pancasila sebagai pemahaman “ideologi terbuka” mampu berinteraksi dengan berbagai budaya dan pemikiran baru sebagai dampak dari era globalisasi dari pertumbuhan dan perkembangan “generasi milineal” pada lingkungan “era digital” rumusan tafsir Pancasila bukan berarti merubah Pancasila tetapi mencari cara pendekatan yang harmonis dan dinamis untuk merespon perubahan jaman. Untuk itu peran aktif dunia kampus khususnya

Universitas Krisnadwipayana mampu merumuskan pemahaman atau peremajaan pemikiran baru terhadap multi tafsir Pancasila yang dikemas pada “Pendidikan multikultural” yang mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang tumbuh dinamis.

Peradaban atau “*civilization*” yang dalam pemahaman dinamis meliputi berbagai aspek kehidupan yaitu :

1. Pandangan hidup suatu bangsa.
2. Tata nilai dan kearifan lokal.
3. Sosial budaya yang berkembang.
4. Cakupan institusi politik dan institusi ekonomi.
5. Perkembangan kesenian daerah.
6. Sains dan teknologi.
7. *Nation character building*.

Pancasila sebagai ruh yang menjiwai alam pikiran bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban maka harus ditemukan sintesa sebagai formula baru yang mamposisikan Pancasila sebagai perekat persatuan dan kesatuan untuk itu Universitas Krisnadwipayana yang turut serta aktif mengambil bagian untuk merumuskan formula baru tersebut sebagai implikasi “Universitas Krisnadwipayana sebagai benteng Pancasila sesuai dengan perkembangan jaman.”

Langkah nyata yang harus ditampuh Universitas Krisnadwipayana sebagai benteng Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Universitas Krisnadwipayana harus membuat perencanaan melalui pembentukan tim khusus yang melakukan penekanan pada peran dan fungsi kampus sebagai benteng Pancasila yang dimulai dari proses rekrutmen dosen, karyawan dan mahasiswa sehingga terjadi semacam sterilisasi dari semua paham yang bertentangan dengan Pancasila. Proses perencanaan juga sampai pada tata Kelola Pendidikan, sistem belajar-mengajar dan sampai pada tahap evaluasi dengan satu parameter yaitu pemurnian paham dan nalar Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa Indonesia. Demikian juga perencanaan pada materi ajar dan bahan ajar harus menjadi *domain control* tim tersebut, dengan demikian bentuk kampus sebagai benteng Pancasila menjadi nyata dari hulu sampai ke hilir.

2. Optimalisasi peran dan fungsi dari 10 komponen Pendidikan artinya harus ada manajemen tata Kelola Universitas Krisnadwipayana yang dilakukan pengkajian dan evaluasi persemester dengan pola waskat atau pengawasan melekat agar kampus terhindar dari semua bentuk penyimpangan termasuk pelecehan seksual di lingkungan Universitas, tidak ada praktik korupsi, dan pola rekrutmen karyawan dan dosen mengutamakan kualitas dengan mengesampingkan atas dasar kekerabatan sehingga mereka yang terlibat langsung dalam proses belajar-mengajar adalah mereka yang profesional, unggul, berintegritas dan berbudi luhur artinya semua "*stakeholders*" Universitas Krisnadwipayana adalah sumber daya manusia yang unggul, dengan demikian perlahan tapi pasti Universitas Krisnadwipayana akan menjadi "mercusuar" dan barometer

Pendidikan yang unggul dan terampil sebagai “benteng Pancasila” dan hanya mereka yang unggul dapat tampil sebagai pemimpin bangsa.

3. Standarisasi sistem rekrutmen tenaga kependidikan atau karyawan dan dosen harus mengacu pada kualitas sehingga diperoleh sumber daya manusia yang mewakili Universitas Krisnadwipayana adalah mereka yang terampil, professional dan tidak tercemar oleh paham raka atau radikal kanan dan juga tidak terpengaruh oleh paham raki atau radikal kiri, karena tercemarnya paham raka dan raki dalam waktu yang lama akan menurunkan harkat dan martabat kampus sebagai benteng Pancasila, demikian juga kreativitas mahasiswa pada UKM harus steril dari kegiatan politik praktis atau partai politik, atau kampus terbebas dari paham apapun. Universitas krisnadwipayana harus mampu menumbuh kembangkan multi tafsir Pancasila yang mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang berdiri di atas semua kepentingan pribadi dan golongan.

4. Rejuvenasi Pancasila adalah pemikiran peremajaan multi tafsir bila dikaitkan dengan perkembangan dan interaksi antara kebudayaan lokal atau kearifan lokal dan *national character building* serta kebudayaan global. Dengan adanya Universitas Krisnadwipayana yang mendeclare sebagai kampus benteng Pancasila maka harus mampu menunjukkan secara nyata “*political discourse*” agar pemikiran tentang Pancasila tetap mempunyai tempat di hati generasi muda bangsa yang disebut dengan generasi milineal. Adapun Langkah yang harus ditempuh UNKRIS untuk “Rejuvenasi Pancasila” adalah sebagai berikut :

- a) Adanya konsep pemahaman Pancasila yang dikemas secara digital melalui media massa atau medsos.
 - b) Menghadirkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
 - c) Membuat program bakti sosial Pancasila.
 - d) Adanya program bantuan Pendidikan atau beasiswa “Bakti Pancasila”
 - e) UKM Sosialisasi Pancasila.
5. Tri Dharma perguruan tinggi yang secara umum dipahami meliputi tiga hal yaitu :
- a) Pendidikan dan Pengajaran
 - b) Penelitian dan Pengembangan
 - c) Pengabdian Masyarakat

Pendidikan dan pengajaran harus mampu menggali ide-ide pokok Pancasila pada setiap silanya kemudian mampu disajikan dalam bentuk pengajaran yang menarik dan memadukan kearifan lokal setiap budaya daerah, budaya nasional serta memahami interaksi dengan budaya global. Adapun penelitian dan pengembangan lebih fokus pada daya serap mahasiswa dan masyarakat terhadap setiap ancaman, tantangan, hambatan serta gangguan terhadap implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sedangkan bentuk pengabdian masyarakat secara nyata adalah kegiatan “Kesetiakawanan sosial” dengan gerakan meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kegiatan ekonomi membuka lapangan pekerjaan dan mendorong kemakmuran masyarakat desa.

Secara etimologi manusia adalah makhluk politik yaitu upaya untuk membangun suatu tatanan kehidupan yang lebih baik, teratur, saling

menghormati dan dituntut adanya rasa kepedulian terhadap orang lain, kemudian pengertian manusia sebagai makhluk politik berkembang menjadi sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, partai politik yang saling mengalahkan. Pancasila memberikan landasan operasional partai politik dalam bingkai negara kesatuan republic Indonesia agar setiap partai politik bersaing secara sportif sesuai dengan mekanisme Undang-undang dalam memperoleh suara terbanyak saat pemilu. Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana adalah salah satu kader potensial calon pemimpin bangsa sejak awal harus memahami Pancasila secara folosofi dan aplikatif, apalagi dengan dicanangkan UNKRIS sebagai kampus benteng Pancasila, maka setiap mahasiswa harus mengambil bagian secara proporsional sebagai patriot Pancasila.

Pendidikan kewarganegaraan untuk mahasiswa UNKRIS bertujuan membangun kepribadian yang unggul dengan parameter

1. Beriman dan bertaqwa.
2. Cerdas dan terampil.
3. Santun dan berbudi luhur.
4. Beretika dan bermoral.
5. Peduli dengan orang lain.

Setiap mahasiswa harus sadar bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia dituntut tanggung jawab terhadap dirinya yaitu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tidak menyiksa dirinya sendiri atau perbuatan yang mendzolimi diri sendiri, sedangkan sebagai makhluk sosial, mahasiswa harus menjaga kerukunan dengan komunitas lainnya dalam kerangka

kehidupan berbangsa dan bernegara dan mendukung program-program pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, serta ada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membuka akses Pendidikan seluas-luasnya.

Pancasila adalah dasar ideologi negara yang dapat menyatukan berbagai agama dalam artian menjaga kerukunan antar umat beragama dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* – berbeda-beda tapi menjadi satu kesatuan dengan semangat yang saling menghormati dalam perbedaan dan toleransi beragama yang kuat untuk itu dalam pergaulan dan interaksi antar mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan atau karyawan pada Universitas Krisnadwipayana dikembangkan semangat persaudaraan dengan satu identitas tunggal “kesatuan persaudaraan” atau dalam satu keluarga “*gens una summus*”. Kehidupan kampus adalah warna kepribadian sebagai bagian dari komunitas masyarakat luas, sehingga diharapkan mahasiswa lulusan dari Universitas Krisnadwipayana dapat tampil menjadi pemimpin nasional dimasa yang akan datang dengan identitas :

1. Cerdas dan tangkas.
2. Beriman dan bertakwa.
3. Nasionalis sejati.
4. Berbudi luhur.

Kompetensi lulusan dari Universitas Krisnadwipayana mempunyai tiga kategori yang unggul yaitu :

1. Kepribadian.
2. Intelektual.

3. *Trengginas atau Kesehatan fisik.*

Ketiga keunggulan tersebut adalah modal dasar dari “Abituren” atau lulusan dari UNKRIS menjadi motor dan dinamisator pembangunan nasional. Hal tersebut sudah banyak dibuktikan bahwa mereka alumni UNKRIS masuk dalam jajaran birokrasi pemerintahan yang secara langsung tampil sebagai “Benteng Pancasila” yaitu semangat dan konsistensi untuk menjunjung tinggi cita-cita nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa menuju masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, untuk itu semangat pesatuan dan kesatuan dalam perbedaan harus dibangun mulai dari kehidupan di kampus.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi memungkinkan terbentuknya masyarakat internasional, artinya terbentuk komunikasi secara internasional dengan cepat seakan-akan negara tanpa batas. Kondisi ini menjadi alasan untuk terbentuknya integrasi komunikasi budaya lokal, budaya nasional dan budaya global. Untuk itu harus ada pemikiran “Pancasila sebagai ideologi terbuka” dengan berbagai alasan yaitu :

1. Agar Pancasila sebagai falsafah negara tidak terpinggirkan dalam pemahaman pada generasi millineal.
2. Agar Pancasila tetap berada dihati masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tampilan baru yang tidak monoton.
3. Agar Pancasila tetap tegak berdiri di tengah gempuran budaya global.
4. Agar ada pihak yang tampil sebagai benteng pancasila. Pada posisi ini Universitas Krisnadwipayana tampil di garda terdepan.

Di tengah pusaran deras globalisasi yang berhadapan dengan “politik identitas kedaerahan” sebagai dampak dari semangat otonomi daerah sehingga menimbulkan kondisi “fundamental sekretarian” dalam bentuk refleksi atau bahkan dalam bentuk “aksi”. Kondisi ini menjadi sesuatu yang sangat mengganggu sebagai generasi muda bangsa, karena jika kondisi ini dibiarkan akan menjadi semacam bola api liar yang menggeser eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk itu segenap dosen dan mahasiswa bahkan semua “*stakeholders*” Universitas Krisnadwipayana harus mampu menjadi motor penggerak sebagai benteng Pancasila. Kondisi nyata yang jelas terlihat adalah sangat jarang pejabat negara pada banyak kesempatan berbicara tentang Pancasila, baik dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif, bahkan di dalam dunia kampus mulai berkurang menyelenggarakan seminar yang berbicara tentang Pancasila, kondisi ini sangat memprihatinkan secara akademis.

Mendamaikan politik identitas dan modernitas dengan semangat kearifan lokal maka sebagai konsekuensi logis akan muncul pemikiran dan cara untuk penguatan eksistensi Pancasila sebagai pilar kuat “kesaktian Pancasila”. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia adalah akumulasi dari interaksi nilai norma dan etika dari jajaran tonggak kearifan lokal yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pancasila adalah ungkapan kata pada setiap sila tidak dapat dirubah karena perdebatan secara akademis tentang masalah ini sudah berakhir dengan satu consensus nasional.
2. Multi tafsir Pancasila menjadi sangat terbuka guna menyesuaikan kondisi terakhir.

3. Pilar kata “kesaktian Pancasila” dapat dimulai dari kampus karena di wilayah kampus diuji setiap pemikiran.

4. Politik identitas hanya satu dan tidak boleh bergeser yaitu “Bhinneka Tunggal Ika”.

Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno (Presiden pertama) mengumandangkan hari lahirnya Pancasila yang sebelumnya didahului dengan terbentuknya “BPUPKI” kemudian badan ini membentuk panitia kecil yang bertugas untuk merumuskan Pancasila. Panitia kecil tersebut disebut panitia Sembilan yang terdiri dari :

1. Soekarno
2. Mohammad Hatta
3. Abikoesno Tjokrosoejoso
4. Agus salim
5. Wahid Hasjim
6. Mohammad Yamin
7. Abdul Kahar Muzakir
8. Mr. AA. Maramis
9. Achmad Soebarjo

Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian dicantumkan pada mukadimah UUD 1945 kemudian disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, maka sejak saat itu Pancasila merupakan bagian dari simbol identitas bangsa Indonesia yang harus dipertahankan dan dibentengi. Pencapaian kesepakatan Bersama Pancasila sebagai dasar

negara adalah prestasi besar para pejuang kemerdekaan harus dijaga dan dilestarikan.

“Mikul Dhuwur, Mendem Jero” adalah pribahasa Jawa yang secara umum dapat diartikan sebagai sikap memaafkan dan menghapus kesalahan pada roda perjalanan berbangsa dan bernegara yang pernah dilakukan oleh para pejuang bangsa karena beliau semua bukan malaikat yang tanpa kesalahan serta mengangkat dan mengingat jasa baik dan perjuangan para “founding fathers”. Oleh sebab itu, ada istilah bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghormati jasa para pahlawannya. Pada konteks pemikiran tersebut, Universitas Krisnaswipayana menyatakan diri sebagai kampus benteng Pancasila dengan alasan :

1. Pancasila adalah karya besar para pendiri bangsa Indonesia sehingga dapat mengumandangkan kemerdekaan
2. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia menyatukan semua perbedaan.
3. Universitas Krisnadwipayana adalah kumpulan dari para intelektual yang mencetak pemimpin bangsa
4. Pancasila harus dijaga kemurniannya oleh generasi muda bangsa terutama oleh civitas akademika Universitas Krisnadwipayana

C. TINJAUAN HISTORIS UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA.

1. GAMBARAN UMUM.

Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) didirikan atas tuntutan kebutuhan masyarakat (bangsa) Indonesia dalam mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, berdasarkan Pancasila dan

Undang-undang Dasar 1945 yang perwujudannya melalui Pembangunan Nasional Indonesia.

Sebagai salah satu Universitas swasta tertua yang berdiri sejak tahun 1952, selayaknya UNKRIS telah menjadi sebuah Universitas swasta yang maju dan terdepan di antara Universitas-universitas swasta yang lain, namun kenyataannya UNKRIS belum dapat meraih prestasi tersebut, karena dalam perjalanannya UNKRIS banyak mengalami pasang dan surut, yang disebabkan selain adanya persaingan di antara perguruan tinggi yang lain, juga karena adanya konflik intern yang terjadi di UNKRIS.

Pada awalnya UNKRIS pernah mengalami zaman kejayaan, dimana jumlah mahasiswanya begitu banyak dan calon mahasiswa baru yang ingin melanjutkan studinya di UNKRIS meningkat sangat tajam, bahkan sampai-sampai UNKRIS tidak mampu lagi untuk menampungnya, hal ini menandakan kepercayaan masyarakat terhadap UNKRIS sangat tinggi.

Seiring berjalannya waktu, keberadaan dan peran serta UNKRIS tidak lepas dari perubahan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, jika UNKRIS tidak mau tertinggal, maka UNKRIS harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Sekiranya UNKRIS tetap berpegang pada komitmennya, yaitu untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui bidang pendidikan tinggi, maka UNKRIS harus bekerja keras agar tetap jaya dan tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat, karena kelangsungan hidup UNKRIS tergantung pada kepercayaan masyarakat. Pengalaman yang ada dapat dijadikan cambuk bagi UNKRIS untuk mencapai kemajuan sebagaimana yang diharapkan.

Peran serta para Alumni UNKRIS juga sangat besar di dalam pembinaan dan pengembangan UNKRIS, terbukti para Alumni UNKRIS yang telah sukses dan berhasil di Lembaga Pemerintahan maupun Swasta masih bersedia menjalankan amanah menyumbangkan tenaga dan pemikirannya menjadi Pengurus Yayasan UNKRIS serta memberikan kontribusi dana bagi perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Kampus UNKRIS, kebersamaan dan kepedulian para Alumni inilah yang membuat bangga sebagai warga UNKRIS. UNKRIS ke depan harus lebih baik dari pada UNKRIS yang sekarang.

2. SEJARAH SINGKAT UNKRIS.

a) Arti Krisnadwipayana.

Krisnadwipayana adalah nama seorang resi atau bagawan yang memiliki ilmu pengetahuan lahir batin yang tinggi. Krisnadwipayana dalam padepokannya di Gunung Supto Argo mendidik Keluarga Bharata menjadi Satria Pinandita yaitu insan illahi yang berwatak, berbudi luhur, cerdas, tekun, terampil dan bersemangat pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negara.

Dalam perwujudannya sekarang, kebesaran namanya diambil dan diabadikan oleh Para Pendahulu/Pendiri UNKRIS sebagai nama Lembaga Pendidikan Tinggi dengan nama “Universitas Krisnadwipayana”

b) Berdirinya Universitas Krisnadwipayana.

Berdirinya UNKRIS dirintis oleh Bapak D. Usman Iman pada bulan Pebruari 1952, dengan membuka konsulat Balai Perguruan

Krisnadwipayana yang berpusat di Bandung. Konsulat tersebut menyelenggarakan kuliah tertulis jurusan hukum, serta membuka beberapa sekolah menengah dan sekolah kejuruan di Kebayoran, Serang, dan Tangerang. Untuk menampung aspirasi pembangunan guna mengisi kemerdekaan, di Kota Bandung didirikan Badan Usaha Rakyat yang dirintis oleh bekas pejuang R.I.. Badan Usaha tersebut antara lain mempunyai program dalam bidang pendidikan dan kesehatan, serta sebagai sarana operasionalnya dibentuk Balai Perguruan Krisnadwipayana.

Balai perguruan tersebut terus berkembang, kemudian dibentuk Perguruan Tinggi Krisnadwipayana dengan Fakultas Hukum dan Ekonomi yang mengadakan kuliah lisan di Jalan Ambon No. 3 Bandung. Selain kuliah tertulis yang diikuti oleh tidak kurang dari 1200 mahasiswa dari segenap pelosok tanah air seperti Ujung Pandang, Banjarmasin, Denpasar, Medan, Palembang, Surabaya, Semarang, dan Kupang.

Pada beberapa kota diadakan Perwakilan/Konsulat yang menampung/menyalurkan kuliah-kuliah tertulis tersebut. Beberapa Konsulat tersebut kemudian ada yang menjadi embrio Perguruan Tinggi di kota/daerah yang akhirnya ada yang berkembang menjadi Universitas Negeri.

Atas desakan para mahasiswa, didirikan Akademi Hukum dan Sosial Krisnadwipayana di Jakarta yang memberikan kuliah secara lisan. Akademi tersebut yang dibuka resmi pada tanggal 1 April 1952 dengan diikuti oleh sekitar 300 mahasiswa.

Untuk kantor dan ruangan kuliah menyewa di gedung Adhuc-staat, yang saat ini menjadi Kantor BAPPENAS.

Pada tanggal 1 Juli 1952 Akademi Hukum dan Sosial diubah bentuknya menjadi Perguruan Tinggi dan namanya diubah menjadi Fakultas Hukum/Sosial. Pada tanggal 1 Juli 1952 pula didirikan Fakultas Ekonomi, yang sebagian perkuliahannya menyewa gedung Hygiene Universitas Indonesia. Nama Perguruan Tinggi kemudian diubah menjadi Universitas yang kemudian menjadi Universitas sesuai dengan ketentuan Pemerintah.

Universitas Krisnadwipayana membuka satu Fakultas lagi pada tahun 1956, yakni Fakultas Ilmu Tata Praja, yang pada akhirnya setelah mengalami beberapa perubahan nama, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/85 diubah namanya dari Fakultas Ilmu Administrasi Negara dan Niaga menjadi Fakultas Ilmu Administrasi (FIA).

Guna memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor: 22 tahun 1961 dan untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat, maka pada tahun 1963 Universitas Krisnadwipayana membuka lagi satu fakultas, yakni Fakultas Teknik.

Tahun 1995 Fakultas Ekonomi UNKRIS telah membuka Jurusan Akuntansi melalui SK DIKTI Nomor: 306/DIKTI/Kep/1995 tanggal 20 Juni 1995 yang kini telah terakreditasi.

Pada saat ini UNKRIS telah mempunyai Program Pascasarjana Strata-2 (S2), disamping sedang mengusahakan pengembangannya dengan membuka program Strata-3 (S3). Adapun Program

Pascasarjana S2 terdiri dari Program Magister Manajemen berdiri tahun 1993, kemudian pada tahun 1996 berdiri Program Magister Hukum, tahun 1998 berdiri Program Magister Ilmu Administrasi, dan Magister Teknik yang berdiri tahun 2004 dan program Doktor pada Fakultas Hukum.

c) Berdirinya Yayasan UNKRIS.

Pada waktu berdirinya UNKRIS tidak didirikan oleh suatu Yayasan. Sesuai dengan kebutuhan dan desakan Persatuan Mahasiswa Krisnadwipayana yang diketuai oleh Bapak Soeprabowo, serta untuk lebih memantapkan usaha dalam penyelenggaraan Universitas, maka pada tahun 1954 dibentuk Yayasan yang diberi nama “Yayasan Universitas Krisnadwipayana”, yang disahkan dengan Akte Notaris Sie Kwan Djioe dengan Nomor 134 tanggal 29 Januari 1954.

Terbentuknya Yayasan belum dapat menambah kelancaran jalannya Universitas, karena dalam usaha mencari sumber pemasukan keuangan belum dapat ditemukan jalan yang tepat. Akhirnya pada bulan Oktober 1954 dibentuk sebuah Badan Usaha Yayasan dengan tugas mengurus rumah tangga dan tata usaha Universitas.

3. POTRET UNKRIS.

a) Mahasiswa.

Maju mundurnya Perguruan Tinggi Swasta pada umumnya sangat tergantung dari jumlah mahasiswa, karena mahasiswa merupakan sumber dana utama penggerak kelangsungan serta pengembangannya. Demikian pula halnya dengan UNKRIS masih

sangat tergantung dari penerimaan mahasiswa untuk membiayai semua biaya operasionalnya.

Pada awal berdirinya sampai dengan tahun 1980 UNKRIS berorientasi pada kuliah malam hari dengan menerima mahasiswa yang berlatar belakang karyawan/pegawai negeri atau swasta. Tiap-tiap Fakultas masih mengontrak gedung SMU sekitar daerah Jakarta Pusat. Kendati demikian UNKRIS menduduki peringkat ke 5 besar PTS di Jakarta karena tiga Fakultas program studinya mendapat status disamakan dengan Perguruan Tinggi Negeri sementara Fakultas Teknik masih berstatus diakui. Setelah UNKRIS dipusatkan di Jatiwaringin terjadi pergeseran mahasiswa, yaitu dari mahasiswa malam ke pagi, sehingga mulai tahun 1987 praktis jumlah mahasiswa menurun sampai tahun 1995. Hal ini disebabkan antara lain :

- Para karyawan/pegawai swasta ataupun Negeri tidak dapat mengikuti kuliah pagi.
- Tumbuhnya PTS baru disertai persamaan status dari program studinya, sehingga pilihan masyarakat semakin luas.
- Lokasi UNKRIS yang kurang strategis, sehingga banyak mahasiswa memilih tempat yang relatif dekat dengan domisili atau tempat kerja mereka; dan
- Pasaran UNKRIS semakin kecil, karena diambil oleh PTN atau PTS lain yang dalam beberapa hal keadaannya relatif lebih baik.

UNKRIS pernah mengalami "*booming period*", yaitu pada tahun 1987/1988 dengan total mahasiswa 14.153 orang (FE 9825 mahasiswa,

FH 2200 mahasiswa, FIA 1453 mahasiswa dan FT 675 mahasiswa). Tahun 1988 jumlah mahasiswa mulai turun, kemudian turun drastis pada tahun 1996/1997 dengan jumlah mahasiswa 3521 orang. Turunnya jumlah mahasiswa disebabkan antara lain citra UNKRIS semakin menurun karena adanya konflik internal, disamping banyaknya PTS yang telah disamakan program studinya.

Untuk meningkatkan jumlah mahasiswa, UNKRIS membuat beberapa terobosan-terobosan dan kebijakan-kebijakan baru antara lain :

- Menjalin kerjasama dengan Kabid SMU Kanwil Departemen Pendidikan dan Pimpinan SMU untuk mempermudah penyebaran informasi berkala ke SMU khususnya di wilayah Jabotabek.
- Menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta untuk menampung kelangsungan jenjang pendidikan, pengembangan pola *“in house education”*, pemagangan serta kerjasama laboratorium;
- Menjalin kerjasama dengan PTN, Pemerintah dan Perusahaan Industri sebagai sumber daya intelektual yang dapat diperbantukan ke UNKRIS;
- Memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi dibidang akademik melalui program Peningkatan Prestasi Akademik dari Departemen Pendidikan Nasional;
- Memberi beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang olah raga oleh UNKRIS sendiri; dan

- Pengembangan atribut UNKRIS melalui program penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan program kemahasiswaan dengan maksud agar UNKRIS lebih dikenal oleh masyarakat.

Dengan terobosan-terobosan dan kebijakan-kebijakan baru yang diambil tersebut ternyata berhasil menambah jumlah mahasiswa, yaitu tahun 1998/1999 jumlah mahasiswa 4976 orang, tahun 1999/2000 berjumlah 5775 orang, pada tahun 2000/2001 mencapai 6873 orang, dan pada tahun 2001/2002 berjumlah 6656 orang.

Kenaikan mahasiswa tahun 2000/2001 disebabkan presentasi kenaikan mahasiswa di Fakultas Teknik lebih cepat dibandingkan kenaikan di Fakultas lainnya. Mahasiswa FT berjumlah 3390 orang (40%) disusul FE 1856 orang (27%), FH 1100 orang (16%) dan FIA 527 orang (8%). Sedangkan populasi mahasiswa di FT sendiri terbagi lagi dalam beberapa jurusan, yaitu Mesin 1439 orang (42%), Elektro 754 orang (22%), Arsitektur 493 orang (15%), Sipil 303 orang (9%), Industri 260 orang (8%) dan Planologi 141 orang (4%).

Mahasiswa UNKRIS kembali mengalami penurunan pada tahun 2002/2003 yang berjumlah 4217, bahkan tahun 2003/2004 mahasiswa UNKRIS hanya berjumlah 3232 orang. Hal ini disebabkan karena UNKRIS tidak pernah lepas dari konflik intern yang telah menyita waktu, tenaga, pikiran serta dana dari pihak manajemen, sehingga usaha pengembangan mutu akademik dan peningkatan jumlah mahasiswa menjadi sedikit terlambat. Padahal persaingan dewasa ini semakin ketat dengan menjamurnya PTS-PTS baru disamping PTS yang

ada telah mampu mengembangkan diri karena telah dapat menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan dan jumlah mahasiswa seyogyanya dapat dijadikan dasar penetapan kebijakan oleh pengambil keputusan, baik yang berhubungan dengan penetapan ruangan serta daya dukung dosen maupun tenaga administrasi beserta perangkat-perangkatnya, apakah perlu dilakukan pengurangan atau penambahan.

b) Struktur Kepemimpinan.

Sumber Daya Manusia merupakan prioritas utama dalam memasuki era globalisasi, maka UNKRIS sebagai perguruan tinggi terkemuka berupaya untuk memantapkan jati diri dan kualitas lulusannya serta tetap "survive" di tengah persaingan pendidikan tinggi.

Dalam mewujudkan upaya cita-cita dan harapan tersebut, UNKRIS telah memilih tenaga-tenaga yang dinamis yang memiliki idealisme tinggi, dan siap meluangkan waktu serta tenaga untuk kemajuan UNKRIS.

c) Dosen.

Pengangkatan Tenaga Akademik (dosen) dilakukan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan ratio antara jumlah dosen dan mahasiswa.

Dosen UNKRIS sampai dengan tahun 2004 berjumlah 196 orang dosen tetap, 12 diantaranya adalah pegawai Negeri sipil yang dipekerjakan, sedangkan dosen tidak tetap berjumlah 301 orang, yang

tersebar pada 4 (empat) Fakultas dan Program Pascasarjana di lingkungan UNKRIS.

d) Karyawan.

Komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan sangat erat kaitannya dengan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta terhadap penerapan sistem dan manajemen Perguruan Tinggi di UNKRIS.

Melihat kenyataan yang ada masih perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan kemampuan SDM yang ada.

e) Prestasi Bidang Kemahasiswaan.

Prestasi yang berhasil diraih UNKRIS di bidang kemahasiswaan antara lain adalah :

1) UKM Merpati Putih:

- Juara Umum I Kejuaraan Pencak Silat antar mahasiswa se-jabotabek, September 2000;
- Juara Umum I Kejuaraan Pencak Silat antar mahasiswa se-DKI Jakarta, Maret 2001;

2) UKM Sepak Bola :

- Tahun 1989 Juara I Turnamen STIA LAN;
- Tahun 1989 Peringkat IV Liga Mahasiswa se DKI;
- Tahun 1992 Juara I Turnamen Universitas Nasional;
- Tahun 1999 Juara I Turnamen IKKM Cup;
- Tahun 2000 Juara I Turnamen MH Thamrin Cup;
- Tahun 2000 Juara III Liga Mahasiswa se DKI;

- Tahun 2001 Juara I Turnamen Sepak Bola antar Perguruan Tinggi se-Bekasi;
- Tahun 2002 Juara I Turnamen ITI Cup.

3) Unit Kegiatan Bola Basket :

- Juara II Turnamen Kawabi Lapas Cipinang Komite Aktivitas Warga Binaan, Agustus 2000.

4) Unit Kegiatan Bola Volley :

- Juara III Kejuaraan Bola Voli Pantai antar Perguruan Tinggi se-Propinsi DKI Jakarta, September 2001.

5) UKM Taekwondo:

- Juara III Kejuaraan antar mahasiswa se-Jawa-Bali yang diselenggarakan di Yogyakarta, September 2000.
- Juara Umum I Kejuaraan Cabang se-Jakarta Timur, Februari 2001.
- Atlet Terbaik Putri Kejuaraan Taekwondo antar Perguruan Tinggi se-Jawa-Bali, UNS-Challegge, Maret 2002.

6) Fakultas Hukum :

- Juara I Lomba Peradilan Semu antar Perguruan Tinggi se-Jabotabek, Juni 2004.
- Juara I Lomba Peradilan Semu antar Perguruan Tinggi se-Jabotabek, Jabar dan Banten, Desember 2004.

7) Mahasiswi FH, Arifiani Budiarti, mewakili UNKRIS ke Soul, Korea dalam rangka pertukaran pemuda, Januari 2003.

f) Aset.

Universitas Krisnadwipayana menempati lahan milik sendiri yang terletak di kawasan Jakarta Timur dengan luas \pm 12 ha, yang dipergunakan untuk :

I. Bangunan/Gedung :

1. Gedung Blok A, 2 lantai. (Sekretariat Fakultas Ilmu Administrasi).
2. Gedung Blok B, 2 lantai. (Rektorat & Program Pascasarjana MM).
3. Gedung Blok C, 2 lantai. (Unit Kegiatan Mahasiswa)
4. Gedung Blok D, 2 lantai. (Prog. Pascasarjana MIA & Perpustakaan)
5. Gedung Blok E, 4 lantai. (Fakultas Ekonomi).
6. Gedung Blok F, 4 lantai. (Fak. Hukum & Prog. Pascasarjana MH).
7. Gedung Blok G, 4 lantai. (Fakultas Teknik).
8. Gedung Blok H, 4 lantai. (Laboratorium Fakultas Teknik).
9. Gedung Pendopo, 2 Lantai.
10. Sarana Ibadah (Masjid).
11. Gedung Koperasi.
12. Gedung Poliklinik.
13. Gedung Humas UNKRIS.
14. Kantin.

II. Lapangan Olah Raga (Sepak Bola, Basket, Bulu Tangkis dan Volley).

III. Lapangan Parkir.

Disamping itu UNKRIS juga memiliki sarana transportasi yang dipergunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi, akademik maupun kemahasiswaan, berupa : 3 Armada Bus, 8 kendaraan dinas roda empat dan enam sepeda motor. Berdasarkan penilaian Bank Artha Graha pada bulan Agustus 2004 seluruh Aset UNKRIS bernilai \pm 100 Milyar.

g) Alumni.

Sampai dengan Pertengahan tahun 2004, UNKRIS telah menghasilkan puluhan ribu alumni yang tersebar di berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta, bahkan manca negara, disamping itu ada beberapa alumnus yang telah menjadi tokoh masyarakat.

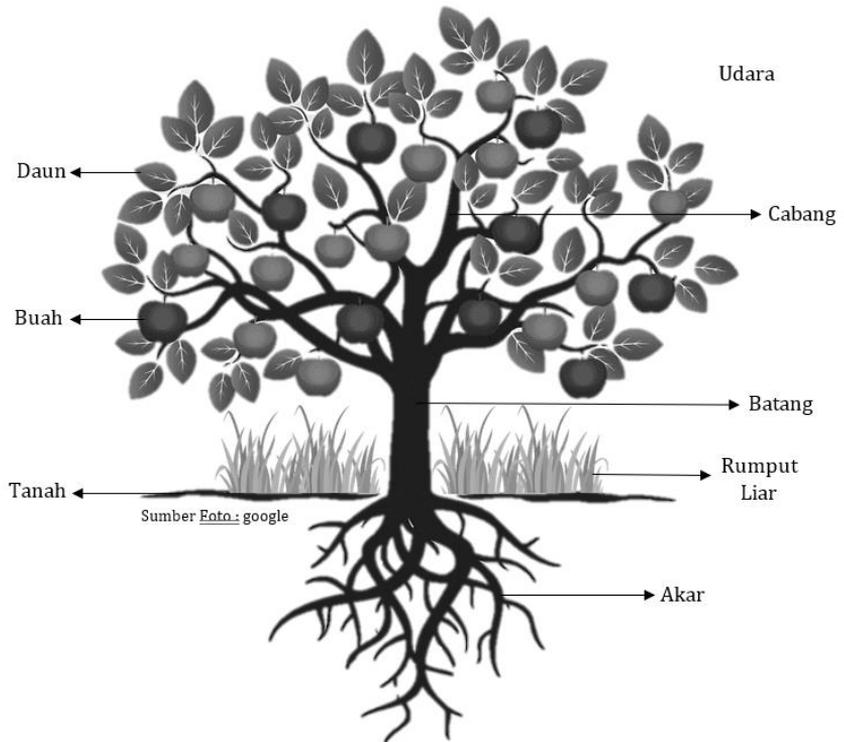
Oleh karenanya potensi Alumni perlu digali dan diberdayakan agar dapat turut serta memikirkan demi pembinaan dan pengembangan UNKRIS menuju ke arah sebagaimana yang diharapkan bersama. Sehubungan dengan hal itu pada akhir tahun 2000, telah dilakukan usaha untuk menata dan mengaktifkan kembali Wadah kegiatan Ikatan Keluarga Besar Alumni (IKEBA) UNKRIS.

“Stakeholders” UNKRIS adalah para pejuang akademis dengan mengorbankan segenap tenaga, pemikiran dan dana untuk pengembangan Kampus Universitas Krisnadwipayana yang secara nasional dapat dikatakan bagian dari program mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tidak berlebihan jika saat ini UNKRIS membuka identitas sebagai *“Kampus Benteng Pancasila”*. Artinya, seluruh aktivitas kampus

berpedoman pada Tri Dharma perguruan tinggi dengan tetap melakukan pendalaman pemahaman dan multitafsir Pancasila.

D. NATION CHARACTER BUILDING

Gambar 12
Pohon Pendidikan



Keterangan Gambar :

- Akar : adalah meliputi iman dan taqwa, budaya dosen dan kearifan lokal
- Tanah : adalah komunitas masyarakat, pemerintah dan civitas

akademika

- Batang : adalah etos dan etis yang meliputi karakter, kepribadian, kesabaran, cita-cita
- Cabang : adalah keterampilan, kecerdasan
- Daun : adalah kemampuan bekerjasama untuk persatuan dan kesatuan
- Buah : adalah peradaban yang unggul dan kemakmuran
- Udara : adalah factor eksternal lingkungan Pendidikan
- Rumput liar : adalah hambatan Pendidikan

Nation Character Building dalam negara kesatuan republic Indonesia berdasarakan Pancasila dan UUD 1945 adalah pembangunan karakter bangsa yang merupakan bentuk dari akumulasi usaha secara “sustainable” mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan ideologi negara menuju masyarakat yang adil dan Makmur. Pada posisi ini dibutuhkan peran serta Pendidikan yang secara kelembagaan merupakan bagian tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional untuk kehidupan bangsa yang beriman dan bertakwa, Tangguh dan kompetitif serta berbudi luhur. Identitas karakter bangsa dibangun dari tiga unsur yaitu :

- a. Tanggap atau kecerdasan
- b. Tanggon atau kepribadian
- c. Tringginas atau kesemaptaan

Proses Pendidikan itu tidak bekerja di ruang hampa, tetapi Pendidikan berlangsung di tengah kehidupan masyarakat, oleh sebab itu proses

Pendidikan harus melihat sosiologi masyarakat yang berkembang dengan cepat, agar hasil didik nantinya tidak “jauh panggung dari api”.

Analogi “Pohon Pendidikan” dibangun atas dasar kesadaran proses belajar mengajar pada dunia Pendidikan itu tidak berdiri sendiri, artinya ada keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia kerja atau pengusaha, budaya dan peradaban yang terus berkembang cepat, ada paham agama, kearifan lokal, demikian juga ada faktor penghambat atau gangguan dalam proses Pendidikan yang datangnya dari unsur radikal kanan dan radikal kiri, untuk itu diperlukan kesabaran dan ketangguhan semua pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan Lembaga Pendidikan. Output atau lulusan Pendidikan harus bisa diterima oleh masyarakat dan dunia kerja untuk itu harus ada sinkronisasi kurikulum Pendidikan. Demikian juga Lembaga Pendidikan, harus mempunyai reputasi dan legitimasi sehingga Lembaga Pendidikan dapat dengan mudah menerima dukungan masyarakat serta animo peserta didik akan meningkat pesat.

Universitas Krisnadwipayana mengambil peran dalam rangka “Restorasi Pancasila” dalam hubungan timbal balik antara masyarakat dan dunia Pendidikan. Analisis tersebut sangat penting karena ibarat air laut adalah masyarakat sedangkan ikannya adalah Lembaga Pendidikan. Rumusan peran tersebut meliputi :

- a. UNKRIS harus mampu menyiapkan lulusan atau “Abituren” sebagai generasi penerus untuk melanjutkan kepemimpinan nasional dengan mengedepankan pembangunan masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung di setiap Sila Pancasila.

- b. UNKRIS mendorong terciptanya konsep analisis untuk memahami perubahan perilaku masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan cepat, agar perubahan tersebut tidak berdampak negative atau bahkan menyimpang dari rambu-rambu Pancasila.
- c. Pada konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian pada masyarakat. UNKRIS mampu memberikan bekal atau melakukan “Ejukasi” pada masyarakat untuk memasuki perubahan yang dinamis dimasa depan di tengah budaya global.
- d. Analisis terhadap masyarakat ekonomi dan masyarakat pengetahuan disiapkan oleh UNKRIS sekaligus menanamkan pemahaman dinamis pada multi tafsir Pancasila sebagai ideologi terbuka agar tingkat pemahaman msyarakat tidak bergeser dari kemurnian Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafat hidup bangsa yang mementingkan program pembangunan nasional di atas kepentingan pribadi dan di atas kepentingan golongan.
- e. UNKRIS membangun “Pemikiran Sosiologis” dengan menitik beratkan pada perkembangan masyarakat ekonomi dan masyarakat pengetahuan dengan memperhatikan setiap perubahan karakternya sesuai dengan perubahan lingkungan strategisnya.
- f. UNKRIS memberikan “*Guidance*” atau panduan untuk menetapkan orientasi yang relevan antara pemahaman Pancasila, perkembangan masyarakat dan kondisi riil Lembaga Pendidikan yang serasi dengan dinamika kehidupan kampus.

g. UNKRIS secara aktif menjaga terjadinya distorsi dan disorientasi pemahaman Pancasila, disinilah letak posisi “UNKRIS sebagai kampus benteng Pancasila”.

h. Guna menjaga “marwah” Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, UNKRIS secara aktif mengambil peran secara porposional untuk :

1) Menumbuh kembangkan tata nilai kemanusiaan yang harmonis.

2) Mendorong terciptanya tata kelola masyarakat yang beriman dan bertakwa serta berbudi luhur.

3) Membangun komunikasi aktif antara pemerintah, masyarakat dan Lembaga perguruan tinggi sehingga tercipta ruang dan akses saling menguatkan dalam hubungan “mutualisme” sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4) Menjaga semangat pengabdian civitas akademika UNKRIS untuk tetap pada koridor semangat pengabdian pada bangsa dan negara serta terhindar dari “*Self Interest*” yang mementingkan keuntungan pribadi dan terhindar dari kasus korupsi serta pelecehan seksual di lingkungan kampus serta lingkungan sekitar kampus.

i. Menyatukan kondisi masyarakat yang terbelah secara nyata terutama saat menjelang pemilu, isu yang saat ini dikembangkan lewat media sosial yang berdampak pada terbelahnya rasa kesatuan dan

persatuan bangsa, ada seputaran :

- 1) Berita hoax atau berita bohong.
- 2) Buzzer atau relawan dari kelompok tertentu yang melempar isu bola api tentang paham radikal.
- 3) Barisan sakit hati dari para tokoh atau pejabat yang tersingkirkan dari panggung pemerintah.
- 4) Sparatis yang terus bergerak dengan berbagai isu di Papua yang melebar sampai ke ibu kota negara.
- 5) Isu hutang negara yang terus meningkat dan masuknya TKA Cina.
- 6) Harga sembako yang tidak terkontrol sehingga merugikan masyarakat secara luas.

Pada posisi ini UNKRIS harus tampil untuk mendamaikan suasana batin yang terpecah.

j. Peran UNKRIS pada para mahasiswanya dengan menyadarkan bahwa dinamika masyarakat disekitar Lingkungan kampus bahkan masyarakat secara luas tumbuh dan berkembang dengan cepat dan para mahasiswa harus memahami hal tersebut, agar tidak tertinggal dari setiap dinamika sosial pada level nasional dan global, yang meliputi :

- 1) Perkembangan tuntutan masyarakat yang berkaitan dengan pemerataan hasil pembangunan dengan semangat “Keadilan Sosial”.
- 2) Tuntutan dari dunia kerja pada perusahaan manufaktur dengan teknologi digital.

3) Benturan peradaban antara timur dan barat yang tidak menutup kemungkinan berdampak friksi yang berkelanjutan.

4) Peredaran obat-obatan terlarang dan narkoba yang terus mengganggu kehidupan generasi muda bangsa serta dampak negatif narkoba yang dapat menurunkan potensi akademis di kalangan mahasiswa dan generasi penerus calon pemimpin bangsa.

k. *“Life Style”* atau gaya hidup masyarakat terus berkembang terutama gaya hidup generasi milineal, sehingga materi ajar terutama yang berkaitan dengan Pancasila harus diolah sedemikian rupa sehingga generasi muda tertarik, pihak UNKRIS harus membentuk tim perumus naskah inovatif yang memadukan antara multi tafsir Pancasila sebagai falsafah hidup dan tuntutan perkembangan budaya masyarakat serta kajian empiris akademis yang mengedepankan telaah ilmiah, dengan demikian *output* nyata dari Universitas Krisnadwipayana menjadi acuan kampus-kampus lain dan sekaligus sebagai acuan pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang bersifat *“sustainable”* atau berkelanjutan, sehingga setiap perubahan dinamis di masyarakat mendapatkan respon positif, melalui kegiatan riset atau penelitian kemudian hasilnya dimanifestasikan saat pelaksanaan program pengabdian masyarakat, artinya pada fase ini secara otomatis pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berjalan dengan baik.

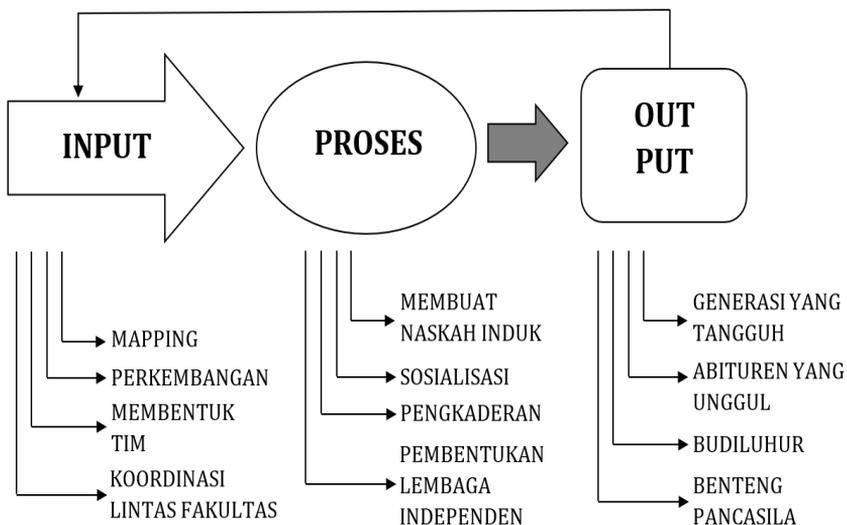
l. Secara komprehensif UNKRIS perlu merumuskan peran dan fungsi kampus guna mengantisipasi dan merespon dari setiap gejala atau

fenomena baru yang terus berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga obyek diskusi di lingkungan kampus tidak tertinggal dari tuntutan masyarakat. Perkembangan kehidupan masyarakat meliputi dua dimensi yaitu bersifat positif dan negatif. Merespon perkembangan positif dengan menggunakan tolak ukur kajian akademis. Ada respon yang perkembangannya negatif yaitu :

- 1) Konflik komunal
- 2) Gejala integrasi
- 3) Friksi yang bersifat vertikal dan horizontal
- 4) Gejolak harga kebutuhan pokok
- 5) Benturan kepentingan karena pemilu atau pilkada dan lain-lain

Pihak kampus harus menggunakan pendekatan empiris dan berkoordinasi dengan aparat terkait guna merumuskan solusi terbaik dalam upaya “mitigasi risiko” di lapangan.

Gambar 13
Alur Program UNKRIS sebagai Benteng Pancasila



Setiap cita-cita yang besar harus dimulai dengan melihat dan orientasi atau mapping pada lingkungan taktis dan strategis yang meliputi :

- a. Mendefinisikan potensi dan perkembangan masyarakat pada skala lokal, nasional dan global.
- b. Analisis terhadap kecenderungan positif dan negative yang berkembang di masyarakat terutama kondisi mahasiswa saat ini.
- c. Melihat dan mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terutama terkait dengan Pancasila.

Perencanaan strategis yang secara akumulatif mempertemukan semua kepentingan dari “*stake holders*” sehingga semua pihak merasa terlibat dan mengambil bagian secara proporsional yang meliputi unsur :

- a. Civitas akademika UNKRIS
- b. Aparat terkait
- c. Masyarakat

Perencanaan yang baik dengan melibatkan semua unsur secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi positif proporsional sesuai dengan peran fungsi masing-masing.

Pembentukan tim khusus yang membidangi peran dan fungsi UNKRIS sebagai benteng Pancasila mutlak diperlukan agar jelas tugas pokok masing-masing siapa dan berbuat apa atau tupoksinya dapat terukur secara kuantitatif dan dapat dilakukan evaluasi, secara kelembagaan dan harus jelas jalur komando pertanggung jawabannya serta target yang harus dicapai pada kurun waktu tertentu dengan melakukan evaluasi rutin maka optimalisasi hasil dapat terukur.

Koordinasi lintas fakultas harus mencerminkan kerjasama harmonis dan ada keterwakilan tiap fakultas didalam tim, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Administrasi harus mempunyai kontribusi dalam kerja kelompok, sehingga sinergisitas dapat terwujud dengan semangat bersama mewujudkan UNKRIS sebagai benteng Pancasila.

Bentuk nyata Kerjasama antar fakultas yaitu :

- a. Tiap fakultas membentuk timkecil untuk menyuarakan aspirasinya.
- b. Menghadiri rapat koordinasi dalam tim UNKRIS untuk membuat perencanaan bersama.
- c. Membuat tim analisis untuk memantau dan mengantisipasi setiap perkembangan di lingkungan kampus dan tim pantau perkembangan masyarakat pada tataran lokal, nasional dan global.
- d. Membangun Kerjasama inovatif dan dinamis dengan kelompok mahasiswa pada UKM, Lembaga Penelitian Kampus serta Kerjasama secara kelembagaan dengan Karang Taruna dan “Krisna Warga” yang berorientasi pada implementasi nyata Pancasila.

Setiap tim kecil dari unsur fakultas membuat naskah dengan menitik beratkan pada analisis kondisi masyarakat secara kekinian dengan dasar argument bahwa lingkungan strategis terus menerus berubah berkembang dan tumbuh mengikuti perubahan peradaban global, untuk itu paling tidak naskah yang bersumber dari pemikiran tiap fakultas diremajakan persatu tahun sekali yang disusun menjadi “Naskah Induk” kemudian dari naskah induk disusun Kembali oleh tim dari Universitas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perubahan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Aspirasi dari masyarakat intelektual yang bersumber dari masyarakat kampus selain UNKRIS
- c. Tuntutan masyarakat sesuai dengan perkembangan kontemporer.

Dengan demikian UNKRIS secara simultan mengeluarkan konsep baru tentang “Kampus sebagai Benteng Pancasila”.

Sosialisasi secara berjenjang dan bertingkat “sustainable” atau berkelanjutan terhadap ide pokok dan mendasar tentang tekad kuat “UNKRIS sebagai benteng Pancasila” dengan selalu membuka ruang sumbangsih pemikiran dari semua unsur generasi muda bangsa yang bersumber dari kalangan :

- a. Pemikir dari unsur TNI-POLRI
- b. Kalangan anggota DPR Pusat dan Daerah
- c. Kalangan wartawan - media massa
- d. Kalangan masyarakat intelektual
- e. Unsur lain yang mempunyai perhatian khusus pada eksistensi Pancasila di setiap perkembangan pemikiran para cerdas – pandai atau para intelektual generasi muda bangsa

Sosialisasi secara “sustainable” atau terus menerus mempunyai dua keuntungan besar yaitu Pertama; pendalaman dan pemahaman terhadap Pancasila menjadi semakin baik. Kedua; selama proses sosialisasi mendapatkan saran dan masukan kritis serta koreksi dari proses diskusi yang berjalan, menjadi bahan masukan pematangan konsep “UNKRIS sebagai Benteng Pancasila”.

Pengkaderan merupakan manfaat tidak langsung dari proses perencanaan UNKRIS sebagai benteng Pancasila, karena dalam proses tersebut melibatkan semua unsur dosen dan mahasiswa sehingga ada upaya keterlibatan pemikiran dan pendalaman materi tentang Pancasila, diskusi Panjang tentang pokok masalah apapun akan mendorong seseorang untuk membaca buku referensi, membuka ruang diskusi terbatas, serta sejenak berfikir disepertaran tema tersebut, untuk itu dosen dan mahasiswa UNKRIS yang terlibat langsung atau tidak langsung pada proses pematangan konsep maka secara sadar dan tidak sadar tingkat pemahaman dan pendalaman materi akan berkembang dengan baik, apalagi jika didukung oleh kecerdasan intelektual yang mumpuni, dengan demikian secara tidak langsung UNKRIS melakukan pengkaderan generasi penerus dan pejuang Pancasila. Keterkaitan antara generasi intelektual dan pemikir di lingkungan kampus mutlak diperlukan untuk menjaga kesinambungan alam berpikir di lingkungan kampus, sehingga UNKRIS di masa yang akan datang tidak kekurangan kader untuk memimpin kampus.

Pembentukan Lembaga independent merupakan keseriusan UNKRIS untuk memposisikan diri sebagai benteng Pancasila. Adapun manfaat dari pembentukan Lembaga independent tersebut adalah :

- a. Fleksibilitas tim dari Lembaga independent tersebut untuk melakukan koordinasi pada instansi terkait pada Lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif.
- b. Memudahkan jalan birokrasi internal dan eksternal dengan focus pada tujuan Lembaga yang sudah digariskan.
- c. Inovasi dan kreatifitas tim dapat dilakukan secara optimal.

Tim independent dapat membuka jalur-jalur khusus pada Lembaga lain di luar kampus UNKRIS dan sekaligus membuka ruang diskusi secara formal dan informal dengan harapan semua informasi dan pemikiran di lingkungan kampus dengan cepat dapat terserap oleh tim yang selanjutnya menjadi bahan kajian dan elaborasi di lingkungan internal kampus UNKRIS, dengan demikian Lembaga independent tersebut dapat berkembang eksistensinya di lingkungan kampus dan di luar kampus.

Generasi muda yang tangguh adalah *output* dari proses yang terus menerus yang didorong oleh semangat berbakti pada bangsa dan negara melalui pengajaran di kampus UNKRIS yang memosisikan UNKRIS sebagai kampus benteng Pancasila maka *output* yang diharapkan sebagai “Abituren” yang unggul dengan identitas tersebut :

- a. Lulusan UNKRIS adalah figur generasi yang berjiwa patriot rela berkorban waktu dan tenaga bahkan jiwa dan raga demi tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Generasi muda yang ulet, sabar dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dengan tetap mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- c. Berbudi luhur dengan tetap berpegang teguh pada norma dan etika yang terkandung di dalam Pancasila.
- d. Mampu menjadi motor penggerak dengan inovatif dan kreatif untuk memajukan bangsa dan mencerdaskan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

“Abituren” yang unggul artinya lulusan UNKRIS diharapkan mempunyai potensi :

- a. Tanggap atau cerdas.
- b. Tanggon atau kepribadian yang baik.
- c. Trengginas atau kesemaptaan fisik.

Dengan ketiga potensi tersebut di atas maka setiap lulusan UNKRIS mampu dengan mudah untuk berintergrasi dengan masyarakat dan lebih jauh dari itu potensi lulusan UNKRIS mampu memimpin Lembaga negara dan bagi mereka yang mengambil minat pada dunia bisnis mampu menjadi pelaku ekonomi yang jujur, kreatif serta mampu bersaing dengan pelaku ekonomi pada skala internasional. Pada konteks “UNKRIS sebagai benteng pancasila” maka lulusan UNKRIS mempunyai identitas sebagai berikut :

- a. Beriman dan bertaqwa.
- b. Berbudi luhur dengan mengedepankan kearifan local.
- c. Cerdas – berkualitas secara akademis .
- d. Mampu menjadi pemimpin di lembaga pemerintah dan swasta atau organisasi apapun.
- e. Tidak terpengaruh dari paham Raka atau Radikal Kanan dan Raki atau Radikal Kiri.

Budi luhur adalah sikap, perilaku, ucap dan cara berpikir seseorang yang dicerminkan dari kondisi batin beriman dan bertakwa sehingga membentuk karakter yang baik, selalu mengedepankan tujuan hidup yang baik, memberi manfaat pada orang lain dengan cara yang baik, artinya jika di analogikan pada pohon, maka bibit pohonnya baik, tumbuh di tempat yang baik, daun-daunnya rindang dapat memberikan keteduhan, akar nya

menunjang kedalam bumi dengan kekuatan karakter dan berbunga serta menghasilkan buah-buahan yang lezat dan menyehatkan yang didalam filosofi jawa dikatakan dengan istilah “Migunani”.

Berbudi luhur secara implementasi memberikan manfaat kepada orang lain dan alam sekitarnya dengan tidak menjadi benalu masyarakat. Kondisi ideal seperti ini adalah cita-cita dan harapan dari semua civitas akademika UNKRIS, sehingga Integritas Kampus UNKRIS mendapat respon positif dari masyarakat dan pemerintah.

Undang-undang RI nomor 3 Tahun 2022 tentang HANNEG pasal 9 ayat (1) mengatakan bahwa setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara, spektrum bela negara sangat luas tetapi pada hakekatnya adalah kesediaan warga negara yang termasuk di dalamnya alumni atau “Abituren” UNKRIS untuk turut serta pada usaha bela negara terutama dengan semangat “juang” peran dan fungsi UNKRIS sebagai benteng Pancasila, dengan diwujudkan pada identitas lulusan UNKRIS yang selalu memperjuangkan sikap dan perilaku sesuai dengan citra positif Pancasila. Jiwa patriot dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta menjunjung tinggi “jiwa korsa” atau identitas bersama seluruh bangsa Indonesia menuju cita-cita nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan jika dimaknai lebih dalam lagi adalah setiap “Abituren” UNKRIS harus mampu menjadi generasi “Benteng Pancasila”.

BAB IV

PERSPEKTIF PANCASILA

PENDAHULUAN.

Cara pandang warga negara terhadap berbagai aspek kehidupan dengan menggunakan Pancasila sebagai barometer, artinya butir-butir pemikiran pada tiap sila Pancasila bila dihadapkan dengan kondisi riil dan setiap perkembangan budaya serta isu-isu sosial yang banyak digambarkan oleh media massa yang antara lain sebagai berikut :

1. Azyumardi Azra (2022). Daya rekat semangat kebangsaan pada tataran kehidupan sosial kemasyarakatan tertuma pada saat melakukan kegiatan ritual keagamaan, dalam hal ini agama islam yang merupakan agama mayoritas agama masyarakat, akan tetapi terjadi perilaku “islamfobia” dalam pengertian adanya prasangka negatif dan diskriminasi terhadap islam sehingga majelis umum PBB memperingati setiap tanggal 15 maret untuk memberantas islam fobia.⁹³
2. Hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila merupakan cara pandang seseorang menggunakan dasar pancasila untuk melihat penerapan hak asasi manusia dalam satu wilayah tertentu. Hak asasi manusia merupakan konsekuensi logis manusia sebagai hamba Tuhan yang bertugas sebagai wakil Tuhan atau “Khalifahfil ard” yaitu menjaga

⁹³ Koran Republika, Kamis 21 April 2022 pada kolom resonansi mengatakan bahwa keutuhan integrasi bernegara sangat dipengaruhi oleh KOHESI RELIGION – SOSIAL.

kelestarian alam dan lingkungan, serta hak yang melekat pada diri manusia meliputi antara lain :

- a. Hak memperoleh kehidupan yang layak.
- b. Hak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan.
- c. Hak mendapatkan perlakuan yang baik sebagai warga negara.
- d. Hak untuk memperjuangkan harkat dan martabat sebagai bagian dari masyarakat dalam komunitas tertentu.
- e. Hak berpendapat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial politik.
- f. Hak untuk menjalankan aktifitas ekonomi.
- g. Hak untuk beragama menurut keyakinannya.
- h. Hak untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.
- i. Hak untuk menyalurkan bakat dan kreatifitas tertentu.
- j. Hak untuk memperoleh perlakuan yang adil pada aspek hukum dan lain-lain.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia bersifat universal sebagai konsekuensi status sebagai manusia makhluk Tuhan yang terbaik yang diutus sebagai pemimpin di dunia. Manusia diciptakan sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial untuk itu sebagai makhluk sosial, manusia harus pandai menghormati hak asasi manusia yang lain dalam hubungan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara tanpa membedakan antar ras, agama, suku, adat, istiadat dan lain-lain. Tuhan memerintahkan kepada manusia antar komunitas untuk saling mengenal,

saling membantu dalam perbedaan, itulah kandungan yang terdalam dari makna “Bhinneka Tunggal Ika”.

Hak memperoleh kehidupan yang layak artinya setiap orang dalam status sebagai makhluk individu dan makhluk sosial berhak untuk hidup makmur dan sejahtera lahir dan batin, serta bertempat dimana saja yang mereka suka, sejauh tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak orang lain. Sehingga antar manusia tidak saling merendahkan martabat sebagai manusia atau dalam istilah yang lazim “memanusiakan manusia”. Setiap orang juga dibenarkan untuk mendapatkan kekayaan pribadi, baik kekayaan berupa harta benda melalui usaha yang sah atau kekayaan intelektual yang harus dihormati dan tidak boleh dirampas secara paksa oleh pihak manapun bahkan oleh negara sekalipun. Kekayaan pribadi manusia dilindungi oleh undang-undang, sehingga pemerintah harus hadir untuk melindungi kekayaan pribadi yang dalam hal ini oleh aparat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim melalui pengadilan yang sah dan bermartabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebutuhan hidup yang layak meliputi :

- a. Sandang.
- b. Pangan.
- c. Papan.
- d. Layanan Kesehatan.
- e. Memperoleh Pendidikan.

Lima kebutuhan pokok tersebut jika secara kuantitatif dapat dirumuskan pada besaran angka lebih dari 50% maka dapat dikatakan cukup baik, tetapi jika kondisinya kurang dari 50 % maka dapat dikatakan bahwa hak untuk

memperoleh kehidupan yang layak pada kenyataannya kurang baik atau kurang layak, dengan demikian harus ada kerjasama dinamis antara pemerintah dan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik.

Gambar 14
Kuadran Hak Asasi Manusia



Hubungan antar masyarakat dimulai dari tingkat individu menjadi keluarga kecil kemudian menjadi komunitas satu kampung kemudian membentuk satu desa, menjadi satu kota dan terakhir menjadi satu komunitas negara, komunikasi antar negara yang berbeda jauh di lain benua membentuk perikatan organisasi internasional. Pada posisi ini terbentuklah suatu negara dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya wilayah dan penduduk.
- b. Adanya pemimpin dan regulasi.

- c. Adanya bentuk pemerintahan dalam batas-batas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- d. Adanya pengakuan dari negara lain.

Pemahaman terhadap hak asasi manusia untuk kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat tidak dibenarkan untuk menghasut, melakukan fitnah dan diskriminasi rasial atau budaya sehingga dapat memecah belah semangat persatuan bangsa, artinya secara spesifik dapat dikatakan bahwa jangan mengatas namakan hak asasi manusia dapat berbicara dan bertindak secara liar sehingga dapat mendiskresitkan agama tertentu, suku dan adat istiadat yang berbeda, kondisi ini dapat berdampak pada timbulnya sikap ketersinggungan nasional dan akan berakhir kerusuhan, artinya secara khusus harus ada penekanan implementasi hak asasi manusia pada satu komunitas tertentu tidak boleh melanggar garis batas kepatuhan dan kesopanan atau norma etika komunitas yang lain. Dalam filosofi jawa dikatakan dengan istilah “tepo seliro” atau tenggang rasa dengan menjaga perasaan orang lain.

Secara kronologis untuk pemetaan atau mapping pengkajian terhadap hak asasi manusia yaitu dengan melihat empat kuadran. Untuk garis datar adalah “X” yang diartikan sebagai garis perkembangan regulasi pada hak asasi manusia dan sumbu vertical adalah sumbu “Y” yang mencerminkan “kesadaran” untuk hak asasi manusia pada garis batas tertentu. Pada kuadran pertama mencerminkan kondisi awal yaitu periode kehidupan manusia yang dicirikan :

- a. Hukum rimba artinya siapa yang kuat mereka yang menang tidak ada aturan atau norma hukum, sehingga dapat dikatakan kehidupan

manusia hampir sama dengan hewan mamalia lainnya, pada saat itu bisa disebut “manusia purba” karena belum ditemukan peralatan. Perbedaan prinsip antara manusia dan hewan adalah manusia dapat menciptakan alat apapun bentuknya dan dengan teknologi yang terus berkembang. Adapun hewan selamanya seperti itu dengan identitas masing-masing yang tidak berubah.

b. Nomaden adalah pola hidup yang tidak menetap atau berpindah-pindah sesuai dengan rantai makanan yang tersedia.

Bentuk masyarakat “NOMADEN” sangat sederhana hanya terdiri dari keluarga kecil sehingga dengan mudah untuk “mobile” dari satu tempat ke tempat lain yang dipengaruhi oleh kondisi lokal, kesuburan tanah dan tingkat ketersediaan pangan untuk keperluan hidup sehari-hari. Ciri hidup individual belum mengenal tata kelola ke masyarakat antar komunitas. Pola seperti ini dikatakan pola hidup pada kuadran I.

Adapun pola hidup pada kuadran II adalah bentuk masyarakat yang sudah mengenal hukum adat dengan satu orang pemimpin adat atau kepala suku tetapi masih bersifat “Nomaden” atau tidak menetap sehingga belum mempunyai batasan wilayah tertentu, dan pada tahapan berikutnya adalah bentuk masyarakat yang menetap pada satu wilayah tertentu dan sudah terbentuk hukum adat artinya hak dan kewajiban masyarakat sudah tertata. Ada regulasi dan sanksi bagi yang melanggar hukum adat serta ada hubungan komunikasi dengan komunitas masyarakat lain. Kondisi ini disebut pola kehidupan masyarakat pada kuadran III.

Kuadran IV adalah fase kemapanan dengan pendekatan sosiologis

maka dapat dikatakan bahwa solidaritas kerukunan dan kekuatan kelembagaan yang ditur dengan regulasi perundang-undangan. Pada study kasus Indonesia, maka partisipasi masyarakat yang didukung oleh kekuatan dan tingkat solidaritas mahasiswa menjadi pilar ideologi negara yaitu Pancasila yang sangat penting.⁹⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada tiga pilar utama penyanggah tetap tegaknya suatu negara dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap Pancasila atau sebagai benteng Pancasila yaitu :

- a. Solidaritas masyarakat.
- b. Mahasiswa.
- c. Aparat pemerintah.

Ketiga pilar tersebut keampuhannya terbukti pada pergeseran kekuasaan tahun 1998 yaitu dari dari kekuasaan Orde Baru menjadi kekuatan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa yang didukung masyarakat dan peran tentara secara tidak langsung.

Pada fase kuadran IV ditandai dengan pola pembagian kekuasaan yang seimbang yaitu :

- a. Eksekutif.
- b. Yudikatif.
- c. Legislatif.

Dengan demikian terjadi sinergitas antar Lembaga negara dalam hubungan internasional. Konsep ketahanan nasional dan wawasan nusantara menjadi sangat penting guna menjaga sekaligus

⁹⁴ Moh. Asy'ari Muthhar, *The Ideal State*, (Yogyakarta: Ircisod, 2018), 48.

mengembangkan ideologi Pancasila yang secara aplikatif dalam kehidupan sehari-hari harus dicari pola dan bentuk keseimbangan baru, guna mengikuti perkembangan dan tuntutan generasi milineal. Secara konseptual Pancasila tidak boleh berubah tetapi secara secara aplikatif menjadi ideologi terbuka yang dapat berinteraksi positif dengan ideologi lain dalam pergaulan masyarakat dunia, sehingga fleksibilitas tafsir Pancasila dapat berkembang dengan satu syarat tidak menyimpang dari ide pokoknya.

Ada istilah yang mengatakan bahwa “rantai kemiskinan hanya dapat diputus dengan Pendidikan” artinya peran perguruan tinggi yang termasuk di dalamnya Universitas Krisnadwipayana sangat strategis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan sekaligus pemerataan hasil-hasil pembangunan. Secara umum orientasi Pendidikan meliputi dua unsur yaitu *Pertama*, pendidikan sains dan teknologi yang memprioritaskan pengembangan ilmu pengetahuan dengan pendekatan penelitian, percobaan dan riset dan sebagainya. Kedua, Pendidikan skill dan keterampilan dengan pendekatan praktik di lapangan atau vokasi. Diharapkan dengan melalui proses Pendidikan tersebut kesejahteraan masyarakat meningkat maka dengan sendirinya pengaruh paham Raki atau Radikal kiri tidak ada tempat untuk berkembang, dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat maka akan terbuka juga akses-akses kesehatan artinya peningkatan pendidikan berbanding lurus dengan peningkatan kesehatan masyarakat.

Semua warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan mempunyai derajat yang sama untuk mendapatlan pelayanan dari

pemerintah baik melalui institusi politik dan institusi ekonomi, kedudukan warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang layak, dengan demikian kewajiban pemerintah terhadap warga negara yaitu :

- a. Ketersediaan lapangan pekerjaan
- b. Ketersediaan sarana pendidikan
- c. Ketersediaan sarana kesehatan
- d. Ketersediaan akses permodalan dan sebagainya.

Adapun kewajiban warga negara yaitu :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Membayar pajak dan retribusi
- c. Berpartisipasi aktif pada setiap program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

Semua bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara terhadap hak dan kewajiban pemerintah menjadi kenyataan sinkronisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai daya saing nasional dan pergaulan masyarakat internasional.

Pemahaman bentuk tanggung jawab antara pemerintah dan warga negara dapat dipersepsikan pada restorasi Pancasila adalah sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab kepada Tuhan artinya secara hakiki masyarakat dan semua unsur pelaksana negara meyakini bahwa yang dilakukan tetap dalam pengawasan Tuhan yang Maha Esa sebagai implementasi dengan Sila Pertama Pancasila.⁹⁵

⁹⁵ Abdullah Fathoni, *Etika Bisnis Syariah - Bank, Koperasi dan BMT*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari, 2018), 133.

- b. Tanggung jawab moral artinya setiap nilai dan norma yang terkandung pada Sila Pancasila menjadi barometer moral dari tindakan, hak dan tanggung jawab warga negara dan pemerintah.
- c. Tanggung jawab sosial, artinya segala bentuk nyata tugas pemerintah dan warga negara akan mempunyai implikasi sosial atau bahkan "*cost social*" untuk itu sebagai amanat dari sila kelima Pancasila harus berakhir pada kehidupan sosial yang lebih baik.
- d. Tanggung jawab pada diri sendiri dengan tidak merugikan diri sendiri dan keluarga.

Pancasila sebagai landasan idiil artinya semua program pembangunan nasional dan semua peraturan perundang-undangan harus berdasarkan Pancasila, mengapa demikian? Karena Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dengan implementasi pemahaman sebagai berikut :

- a. Nilai yang terkandung pada Sila Pertama yang berbunyi "Ketuhanan yang Maha Esa" dengan implementasi bahwa semua warga negara mempunyai kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut keyakinan dan kepercayaan tersebut tanpa adanya hambatan dan gangguan apalagi intimidasi dari pihak manapun dan pada posisi ini negara harus hadir jika terjadi halangan untuk beribadah, sehingga tercipta tiga kerukunan yaitu Pertama, kerukunan antar umat seagama, Kedua, kerukunan antar umat beragama dan Ketiga, terjadi kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Keseimbangan yang tercipta dari kerukunan tersebut harus juga terjadi di lingkungan semua kampus yang termasuk di dalamnya Universitas

Krisnadwipayana, sehingga tercipta kondisi saling menghormati dengan semangat toleransi beragama.

b. Nilai yang terkandung pada Sila Kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Ada tiga pembahasan dan pendalaman

- 1) Nilai kemanusiaan.
- 2) Nilai keadilan.
- 3) Nilai beradab.

Hak manusia yang melekat pada hidup dan kehidupan sebagai pemberian Tuhan seperti hak berkeluarga tidak boleh dirampas oleh siapapun termasuk negara artinya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial setiap warga negara berhak untuk membentuk kehidupan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan wa rahmah dengan melalui proses yang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai keadilan adalah hubungan timbal balik antar kepentingan individu, sosial dan pemerintah serta harmonis, sedangkan beradab adalah tata krama dan sopan satun serta praktik adab dalam tataran norma dan etika, kearifan lokal yang tergambar dari hukum adat harus dihormati dan diposisikan secara proporsional, sehingga tidak terjadi pertentangan dan gesekan kepentingan sosial.

c. “Persatuan Indonesia” pada Sila Ketiga mencerminkan adanya sikap untuk mementingkan kepentingan nasional atau kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Semangat otonomi daerah telah membuka ruang perbedaan pemahaman dan multi tafsir antara semangat kedaerahan dan kepentingan nasional, untuk itu harus ada rujukan keseimbangan porsi pembangunan daerah

dan pembangunan nasional, dengan demikian porsi kampus termasuk di dalamnya Universitas Krisnadwipayana memberikan sumbangsih pemikiran untuk mensinkronkan antar kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Arah pembangunan daerah harus selalu bertumpu dan mengambil referensi dari program pembangunan nasional untuk koordinasi dari instansi terkait pada unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif serta pada Lembaga atau instansi politik dan instansi ekonomi harus menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan.

d. Sila Keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan”, nilai yang terkandung di dalam sila keempat ini adalah :

- 1) Kerakyatan.
- 2) Demokrasi.
- 3) Musyawarah - mufakat.

Rakyat adalah pemegang kedaulatan yang melalui sistem pemilihan umum menentukan perwakilannya pada partai politik sesuai dengan pilihan masing-masing-masing tanpa adanya pemaksaan dan melalui “Pemilu” tersebut rakyat menentukan pilihannya figur Presiden dan Wakil Presiden, artinya proses demokrasi berlangsung saat pentahapan pemilu dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, kemudian pada setiap pengambilan keputusan di organisasi politik pusat dan daerah mengutamakan mekanisme musyawarah untuk mufakat. Jika pada mekanisme tersebut tidak diperoleh mufakat maka dapat dilakukan *voting* berdasarkan suara terbanyak sesuai

dengan mekanisme organisasi yang benar, dengan demikian Lembaga atau institusi politik menjunjung tinggi mekanisme demokrasi.

e. Sila Kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, adalah pernyataan komitmen semua unsur penyelenggara negara bahwa semua rakyat Indonesia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan mendapatkan perlakuan yang adil, artinya tidak ada dominasi mutlak mayoritas terhadap minoritas. Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berkiprah dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan potensinya masing-masing. Setiap daerah bebas berkreasi pada batas-batas tertentu secara proporsional untuk mengembangkan daerahnya masing-masing serta sesuai dengan hasrat dan potensi masyarakatnya. Perbedaan prioritas pembangunan dan perbedaan kearifan lokal akan menjadi kekayaan dan saling melengkapi antar daerah, dengan demikian potensi khas daerah akan berkembang laksana rantai mutiara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara menyeluruh dari timur sampai ke barat, dari Sabang sampai Merauke.

Universitas Krisnadwipayana merupakan bagian integral dari Pendidikan tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pada aspek :

- a. Pendidikan.
- b. Penelitian.
- c. Pengabdian kepada masyarakat.

Pada konteks “Perspektif Pancasila” maka ketiga aspek tersebut di atas harus mengandung pendayagunaan nilai-nilai yang terkandung pada sila

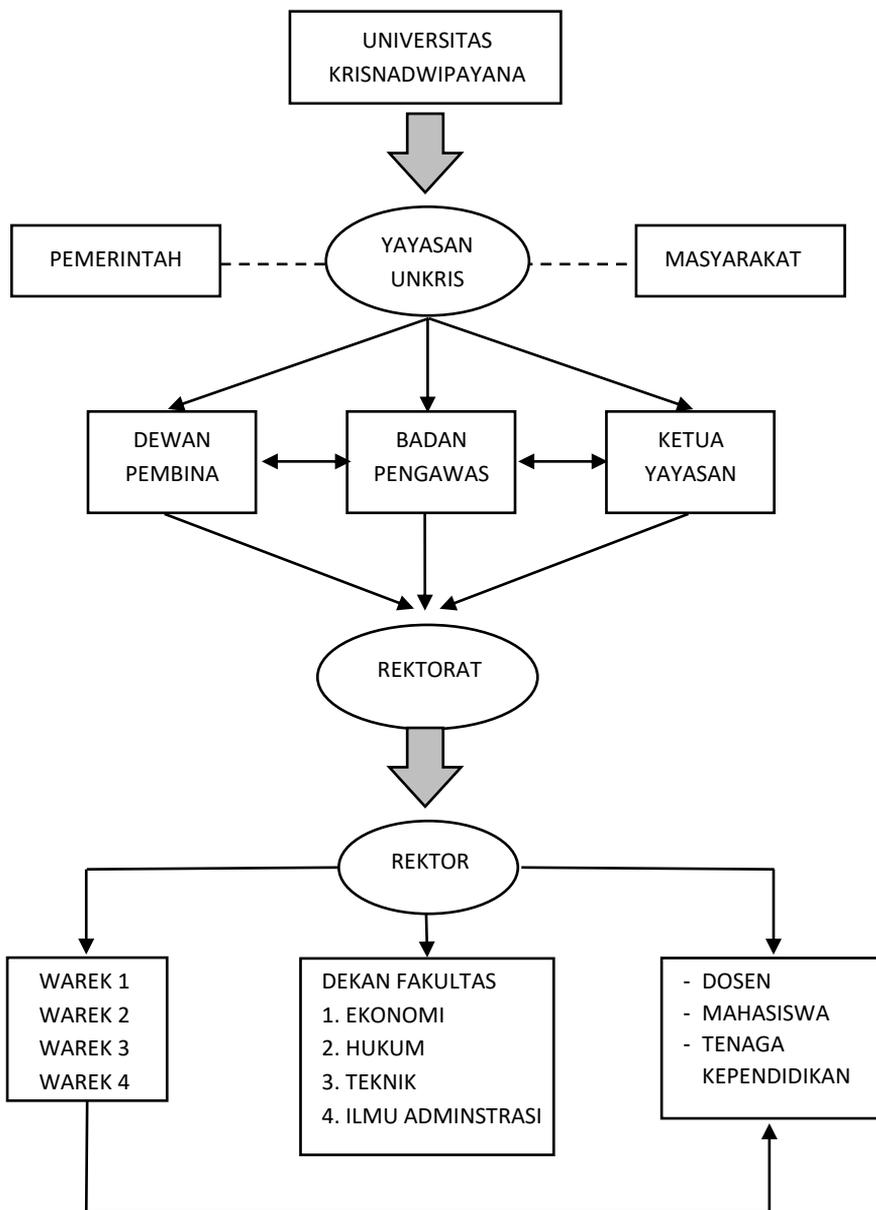
Pancasila, menjiwai pelaksanaannya serta mendorong implementasi Pancasila pada setiap kegiatannya yang meliputi unsur Tindakan, ucapan dan pola pikir. Adapun secara kelembagaan yang berperan aktif pada kegiatan sosialisasi Pancasila secara umum adalah :

- a. Unsur Pembina Yayasan.
- b. Unsur Badan Pengawas Yayasan.
- c. Unsur Pengurus Yayasan.
- d. Unsur Rektorat yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III, Dekan Fakultas dan Staf.
- e. Unsur Dosen.
- f. Unsur Mahasiswa.
- g. Unsur Tenaga Kependidikan atau Karyawan.
- h. Unsur Pemerintah.
- i. Unsur Masyarakat.

Perspektif Pancasila adalah memposisikan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung pada setiap Sila Pancasila menjadi barometer atau landasan berfikir untuk mengelaborasi pada setiap aspek kehidupan.

Dengan demikian, semua struktur dan elemen berbangsa dan bernegara memposisikan Pancasila sebagai “*way of life*”.

Gambar 15
Kelembagaan UNKRIS



“Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” merupakan bagian dari tugas semua perguruan tinggi dengan menjalin Kerjasama yang harmonis dengan pemerintahan dan masyarakat secara umum.

Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan antar lain mengatur bahwa dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu menegaskan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang Pendidikan, untuk itu menjadi sangat tepat jika Universitas Krisnadwipayana mengambil porsi sebagai “kampus Benteng Pancasila” dengan berbagai macam kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan materi kuliah tentang Pancasila dan kewarganegaraan disesuaikan dengan perkembangan cara berfikir generasi milenial dan disesuaikan dengan perkembangan budaya global.
- b. Bekerjasama dengan aparat terkait dan masyarakat guna menetapkan serapan kurikulum.
- c. Menyelenggarakan seminar atau diskusi terbuka dan lain-lain serta menyusun buku referensi yang berkaitan dengan pemahaman Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- d. Penguatan unsur dosen dan mahasiswa untuk penyalarsan pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa Indonesia jika dikaitkan dengan otonomi daerah.

Adapun standar kompetensi yang dicanangkan pemerintah untuk lulusan perguruan tinggi yang termasuk di dalamnya adalah Univeritas Krisnadwipayana sebagai berikut :

- a. Masa persiapan atau penyiapan mahasiswa untuk terjun ke masyarakat dengan tiga unsur pembekalan yaitu :
 - 1) Beriman dan bertakwa.
 - 2) Cerdas dan terampil.
 - 3) Berbudi luhur atau berakhlak mulia.
- b. Penanaman karakter sebagaimana diajarkan pada nilai-nilai Pancasila.
- c. Tercapainya sikap mental yang baik dengan berdasarkan :
 - 1) Pengetahuan.
 - 2) Keterampilan.
 - 3) Kemandirian.
 - 4) Implementasi ilmu pengetahuan *sains* dan teknologi dan seni yang dapat dikembangkan dalam masyarakat.

Dengan demikian peran dan fungsi kampus harus dioptimalkan manfaatnya dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan pengembangan kurikulum.

Kurikulum Pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi mengacu pada pedoman tentang materi pembelajaran Pancasila yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pembinaan ideologi Pancasila. Adapun penyusunan kurikulum harus sesuai dengan dinamika pemahaman dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan meliputi :

- a. Peningkatan iman dan takwa.
- b. Pemahaman nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada setiap Sila.

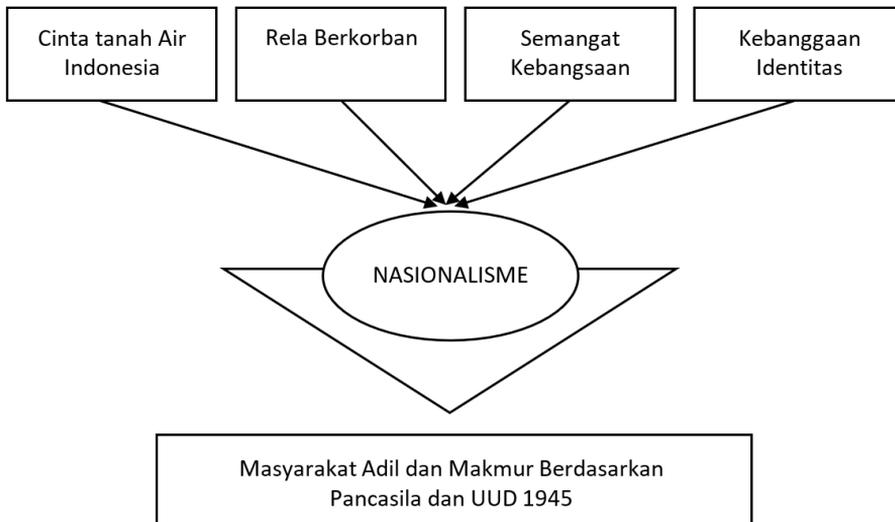
- c. Peningkatan akhlak yang mulia seiring dengan pemahaman dan dinamika kearifan lokal.
- d. Peningkatan potensi kecerdasan sesuai dengan bakat dan minat terutama jika dikaitkan masa pertumbuhan dan pematangan generasi milineal pada era digital.
- e. Keragaman potensi daerah dan pelestarian lingkungan dengan memperhatikan ekosistem flora dan fauna di dalamnya.
- f. Tuntutan ragam pembangunan dan dunia kerja era globalisasi.
- g. Pemahaman agama yang kuat sehingga tidak terpengaruh faham radikalisme.

BAB V
NASIONALISME
(THE BEST AMONG THE OTHERS)

A. PENDAHULUAN.

Semangat kebangsaan, cinta tanah air Indonesia, rela berkorban dan segala bentuk upaya menjaga kedaulatan negara dari ancaman, rintangan, hambatan serta gangguan atau sering disebut dengan singkatan “ATHG” adalah cermin dari jiwa nasionalisme, demikian juga Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa harus dijaga dan dibentengi dengan baik dari segala bentuk rongrongan atau upaya pelemahan pemahaman dan implikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Gambar 16
Nasionalisme



Jika sudah tertanam dalam hati dan fikiran rasa cinta yang berkobar-kobar terhadap bangsa dan negara Indonesia sehingga tercipta ungkapan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah yang terbaik dibanding dengan negara lain atau dengan istilah *"The Best Among The Others"*. Kecintaan yang mendalam pada bangsa dan negara inilah yang menimbulkan jiwa nasionalisme dengan identitas sebagai patriot sejati. Secara umum kandungan nasionalisme terdapat dua unsur utama yaitu unsur etnis dan unsur politik.

Menanamkan rasa cinta tanah air Indonesia dan kebanggaan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia harus diupayakan seoptimal mungkin di kalangan masyarakat luas dan para mahasiswa terutama mahasiswa Universitas Krinadwipayana melalui berbagai kegiatan sebagaimana terkandung didalam pengertian Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara umum terdiri dari tiga aspek yaitu aspek pengajaran atau *"transfer knowledge"*, aspek riset dan penelitian serta aspek pengabdian masyarakat yang merupakan aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Aspek pengajaran atau *"transfer knowledge"* adalah interaksi antara mahasiswa dan dosen baik di kelas atau diluar kelas yang meliputi :

1. Pendidikan moral Pancasila, kewiraan, kewarganegaraan serta semua materi kuliah yang mendorong mahasiswa Krisnadwipayana untuk tampil sebagai benteng Pancasila, artinya semua ucapan, tindakan serta cara berfikir mahasiswa didasari oleh semangat implementasi nilai-nilai Pancasila secara tepat.
2. Semua bentuk kegiatan *"UKM"* yaitu organisasi kemahasiswaan atau unit kegiatan mahasiswa terhindar dari pengaruh Raka atau

radikal kanan dan Raki atau radikal kiri sehingga orientasi dasar “UKM” selalu berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dari setiap sila dari Pancasila, untuk itu harus dibangun kerjasama harmonis antara mahasiswa, dosen dan masyarakat dan didukung oleh semua aparat terkait.

3. Materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa harus mengandung dua unsur yaitu kajian yang bersifat teoritis dan aplikatif, sehingga pada proses pegajaran menjadi harmonis dan dinamis yang menciptakan suasana kelas menjadi hidup.

4. Dosen sebagai salah satu unsur utama pada proses belajar dan mengajar harus bisa tampil sebagai guru atau dalam filosofi jawa dikatakan “di gugu lan ditiru” artinya etika dosen dalam berucap, berperilaku dan berfikir dapat dicontoh oleh mahasiswa. Ada hal yang pantangan pada komunikasi fisik antara mahasiswa dan dosen tidak boleh menyentuh pada kondisi kekerasan seksual atau pelecehan seksual di dalam lingkungan kampus atau diluar kampus yang dapat berdampak pada citra negatif dunia pendidikan, karena apapun perilaku dosen dan mahasiswa akan dimonitor oleh masyarakat umum, apalagi jika berhubungan dengan masalah hukum.

Rela berkorban adalah manifestasi puncak dari sifat cinta tanah air Indonesia, sehingga rela mengorbankan :

1. Waktu.
2. Tenaga.
3. Fikiran.

4. Harta - benda.
5. Jiwa - raga.

Kerelaan berkorban adalah salah satu wujud dari cinta tanah air Indonesia, dan kecintaan tersebut timbul karena adanya rasa bangga sebagai bagian dari komunitas masyarakat dengan beragam agama, suku, ras, warna kulit, bahasa serta budaya dan bertempat tinggal di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kaya dengan aneka flora dan fauna serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sentimen etnis merupakan bentuk dari nasionalis dari identitas yang secara geografis berbeda dengan negara lain pada saat perang kemerdekaan maka sentimen etnis tersebut sangat jelas antara pihak penjajah belanda dengan bangsa Indonesia.

Pengorbanan waktu menjadi ukuran utama jiwa nasionalisme, mereka yang mempunyai jiwa kebangsaan dan semangat cinta tanah air akan merelakan waktunya untuk kepentingan bangsa dan negara, seperti menghadiri bahkan ikut berkontribusi pada acara-acara tradisi kebangsaan, upacara-upacara dan peringatan hari-hari bersejarah, demikian juga pengorbanan waktu dan tenaga pada acara kerja bakti, gontong royong atau untuk kegiatan kepedulian seperti pada acara bantuan karena bencana alam, pembangunan sarana umum seperti jalan raya, kebersihan sungai, pembangunan tempat-tempat kegiatan agama, meskipun bukan sarana agamanya sendiri, artinya mementingkan kepentingan umum atau kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan, dengan demikian harus ada kontribusi positif sebagai implementasi nasionalisme untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang dicintainya.

Kontribusi pemikiran untuk ide-ide pembangunan bangsa dan negara meliputi pemikiran :

1. Pemikiran teoritis.
2. Pemikiran aplikatif.
3. Pemikiran tentang nasionalisme.
4. Pemikiran tentang pembangunan budaya - bangsa.
5. Pemikiran tentang strategi pembangunan dan lain-lain.

Objek pemikiran adalah domain kampus atau Universitas yang termasuk di dalamnya adalah Universitas Krisnadwipayana, untuk itu harus ada ide-ide cemerlang dari dunia kampus untuk pembangunan nasional. Ada semacam transformasi intelektual dari teoritis menjadi aplikatif, untuk itu segenap civitas akademika Universitas Krisnadwipayana harus menyusun semacam panduan sebagai "*guidance*" untuk pedoman pembangunan mulai dari skala nasional, daerah sampai pada pembangunan desa. Program pembangunan yang dapat dijadikan contoh adalah ABRI masuk desa pada saat orde baru yang manfaatnya secara langsung dirasakan oleh masyarakat desa.

Pengorbanan harta - benda untuk kontribusi pembangunan nasional adalah salah satu bentuk nyata dari jiwa nasionalisme, artinya sebagai anggota masyarakat Indonesia tidak hanya mengorbankan waktu, tenaga, dan pemikiran, tetapi juga mengorbankan harta bendanya yang dicintai, sebagai wujud rasa cinta adalah pengorbanan harta benda karena menjadi tidak mungkin ada cinta tetapi pelit, rasa cinta juga menimbulkan kerinduan. Ada istilah lebih baik hujan batu di negara sendiri dari pada hujan emas di negara orang, kerinduan pada negara sendiri akan terlihat

nyata pada mereka yang melaksanakan ibadah haji, mereka yang bertugas belajar diluar negeri atau para diplomat dan keluarganya saat berdinias bertahun-tahun di luar negeri. Kerinduan itu muncul dari memori, tanah yang subur membentang area persawahan, acara-acara keagamaan, tradisi lokal kedaerahan seperti pulang mudik dan lain-lain, itulah daya pikat negara kesatuan Republik Indonesia yang cantik jelita sehingga menimbulkan sentimen etnis.

Jika negara dalam kondisi berbahaya karena ancaman dari dalam negeri atau ancaman dari luar negeri maka untuk semua warga negara termasuk masyarakat kampus Universitas Krisnadwipayana dituntut adanya kondisi pengorbanan jiwa dan raga dalam bentuk wajib militer atau yang lainnya, keterlibatan masyarakat kampus atau dunia pendidikan pernah terjadi pada saat perang kemerdekaan dengan sebutan "trip" atau Tentara Republik Indonesia Pelajar dengan system pertahanan rakyat semesta yaitu melibatkan semua komponen bangsa pada aspek pertahanan maka terbukalah ruang segenap sivitas akademika Universitas Krisnadwipayana pada upaya bela negara yang secara langsung di garis depan sebagai salah satu bagian dari "Benteng Pancasila" artinya sudah tidak dapat dipungkiri bahwa komponen bela negara memposisikan mahasiswa dan dosen sebagai komponen pertahanan negara yang menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari pihak lain.

Penyelenggara negara pada aspek pembentukan peraturan perundang-undangan atau aspek regulasi disebut "Legislatif" dan penyelenggara negara pada aspek pelaksanaan pemerintahan disebut "Eksekutif". Adapun penyelenggara negara pada aspek penegakan hukum yang berorientasi

pada bidang keadilan disebut “Yudikatif”, jika pelaksanaan ketiga aspek tersebut berjalan dengan baik maka secara langsung menciptakan kondisi semangat kebangsaan yaitu bangga menjadi bagian komunitas masyarakat Indonesia, sehingga menimbulkan gairah untuk berprestasi pada skala internasional yang dapat mengharumkan nama bangsa, prestasi tersebut meliputi :

1. Prestasi akademis.
2. Prestasi sains dan teknologi.
3. Prestasi olahraga.
4. Dan prestasi lainnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa optimalisasi prestasi mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Krisnadwipayana dapat mengharumkan nama bangsa pada tingkat internasional.

Kebanggaan identitas merupakan akumulasi dari berbagai potensi internal bangsa Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Kebanggaan tersebut meliputi antara lain :

1. Kebanggaan budaya dengan aneka ragam identitas budaya Indonesia.
2. Kebanggaan peradaban dan kemajuan teknologi.
3. Kebanggaan atas keindahan flora dan fauna alam Indonesia.
4. Kebanggaan akan kesuburan tanah dan sumber daya alam dengan berbagai tambang mineral yang terkandung di dalamnya.
5. Kebanggaan akan keramahan dan etika serta persatuan dan kesatuan masyarakatnya meskipun terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, warna kulit dan agama yang berbeda-beda.

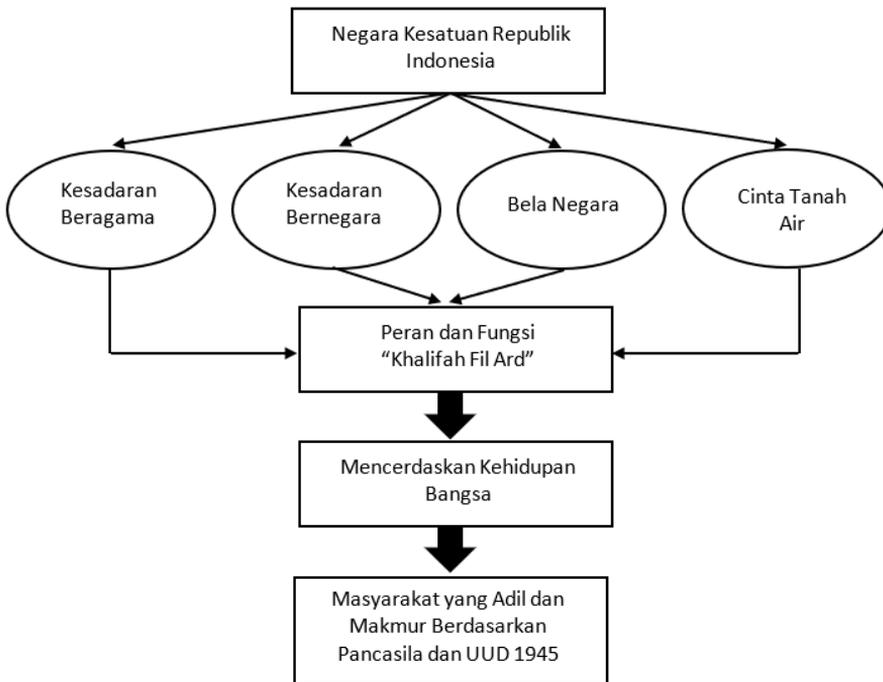
Dengan demikian kebanggaan identitas sebagai bangsa menjadi perekat untuk menuju jiwa persatuan dan kesatuan yang merupakan cermin dari Sila Ketiga Pancasila.

B. SEMANGAT BELA NEGARA.

Manusia diciptakan Tuhan sebagai pemimpin atau “khalifah fil ard” di dunia ini yang mempunyai tugas untuk mengelola bumi dan alam sekitarnya menjadi seimbang, teratur dan berkembang dengan baik, menjaga ekosistem dan menjaga bumi, fauna dan flora yang lestari terhindar dari kerusakan, polusi dan sebagainya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin manusia membentuk komunitas masyarakat dengan aturan atau regulasi tertentu dan pada batas wilayah atau teritorial tertentu, kemudian untuk menjaga keteraturan dalam batas wilayah yang disebut negara maka diperlukan pembagian tugas pada suatu negara, serta diperlukan kerjasama dengan negara lain, pada posisi ini dengan sendirinya negara terbentuk dengan syarat sebagai berikut :

1. Adanya komunitas masyarakat.
2. Adanya wilayah tertentu.
3. Adanya pemerintahan.
4. Adanya regulasi.
5. Adanya pengakuan dari negara lain.
6. Berbagai unsur kelengkapan negara.

Gambar 17
Semangat Bela Negara



Bela negara merupakan konsekuensi logis dari setiap warga negara, kontribusi warga negara terhadap negaranya adalah kesadaran untuk membela kepentingan nasional, akan tetapi jika dikaji lebih dalam maka semangat bela negara timbul karena dua hal yaitu : *Pertama*, rasa cinta tanah air Indonesia dengan beragam suku, adat dan agama serta karena keindahan tanah air Indonesia yang membentang dari sabang sampai maraoke terdiri sekitar 17.000 pulau besar dan kecil. *Kedua*, rasa bangga sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa perjalanan hidup bangsa Indonesia mengalami pasang surut yang dimulai dari terbentuknya kerajaan nusantara, priode penjajahan dan berujung

pada periode perjuangan kemerdekaan. Pahit getirnya perang kemerdekaan dengan berbagai pengorbanan jiwa yang ditandai dengan peristiwa 10 November di Surabaya kemudian Surabaya diabadikan sebagai kota pahlawan. Pengorbanan arek-arek Suroboyo serta pengorbanan para pahlawan di seantero negara kesatuan Republik Indonesia adalah bukti nyata dari semangat bela negara yang tertanam pada jiwa seluruh masyarakat Indonesia.

“Sentimen kebangsaan” yang melahirkan rasa cinta pada bangsa dan negara secara utuh pada garis pengabdian bersifat vertikal dan horizontal adalah bagian dari bentuk semangat bela negara yang disusun dalam sistem pertahanan negara bersifat sementara, artinya sistem pertahanan diselenggarakan secara total dan terpadu yang melibatkan :

1. Aparat pertahanan dan keamanan.
2. Seluruh warga negara.
3. Wilayah NKRI dengan segala potensinya.
4. Sumber daya nasional.

Keselamatan negara menjadi prioritas utama dalam semangat bela negara untuk menjaga keutuhan wilayah dan menjaga kepentingan nasional dari semua ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang bersumber dari dalam negeri dan bersumber dari luar negeri, demikian juga harus ada upaya untuk menjaga tetap tegaknya Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia untuk itu sudah seyogyanya UNKRIS mengedepankan konsep sebagai “Kampus Benteng Pancasila”.

Agama mengajarkan “cinta kepada negara adalah sebagai bagian dari iman”, artinya agama mempunyai andil besar dalam menumbuh

kembangkan semangat bela negara, kenyataan ini di catat oleh sejarah terutama pada peristiwa 10 November di Surabaya. Bung Tomo yang saat itu memegang kendali salah satu unsur perjuangan arek-arek Suroboyo mengumandangkan kalimat “ALLAHU AKBAR” untuk mengorbankan semangat juang dan jiwa patriot pada peristiwa “Jembatan Merah” di Surabaya. Pada sisi lain kekuatan iman dan takwa bangsa Indonesia akan melahirkan kerelaan berkorban demi nusa dan bangsa, dan tidak dapat dipungkiri bahwa laskar-laskar perjuangan kemerdekaan waktu itu berlatar belakang komunitas keagamaan, bahkan panglima besar Jendral Sudirman berlatar belakang guru sekolah Muhammadiyah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ajaran agama menjadi dasar motivasi dan dapat mendorong semangat juang, rela berkorban demi untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu bentuk nasionalisme yang utuh dan tangguh adalah terciptanya ketahanan nasional yang baik dan ketahanan nasional dapat didefinisikan sebagai kondisi dinamis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus tumbuh dan berkembang yang didukung oleh semangat juang, keuletan dan ketangguhan serta kemampuan dalam menghadapi segala bentuk ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan terhadap stabilitas keamanan baik yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Kesejahteraan ekonomi masyarakat harus terjamin dengan terbukanya lapangan kerja yang merata. Kondisi ini sangat penting dengan dasar argumentasi bahwa kondisi masyarakat yang makmur secara ekonomi akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program

pembangunan nasional, demikian juga kondisi ekonomi masyarakat secara mayoritas di bawah garis kemiskinan akan banyak mengandung keresahan dan kerusuhan sosial serta konflik komunal yang sulit dicarikan solusi terbaiknya.

Secara umum negara dapat definisikan dari sekumpulan komunitas masyarakat yang menempati suatu daerah dengan batas teritorial yang jelas dan diikat oleh suatu aturan perundang-undangan yang telah disepakati bersama dan dipimpin oleh suatu lembaga negara serta mendapat pengakuan legitimasi dari negara lain, sehingga pada kondisi tersebut melahirkan “kesadaran bernegara” oleh masyarakatnya, dalam bentuk :

1. Kesadaran bernegara merupakan bentuk ikatan persekutuan yang menyatukan dalam satu identitas masyarakat secara nasional.
2. Kesadaran bernegara akan membangun jiwa persatuan dan kesatuan serta merasa satu nasib satu penanggungungan demi membangun kejayaan identitas nasional.
3. Kesetiakawanan sosial, semangat gotong royong, saling menghormati dalam perbedaan serta mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan adalah ciri dari kesadaran bernegara.

Ada hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya. Hubungan tersebut bersifat mengikat antara keduanya yang tidak dapat dipisahkan, sehingga semangat bela negara dapat dirumuskan menjadi kondisi kesadaran yang bersifat pribadi dan kolektif sebagai bagian dari komunitas masyarakat dengan satu individu bangsa Indonesia, oleh sebab

itu sebagai warga negara yang baik maka setiap warga negara dituntut adanya sikap bela negara dalam bentuk :

1. Rela berkorban demi menjaga keutuhan wilayah NKRI.
2. Turut serta berjuang untuk kepentingan nasional yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Berpartisipasi aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Mampu dan mau berperan sebagai benteng Pancasila.
5. Pejuang nasionalis sejati dengan tetap tegak berdiri membela kepentingan nasional di tengah pengaruh budaya global.

Cinta tanah air Indonesia adalah kondisi batin bangsa Indonesia untuk selalu memandang negara kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari hidupnya sehingga menimbulkan kerinduan ketika dalam waktu lama berada di luar negeri. Rasa cinta dan rasa rindu kemudian melahirkan semangat pengorbanan untuk yang dicintai adalah kondisi logis, sehingga rasa cinta tanah air Indonesia harus dipelihara dengan cara:

1. Negara memberikan hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
2. Setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil didalam hukum.
3. Hak asasi manusia yang melekat sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa dijaga dan dilindungi oleh negara.
4. Setiap warga negara mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya secara proporsional.

5. Setiap warga negara mempunyai akses yang sama memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

C. UPAYA MENINGKATKAN POTENSI MAHASISWA UNKRIS SEBAGAI BENTENG PANCASILA.

Bentuk negara kesatuan republik Indonesia memposisikan kekuasaan pemerintah pusat menjadi mutlak kecuali pada batas *spare of controle* atau pelimpahan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prosedur dan mekanisme administrasi yang telah disepakati antara pusat dan daerah untuk itu proses regenerasi dan pengkaderan antar generasi pada periode waktu tertentu menjadi sangat penting dengan melibatkan unsur pendidikan khususnya pada perguruan tinggi yang dalam hal ini adalah Universitas Krisnadwipayana agar tidak terjadi jeda waktu yang dapat mengganggu mekanisme alih generasi dengan satu argument bahwa generasi yang bagus adalah generasi yang mampu menyiapkan generasi penerus yang baik.

“Trias politica” merupakan hasil pemikiran “John Locke” kemudian disempurnakan oleh “Montesquieu” dengan membagi fungsi negara menjadi tiga secara terpisah yaitu :

1. Fungsi legislatif yaitu melaksanakan Undang-Undang dan semua peraturan pada batas-batas secara proporsional pada peran Lembaga pemerintahan masing-masing.
2. Fungsi yudikatif yaitu fungsi mengadili terhadap pelaksanaan

peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

3. Fungsi eksekutif atau pemerintahan.

Secara implemetatif ketiga fungsi tersebut harus sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara, oleh sebab itu segenap mahasiswa UNKRIS harus memahami ketiga fungsi ketiga lembaga tersebut. Tugas Fakultas secara proporsional dengan tingkat kedalaman materi sesuai pada kurikulum yang telah digariskan, dengan demikian lulusan UNKRIS atau “Abituren UNKRIS” mampu berinteraksi pada masyarakat dengan satu identitas “sebagai Benteng Pancasila” yang dilaksanakan secara murni dan konsekuen terhindar dari paham radikal sektoral.

Langkah nyata dalam rangka optimalisasi mahasiswa UNKRIS sebagai Benteng Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan ajar sebagaimana tertuang pada kurikulum menyentuh unsur-unsur :
 - a. Pendalaman terhadap nilai-nilai dan norma yang terkandung di setiap Sila Pancasila.
 - b. Membuka ruang diskusi antar mahasiswa dan antar Fakultas dengan materi Pancasila sebagai ideologi negara, dan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia yang dihadapkan dengan perkembangan masyarakat pada budaya global dan generasi milineal.
 - c. Menjalin kerjasama harmonis antara mahasiswa dan masyarakat dalam konteks pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- d. Membangun sinergisitas antara mahasiswa, dosen, masyarakat dan aparat terkait melalui acara seminar dengan tema pendalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
2. Menunjuk perwakilan mahasiswa per-fakultas sebagai penyuluh atau pembimbing pendalaman Pancasila kepada masyarakat pedesaan.
 3. Mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan masyarakat berupa usaha-usaha yang menyentuh kebutuhan masyarakat desa dalam bentuk kegiatan “Bhakti Pancasila” yang melibatkan aparat terkait dan civitas akademika UNKRIS serta masyarakat seperti :
 - a. Pembangunan jalan perintis atau jalan tembus antar desa.
 - b. Pembangunan sarana atau rumah ibadah.
 - c. Pembangunan sarana olahraga yang sangat dibutuhkan masyarakat.
 - d. Pembangunan sarana pendidikan dan penyiapan tenaga pengajar di desa-desa perbatasan.
 4. Mahasiswa dilatih dalam kegiatan UKM yang mendorong terciptanya semangat juang, karakter yang kuat dan jiwa patriot serta rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Contoh kegiatan tersebut antara lain :
 - a. *Survival*.
 - b. Terlibat langsung kegiatan SAR bencana alam.
 - c. Siap ditugaskan di desa-desa terpencil.

d. Menjadi pelopor pembangunan di desa-desa pesisir yang tertinggal.

Semangat kebangsaan sebagai cermin dari pohon “Nasionalisme” harus ditanamkan pada jiwa dan raga mahasiswa UNKRIS sehingga terbentuk karakter yang kuat sebagai bagian dari semangat “UNKRIS sebagai Benteng Pancasila”, integritas dan identitas mahasiswa tercermin dari cara berfikir, sikap dan ucapan sebagai berikut :

1. Selalu berfikir untuk memajukan kehidupan bangsa menuju cita-cita nasional yaitu masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan tidak terpengaruh dari paham ideologi radikal yang bertentangan dengan Pancasila .
3. Bertindak dan berucap secara santun dan berbudi luhur dengan tetap menghormati kearifan local.
4. Selalu menjunjung tinggi kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan.
5. Menebarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa serta menghormati nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang dikemas dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah telah mencatat bahwa semangat dan jiwa nasionalisme para pemuda dan salah satu unsurnya adalah kalangan mahasiswa mengaktualisasikan diri dengan sikap politiknya pada waktu itu dengan ciri nasionalisme seperti terbaca pada pernyataan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi :

1. Kami putera-puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu: Tanah Indonesia.
2. Kami putera-puteri Indonesia mengaku berbangsa satu : Bangsa Indonesia.
3. Kami putera-puteri Indonesia menjunjung bahasa yang satu : Bahasa Indonesia.

Adapun kronologis secara kelembangaan organisasi perjuangan berwawasan nasional yaitu :

1. Boedieoetomo tahun 1908.
2. Sarekat Islam tahun 1911.
3. Muhammadiyah tahun 1912.
4. Indische party tahun 1912.
5. Indische social democratische Vereniging tahun 1913.
6. Trikoro dharmo tahun 1915.
7. Jong java tahun 1918.
8. Indonesia muda tahun 1931.
9. Nahdatul Oelama tahun 1926.

D. WAWASAN NUSANTARA.

Pengertian umum wawasan nusantara adalah karakter bangsa Indonesia yang tercermin dari cara pandang, sikap dan perilaku bangsa Indonesia yang mamahami dan menyadari tentang peran dan fungsi dalam kehidupan bernegara serta cara pandang terhadap lingkungannya dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Cara pandang tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Introspeksi diri artinya melihat potensi diri sebagai makhluk individu dan makhluk sosial jika dihadapkan pada tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.
2. Melihat potensi alam Indonesia yang terdiri sekitar 17.000 pulau besar dan pulau kecil dengan beraneka ragam hasil tambang, serta sebaran flora dan fauna yang indah sehingga diperlukan ekosistem yang baik.
3. Geopolitik yang menyadarkan segenap bangsa Indonesia dengan dikaitkan pada kepentingan integritas nasional yang dihadapkan pada hubungan diplomatik antar negara kawasan dan kepentingan Indonesia pada kanca internasional.
4. Kesadaran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai komponen bangsa terhadap kebhinnekaan sehingga harus diikuti dengan semangat toleransi dan semangat persatuan dan kesatuan yang memposisikan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan dengan sikap dan pola tindak serta pola pikir sebagai berikut :
 - a. Berjiwa besar dengan menerima perbedaan sebagai potensi kekayaan untuk saling melengkapi dan saling menguatkan dan menjaga jangan sampai perbedaan membawa sikap kecurigaan yang melemahkan.
 - b. Membuka ruang bagi semua kepentingan kearifan lokal untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan program pembangunan.

- c. Menjaga agar tidak terjadi dominasi mayoritas terhadap minoritas, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik.
- d. Selalu berorientasi pada tujuan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Mahasiswa adalah kader atau calon pemimpin bangsa Indonesia di masa depan, untuk itu Universitas Krisnadwipayana dengan menggunakan parameter Tri Dharma perguruan tinggi untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa dengan harapan ketika lulus dan setelah wisuda memasuki kehidupan berbaur dengan masyarakat mempunyai potensi bermasyarakat dengan kearifan lokal dapat menggalang persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan demikian pembekalan yang diberikan pada mahasiswa meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Beriman dan bertakwa serta mempunyai semangat toleransi yang membawa keharmonisan serta terhindar dari paham radikalisme baik dari Raka dan Raki.
2. Mempunyai semangat kepedulian dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana tercermin pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia, dan mampu menebar aroma keadilan tanpa melihat suku, ras dan agama serta mempunyai jiwa sosial, semangat kepedulian semangat berbagi serta semangat kesetia kawan sosial.
3. Semangat persatuan dan kesatuan serta rasa cinta tanah air Indonesia harus dibangun sejak dini sehingga melekat pada jiwa dan karakter mahasiswa Universitas Krisnadwipayana dan *output* yang

terbaca adalah memposisikan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kondisi spiritual dan jiwa persatuan ini sangat penting karena Indonesia disusun dari berbagai suku, budaya dan peradaban serta kearifan lokal yang berbeda jenis dan akar pemahamannya untuk itu semangat “Bhinneka Tunggal Ika” harus ditanamkan sejak awal proses pengkaderan sebagai pemimpin nasional.

4. Semangat demokrasi dan semangat musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan apapun selalu memposisikan untuk kepentingan bersama yaitu kepentingan nasional dengan tujuan besarnya adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, lebih khususnya adalah semangat otonomi daerah diposisikan di bawah kepentingan nasional.

5. “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah implementasi dari keanekaragaman suku bangsa Indonesia harus mendapatkan pelayanan dan perlakuan secara adil, artinya negara harus hadir ketika terjadi diskriminasi atau praktik ketidakadilan atau bahkan ada otoritas ketidakadilan mayoritas terhadap minoritas. Hal ini sangat penting karena dengan hepotesa jika keadilan dapat terlaksana dengan baik maka semangat persatuan dan kesatuan terpelihara dengan baik, demikian juga sebaliknya.

6. Nasionalisme yang salah satunya dalam manifestasi wawasan nusantara harus mampu menggerakkan jiwa dan raga mahasiswa Universitas Krisnadwipayana, dengan demikian harus ditata kembali hal-hal sebagai berikut :

- a. Kurikulum pengajaran harus menyentuh hal-hal pokok wawasan kebangsaan secara teoritis dan aplikatif.
- b. Dosen yang membawakan materi tersebut harus yang capable atau dosen yang memahami tentang kewiraan dan mempunyai semangat nasionalisme yang terbukti secara teoritis dan aplikatif.

E. PERADABAN KAMPUS.

“Civilization” atau peradaban secara umum dapat difahami sebagai akumulasi dari proses perkembangan kehidupan bangsa atau komunitas tertentu menuju yang lebih baik yang secara simultan dapat meningkatkan derajat kehidupan manusia yang meliputi:

1. Cara berfikir.
2. Norma dan etika.
3. Karakter.
4. Ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Seni dan budaya.
6. Kearifan lokal, adat istiadat.
7. Aneka peralatan dan sarana prasarana.
8. Manajemen dan tata kelola organisasi kelembagaan dan lain-lain.

Kampus sebagai wilayah proses interaksi pemikiran yang menghasilkan calon intelektual sebagai agen peradaban yang terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan tuntutan kebutuhan masyarakat. Universitas Krisnadwipayana memposisikan diri sebagai bagian integral dari

peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia.

Untuk itu Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Universitas Krisnadwipayana sebagai agen peradaban dengan semboyan sebagai kampus “Benteng Pancasila” adalah sebagai berikut :

1. Membuat “*database*” setiap perubahan tuntutan masyarakat, geopolitik dan geostrategis dan kearifan lokal pada setiap strata kehidupan dan setiap komunitas.
2. Membangun cara berfikir di depan perubahan atau “*forecasting*” terhadap multikultural secara global yang sangat mungkin terjadi di masa yang akan mendatang, kemudian membangun Langkah-langkah antisipatif secara proporsional dan simultan.
3. Merancang proses Pendidikan yang mempunyai daya jangkau kedepan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menciptakan hubungan yang dinamis, romantis, kreatif, inovatif pada rambu-rambu etika dan norma yang terkandung pada setiap sila Pancasila sehingga tercipta semangat Universitas Krisnadwipayana sebagai benteng Pancasila yang melibatkan semua “*stake holders*” kampus.
5. Peradaban kampus harus dibangun di atas pilar cinta tanah air Indonesia, semangat dan dibangun jiwa persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan bangsa dan negara.
6. Kerjasama Pendidikan antar kampus di dalam negeri dan luar negeri pada konsep Pendidikan “*multikultural*” sangat penting

dilakukan oleh Universitas Krisnadwipayana agar para mahasiswanya berwawasan luas berdemensi internasional serta dilakukan program tukar-menukar dosen antar kampus dengan harapan para dosen juga mempunyai pandangan dan cara berfikir yang luas.

7. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif dengan harapan agar para mahasiswa tidak hanya memahami ilmu pengetahuan dan teknologi secara teori saja tetapi para mahasiswa mengetahui kondisi riil yang dibutuhkan masyarakat, sehingga wawasan mahasiswa menjadi luas dan bersifat “kontemporer”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Universitas Krisnadwipayana dalam melakukan dan mengimplementasikan Tri Dharma perguruan tinggi membawa para mahasiswa untuk menjadi insan paripurna membangun peradaban kampus sebagai benteng Pancasila yaitu dengan kemampuan potensi :

1. Berbudi luhur dan bertakwa.
2. Cerdas dan santun.
3. Berjiwa patriot nasionalis dan beretika Pancasila.
4. Kreatif dan inovatif.
5. Semangat kesetia kawan sosial dan menjunjung tinggi persatuan kesatuan pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Segecap civitas akademika Universitas akan tetap mengembangkan kerja sama antar perguruan tinggi, instansi terkait dan masyarakat guna membangun peradaban kampus yang unggul dan berdaya saing

internasional, serta menjadi pelopor untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

F. KAMPUS SEBAGAI AGEN PERUBAHAN.

Tuhan menciptakan manusia sebagai pemimpin di dunia atau “Khalifah Fil Ard” artinya manusia mendapatkan amanah dari Tuhan untuk menjaga keseimbangan alam atau ekosistem. Tuhan melarang manusia untuk berbuat kerusakan, untuk itu Universitas Krisnadwipayana sebagai bagian integral dengan kampus-kampus lainnya berperan aktif sebagai agen peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju yang lebih baik. Adapun Langkah-langkah yang ditempuh Universitas Krisnadwipayana dengan identitas kampus sebagai agen perubahan adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan suasana kampus yang harmonis dan dinamis serta kondisi lingkungan yang aman, tentram dan asri.
2. Mendorong semua elemen “*stake holders*” untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa menuju tata Kelola yang baik dan kehidupan masyarakat yang adil dan Makmur.
3. Membangun kehidupan kampus sebagai mediasi peradaban melalui program Pendidikan formal dan non-formal yang memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan lingkungan melalui Pendidikan “multikultural”.

4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar semua mahasiswa memahami tuntutan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala internasional.
5. Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi rujukan utama dalam mengembangkan karakter dan kepribadian mahasiswa sehingga tercipta semangat nasionalisme, jiwa patriot dan rela berkorban demi bangsa dan negara.

Dengan demikian kampus sebagai agen perubahan menjadi nyata dan Universitas Krinadwipayana memposisikan diri sebagai pelopor yang menghasilkan lulusan atau sarjana sebagai calon pemimpin bangsa.

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk kreatif dan inovatif, untuk itu peradaban manusia terus berkembang dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun. Masyarakat intelektual sebagai motor penggerak peradaban saat ini mayoritas bersumber dari kampus, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “Kampus sebagai Agen Perubahan”

“Brand” Universitas Krisnadwipayana sebagai Benteng Pancasila memposisikan bahwa multi tafsir Pancasila dapat berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban, tetapi konsep dasar Pancasila kata perkata pada setiap sila tidak boleh berubah, untuk itu segenap civitas akademika UNKRIS harus berani tampil di garda terdepan untuk menjaga kemurnian dan implementasi Pancasila secara baik dalam kehidupan sehari-hari pada tatanan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Semangat persatuan dan kesatuan, jiwa nasionalis dan toleransi pada semua aspek kehidupan serta rela berkorban untuk bangsa dan negara

harus ditanamkan mulai dari kampus dengan tetap meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa segenap dosen, mahasiswa serta “*stakeholders*” Universitas Krisnadwipayana memosisikan diri sebagai “agen perubahan” dan sekaligus tetap menjaga pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan hidayah dan petunjuk pada semua civitas akademika UNKRIS untuk mengabdikan pada nusa dan bangsa melalui jalur Pendidikan.

Universitas Krisnadwipayana adalah salah satu kampus tertua, berdiri tahun 1952 dengan tetap berpegang teguh prinsip kemandirian, nasionalis dan menjunjung tinggi nilai-nilai warisan leluhur yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menuju masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia;
- Abdullah, Amin, 2002, pada *Ensiklopedi Dunia Islam, Pemikiran dan Peradaban*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve;
- Abdullah, Burhanuddin, 2006, *Jalan Menuju Stabilitas-Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, Jakarta : LP3ES;
- Abdullah, Burhanuddin, 2006, *Menanti Kemakmuran Negeri*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama;
- Acemoglu, Daron– James A. Robinson, 2015, *Mengapa Negara Gagal*, Jakarta : PT. Alex Media Komputindo;
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir, 2001, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 5*, Bandung : Sinar baru Algensindo;
- Al – Jailani, Syaikh `Abdul Qadir, 2007, *a Raihlah Hakikat Jangan Abaikan Syariat* yang diterjemahkan oleh Tatang Wahyudin dari judul aslinya *Adab As - Suluk Wa At - Tawasshul Ila Manazil Al - Mulk*, Bandung : Pustaka Hidayah;
- Al-Albani, M. Nashiruddin, 2005, *Ringkasan Shahih Muslim*, Penerjemah: Elly Latifah, Jakarta : Gema Insani;
- Al-Gharyan, Ash-Shadiq Abdurrahman, 2004, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya : Pustaka Progressif;
- Ali, Fachry - Bahtiar Effendy, 1986, *Merambah Jalan Baru Islam*, Bandung : Mizan;
- Ali, Maulana Muhammad, 1996, *Islamologi*, Jakarta : Darul Kutubil Islamiyah;

Ali, Muhammad Aud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press;

Al-Iskandari, Ibnu Atha'illah, *Al-Hikam*, 2012, Penerjemah: Imam Firdaus, Jakarta : Turos Pustaka;

Al-Jailani, Syaikh `Abdul Qadir, 2007, dalam bukunya *Raihlah Hakikat Jangan Abaikan Syariat* yang diterjemahkan oleh Tatang Wahyudin dari judul aslinya *Adab As - Suluk Wa At - Tawasshul Ila Manazil Al - Mulk*, Bandung : Pustaka Hidayah;

Al-Jamal, Muhammad Abdul Mun'im, 2000, *Ensiklopedia Ekonomi Islam*, Penerjemah: Salahuddin Abdullah, Jilid 1, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka;

Al-Jamal, Muhammad Abdul Mur'im, 1997, *Ensiklopedia Ekonomi Islam Jilid 2*, Penerjemah: Salahuddin Abdullah, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka;

Al-Mawardi, Imam - Penerjemah: Khalifurrahman, 2019, *Ahkam Sulthaniyah*, Jakarta : QISTHI Press;

Al-Qaradhawi, Yusuf, 2004, *Halal Haram Dalam Islam*, Jakarta : Akbar Media Eka Sarana;

Al-Qasim, Abu `Ubaid, 2009, *Al-Amwal-Ensiklopedia Keuangan Publik*, Penerjemah: Setiawan Budi Utomo, Jakarta : Gema Insani;

An-Nawawi, Imam, 2015, *Riyadus Shalihin*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar;

Arifin, Bustanul, 2004, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, Jakarta : Buku Kompas;

Ash-Shawi, Muhammad Sholah Muhammad, 2008, *Problematika Investasi Pada Bank Islam, Solusi Ekonomi Islam*, Jakarta : Migunani;

Azra, Azyumardi, 2006, *Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia*, dalam buku *Restorasi Pancasila Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Bogor : Perhimpunan Pendidikan Demokrasi;

Basri, Faisal, 2002, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Erlangga;

Bastian, Aulia Reza, 2002, *Reformasi Pendidikan*, Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama;

Bastian, Aulia Reza, 2002, *Reformasi Pendidikan*, Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama;

Basuki, M. Heru, 2022, *Civic Education*, Jakarta : Fidie Press;

Boediono dan Mubyarto, 1997, *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta : BPFE;

Chapra, M. Umer, 1985, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta : Gema Insani;

Chapra, M. Umer, 1999, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Surabaya : Risalah Gusti;

Chapra, M. Umer, 1999, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Surabaya : Risalah Gusti;

Collin, ,1988, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta : Erlangga;

Dimiyati, Ahmad, dkk., 1998, *Islam dan Koperasi-Telaah Peran Serta Umat Islam Dalam pengembangan Koperasi*, Jakarta : Kopinfo;

Dimiyati, Hamdan – Kadar Nurjaman, 2014, *Manajemen Proyek*, Bandung : CV. Pustaka Setio;

Djamil, Fathurrahman, 2005, *Fikih Muamalah, pada Ensiklopedi Dunia Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve;

Djamin, Zulkarenain, 1995, *Masalah Hutang Luar Negeri bagi Negara-Negara Berkembang dan Bagaimana Indonesia Mengatasinya*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia;

Djohanputro, Bramantyo, 2008, *Manajemen Keuangan Korporat*, Jakarta : PT. Mitra Kesjaya;

Djojohadikusumo, Sumitro, 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES;

Edukasi Profesional Syariah, 2005, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Jakarta : Renaisan;

Edukasi Profesional Syariah, 2005, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta : Renaisan;

Eriyatno, 2011, *Membangun Ekonomi Komporatif*, Jakarta : PT. Alex Media Komputindo;

Fathoni, Abdullah, 2008, *Serat Sejatining Urip 2*, Jakarta : Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari;

Fathoni, Abdullah, 2010, Disertasi Doktor UIN Sahid Jakarta, *Implementasi Ekonomi Islam dan Dampaknya Pada SHU dan Asset Koperasi*, Jakarta;

Fathoni, Abdullah, 2014, *Bersama Rakyat TNI Kuat*, Jakarta : BPA Pustaka;

Fathoni, Abdullah, 2014, *Serat Sejatining Urip 1*, Jakarta : Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari;

Fathoni, Abdullah, 2017, *Serat Sejatining Urip 3*, Jakarta : Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari;

Fathoni, Abdullah, 2018, *Etika Bisnis Syariah - Bank, Koperasi dan BNT*, Jakarta : Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari;

Fatmawati, Sri, 1999, *Bank Sentral-pada buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta : STIE YKPN;

Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April Tahun 2000 tentang Murabahah;

Fukuyama, Francis, 1992, *The End of History and The Last Man, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, yang diterjemahkan oleh M.H. Amrullah, Yogyakarta : CV. Qalam;

Fukuyama, Francis, 2005, *Memperkuat Negara*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama;

Fukuyama, Francis, 2005, *Memperkuat Negara - Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama;

Gie, Kwik Kian, 1999, *Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama;

Goldfeld, Sthepen M. dan Lester V. Chandler, 1996, *Ekonomi dan Bank*, Alih Bahasa: Danny Hutabarat, Jakarta : Erlangga;

Hasan, Ahmad, 2005, *Mata Uang Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada;

Hidayat Nataatmaja, Karsa, 1997, *Membangun Ilmu Ekonomi Pancasila* dalam buku *Ekonomi Pancasila* edisi pertama dengan editor Mubyarto dan Boediono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden RI, Yogyakarta : BPFE;

Hidayat, Komaruddin, 1994, *Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi* dalam buku *Demokratisasi Politik, Budaya, dan Ekonomi*, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina;

Huntington, Samuel P., 2002, *Benturan Antar Peradaban*, Yogyakarta : C.V. Qalam;

Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Audit Intern Bank*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama;

Irawan, Prasetyo dan Tim, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : STIA Press LAN;

Janwari, Yadi, 2015, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya;

Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta : Paradigma;

Kahf, Monzer, 1995, *Ekonomi Islam-Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar;

Kaisiepo, Manuel, 2006, *Pancasila dan Keadilan Sosial : Peran Negara dalam buku Restorasi Pancasila Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Yogyakarta : Perhimpunan Pendidikan Demokrasi;

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;

Keraf, A. Sonny, 1998, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta : Kanisius;

Kerjasama Bank Indonesia dan UII Yogyakarta, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada;

Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang *Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*;

Koentjaraningrat, 1999, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta : Djambatan;

- Komisi Pemberantasan Korupsi-KPK, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta : KPK;
- Koran Jakarta Pos, 2010, tanggal 7 Januari;
- Koran Kompas, 2013, tanggal 2 Juni;
- Koran Republika, 2011 tanggal 3 Oktober;
- Koran Republika, 2011, tanggal 13 September;
- Koran Republika, 2013, tanggal 1 Juni;
- Koran Republika, 2013, tanggal 3 Juni;
- Koran Republika, 2013, tanggal 29 Juni;
- Koran Republika, 2013, tanggal 15 Juli;
- Koran Republika, 2022, tanggal 21 April;
- Kotler, Philip, 1998, *Pemasaran Keunggulan Bangsa (The Marketing of Nation)*, Jakarta : PT. Prenhallindo;
- Kuncoro, Mudrajad, 2005, *Strategi-Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Jakarta : Erlangga;
- Lewis, Mervin K. dan Latifah M. Algaoud, 2007, *Perbankan Syariah-Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta;
- Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rohim Lubis, 2013, *Kepemilikan Properti Di Indonesia Termasuk Kepemilikan Rumah Oleh Orang Asing*, Bandung : Mandar Maju;
- Maarif, Ahmad Syafii, 1985, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, Jakarta : Pusataka LP3ES;
- Madjid, Nurcholis, 2004, *Indonesia Kita*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama;

Majid, M. Nazori, 2003, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Yogyakarta : PSEI;

Mannan, M. Abdul, 1997, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wkaf;

Manurung, Jonni, 2009, *Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Moneter*, Jakarta : Salemba Empat;

Mardiasmo (Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan), 2009, *Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi 2005-2008* pada judul buku *Era Baru Kebijakan Fiskal*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara;

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1992, *Sejarah Nasional Indonesia* jilid dua, Jakarta : Balai Pustaka;

Maryoto, Andreas, 2009, *Jejak Pangan Sejarah, Silang Budaya dan Masa Depan*, Jakarta : Buku Kompas;

Masruri, Siswanto, 2005, *Humanitarianisme Soedjatmoko, Visi Kemanusiaan Kontemporer*, Yogyakarta : Pilar Media;

Masyhuri, 2005, *Peran Pemerintah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, pada buku *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Yogyakarta : Kreasi Wacana;

Mubyanto, 1987, *Ekonomi Pancasila-Gagasan Dan Kemungkinan*, Jakarta : LP3ES;

Mubyanto, 1988, *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta : LP3ES;

Mubyarto, 1987, *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: LP3ES;

Mudzar, Atho, 2002, *Pendekatan Studi Islam-Dalam Teori Dan Praktiknya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar;

- Muhtar, Moh. Asy'ari, 2018, *The Ideal State-Perspektif Al-Farabi Tentang Konsep Negara Ideal*, Yogyakarta : IRCISod;
- Muthhar, Moh. Asy'ari, 2018, *The Ideal State*, Yogyakarta, Ircisod;
- Nadjib, Mochammad, 2006, *Etika Kerja Dalam Ajaran dan Pandangan Masyarakat Islam*-pada buku *Kajian Teori Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta : Lipi Press;
- Nasution, Mustofa Edwin, dkk., 2007, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta : Prenada Media Group;
- Nataatmaja, Hidayat, Karsa, 1997, *Membangun Ilmu Ekonomi Pancasila* dalam buku *Ekonomi Pancasila* edisi pertama dengan editor Mubyarto dan Boediono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden RI, Yogyakarta : BPFE;
- Oktaviani, Rina, 2011, *Modal Ekonomi Keseimbangan Umum*, Bogor : IPB Press;
- Outhwhite, William, 2008, *Ensiklopedia Pemikiran Sosial Modern*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group;
- Pieris, John, Nizam Jim, 2007, *Etika Bisnis dan Good Corporate Governance*, Jakarta : Pelangi Cendekia;
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notokusanto, 1992, *Sejarah Nasional Indonesia* jilid satu, Jakarta : Balai Pustaka;
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notokusanto, 1992, *Sejarah Nasional Indonesia* jilid dua, Jakarta: Balai Pustaka;
- Porter, Michael E. – Agus Maulana, 1980, *Strategi Bersaing*, Jakarta : Erlangga;

Pramudito, Bambang, 2006 pada Kata Pengantar dari *Kitab Negara Kertagama* Yogyakarta : Gelombang Pasang;

Prawironegara, Darsono, 2010, *Ekonomi Politik Globalisasi*, Jakarta : Nusantara Consulting;

Purwadi, 2004, *Jejak Nasionalisme Gajah Mada*, Yogyakarta : Diva;

Purwadi, 2004, *Strategi Politik Ken Arok*, Yogyakarta : Gelombang Pasang;

Pusjarah TNI, 2003, *Sejarah Perang-Perang Nusantara*, Jakarta : Pusat Sejarah dan Tradisi TNI;

Putong, Iskandar, 2005, *Ekonomi Mikro*, Jakarta : Mitra Wacana Media;

Putra, Windhu, 2018, *Perekonomian Indonesia*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada;

Rahardjo, M. Dawam, 1997, *Demokrasi Ekonomi dalam Alam Liberalisasi Ekonomi* dalam buku *Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, Yogyakarta : Pusat Pengembangan Manajemen FE UII;

Rahardjo, M. Dawam, 2006, *Krisis Kapatalisme Global Ilusi Atau Realitas*, pada pengantar buku George Soros, *Open Society-Reforming Global Capitalism*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia;

Rahardjo, M. Dawam, 2011, *Nalar Ekonomi Politik Indonesia*, Bogor : IPB Press;

Raharjo, Iman Toto K., dkk., 2001, Kata Pengantar, *Bung Karno dan Wacana Islam*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia;

Rasjid, Sulaiman, 1989, *Fikih Islam*, Bandung : Sinar Baru;

Rezabastian, Aulia, 2002, *Reformasi Pendidikan*, Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama;

- Ridha, Muhammad, 2010, *Sirah Nabawiyah*, Penerjemah: Anshori Umar, Jakarta : Irsyad Baitus Salam;
- Rinakit, Soegeng Sarjadi Sukardi, 2006, *Memahami Indonesia*, Jakarta;
- Rivai, Veithzal, dkk., 2007, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada;
- Rohman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, 2002, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa;
- Sanie, Susy Y.R. – Herman, 2012, *Teori Ekonomi Mikro Tentang Agama – Pengaruh Religius Terhadap Perilaku Ekonomi*, Jakarta : CV. EFKO Grafika;
- Sasmita, Ginanjar Karta, 1996, *Pembangunan untuk Rakyat*, Jakarta : CIDES;
- Sasono, Adi, 2013, *Menjadi Tuan di Negeri Sendiri, Pergulatan Kerakyatan, Kemartabatan dan Kemakmuran*, Jakarta : Grafindo Books Media;
- Seda, Frans, 2004, *Kebijakan APBN Berimbang dan Dinamis-dalam buku Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Buku Kompas;
- Shihab, M. Quraish, 2002, *Tafsir Al-Misbah-Volume 1*, Jakarta : Lentera Hati;
- Shihab, M. Quraish, 2006, *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta : Lentera Hati;
- Sholahuddin, M., 2007, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada;
- Sholihin, Ahmad Ifham, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kompas Gramedia;
- Simbolon, Parakitri T., 2006, *Menjadi Indonesia*, Jakarta : Buku Kompas;

Sjahdeini, Sutan Remy, 2014, *Perbankan Syariah-Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Prenada Media Group;

Skoven, Mark, 2005, *Sejarah Pemikiran Ekonomi-Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern*, Penerjemah: Tri Wibowo Budi Santoro, Jakarta : Prenada Media;

Soekarno, 1930, *Indonesia Menggugat*;

Soekarno, 2001, *Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme*, dalam buku *Bung Karno dan Wacana Islam*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia;

Sri - Edi Swasono, 2005, *Ekspose Ekonomika, Mewaspadaai Globalisme dan Pasar Bebas*, Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Pancasila - UGM;

Stiglitz, Joseph E., 2003, *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*, Jakarta : PT. Ina Publikatama, 5. Dengan judul asli *Globalization and Discontents*, yang diterjemahkan oleh Ahmad Lukman.

Stiglitz, Josept E., 2006, diterjemahkan oleh Aan Suhaeni, *Dekade Kecerakahan (the roaring nineties : a new history of the world`s most prosperous decade)*, Jakarta : marjin kiri PT. Cipta Lintas Wacana;

Sumawinata, Sarbini, 2004, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta : PT. Gamedia Pustaka Utama;

Sumitro, Markum, 2002, *Asa-Asas Perbankan Syariah dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada;

Suryosumarto, Budisantoso, 2001, *Ketahanan Nasional Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan;

Susanto, A.B., dkk., *Corporate Culture-Orgazation Culture*, 2008, Jakarta : The Jakarta Consulting Group;

Susanto, A.B., dkk., *Family Business*, 2008, Jakarta : Divisi penerbitan The Jakarta Consulting Group;

Syafi'i, Imam, 2019, *Ar-Risalah-Usul Fikh*, Penerjemah: Zainul Maarif, Jakarta : PT. Rene Turo;

Terry, George R., 2003, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Penerjemah: J. Smith D.E.M, Jakarta : PT. Bumi Aksara;

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, 2004, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta : Erlangga;

Torado, Michael P. dan Stephen C. Smith, 2009, *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Erlangga;

Tungal, Imam Sjahputra, 2002, *Membangun Good Corporate Governance*, Jakarta : Harvarindo;

Umar, Nasaruddin, dalam kolom *Hikmah Koran Republika* tanggal 27 September 2011;

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

Utomo, Anif Punto Adi Sasono, 2013, *Sang Penggerak Seribu Gagasan, Seribu Tindakan*, Jakarta : Buku Republika;

Weber, Max, 2006, *Sosiologi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar;

Weston, D. Fred dan Tim, 1999, *Manajemen Keuangan*, Jakarta : Erlangga;

Winters, Jeffrey A., 1999, *Power in Motion*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan;

Yanuariddin, Umi Karomah, 2005, *Kebijakan Stabilisasi dan Keadilan Dalam Islam*-pada buku *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Yogyakarta : Kreasi Wacana;

Yatim, Badri, 1993, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada;

Yudhoyono, Susilo Bambang, 2000, *Mengatasi Krisis Menyelamatkan Reformasi*, Jakarta : PUSKAP;

Yudhoyono, Susilo Bambang, *Menata Kembali Kerangka Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, yang ditulis dalam buku "*Restorasi Pancasila*" pada acara pidato peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2006;

Yusgiantoro, Purnomo, 2014, *Ekonomi Pertahanan-Teori Dan Praktik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka;

Yustika, Ahmad Erani, 2008, *Ekonomi Kelembagaan*, Malang : Bayumedia Publishing;

Zainuddin, Oemar, 2010, *Kota Gresik 1896 - 1916*, Jakarta : Ruas;

LAMPIRAN



UNKRIS
UNIVERSITAS KRISNADWIPIYANA

021 - 846 2230
021 - 846 2231
www.unkris.ac.id
marketing@unkris.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0476/I.02.02/V/2022

Pimpinan Universitas Krisnadwipayana dengan ini menugaskan kepada :

1. Nama : Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP, CIQaR
Jabatan : Rektor - UNKRIS
2. Nama : Dr. H. Abdullah Fathoni, SE, MM
Jabatan : Kabiro. Adm. Umum - UNKRIS

Untuk menyusun buku dengan judul "Mewujudkan Universitas Krisnadwipayana sebagai Benteng Pancasila".

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Jakarta, 12 Mei 2022

Rektor,

u.b.

Waka. Rektor II,



Wanda ST, MT